



# BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
7. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam upaya mencapai tujuan bernegara.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana...

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penjabaran...

1. Penjabaran. dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJM Nasional; dan
2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

### BAB III

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD 2019-2024 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH

BAB IX : PENUTUP

(2) Dokumen...

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### BAB IV

##### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 6

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RKPD setiap tahun pada periode masa jabatan Bupati.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan jika:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (Tiga) Tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan Nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/ tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 10...

## Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 12 Juli 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN  
2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3-59/2019

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I – 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I – 1
1.2 Landasan Hukum .....	I – 4
1.3 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	I – 6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I – 8
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten OKI.....	I – 9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR</b>	<b>II– 1</b>
2.1 Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 1
2.1.1 Aspek Geografis .....	II – 1
2.1.1.1 Satuan Geomorfik Rawa.....	II – 3
2.1.1.2 Satuan Geomorfik Sungai.....	II – 3
2.1.1.3 Klimatologi .....	II – 4
2.1.1.4 Penggunaan Lahan .....	II – 5
2.1.1.5 Kerawanan Bencana Alam.....	II – 6
2.1.2 Aspek Demografis .....	II – 9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II – 12
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 13
2.2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto .....	II – 13
2.2.1.2 Inflasi.....	II – 18
2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita dan Gini Ratio..	II – 20
2.2.1.4 Perkembangan Penduduk Miskin.....	II – 22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II – 24
2.2.2.1 Pendidikan.....	II – 24
2.2.2.2 Kesehatan.....	II – 26
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	II – 28
2.2.2.4 Ketenagakerjaan.....	II – 30
2.2.2.5 Seni Budaya dan Olahraga.....	II – 30
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II – 32
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II – 32
2.3.1.1 Pendidikan.....	II – 32

2.3.1.2	Kesehatan .....	II – 33
2.3.1.3	Pekerjaan Umum.....	II – 35
2.3.1.4	Perumahan.....	II – 36
2.3.1.5	Komunikasi dan Informasi.....	II – 37
2.3.1.6	Lingkungan Hidup .....	II – 37
2.3.1.7	Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II – 39
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II – 39
2.3.1.9	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	II – 40
2.3.1.10	Ketenagakerjaan.....	II – 41
2.3.2	Fokus Urusan Pilihan.....	II – 44
2.3.2.1	Perikanan.....	II – 44
2.3.2.2	Pariwisata.....	II – 45
2.3.2.3	Pertanian.....	II – 45
2.3.2.4	Perdagangan.....	II – 49
2.3.2.5	Perindustrian.....	II – 50
2.4	Aspek Daya Saing .....	II – 51
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 51
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II – 52
2.4.2.1	Perhubungan .....	II – 52
2.4.2.2	Penataan Ruang .....	II – 53
2.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang	II – 54
2.4.4	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II – 55
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OKI....	II – 56
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III – 1</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III – 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III – 1
3.1.2	Neraca Daerah .....	III – 5
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III – 9
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III – 14
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III – 16
3.3	Kerangka Pendanaan .....	III – 18
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III – 18
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III – 21
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH</b>	<b>IV – 1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV – 1
4.1.1	Tata Kelola Pemerintahan .....	IV – 2

4.1.1.1	Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.....	IV – 2
4.1.1.2	Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.....	IV – 3
4.1.1.3	Pelayanan Publik.....	IV – 3
4.1.1.4	Keuangan Daerah.....	IV – 4
4.1.1.5	Pemerintahan Desa.....	IV – 4
4.1.2	Infrastruktur Dasar .....	IV – 4
4.1.3	Pendidikan .....	IV – 6
4.1.4	Kesehatan .....	IV – 7
4.1.5	Kemiskinan .....	IV – 8
4.1.6	Pengelolaan Sumber daya Alam .....	IV – 9
4.1.7	Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup.....	IV – 9
4.2	Isu Eksternal.....	IV – 10
4.3	Isu Tata Ruang dan Lingkungan.....	IV – 16
4.4	Analisis KLHS.....	IV – 18
4.5	Isu-isu Strategis.....	IV – 21
4.6	Penyelarasan Isu Strategis .....	IV – 23
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>V-1</b>
5.1	Visi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir....	V-1
5.2	Arahan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	V-2
5.2.1	Visi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V-2
5.2.2	Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V-2
5.3	Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	V-4
5.3.1	Visi.....	V-4
5.3.2	Misi.....	V-5
5.4	Tujuan dan Sasaran .....	V-10
5.4.1	Tujuan .....	V-10
5.4.2	Sasaran .....	V-11
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VI-9
6.3	Arah Kebijakan .....	VI-13
6.4	Program Pembangunan Daerah .....	VI-16

<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah .....	VII-4
7.2.1 Program Setiap Perangkat Daerah .....	VII-6
7.2.2 Program Pembangunan Daerah Urusan Wajib Layanan Dasar.....	VII-6
7.2.3 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar .....	VII-9
7.2.4 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Urusan Pilihan.....	VII-13
7.2.5 Program Pembangunan Daerah Terkait dengan Penunjang Pemerintah Daerah .....	VII-14
 <b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	 <b>VIII-1</b>
8.1 Indikator Kinerja Utama .....	VIII-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....	VIII-3
 <b>BAB IX PENUTUP</b>	 <b>IX-1</b>
9.1 Pedoman Transisi .....	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan .....	IX-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah & Jumlah Desa per Kecamatan di Kabupaten OKI.....	II – 2
Tabel 2.2	Curah Hujan rata- rata di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 5
Tabel 2.3	Data penutupan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	II – 5
Tabel 2.4	Areal sawah yang tergenang akibat banjir di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017...	II – 7
Tabel 2.5	Jumlah sebaran titik api di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 8
Tabel 2.6	Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 10
Tabel 2.7	Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 11
Tabel 2.8	Komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017	II – 11
Tabel 2.9	Proporsi penduduk menurut agama di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017.....	II – 12
Tabel 2.10	Struktur perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017 (Persen).....	II – 14
Tabel 2.11	Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 17
Tabel 2.12	Pendapatan per kapita di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan harga berlaku dan konstan tahun 2014-2017.....	II – 20
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Tangga BDT Tahun 2015 Menurut Klasifikasi Kemiskinan per Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 23
Tabel 2.14	Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	II – 23
Tabel 2.15	Indikator Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan perKabupaten Tahun 2017.....	II – 24
Tabel 2.16	Perkembangan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	II – 24
Tabel 2.17	Persentase Penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut Pendidikantertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	II – 25
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.....	II – 26
Tabel 2.19	Perkembangan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	II – 27
Tabel 2.20	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan Polkesdes yang ada di Ogan Komering Ilir Tahun 2017.....	II – 28

Tabel 2.21	Variabel indeks pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 29
Tabel 2.22	Besaran dan peringkat IPM menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.....	II – 29
Tabel 2.23	Perkembangan TPAK dan Pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017..	II – 30
Tabel 2.24	Potensi seni budaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 31
Tabel 2.25	Indikator seni budaya dan olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.....	II – 31
Tabel 2.26	Indikator Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	II – 32
Tabel 2.27	Indikator Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	II – 34
Tabel 2.28	Persentase penduduk yang pernah berobat jalan Menurut tempat berobat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	II – 35
Tabel 2.29	Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	II – 35
Tabel 2.30	Kondisi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten OKI Tahun 2017.....	II – 36
Tabel 2.31	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten OKI Tahun 2017.....	II – 36
Tabel 2.32	Indikator Perumahan.....	II – 37
Tabel 2.33	Indikator Teknologi informasi dan komunikasi.....	II – 37
Tabel 2.34	Indikator Lingkungan Hidup.....	II – 38
Tabel 2.35	Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup.....	II – 38
Tabel 2.36	Indikator Kependudukan.....	II – 39
Tabel 2.37	Rasio APS perempuan terhadap Laki-Laki,IPG dan IDG di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 40
Tabel 2.38	Indikator Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah.....	II – 40
Tabel 2.39	Jumlah Industri kecil menurut kelompok industri kecil (unit) kab. OKI.....	II – 41
Tabel 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis Kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 42
Tabel 2.41	Jumlah produksi perikan tangkap (TON) kab. OKI	II – 44
Tabel 2.42	Obyek wisata di kab. OKI.....	II – 45
Tabel 2.43	Luas Panen dan produksi padi per kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 46
Tabel 2.44	Luas areal dan produksi perkebunan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 47
Tabel 2.45	Luas areal perkebunan besar menurut komoditas tahun 2017.....	II – 47
Tabel 2.46	Jumlah populasi ternak menurut jenis ternak (Ekor) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017.....	II – 48

Tabel 2.47	Indikator Sektor pertanian.....	II – 49
Tabel 2.48	Indikator Perdagangan.....	II – 50
Tabel 2.49	Indikator Perindustrian.....	II – 51
Tabel 2.50	Indikator Pengeluaran Per Kapita.....	II – 51
Tabel 2.51	Indikator Pendukung Daya Saing.....	II – 52
Tabel 2.52	Indikator Perhubungan.....	II – 52
Tabel 2.53	Indikator Kinerja Penataan Ruang.....	II – 54
Tabel 2.54	Indikator fungsi penunjang.....	II – 55
Tabel 2.55	Indikator Investasi.....	II – 56
Tabel 2.56	Capaian SDG's Kab. OKI Tahun 2017.....	II – 57
Tabel 3.1	Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	III – 2
Tabel 3.2	Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	III – 3
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	III - 5
Tabel 3.4	Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2017	III – 6
Tabel 3.5	Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015- 2017.....	III – 9
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2017.....	III – 14
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 – 2017.....	III – 15
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017.....	III – 15
Tabel 3.9	Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	III – 16
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	III – 17
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	III – 17
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 19
Tabel 3.13	Proyeksi SILPA Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 21
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019 – 2024.....	III – 22
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024.....	III – 23
Tabel 3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 -2024.....	III – 24

Tabel 4.1	Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan.....	IV – 14
Tabel 4.2	Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan.....	IV – 16
Tabel 4.3	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah.....	IV – 17
Tabel 4.4	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah.....	IV – 18
Tabel 4.5	Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS.....	IV – 19
Tabel 4.6	Proyeksi kebutuhan air di Kabupaten OKI.....	IV – 20
Tabel 4.7	Ketersediaan dan kebutuhan pangan di kabupaten OKI.....	IV – 20
Tabel 4.8	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV – 25
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi Misi dan Tujuan .....	V – 11
Tabel 5.2	Indikator Tujuan .....	V – 13
Tabel 5.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran .....	V – 15
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019- 2024 untuk Mewujudkan Misi .....	VI – 10
Tabel 6.2	Tema atau Fokus Lima Tahu.....	VI – 14
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.....	VI – 15
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024	VII – 2
Tabel 7.2	Program Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VII - 17
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	VIII – 2
Tabel 8.2	Penetapan Indiktor Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.....	VIII – 4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan RPJP dan RPJM Daerah.....	I – 8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir..	II – 2
Gambar 2.2	Peta Lokasi rawan banjir di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 9
Gambar 2.3	Peta Daerah Rawan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	II – 9
Gambar 2.4	Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	II – 16
Gambar 2.5	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir , Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II – 18
Gambar 2.6	Laju Inflasi PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir , Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2014-2017...	II – 20
Gambar 2.7	Gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir , Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II – 21
Gambar 2.8	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017.....	II – 22
Gambar 2.9	Persentase balita menurut penolong persalinan tahun 2014-2017.....	II – 27
Gambar 2.10	TPAK Kabupaten Ogan Komering Ilir , Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II – 43



# *Bab I*

## *Pendahuluan*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dalam empat tahun terakhir (2014-2018), telah membawa perbaikan dan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap terus meningkat, kondisi sosial semakin membaik dan kegiatan ekonomi daerah terus berkembang. Peningkatan kinerja pembangunan menandai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, menunjukkan kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam dinamika pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin maju dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2019-2024) adalah melakukan akselerasi pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi dan energi di pedesaan, peningkatan kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; pelayanan pendidikan dan kesehatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; serta pembangunan antar wilayah. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di setiap wilayah.

Pembangunan daerah sebagai suatu proses perubahan dan pertumbuhan sangat bergantung pada kinerja pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Pembangunan berkelanjutan berangkat dari suatu permasalahan dan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya berorientasi pada Visi, Misi dan Strategi kedepan, berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui berbagai program pembangunan untuk mewujudkan kondisi daerah yang lebih maju telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai kehidupan masyarakat, namun demikian masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi terutama masalah pembangunan yang berkualitas dan di satu sisi pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan.

Upaya mengatasi masalah tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pelaku pembangunan. Untuk meningkatkan

sinergitas seluruh potensi pembangunan diperlukan perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi seluruh pihak-pihak terkait dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan **“Melanjutkan pembangunan dari Desa yang berkualitas”**, yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode 2014-2019 yaitu program pembangunan infrastruktur dasar pedesaan (jalan, air bersih, sanitasi dan penerangan), pembangunan PAUD setiap desa, pembangunan poskesdes setiap desa, pembentukan koperasi setiap desa. Maka pada periode berikutnya memfokuskan kepada peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat yaitu sumber daya manusia. Peningkatkan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan agar lebih mandiri, sejahtera, dan beriman melalui program dan kegiatan yang lebih fokus dan strategis dengan mempertimbangkan keterbatasan dana dan sumberdaya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah, menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, dan mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari sesuai RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di bidang ekonomi,

pembangunan diarahkan untuk menjadikan industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi berperan signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sektor pertanian tetap menjadi penopang struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk masa lima tahun, sesuai dengan periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019-2024 yang telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 15 Januari 2019. Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah tahun 2019-2024, Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang disusun dengan menggunakan pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. **Politis**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) terhadap pembangunan, pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. **Atas-bawah** (*top-down*) dan **bawah-atas** (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional,

Dokumen RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik, melalui 6 (enam) tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi 1) Persiapan penyusunan RPJMD, 2) Penyusunan rancangan awal RPJMD, 3) Penyusunan rancangan RPJMD, 4) Pelaksanaan musrenbang RPJMD, 5) Perumusan rancangan akhir RPJMD, dan 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Keberadaan RPJMD ini akan menjadi acuan kerja bagi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20182 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033;

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9 );

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten OKI Tahun 2016 Nomor 2);

### **1.3. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan**

#### **Lainnya**

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

#### (1) RPJMD dan RPJM Nasional

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019 yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kurun waktu 2014-2019 maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional, dan pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2014-2019.

#### (2) RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir diselaraskan dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas provinsi, dan pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah yaitu indeks pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan.

(3) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 -2025, oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti tahun 2019 – 2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 – 2025.

(4) RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sesuai dengan amanat pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(5) RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan program kegiatan RPJMD dilakukan analisa sistematis untuk memastikan unsur pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah. KLHS menyatakan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap suatu kebijakan rencana dan program pembangunan.

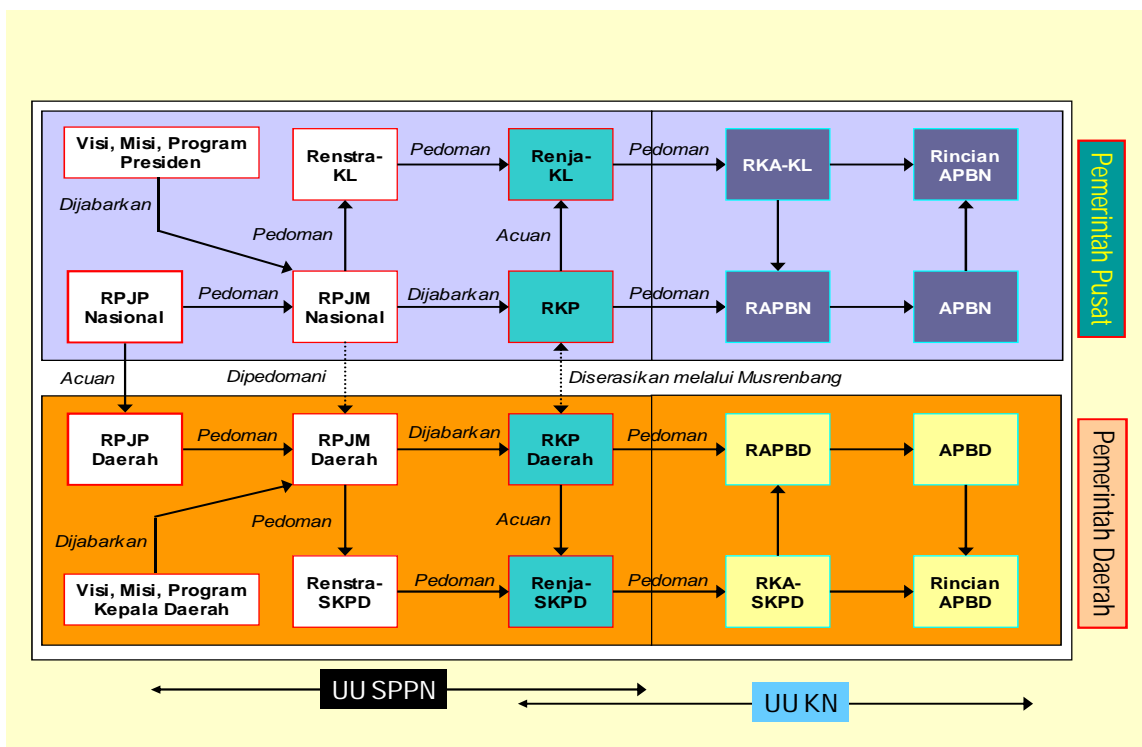
(6) RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(7) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.



Gambar 1.2. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan RPJP dan RPJM Daerah

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 – 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 - 2024. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
2. Terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Daerah;
5. Tersedianya acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

#### **1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten OKI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP



## *Bab II*

# *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

#### **2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir**

##### **2.1.1. Aspek Geografis**

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Dengan luas wilayah 19.023,47 km<sup>2</sup>, pada tahun 2017 Kabupaten Ogan Komering Ilir berpenduduk 809.203 jiwa, dengan kepadatan penduduk 42,54 jiwa/km<sup>2</sup>,

Aspek Geografis menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan Wilayah. Secara Geografis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terletak diantara 104<sup>0</sup>, 20" sampai 106<sup>0</sup>00' Bujur Timur dan 2<sup>0</sup>,30' sampai 4<sup>0</sup>,15' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 10 meter diatas permukaan laut. Daerah tertinggi diperlihatkan oleh topografi Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur, sedang daerah terendah terletak di kawasan timur, tepatnya di Kecamatan Air Sugihan, dengan rata-rata ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan laut. Bentang alam pada umumnya disusun oleh endapan aluvial yang bersifat lempungan liat atau lembek dan endapan gambut, kecuali Bukit Gajah dimana batuan penyusun utamanya adalah batuan beku intrusi granit.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ibu kota Kayuagung memiliki luas wilayah 19.023,47 km<sup>2</sup> atau 21,86 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, secara administratif pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 18 Kecamatan, 13 kelurahan dan 314 desa berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin;  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Mesuji (Provinsi Lampung);  
 Sebelah Barat : Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Timur,  
 dan ;  
 Sebelah Timur : Selat Bangka dan Laut Jawa.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir



Tabel 2.1. Luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan tiap kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah	Luas wilayah (km2)	Persentase (%)
1	Lempuing	19	-	19	295,61	1,55
2	Lempuing Jaya	16	-	16	505,80	2,66
3	Mesuji	16	-	16	642,86	3,38
4	Sungai Menang	18	-	18	2.305,42	12,12
5	Mesuji Makmur	20	-	20	493,14	2,59
6	Mesuji Raya	17	-	17	515,85	2,71
7	Tulang Selapan	22	1	23	5.363,65	28,19
8	Cengal	17	-	17	3.038,66	15,97
9	Pedamaran	14	-	14	376,68	1,98
10	Pedamaran Timur	7	-	7	692,79	3,64
11	Tanjung Lubuk	21	1	22	219,97	1,16
12	Teluk Gelam	14	-	14	169,29	0,89
13	Kayuagung	14	11	25	224,45	1,18
14	Sirah Pulau Padang	20	-	20	102,08	0,54
15	Jejawi	19	-	19	237,98	1,25
16	Pampangan	22	-	22	483,42	2,54
17	Pangkalan Lampam	19	-	19	1.104,75	5,81
18	Air Sugihan	19	-	19	2.251,07	11,83
	<b>Total</b>	<b>314</b>	<b>13</b>	<b>327</b>	<b>19.023,47</b>	<b>100,00</b>

#### **2.1.1.1. Satuan Geomorfik Rawa**

Daerah rawa di sejumlah lokasi telah kering atau tidak berair kecuali pada musim penghujan akibat proses sedimentasi terutama oleh sungai. Satuan geomorfik rawa mendominasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama kawasan timur. Satuan geomorfik rawa ini mencapai 75 persen dari luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada satuan geomorfik rawa ini dijumpai empat danau, yaitu : 1). Danau Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam; 2). Danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran; 3). Danau Teluk Gelam di Kecamatan Teluk Gelam; dan 4). Danau Teloko di Kecamatan Kota Kayuagung.

Berdasarkan pada pola penyebaran areal permukiman di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perubahan satuan geomorfik rawa yang paling signifikan terjadi di kawasan barat dan kawasan tengah. Penyusutan areal rawa berair terjadi pula akibat pembukaan lahan-lahan perkebunan dengan sistem drainasenya yang berperan dalam pengeringan rawa. Perubahan akibat pemanfaatan lahan rawa menjadi areal perkebunan sebagian besar terjadi di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Cengal, dan Kecamatan Sungai Menang.

#### **2.1.1.2. Satuan geomorfik sungai**

Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari: 1). Sungai Komering yang berhulu dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bermuara ke Sungai Musi, dan 2). Sungai Mesuji yang membatasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Lampung bermuara ke Laut Jawa. Kedua sungai utama Sungai Komering dan Sungai Mesuji dialiri air sepanjang tahun. Selain kedua sungai utama tersebut, daerah Ogan Komering Ilir dialiri pula oleh sungai-sungai kecil yang bermuara ke Selat Bangka. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Sugihan yang mengalir di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Sungai Dua belas dan Sungai Lebong Itam yang mengalir di wilayah Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Lumpur yang membatasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Cengal, Sungai Jeruju dan Sungai Pasir yang mengalir di wilayah Kecamatan Cengal.

Sungai-sungai ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu sebagai prasarana transportasi air, terutama sebagai akses bagi daerah-daerah yang tergolong masih terisolir

seperti di kawasan timur. Selain itu, sungai berperan pula dalam kegiatan ekonomi seperti tempat mencari ikan, perdagangan (pasar terapung), dan pengadaan air bersih (*water intake*).

### **2.1.1.3. Klimatologi**

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang beriklim tropis dengan musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan umumnya berkisar antara bulan November sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Penyimpangan musim biasanya terjadi lima tahun sekali, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dari pada musim penghujan.

Sementara itu, rata-rata curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2017) adalah sekitar 2.400 mm/tahun atau sekitar 200 mm/bulan. Ini berarti bahwa situasi rata-rata curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap bulannya termasuk ke dalam kategori sedang. Adapun untuk rata-rata jumlah hari hujan selama satu tahun adalah sekitar 109 hari atau sebanyak 9 sampai 10 hari setiap bulan. Temperatur udara (suhu) di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017 memiliki rata-rata sekitar 27°C sampai dengan 28° C, dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 82 persen.

Curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi wilayah. Pada musim penghujan terjadi kenaikan permukaan air atau peningkatan volume air. Sebaliknya, pada musim kemarau terjadi penurunan permukaan air atau penyusutan volume air. Sebagai konsekuensinya, pada periode kenaikan permukaan air terdapat kecenderungan dataran-dataran rendah tergenang air atau mengalami banjir dan pada masa penyusutan air banyak dijumpai daerah cekungan terutama yang dangkal mengalami kekeringan. Fenomena alam seperti ini terjadi pada setiap perubahan musim. Dengan demikian, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki daerah-daerah yang rawan banjir dan rawan kekeringan akibat perubahan pola hidrologi.

Tabel 2.2. Curah Hujan rata-rata di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Akumulasi Curah Hujan (mm) pada Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Jejaw	-	-		284,5	363	233,5	124	95	128	-	308	398,5
2.	Tanjung Lubuk	215	327	-	286,5	168	132	38	67,5				
3.	Tulang Selapan	245	294	264	235	167	162	174	-	-	-		390
4.	Pampangan	-	218	274	242	254	189	115	41	86	-	245	391
5.	Lempuing	319	187	340	495	418	103	107	95	-	310	297	552
6.	Kayuagung	158	283	555	551	392	90	140	95	-	-	400	655
7.	Cengal	590	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pedamaran Timur	339	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pangkalan Lampam	172	-	117	291	261	-	-	-	-	-	-	-
		291,1	310,6	310,0	340,7	289,0	151,6	116,3	78,7	107,0	310,0	312,5	477,3
	RATA-RATA	257,9 mm/bulan											

Keterangan : ( - ) data tidak tercatat/tidak tersedia

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. OKI 2017

#### 2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari Belukar, Perkebunan, Persawahan, Perkampungan, Rawa, Tegalan dan Tambak. Secara lebih rinci luas masing-masing penggunaan lahan dapat dilihat Tabel 2.3.

Berdasarkan proyeksi penggunaan lahan terlihat bahwa potensi lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih besar, terutama yang ditunjukkan oleh areal belukar (346.373,735 ha) dan semak alang-alang (6.047,811 ha), atau ±18,53% dari total luas lahan yang ada sehingga kabupaten ini mempunyai peluang besar untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi lahan produktif. Gambaran potensi sumber daya alam di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari kondisi hidrologi dan penggunaan lahan.

Tabel 2.3. Data Penutupan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017

NO	Penutupan Lahan	Luas Tahun 2017 (Ha)	Kawasan Hutan (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	-	-
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	8,748	8,748
3	Hutan Mangrove Primer	-	-
4	Hutan Mangrove Sekunder	22.130	22.130
5	Hutan Rawa Primer		
6	Hutan Rawa Sekunder	9.831	9.831
7	Hutan Tanaman	116.782	116.782
8	Perkebunan	389.645	

9	Pemukiman (lahan terbangun)	21.246	
10	Pertambangan	-	
11	Pertanian Lahan Kering	117.230	
12	Pertanian Lahan Kering campur Semak	24.940	
13	Rawa	63.190	
14	Padang Rumput	46.431	
15	Sawah	114.460	
16	Semak Belukar	79.628	
17	Semak Belukar Rawa	470.105	
18	Tambak	46.753	
19	Lahan Terbuka	263.335	
20	Transmigrasi	30.319	
21	Tubuh Air	11.130	
	<b>Total</b>	<b>1.835.904</b>	<b>157.491,00</b>

Sumber : BPKH Sumsel 2017

#### 2.1.1.5 Kerawanan Bencana Alam

Kemungkinan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan topografi wilayah antara lain: banjir, kebakaran hutan/gambut, dan angin puting beliung. Tinjauan terhadap kawasan rawan bencana alam, menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sejumlah kawasan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana alam, terutama bencana banjir, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Kecamatan Lempuing Jaya dan Air Sugihan merupakan daerah yang memiliki kawasan rawan banjir. Di Kecamatan Lempuing desa-desa ini sering mengalami banjir seperti di Desa Cahaya Bumi, Desa Tebing Suluh, Desa Bumi Arjo, dan Desa Sungai Belida. Banjir ini selain menggenangi perumahan penduduk juga menggenangi areal persawahan sehingga menyebabkan gagal panen dan gagal tanam. Luasan areal sawah yang tergenangi air akibat banjir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.4, sedangkan peta lokasi rawan banjir ditampilkan pada Gambar 2.2. Fenomena alam ini pada dasarnya dikarenakan volume air yang meresap ke bawah permukaan jauh lebih kecil dari pada air yang membentuk aliran bebas (*run off*) di permukaan sebab tanah pembentuk alam bersifat impermiabel atau kedap air. Selain faktor tanah, bencana alam banjir kemungkinan diakibatkan pula oleh: 1). Luapan air dari sungai-sungai kecil, karena air sungai tidak mengalir akibat sampah buangan yang membendung aliran

sungai; 2). Sistem pengaliran (drainase) yang kurang baik sehingga terjadi konsentrasi atau genangan air permukaan; 3). Penyempitan areal tangkapan air (*catchment areas*) akibat penimbunan untuk areal permukiman dan pembuatan jaringan jalan; 4). Naiknya permukaan air rawa ketika musim penghujan dan; 5) Kombinasi peristiwa-peristiwa tersebut.

Tabel 2.4. Areal sawah yang tergenang akibat banjir di Kabupaten Ogan Komering tahun 2014-2017

No	Kecamatan	Luas Areal Tergenang (ha)			
		2014	2015	2016	2017
1	Kayuagung	0	2	150	0
2	Lempuing	559	0	0	0
3	Lempuing Jaya	978	263	50	194
4	Pedamaran Timur	40	114	111	820
5	Tanjung Lubuk	48	6	292	33
6	Mesuji	0	0	0	394
7	Jejawi	33	0	315	327
8	Sirah Pulau Padang	0	6	2	0
9	Air Sugihan	0	4836	6657	295
10	Tulang Selapan	463	0	611	689
11	Cengal	0	688	709	1895
12	Sungai Menang	0	12	88	4800
13	Pedamaran	75	1.040	0	62
14	Teluk Gelam	0	8	98	0
15	Pampangan	0	16	136	275
16	Pangkalan Lampam	65	109	144	742
17	Mesuji Makmur	0	0	0	0
18	Mesuji Raya	422	97	0	209
<b>Jumlah</b>		<b>2.683</b>	<b>7.197</b>	<b>9.363</b>	<b>10.735</b>

Sumber : Dinas Ket. Pangan, T.Pangan & Holtikultura Kabupaten OKI, 2018

Kabupaten Ogan Komering Ilir juga jadi daerah yang rawan akan terjadinya kebakaran hutan, secara umum faktor utama terjadinya kebakaran bisa digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu pemicu kebakaran dan kondisi pendukung. Pemicu kebakaran merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi terjadinya penyulutan api. Aktifitas manusia merupakan porsi terbesar di dalam penyulutan api, dibandingkan secara alami. Kebakaran yang berasal dari batubara yang terbakar, halilantar ataupun gesekan ranting kering sangat jarang terjadi, terlebih di Sumatera Selatan, oleh karenanya penyulutan oleh alam cenderung dapat diabaikan.

Penyulutan api oleh manusia juga dikelompokkan menjadi 2 komponen yaitu kesengajaan dan kecerobohan. Walaupun seringkali kebakaran besar diawali dari upaya yang disengaja dan akibat ketidakpahaman pembakar mengenai kondisi yang ada, sehingga menjadi kecerobohan yang menyebabkan kebakaran merambat ke tempat lain.

Sebaran titik panas di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada Tabel 2.5, sedangkan peta lokasi daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditampilkan pada Gambar 2.2.

Tabel 2.5. Jumlah sebaran titik api di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 – 2017

No	Kecamatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Air Sugihan	93	4.227	28	8
2	Tulung Selapan	500	5.632	32	33
3	Cengal	435	2.973	1	1
4	Sungai Menang	297	907	1	3
5	Pangkalan Lampam	-	663	18	9
6	Pampangan	119	758	4	-
7	Jejawi	13	11	-	6
8	Sirah Pulau Padang	10	54	-	-
9	Kayuagung	20	81	5	-
10	Pedamaran	166	230	8	-
11	Pedamaran Timur	-	643	2	2
12	Tanjung Lubuk	14	143	7	1
13	Teluk Gelam	-	5	-	-
14	Lempuing Jaya	21	25	-	3
15	Lempuing	-	5	-	-
16	Mesuji Raya	79	242	-	2
17	Mesuji Makmur	-	1	-	-
18	Mesuji	-	29	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1.767</b>	<b>16.629</b>	<b>109</b>	<b>71</b>

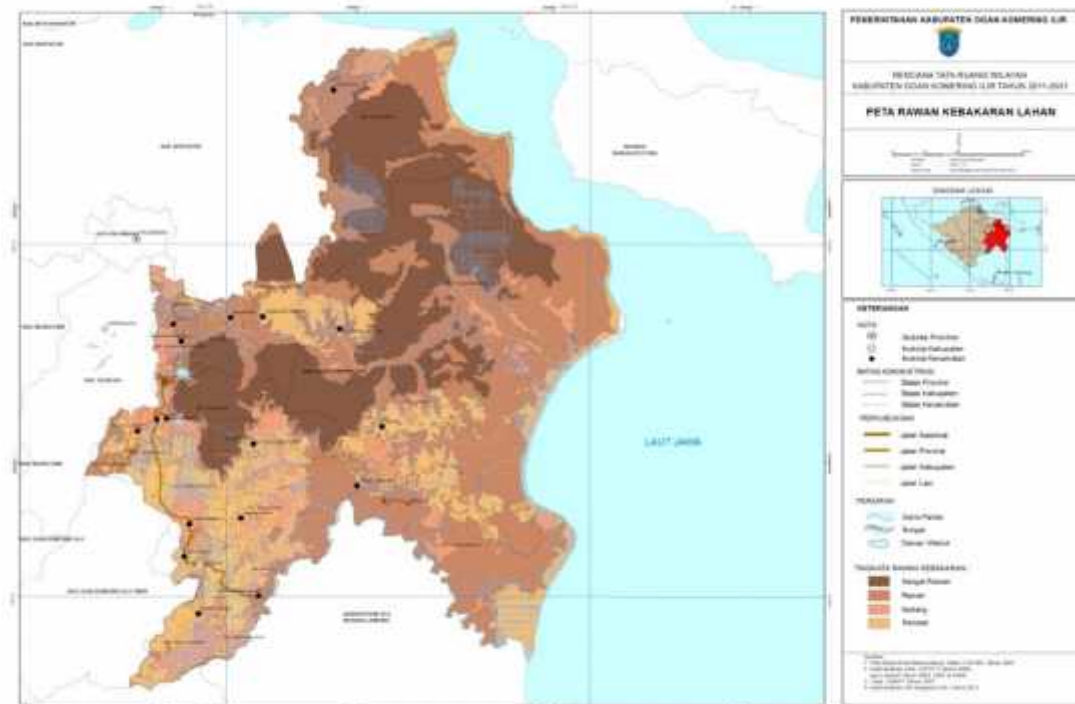
Sumber : Data harian satelit Terra Aqua Modis

Terlihat dari Tabel 2.5 di atas bahwa jumlah titik api di Kabupaten Ogan Komering ilir pada tahun 2017 menurun jauh dibandingkan tahun 2015, titik api ini terbesar berasal dari kecamatan Tulung Selapan, Pangkalan Lampam dan Air Sugihan, hal ini bisa disebabkan oleh masih banyaknya rawa di kecamatan-kecamatan tersebut. Jumlah titik api terbanyak biasanya pada bulan September setiap tahunnya.

Gambar 2.2. Peta lokasi rawan banjir di Kabupaten Ogan Komering Ilir



Gambar 2.3. Peta daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir



### 2.1.2. Aspek Demografis

Berdasarkan data Statistik tahun 2017, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 809.203 jiwa terdiri dari 413.442 laki-laki dan 395.605 perempuan, dengan sex ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan 104,63, jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 798.442 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir sebesar 1,39 persen, dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 mencapai 42,54 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kecamatan terpadat

penduduknya adalah Kecamatan SP. Padang (450,59 jiwa/km<sup>2</sup>). Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Tulung Selapan (8,38 jiwa/km<sup>2</sup>). Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 s.d 2017, ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 s.d 2017

No	Kecamatan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Penduduk	%	Kepadatan /km <sup>2</sup>	Penduduk	%	Kepadatan /km <sup>2</sup>	Penduduk	%	Kepadatan /km <sup>2</sup>	Penduduk	%	Kepadatan /km <sup>2</sup>
1	Lempuing	76.361	9,84	258,32	77.744	9,87	263,00	79.096	9,91	267,57	80.421	9,94	272,05
2	Lempuing Jaya	63.607	8,19	125,76	64.503	8,19	127,53	65.375	8,19	129,25	66.225	8,18	130,93
3	Mesuji	41.365	5,33	64,35	41.992	5,33	65,32	42.604	5,34	66,27	43.202	5,34	67,20
4	Sungai Menang	49.955	6,44	21,67	50.556	6,42	21,93	51.141	6,40	22,18	51.710	6,39	22,43
5	Mesuji Makmur	54.982	7,08	111,49	55.585	7,06	112,72	56.172	7,03	113,91	56.743	7,01	115,06
6	Mesuji Raya	36.961	4,76	71,65	37.524	4,76	72,74	38.073	4,77	73,81	38.609	4,77	74,85
7	Tulung Selapan	43.235	5,57	8,06	43.814	5,56	8,17	44.377	5,56	8,27	44.926	5,55	8,38
8	Cengal	46.810	6,03	15,40	47.590	6,04	15,66	48.354	6,06	15,91	49.103	6,07	16,16
9	Pedamaran	43.170	5,56	114,61	43.995	5,59	116,80	44.803	5,61	118,94	45.597	5,63	121,05
10	Pedamaran Timur	21.753	2,80	31,40	22.112	2,81	31,92	22.463	2,81	32,42	22.806	2,82	32,92
11	Tanjung Lubuk	33.516	4,32	152,37	33.882	4,30	154,03	34.238	4,29	155,65	34.584	4,27	157,22
12	Teluk Gelam	22.331	2,88	131,91	22.553	2,86	133,22	22.768	2,85	134,49	22.977	2,84	135,73
13	Kayuagung	66.770	8,60	297,48	67.770	8,61	301,94	68.743	8,61	306,27	69.694	8,61	310,51
14	Sirah Pulau Padang	44.166	5,69	432,66	44.791	5,69	438,78	45.400	5,69	444,75	45.996	5,68	450,50
15	Jejawi	40.065	5,16	168,35	40.574	5,15	170,49	41.068	5,14	172,57	41.551	5,13	174,60
16	Pampangan	29.337	3,78	60,69	29.665	3,77	61,36	29.983	3,76	62,02	30.294	3,74	62,67
17	Pangkalan Lampam	27.724	3,57	25,10	28.047	3,56	25,39	28.361	3,55	25,67	28.668	3,54	25,95
18	Air Sugihan	34.155	4,40	15,17	34.816	4,42	15,47	35.463	4,44	15,75	36.097	4,46	16,04
	<b>Total</b>	<b>776.263</b>		<b>40,81</b>	<b>787.513</b>		<b>41,40</b>	<b>798.482</b>		<b>41,97</b>	<b>809.203</b>		<b>42,54</b>

Sumber: Diolah dari Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2018

Ditinjau dari sebaran geografis, jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 terbanyak di Kecamatan Lempuing sebesar 9,94 persen dan yang terkecil terletak di kecamatan Pedamaran Timur sebesar 2,82 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata antar kecamatan. Kondisi ini memicu ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan pembangunan antar bagian wilayah ini, terutama dengan kawasan-kawasan yang masih terisolasi memerlukan prioritas penanganan guna mencegah bertambahnya tingkat kesenjangan, meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga mencegah potensi konflik horizontal.

Profil penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat dari komposisi penduduknya, yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, lapangan

usaha dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dalam 5 tahun terakhir lebih banyak daripada perempuan. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan pada 2017 adalah 105 sedangkan dilihat dari usianya, persentase penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) pada tahun 2016 masih cukup tinggi yaitu 66,47 persen.

Tabel 2.7. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017

Kelompok Umur	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0 – 4	41.936	40.359	82.295	41.861	40.539	82.400	41.737	40.404	82.141	41.542	40.244	81.786
5 – 9	39.126	37.106	76.232	39.599	37.559	77.158	39.995	38.134	78.129	40.339	38.657	78.996
10-14	36.895	35.301	72.196	37.276	35.666	72.942	37.623	35.944	73.567	37.892	36.225	74.117
15-19	34.612	32.361	66.973	34.630	32.362	66.992	34.828	32.492	67.320	35.077	32.749	67.826
20-24	33.504	33.170	66.674	33.279	32.961	66.240	33.138	32.738	65.876	33.013	32.533	65.546
25-29	35.708	34.982	70.690	35.645	34.952	70.597	35.525	34.828	70.353	35.343	34.313	69.656
30-34	34.408	33.377	67.785	34.810	33.778	68.588	35.231	34.123	69.354	35.343	34.712	70.055
35-39	32.954	30.367	63.321	33.723	31.204	64.927	34.324	31.868	66.192	34.932	32.573	67.505
40-44	27.718	24.898	52.616	28.480	25.545	54.025	29.327	26.246	55.573	30.120	26.947	57.067
45-49	22.271	20.927	43.198	22.916	21.503	44.419	23.634	22.078	45.712	24.363	22.677	47.040
50-54	17.563	17.220	34.783	18.099	17.862	35.961	18.594	18.413	37.007	19.108	18.957	38.065
55-59	14.041	13.252	27.293	14.626	13.965	28.591	15.209	14.731	29.940	15.730	15.442	31.172
60-64	10.991	9.652	20.643	11.687	10.316	22.003	12.447	10.951	23.398	13.192	11.700	24.892
65-69	6.437	6.400	12.837	6.822	6.634	13.456	7.233	6.949	14.182	7.732	7.282	15.014
70-74	4.544	4.747	9.291	4.660	4.880	9.540	4.790	4.997	9.787	4.917	5.144	10.061
75+	4.389	5.045	9.434	4.506	5.168	9.674	4.647	5.304	9.951	4.799	5.450	10.249
<b>Jumlah</b>	<b>397.097</b>	<b>379.164</b>	<b>776.261</b>	<b>402.619</b>	<b>384.894</b>	<b>787.513</b>	<b>408.282</b>	<b>390.200</b>	<b>798.482</b>	<b>413.442</b>	<b>395.605</b>	<b>809.047</b>

Sumber: Diolah dari Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2018

Dari sisi lapangan usaha, komposisi penduduk yang bekerja di sektor primer cenderung mengalami penurunan dari 73,75 persen pada tahun 2014 menjadi 66,78 persen pada tahun 2017, sedangkan proporsi penduduk yang bekerja disektor tersier mengalami kenaikan dari 20,21 persen pada tahun 2014 menjadi 25,42 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.8. Komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017

No	Jenis lapangan usaha	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Primer	73,75	67,12	67,12	66,78
2	Sekunder	5,99	7,88	7,88	7,78
3	Tersier	20,26	25,00	25,00	25,42

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Dari sisi agama, komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2010 didominasi oleh agama Islam (86,25 persen), sedangkan proporsi agama lainnya masing-masing Hindu 1,48 persen, Kristen

Protestan 0,67 persen, Katolik 0,44 persen dan sisanya 0,01 persen beragama Budha. Secara umum kondisi kehidupan antara warga beragama di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup kondusif. Secara historis di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah hidup secara berdampingan, khususnya antara penganut agama Islam dan Nasrani yang telah hidup rukun selama ini. Kemudian bertambah dengan migrasi dan urbanisasi penduduk baru yang berbeda agama, suku, dan budaya; telah memperkaya kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 2.9. Proporsi penduduk menurut agama di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017

No	Kecamatan	Islam	Kriten Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Lempuing	66 460	822	517	890	25	4
2	Lempuing Jaya	64 778	962	735	4 651	67	7
3	Mesuji	34649	260	136	841	6	-
4	Sungai Menang	22 428	252	103	143	-	-
5	Mesuji Makmur	63 171	1 438	1 345	2 966	63	10
6	Mesuji Raya	41 056	643	497	2 164	7	1
7	Tulung Selapan	38 011	7	-	-	-	1
8	Cengal	31 461	69	2	8	1	3
9	Pedamaran	36 644	31	13	17	2	6
10	Pedamaran Timur	19 020	120	58	18	46	-
11	Tanjung Lubuk	35 039	7	4	1	1	5
12	Teluk Gelam	29 777	229	78	246	-	1
13	Kayuagung	69 957	259	38	4	209	3
14	Sirah Pulau Padang	37 875	2	1	3	-	34
15	Jejawi	30 177	5	1	-	-	-
16	Pampangan	27 342	2	1	17	-	3
17	Pangkalan Lampam	18 995	2	-	-	-	-
18	Air Sugihan	31 066	307	71	15	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>697 906</b>	<b>5 417</b>	<b>3 600</b>	<b>11 984</b>	<b>429</b>	<b>78</b>

Sumber: BPS Kabupaten OKI, 2018

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan tanah, ketenagakerjaan serta fokus seni budaya dan olah raga.

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), dan angka kriminalitas yang tertangani.

#### **2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kondisi perekonomian suatu daerah secara makro diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai PDRB, tingkat kemiskinan dan lain-lain. PDRB sebagai salah satu indikator penting merupakan dasar pengukuran penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut definisinya, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

#### **Struktur Perekonomian**

Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Struktur perekonomian digunakan untuk melihat sektor-sektor yang mendominasi dalam pembentukan nilai tambah ekonomi suatu daerah. Dari struktur tersebut akan didapat gambaran mengenai potensi ekonomi suatu wilayah. Struktur perekonomian didapat dari besaran distribusi persentase nilai tambah tiap-tiap sektor terhadap total PDRB yang pada umumnya menggunakan ukuran harga berlaku.

Struktur perekonomian merupakan besar *share* lapangan usaha terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

Tabel 2.10. Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	63,79	60,48	57,77	56,36
2	Pertambangan dan Penggalian	1,03	1,07	1,08	1,08
<b>Sektor Primer</b>		<b>64,82</b>	<b>61,55</b>	<b>58,85</b>	<b>57,44</b>
3	Industri Pengolahan	4,87	5,55	6,39	7,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	11,13	11,50	12,78	13,23
<b>Sektor Sekunder</b>		<b>16,05</b>	<b>17,11</b>	<b>19,24</b>	<b>20,54</b>
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,59	8,82	9,49	9,88
8	Transportasi dan Pergudangan	0,52	0,64	0,72	0,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,73	0,87	0,98
10	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,42	0,42	0,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,02	1,06	1,04
12	Real Estate	1,45	1,62	1,81	1,88
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,46	5,89	5,38	4,87
15	Jasa Pendidikan	1,48	1,52	1,48	1,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,15	0,15	0,15
17	Jasa Lainnya	0,45	0,46	0,45	0,47
<b>Sektor Tersier</b>		<b>19,15</b>	<b>21,33</b>	<b>21,9</b>	<b>22,03</b>

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2014-2017, 2018

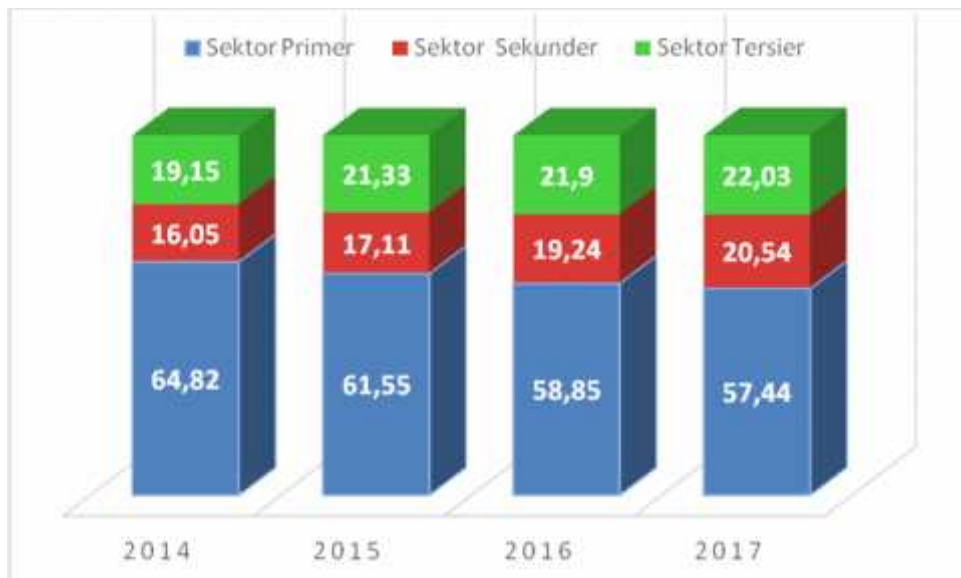
Struktur ekonomi berarti juga menggambarkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Suatu daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian, maka nilai tambah ekonomi akan banyak terbentuk di sektor pertanian sehingga sektor primernya akan cenderung lebih dominan. Sebaliknya pada wilayah yang masyarakatnya banyak bergerak di sektor perdagangan dan jasa seperti di daerah perkotaan, sektor tersier akan lebih dominan dibanding sektor primernya. Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ogan

Komering Ilir masih bertumpu pada sektor primer dengan kontribusi rata-rata mendekati angka 50 persen. Namun jika dilihat secara series dari tahun ke tahun tampak adanya penurunan kontribusi dari sektor primer. Pada tahun 2014 sektor primer memberikan kontribusi sebesar 64,82 persen dan pada tahun 2017 kontribusinya menurun menjadi 57,44 persen. Data empiris tersebut menunjukkan bahwa mulai terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan, meskipun berlangsung secara perlahan. Penurunan kontribusi sektor primer yang dibareng dengan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier mamperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi di Kaupaten OKI sejalan dengan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Lewis yang menyoroti terjadinya perubahan struktur perekonomian dari tradisional ke industri/modern yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melebihi tingkat subsisten.

Sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan, penggalian, keduanya memberikan kontribusi sebesar 57,44 persen. Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan sendiri memberikan kontribusi sebesar 56,36 persen terhadap total PDRB. Sisanya sebesar 1,08 persen merupakan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian. Dengan kontribusi sebesar ini berarti dapat dikatakan separuh perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari sektor primer. Besarnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar masih bergerak di bidang agraris sehingga sektor ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Ogan Komering Ilir. Kondisi ini selaras dengan kultur masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan masyarakat agraris juga ditunjang dengan potensi alam di bidang pertanian yang masih melimpah.

Sektor sekunder pada tahun 2017, memberikan kontribusi sebesar 20,54 persen. Kontribusi ini sedikit meningkat dibanding kontribusi yang diberikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 16,05 persen. Kontribusi yang dihasilkan ini sebagian besarnya yaitu 13,23 persen berasal dari sektor Konstruksi dan 7,24 persen berasal dari industri pengolahan, kontribusi sektor ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.4. Struktur Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 - 2017



Sementara itu, pada tahun 2017 sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 22,03 persen. Tampak bahwa kontribusi sektor tersier mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Peranan terbesar dalam sektor tersier terbentuk dari aktivitas sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,88 persen, real estate sebesar 1,88 persen, Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 4,87 persen. Sementara, kontribusi sektor transportasi pergudangan dan Jasa-jasa masih relatif kecil. Jika dilihat secara global, tampak bahwa peranan sektor primer mengalami penurunan bersamaan dengan meningkatnya peranan sektor sekunder dan tersier. Keadaan ini diharapkan menjadi indikasi adanya kemajuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena pada umumnya ekonomi negara maju cenderung didominasi oleh sektor sekunder dan tersier.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pergeseran kontribusi sektoral ternyata tidak diiringi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 4 tahun terakhir (2014 – 2017) rata-rata sebesar 3,89 persen. Jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut mengalami sedikit perlambatan, dimana pada tahun 2014 sebesar 5,07 persen menjadi 4,86 persen pada tahun 2017 atau melambat sebesar 0,21 persen. Fakta empiris ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi hampir seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dunia. Provinsi Sumatera Selatan mengalami perlambatan sebesar 0,49 persen PDRB dengan migas dan 0,16 persen

tanpa migas. Fenomena tersebut terjadi disebabkan dampak melemahnya perekonomian dunia yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar rupiah dalam perdagangan internasional, sehingga berimbas pada merosotnya nilai ekspor baik barang maupun jasa dan sebaliknya mahal biaya impor dari negara lain. Keadaan ini pada akhirnya juga akan dirasakan oleh segenap masyarakat dalam wilayah Negara Indonesia dengan melambatnya aktivitas roda perekonomian domestik.

Tabel 2.11. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017

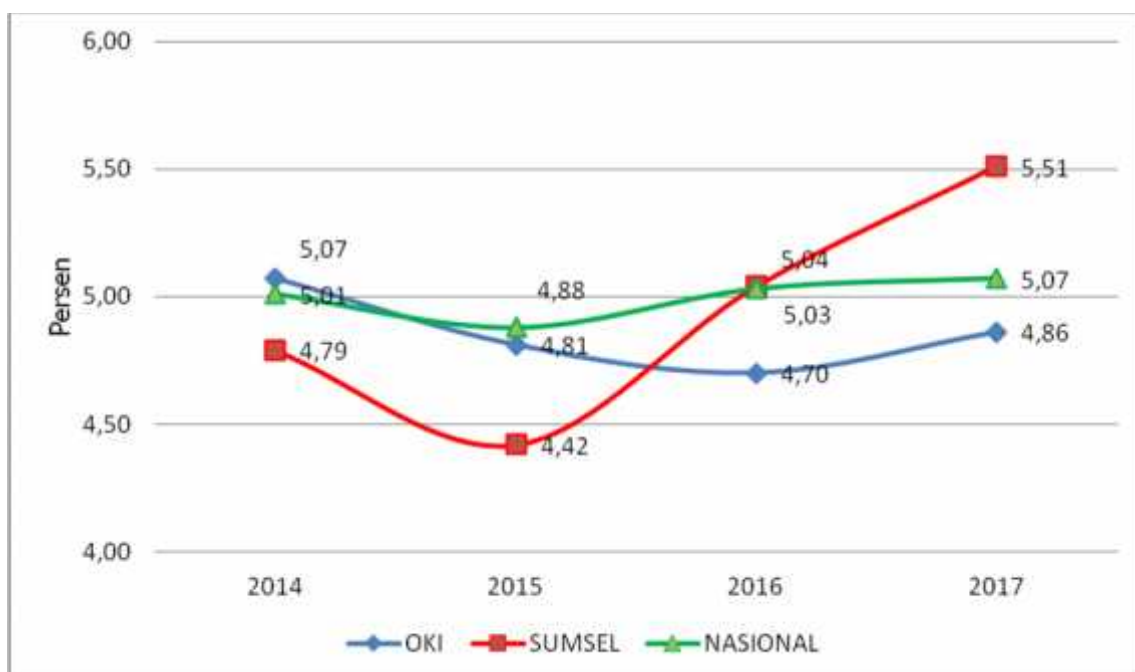
No	Sektor	Tahun			
		2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,60	2,23	2,57
2	Pertambangan dan Penggalian	6,14	7,59	7,33	8,54
3	Industri Pengolahan	6,97	7,41	10,86	12,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	4,44	17,23	4,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,65	6,59	1,49	4,08
6	Konstruksi	6,35	3,90	9,40	9,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran	12,02	7,97	11,82	9,65
8	Transportasi dan Pergudangan	8,47	12,10	8,76	10,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27	11,99	13,97	11,48
10	Informasi dan Komunikasi	13,92	14,44	11,43	11,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,14	4,55	8,36	2,71
12	Real Estate	8,66	7,11	11,53	9,01
13	Jasa Perusahaan	7,65	5,87	8,65	9,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,25	10,56	4,96	5,71
15	Jasa Pendidikan	17,98	9,34	4,30	2,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	7,58	1,29	3,31
17	Jasa Lainnya	6,86	5,24	7,25	9,24
	<b>PDRB</b>	<b>5,07</b>	<b>4,81</b>	<b>4,70</b>	<b>4,86</b>

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2014-2017, 2018

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan nasional mengalami tren penurunan dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melambat selama periode tersebut sangat relevan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan maka dapat

dikatakan kurang relevan. Namun demikian, di Tahun 2017 kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami kenaikan (dari 4,70% menjadi 4,86%) ternyata relevan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang juga mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masing sebesar 5,07 persen dan 5,51 persen. Meskipun demikian, kondisi pertumbuhan ekonomi pada setiap level pemerintahan masih dikatakan relatif rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional dapat ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut ini :

Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2017



### 2.2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

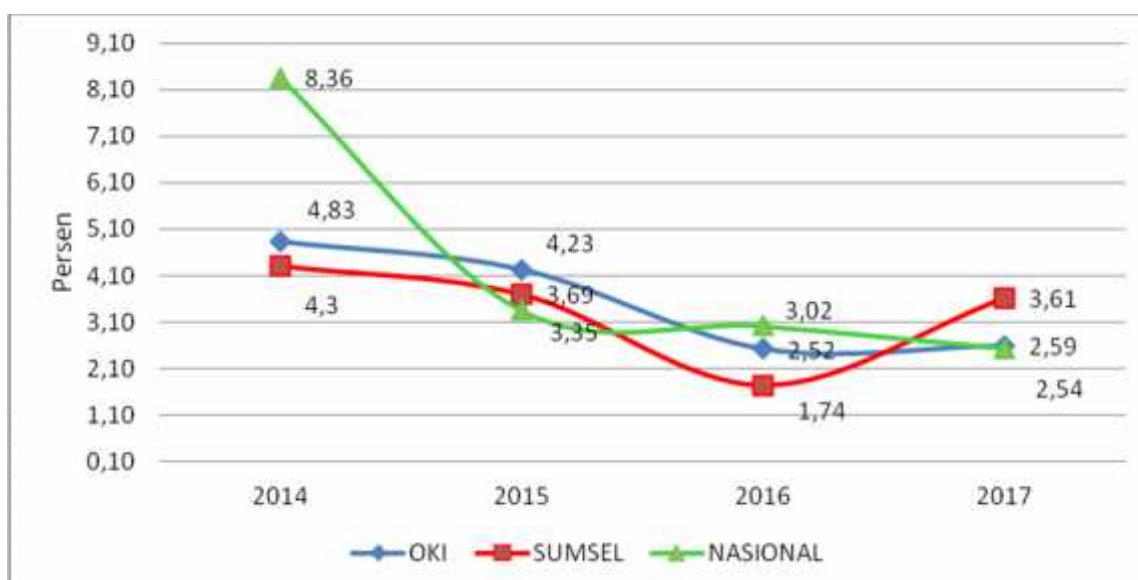
Angka inflasi yang umum dipakai sebagai indikator perekonomian adalah inflasi pada tingkat harga konsumen / harga pasar. Adapun inflasi pada penghitungan PDRB ini adalah inflasi pada tingkat harga produsen

yaitu inflasi yang timbul dari kegiatan produksi barang dan jasa, sehingga sangat mungkin adanya perbedaan antara keduanya. Inflasi PDRB tahun 2017 lebih tinggi dibanding inflasi tahun lalu. Pada tahun 2017, inflasi migas sama dengan inflasi tanpa migas sebesar 6,24 persen sedangkan tahun 2016 sebesar 6,97 persen. Inflasi tertinggi tahun 2017 terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,56 persen. Sedangkan inflasi terendah sebesar 5,54 persen terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan.

Pada umumnya, inflasi ditimbulkan akibat naiknya ongkos produksi sehingga mendorong naiknya harga barang yang diproduksi. Selain itu bisa juga diakibatkan karena meningkatnya permintaan terhadap barang jasa yang menyebabkan naiknya daya tawar barang dan jasa.

Dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga 2017 kinerja inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional secara umum mengalami penurunan. Meskipun demikian, di tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan di setiap tingkatan wilayah. Inflasi selama periode tersebut berada di bawah angka 10 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi masih dalam kondisi yang wajar. Perkembangan inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun sangat relevan dengan inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tingkat inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Inflasi yang terjadi pada setiap tingkatan wilayah di tahun 2017 dapat dikatakan relatif rendah dengan angka sebesar 2,54 persen untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebesar 2,59 persen untuk Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar 3,61% untuk nasional. Baik Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional, inflasi pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014, sebagaimana dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Laju Inflasi PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2017



Sumber: BPS Kabupaten OKI

### 2.2.1.3. Pendapatan Per Kapita dan Gini Ratio

Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto, nilai hasilnya akan sama dengan pendapatan regional (*regional income*) bila diasumsikan pendapatan netto sama dengan nol.

Tabel 2.12 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2014-2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pendapatan per Kapita (Juta Rp)	Pertumbuhan	Pendapatan Per Kapita (Juta Rp)	Pertumbuhan
2014	25,746	10,14	20,485	5,07
2015	27,597	8,75	21,164	4,81
2016	29,213	7,33	21,855	4,70
2017	31,14	6,60	22,61	3,45

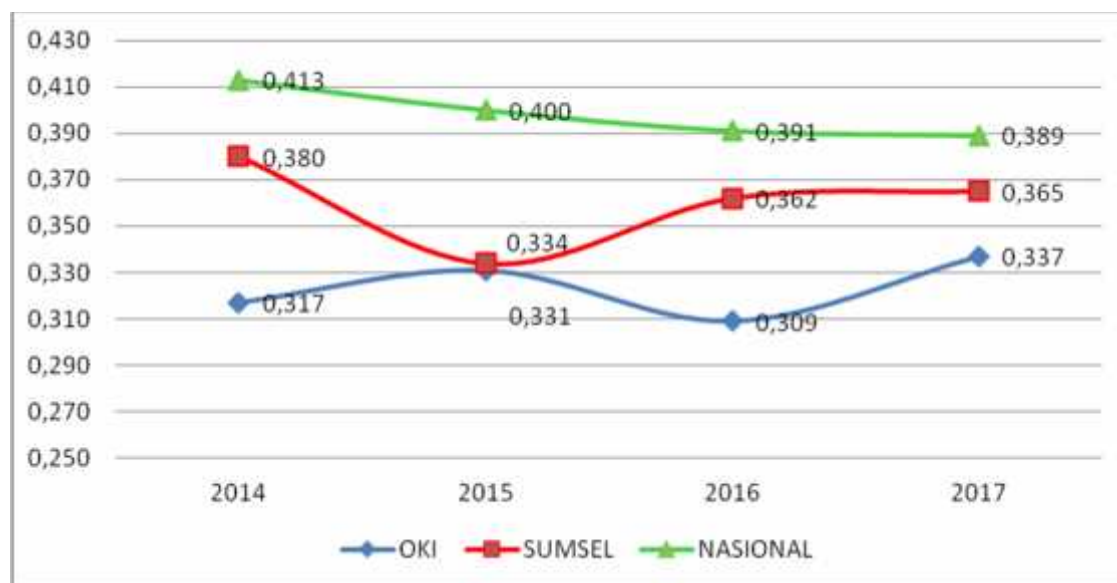
Sumber: PDRB Kab. Ogan Komering Ilir Menurut Lapangan Usaha 2014-2017, 2018

Kemudian jika pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk maka didapat nilai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran di suatu wilayah namun tidak dapat melihat pemerataannya karena ini bersifat rata-rata pendapatan per orang, dan kurang menggambarkan distribusinya. Dengan kata lain, dapat saja nilai tersebut diperoleh dari sekelompok masyarakat dengan penghasilan sangat tinggi dan sekelompok besar lainnya dengan

penghasilan yang sangat rendah. Untuk mengukur hal ini digunakan indeks gini rasio yang sering digunakan untuk menilai kesenjangan distribusi pendapatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir (2017), angka Gini Ratio Kabupaten Ogan Komering sebesar 0,337. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (lebih dari 0,3).

Dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga 2017 kinerja gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional secara umum mengalami fluktuatif. Meskipun demikian, di tahun 2017 gini ratio mengalami kenaikan di setiap tingkatan wilayah. Perkembangan gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun sangat relevan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Gini ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Gini ratio yang terjadi pada setiap tingkatan wilayah di tahun 2017 dapat dikatakan relatif rendah dengan angka sebesar 0,337 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebesar 0,365 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan sebesar 0,389 untuk nasional, sebagaimana dapat ditunjukkan pada Gambar 2.7

Gambar 2.7. Gini Ratio Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2017

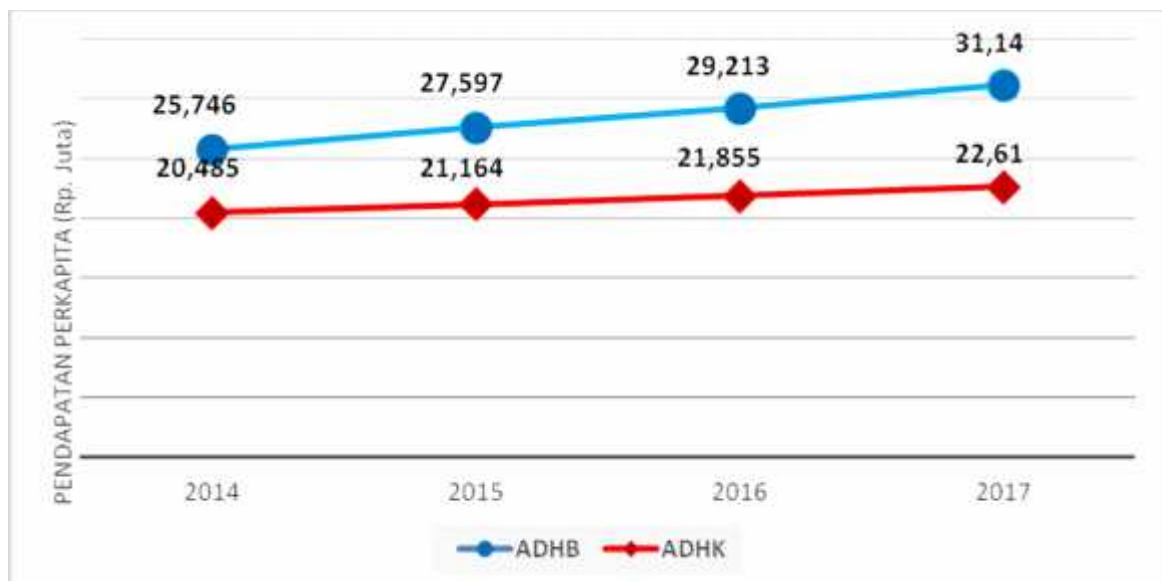


Sumber: PDRB Kabupaten OKI Menurut Lapangan Usaha 2014-2017, 2018

Indeks gini ratio bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini ratio bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Pada tahun 2017 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp. 31.140.000,- meningkat 6 persen dibanding dengan kondisi tahun 2016 yang pendapatan per kapitanya sebesar Rp. 29.213.000,- Dengan menggunakan harga konstan pendapatan per kapita tahun 2017 sebesar Rp. 22.610.000,- meningkat 3,5 persen dibanding tahun 2016 yaitu sebesar Rp 21.855.000,-.

Gambar 2.8. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2017



#### 2.2.1.4. Perkembangan Penduduk Miskin

Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 17,08 persen menurun pada tahun 2017 menjadi 15,75 persen. Dan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang di terbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terlihat bahwa persentase penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015 sebesar 17,08 persen. Sedangkan nilai Garis Kemiskinan terus meningkat selama 2014 sampai 2017. Pada tahun 2014 nilai Garis Kemiskinan adalah 263.345 rupiah; dan meningkat menjadi 310.341 rupiah pada 2017. Naiknya garis kemiskinan diiringi dengan turunnya nilai persentase penduduk miskin kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bertambahnya pendapatan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir secara rata-rata.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah Tangga BDT tahun 2015 Menurut Klasifikasi Kemiskinan dirinci per Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Kecamatan	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin Lainnya	Total
1.	Lempuing	455	1.302	1.508	318	3.583
2.	Lempuing Jaya	693	1.932	2.253	532	5.410
3.	Mesuji	340	739	757	163	1.999
4.	Sungai Menang	462	1.053	1.308	459	3.282
5.	Mesuji Makmur	448	1.200	1.325	258	3.231
6.	Mesuji Raya	265	724	1.047	272	2.308
7.	Tulung Selapan	1.554	1.983	1.445	219	5.201
8.	Cengal	1.006	1.575	1.576	462	4.619
9.	Pedamaran	1.792	1.479	1.124	197	4.592
10.	Pedamaran Timur	290	463	478	123	1.354
11.	Tanjung Lubuk	1.673	1.904	1.170	204	4.951
12.	Teluk Gelam	741	910	685	148	2.484
13.	Kota Kayuagung	2.087	2.526	1.808	358	6.779
14.	Sirah Pulau Padang	2.128	2.660	2.080	483	7.351
15.	Jejawi	2.133	1.563	872	183	4.751
16.	Pampangan	1.462	1.686	1.420	275	4.843
17.	Pangkalan Lampam	755	1.342	1.113	213	3.423
18.	Air Sugihan	285	723	921	234	2.163
	Jumlah	18.569	25.764	22.890	5.101	72.324

Sumber : Diolah dari Hasil BDT tahun 2015

Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin cenderung menurun dibandingkan tahun 2016, pada tahun 2016 persentase penduduk miskin 16,03 menjadi 15,75 di tahun 2017.

Tabel 2.14. Indikator Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014– 2017

No	URAIAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin	119.210	134.070	127.540	127,06
2	Persentase Penduduk Miskin	15,30	17,08	16,03	15,75
3	P1 Kedalaman kemiskinan	2,40	3,11	2,79	2,95
4	P2 Keparahan kemiskinan	0,56	0,85	0,70	0,78
5	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/BL)	263.395	274.843	295.852	310.341

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Persentase penduduk miskin Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan demikian pula dengan Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai data pembandingan, tabel berikut akan memperlihatkan Jumlah dan Indikator Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera selatan tahun 2017.

Tabel 2.15. Indikator Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Per Kabupaten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin (000)				Persen tase	Peringkat
		2014	2015	2016	2017		
1	Ogan Komering Ulu	41,4	46,0	46,97	46,97	13,29	11
2	<b>Ogan Komering Ilir</b>	119,2	134,1	127,54	127,06	16,03	4
3	Muara Enim	106,1	87,0	82,35	82,35	13,56	9
4	Lahat	70,3	70,7	67,83	67,83	17,11	3
5	Musi Rawas	97,0	58,0	55,50	55,50	14,30	5
6	Musi Banyuasin	105,1	111,9	106,78	106,78	17,27	2
7	Banyuasin	95,4	100,6	95,99	95,99	11,72	14
8	OKU Selatan	38,2	40,6	38,42	38,42	10,95	13
9	OKU Timur	65,3	72,8	73,93	73,93	11,29	16
10	Ogan Ilir	54,2	59,0	57,01	57,01	13,80	8
11	Empat Lawang	30,4	31,6	30,17	30,17	12,54	12
12	PALI	-	26,8	25,89	25,89	14,26	6
13	Musi Rawas Utara	-	35,9	36,95	36,95	20,00	1
14	Palembang	202,3	203,1	191,95	191,95	12,04	13
15	Prabumulih	19,0	21,4	20,47	20,47	11,44	15
16	Pagar Alam	11,8	12,9	12,40	12,40	9,19	17
17	Lubuk Linggau	30,2	33,2	31,05	31,05	13,99	7
	Sumatera Selatan	1.085,8	1.145,6	1.101,20	1.101,20	13,54	10

Sumber : BPS Propinsi Sumsel

Dari uraian indikator kemiskinan di atas dapat disimpulkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara bertahap menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Perkembangan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014- 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf	97,21	97,69	97,74	98,09
2	Rata-Rata Lama sekolah	6,44	6,45	6,74	7,01
3	Angka Partisipasi Kasar				
	SD	110,91	115,88	119,84	112,96
	SMP	83,53	92,26	80,71	89,42
	SMA	59,32	60,99	67,96	73,50
4	Angka Partisipasi Murni				
	SD	96,42	99,30	98,11	96,46
	SMP	70,57	78,07	72,96	74,43
	SMA	40,48	46,89	55,10	57,95

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, 2018

Dilihat dari bidang pendidikan, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir tingkat pendidikannya masih belum baik, hal ini terlihat dari angka melek huruf yang belum mendekati 100 persen dan rata-rata lama sekolah belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilihat dari Angka Partisipasi Kasar menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia sekolah sudah menikmati pendidikan tingkat SD sederajat, tetapi masih ada sebagian anak usia sekolah SMP dan SMA yang belum menikmati pendidikan.

Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memenuhi wajib belajar sembilan tahun, pada tahun 2017 baru mencapai 7,01 tahun, yang artinya masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir rata-rata baru menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/sederajat, hal ini disebabkan masih tingginya masyarakat yang tidak tamat SD atau belum mempunyai ijazah SD/sederajat sebesar 64,84 persen seperti disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.17. Persentase Penduduk umur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014–2017

No	Pendidikan Tertinggi	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Tidak Punya Ijazah	32,23	26,19	23,86	19,03
2.	SD/Sederajat	31,41	35,70	36,59	40,06
3.	SMP/ Sederajat	17,55	21,52	19,95	23,19
4.	SMA/Sederajat	16,01	12,43	14,96	13,74
5.	Perguruan Tinggi	2,80	4,16	4,65	3,99

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Persentase penduduk umur 15 tahun keatas menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 hanya 13 persen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengenyam pendidikan dibangku SMA sederajat (13,74 persen). Bahkan jumlah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak mempunyai ijazah masih cukup tinggi yaitu 19,03 persen. Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berpendidikan SD kebawah tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan.

Tabel 2.18. Perkembangan Indikator bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Angka Melek Huruf	Peringkat	Rata-rata Lama Sekolah	Peringkat
1	Ogan Komering Ulu	99,31	2	8,81	5
<b>2</b>	<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>98,09</b>	<b>16</b>	<b>7,45</b>	<b>14</b>
3	Muara Enim	99,32	11	8,02	9
4	Lahat	99,52	6	8,40	6
5	Musi Rawas	100,00	1	7,41	12
6	Musi Banyuasin	99,39	7	7,56	8
7	Banyuasin	94,06	17	7,12	13
8	Ogan Komering Ulu Selatan	98,89	14	7,60	7
9	Ogan Komering Ulu Timur	100,00	2	7,63	14
10	Ogan Ilir	99,18	13	7,79	11
11	Empat Lawang	99,36	10	7,64	10
12	Penukal Abab Lematang Ilir	100,00	3	6,70	16
13	Musi Rawas Utara	99,39	8	7,07	17
14	Kota Palembang	99,39	9	10,60	1
15	Kota Prabumulih	100,00	4	9,40	2
16	Kota Pagar Alam	100,00	5	8,77	4
17	Kota Lubuk Linggau	98,72	15	9,35	3
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>98,94</b>		<b>8,32</b>	

Sumber : BPS Propinsi Sumsel

Angka melek huruf Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sebesar 98,09 persen yang rata-rata sudah mendekati dengan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 98,94 persen dan menempati peringkat 16 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sebesar 7,45 tahun masih dibawa rata-rata Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar 8,32 tahun dan menempati peringkat (peringkat 14) dari 17 kabupaten/kota yang ada. Perlu kerja keras Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar dapat setara dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

#### 2.2.2.2. Kesehatan

Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini.

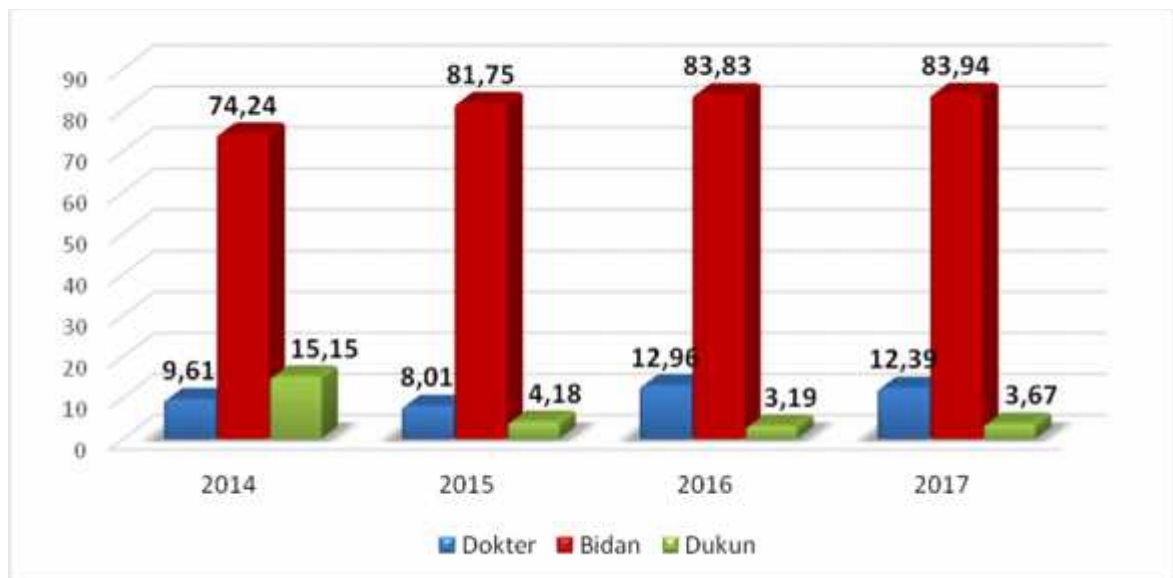
Tabel 2.19. Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014– 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Usia Harapan Hidup	67,99	68,01	68,02	68,04
2	Jumlah Kematian Bayi	34	49	41	33
3	Jumlah Kematian Ibu	11	18	8	2
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,02	0,01	0,01	0,01

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin meningkat yaitu 68,02 pada tahun 2016. Namun, disisi lain dengan jumlah kematian bayi dan Ibu yang terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 jumlah kematian bayi 41 dan jumlah kematian ibu 8 perlu peningkatan kinerja di bidang kesehatan sehingga angka kematian bayi dan ibu dapat diturunkan.

Gambar 2.9. Persentase balita menurut penolong persalinan tahun 2014 – 2017



Bila dilihat secara rinci pada Gambar 2.9, penolong persalinan oleh tenaga dokter mengalami kenaikan signifikan dari 9,61 persen pada tahun 2014 menjadi 12,39 persen pada tahun 2017. Sementara persentase persalinan yang dibantu oleh bidan mengalami kenaikan dari 74,24 persen pada tahun 2014 menjadi 83,94 persen pada tahun 2017. Sedangkan persalinan oleh dukun mengalami penurunan yaitu dari 15,15 persen pada tahun 2014 menjadi 3,67 persen di tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang proses persalinannya ditolong oleh bukan tenaga kesehatan, terlepas dari dukun

terlatih maupun tidak terlatih. Hal ini diduga erat kaitannya dengan tingkat kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang masih berlaku.

Tabel 2.20. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan Poskesdes yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017

No	Kecamatan	Pusekesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesdes	Praktek Dokter	Klinik
1	Lempuing	3	6	23	11	5
2	Lempuing Jaya	2	8	16	1	1
3	Mesuji	2	6	13	2	-
4	Sungai Menang	1	8	17	2	1
5	Mesuji Makmur	2	11	18	5	2
6	Mesuji Raya	2	6	16	4	-
7	Tulung Selapan	1	4	22	-	-
8	Cengal	1	3	15	1	1
9	Pedamaran	1	5	14	-	1
10	Pedamaran Timur	1	2	6	1	-
11	Tanjung Lubuk	1	5	19	2	-
12	Teluk Gelam	2	5	4	1	-
13	Kayuagung	2	4	22	25	7
14	Sirah Pulau Padang	2	4	14	1	1
15	Jejawi	2	2	17	-	-
16	Pampangan	2	-	20	2	1
17	Pangkalan Lampam	1	3	17	2	-
18	Air Sugihan	2	4	17	9	1
	<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>290</b>	<b>69</b>	<b>21</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. OKI, 2018

### 2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 66,11. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 65,44 berarti meningkat sebesar 0,67 poin. Kenaikan indeks penyusun IPM disebabkan oleh kenaikan variable pembangunan manusia yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli). Kalau dilihat dari Tabel 2.20 di bawah ini kenaikan Indeks Kesehatan disebabkan oleh bertambahnya Angka Harapan Hidup sebesar 0,23 tahun. Kenaikan Indeks Pendidikan disebabkan oleh kenaikan angka melek huruf sebesar 0,02 persen dan kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 0,01 tahun. Dan kenaikan Indeks Daya beli disebabkan oleh kenaikan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 3.520,-

Tabel 2.21. Variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 – 2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup	67,99	68,01	68,02	68,04
2	Harapan Lama Sekolah	10,78	11,34	11,35	11,39
3	Rata-rata Lama Sekolah	6,44	6,45	6,74	7,01
4	Pengeluaran Riil Perkapita (Juta Rupiah)	9,517	9,723	10,039	10,306
	<b>IPM</b>	<b>63,87</b>	<b>64,73</b>	<b>65,44</b>	<b>66,11</b>

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 masih berada dibawah rata-rata IPM provinsi Sumatera Selatan dan berada pada posisi ke-10 dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini tentunya karena angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya mengalami peningkatan sedikit. Sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan IPM itu sendiri. Sedangkan kabupaten/kota yang naik ke peringkat kesembilan pada tahun 2017 adalah Kota Lubuk Linggau (1,86) lebih besar dibandingkan dengan perkembangan IPM Kabupaten Ogan Komering Ilir (1,55).

Tabel 2.22. Besaran dan peringkat IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat
1	Kota Palembang	77,22	1
2	Kota Lubuk Linggau	73,67	2
3	Kota Prabumulih	73,58	3
4	Ogan Komering Ulu	68,28	4
5	Ogan Komering Ulu Timur	67,84	6
6	Muara Enim	67,63	5
7	Musi Banyuasin	66,96	7
8	Kota Pagar Alam	66,81	8
9	Lahat	66,38	9
<b>10</b>	<b>Ogan Komering Ilir</b>	<b>66,11</b>	<b>10</b>
11	Banyuasin	65,85	11
12	Ogan Ilir	65,63	12
13	Musi Rawas	65,31	13
14	Empat Lawang	64,21	14
15	OKU Selatan	63,96	15
16	Muratara	63,18	16
17	Pali	62,58	17
	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>68,86</b>	

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

#### 2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tabel 2.23 menyajikan TPAK selama tahun 2014 – 2017, terlihat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 adalah 3,45 persen mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 3,48 persen.

Tabel 2.23. Perkembangan TPAK dan Pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014– 2017

No	Indikator Ketenagakerjaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Angkatan Kerja	384.773	365.939	365.939	401.335
	Bekerja	371.385	340.733	340.733	387.495
	Pengangguran	13.388	25.206	25.206	13.840
2.	Bukan Angkatan Kerja	159.288	186.016	186.016	174.533
3.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas	544.061	551.955	564.645	574,148
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,72	66,30	64,81	69,01
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,48	6,89	6,89	3,45

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ke tahun meningkat, diimbangi dengan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun meningkat. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebagian besar dapat terserap dalam lapangan kerja yang ada dengan rata-rata 70 persen. Jumlah penduduk yang tidak bekerja juga ada kecenderungan semakin menurun. Dengan demikian upaya-upaya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait perlu terus ditingkatkan.

#### 2.2.2.5. Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki keanekaragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Sejumlah kesenian, museum purbakala dan sejarah nilai budaya masih dapat ditemukan disetiap wilayah kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24. Potensi Seni budaya di Kabupaten Ogan Komering ilir

No	Kecamatan	Seni Budaya	Jenis
1	Kayuagung	Kesenian	Tari peguton, incang-incang, tari sabung ayam, tari cang-cang, tari kono mibor, tari cindo, tari perempuan kurungan, tari benang setungkal dan tari gurdan
		Museum	Rumah bari, makam ratu jimat, makam puyang buncit, makam seriang kuning,
		Sejarah nilai budaya	Midang morge siwe, mengarak haji, perahu jukung, legenda negeri silap, legenda putri rambut putih, legenda buluh cawang, gerabah adat perkawinan, mabak handuk dan bidar
2	Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam	Kesenian	Tari ngantak dan tari gopung
		Museum	Makam syeh, rumah seratus tiang, rumah adat pulau gemantung, masjid tua, rumah mantan pangeran bengkulah pulau gemantung
		Sejarah nilai budaya	Quran tua, beduk tua dan adat nyucuk
3	Pedamaran dan Pedamaran Timur	Kesenian	Tanjidor
		Sejarah nilai budaya	Rumah rakit, legenda siberanak dan sembilan muyang
4	Pampangan dan Pangkalan Lampam	Museum	Batu pengantin, batu lesung, bantu gajah dan bukit batu
		Sejarah nilai budaya	Legenda bukit batu
5	Tulung Selapan	Kesenian	Batanghari sembilan dan gamelan
		Museum	Makam panglima batu api, pemangku adat selapan
		Sejarah nilai budaya	Masjid alawiyah, masjid taqwa, legenda panglima batu api dan legenda puyang atung bungsu
6	Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur dan Air Sugihan	Kesenian	Reog, ludruk, sintren, wayang kulit, legog, tari pendet, kuda lumping, tayub, dan campur sari
		Sejarah nilai budaya	Legenda saman lempuing

Sumber, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI, 2018

Kesenian daerah kabupaten ogan komering ilir terus di lestarikan dengan modifikasi untuk meningkatkan daya kreasi masyarakat yang diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian. Pertumbuhan sanggar seni tidak terlalu pesat, namun menunjukkan adanya kegiatan seni yang berusaha dilestarikan masyarakat melalui penampilan kegiatan acara budaya berupa acara perayaan pernikahan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesenian daerah sebagai unsur penting dalam mempertahankan kerestarian budaya dan kesenian daerah yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun.

Tabel 2.25. Indikator seni budaya dan olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jumlah sanggar seni	Unit	41
2	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Unit	2
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	Unit	2

Sumber, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKI, 2018

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1. Pendidikan

Perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat dari keadaan pendidikan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah (APS), pendidikan anak usia dini, fasilitas pendidikan, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Tabel 2.26. Indikator Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 - 2017

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Angka Partisipasi Sekolah					
	SD	%	99,16	100,00	100	99,57
	SMP	%	87,53	91,50	86,39	88,62
	SMA	%	50,45	57,40	60,24	67,79
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	%	63,4	63,5	63,6	63,7
3.	Fasilitas Pendidikan					
	- Bangunan SD/MI Kondisi Baik	%	76,5	76,75	77	77,25
	- Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	%	78,80	78,85	78,90	78,45
	- Bangunan SMA/MA/SMK Kondisi Baik	%	89,75	89,80	89,85	89,90
4.	Angka Putus Sekolah (APS)					
	- APS SD/MI	%	0,48	0,47	0,46	0,45
	- APS SMP/MTs	%	0,55	0,53	0,52	0,50
	- APS SMA/MA/SMK	%	0,60	0,55	0,50	0,50
5.	Angka Kelulusan (AL)					
	- AL SD/MI	%	100	100	100	100
	- AL SMP/MTs	%	100	100	100	100
	- AL SMA/MA/SMK	%	99,5	99,5	99,5	99,5
6.	Angka Melanjutkan (AM)					
	- AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,20	89,30	89,40	89,50
	- AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	77,30	77,40	77,50	77,60
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	%	60,00	60,00	60,00	60,00
8.	Rasio Guru/murid	Per 10.000 murid				
	- SD/MI		0,21	0,227	0,157	0,059
	- SMP/MTs		0,419	0,266	0,208	0,083
	- SMA/MA/SMK		0,416	0,754	0,251	0,084

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan secara umum banyaknya anak kelompok umur tertentu bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Indikator ini sangat relevan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, yaitu dengan melihat APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) dan 13-15 tahun (usia SMP). Dengan adanya program wajib belajar tersebut seharusnya anak-anak usia 7-15 tahun sedang berada di bangku sekolah. Data pada Tabel 2.26 menunjukkan bahwa tahun 2017 APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai 99,57 persen. Sedangkan pada usia 13-15 tahun (usia SMP) APS sebesar 88,62 persen dan 16-18 tahun (usia SMA) sebesar 67,79 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun telah cukup berhasil namun belum sepenuhnya menjangkau anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun angka partisipasi sekolah penduduk semakin kecil sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini mudah dipahami, karena mereka yang memasuki usia produktif, dituntut partisipasinya dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin mahal pula kebutuhan biaya, Sehingga tidak semua penduduk mampu menjangkaunya. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah meningkatnya sarana pendidikan seperti sekolah dan meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, jumlah tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan SD/ MI pada tahun 2017 sebanyak 6.676 orang, untuk pendidikan SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 3.347 orang, untuk tenaga pendidik SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebanyak 2.237 orang. Peningkatan jumlah tenaga pendidik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pendidik yang bersertifikat sehingga dapat menghasilkan siswa siswi yang berkualitas dan berprestasi.

#### **2.3.1.2. Kesehatan**

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir 29 buah dan telah tersebar di 18 kecamatan. Selain itu pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh klinik swasta dan dokter praktek. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah adalah meningkatnya pelayanan kunjungan dan status gizi, sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada telah mencakup

seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penurunan indikator derajat kesehatan akan ditanggulangi dengan beberapa program dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan dokter siaga di wilayah maupun penambahan tenaga medis maupun anggaran perlindungan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.27. Indikator Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014 -2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	2,24	2,21	2,20	2,17
2.	Rasio dokter per satuan penduduk	9,6	7,5	14,39	7,29
3.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	55,81	53,34	59,25	51,9
4.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	76,6	70,1	73,5	66,42
5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,2	92,1	93,7	93,94
6.	Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,9	100	100	100
7.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,60	2,20	2,36	2,81
10.	Cakupan kunjungan bayi	95,9	96,7	88,5	97,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, 2018

Sejauh mana pengadaan berbagai fasilitas kesehatan telah mampu menjangkau seluruh masyarakat, bisa dilihat melalui beberapa ukuran atau rasio antara jumlah fasilitas kesehatan yang ada dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Keterbatasan sarana kesehatan yang ada, masih relatif sulitnya akses sebagian masyarakat pada sarana yang tersedia serta kesadaran kesehatan masyarakat yang rendah berdampak rendahnya kunjungan masyarakat pada sarana kesehatan. Tabel 2.28 memberikan informasi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan kunjungan ke tempat fasilitas kesehatan, dari tabel tersebut didapat ternyata di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2016 penduduknya lebih banyak mengunjungi puskesmas/pustu dan petugas kesehatan, dari tabel tersebut didapat bahwa persentase jumlah kunjungan ke fasilitas puskesmas/pustu sebanyak 26,32 persen dibandingkan dengan Rumah sakit yang hanya 6,99 persen.

Tabel 2.28. Persentase penduduk yang pernah berobat jalan menurut tempat berobat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014– 2017

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Rumah Sakit	2,47	8,63	6,99	7,40
2.	Praktek Dokter / Poliklinik	19,27	55,36	66,81	76,53
3.	Puskesmas / Pustu	17,05	35,10	26,32	19,96
4.	Petugas Kesehatan	53,36	-	-	-
5.	Praktek Tradisional	5,90	2,79	0,68	1,30
6.	Lainnya	1,44	0,38	0,17	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pergerakan perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya pada aksesibilitas arus transportasi jalan masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi rusak di tahun 2017 sebesar 29,53 persen dari total panjang jalan yang ada 2.037,106 km, hanya 31,83 persen kondisi jalan baik dan sisanya (38,63 persen) dalam kondisi sedang. Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak transportasi air yang digunakan masyarakat, seperti di Kecamatan Air Sugihan, Cengal dan Sungai Menang sekitar 70 persen masih menggunakan kendaraan air.

Tabel 2.29. Daftar panjang jalan menurut keadaan dan status jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun							
	2014		2015		2016		2017	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
<b>Jenis Permukaan Jalan</b>								
Aspal/Penetrasi Macadam	455,49	29,60	365,33	23,74	358,687	23,31	376,620	18,49
Beton	27,37	1,78	48,69	3,16	538,316	34,98	166,529	8,17
Telford/Kerikil	342,85	22,28	526,44	34,21	564,354	36,67	830,147	40,75
Tanah	713,16	46,34	598,42	38,89	77,512	5,04	663,810	32,59
Jumlah	1.538,87	100	1.538,869	100	1.538,869	100	2.037,106	100,00
<b>Kondisi Jalan</b>								
Baik	354,67	23,05	459,40	29,85	485,408	31,54	648,472	31,83
Sedang	561,37	36,48	561,85	36,51	578,118	37,57	787,035	38,63
Rusak Ringan	472,79	30,72	402,86	26,18	368,406	23,94	433,059	21,26
Rusak Berat	150,05	9,75	114,76	7,46	106,937	6,95	168,540	8,27
Jumlah	1.538,88	100	1.538,869	100	1.538,869	100	2.037,106	100

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

Adapun total panjang jaringan jalan berstatus di Kabupaten OKI pada tahun 2017 mencapai 2.225,81 km. Jaringan jalan tersebut terdiri atas jalan dengan status jalan nasional sepanjang 109,6 km (4,92%), jalan provinsi sepanjang 79,1 km (3,55%) dan jalan kabupaten sepanjang 2.037,11 km (91,53%) dengan kondisi kemandapan jalan 71,95 %.

Tabel 2.30 Kondisi Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten OKI Tahun 2017

No	Status Jalan	Panjang (km)	%	Kondisi mantap (km)	%
1.	Nasional	109,6	4,92	109,6	100
2.	Provinsi	79,1	3,55	56,5	71,43
3.	Kabupaten OKI	2.037,11	91,53	1.435,507	70,46
	Total	2.225,81	100	1.601,607	71,95

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten OKI, 2018

Wilayah Kabupaten OKI yang sebagian besar berupa rawa, maka infrastruktur sumber daya air yang ada yaitu infrastruktur jaringan irigasi rawa. Adapun kondisi jaringan irigasi rawa dengan kondisi rusak berat 44,36%, rusak sedang 24,53%, dan rusak ringan 14,92%

Tabel 2.31 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten OKI Tahun 2017

No.	Luas Daerah Irigasi Rawa (ha)	Kondisi Daerah Irigasi (ha)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1.	1.019	452	250	152

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten OKI, 2018

#### 2.3.1.4. Perumahan

Sumber air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat ini masih bertumpu pada air tanah dangkal, sungai dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung. Dimana pada tahun 2014 masih terdapat 57,84 persen rumah tangga menggunakan air yang tidak bersih, persentase atas pengguna air tidak bersih ini menurun pada tahun 2017 menjadi 38,17 persen. Persentase rumah tangga pengguna listrik terjadi peningkatan di tiap tahunnya, pada tahun 2017 persentase rumah tangga berlistrik sudah mencapai 97,08 persen. Untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak telah mencapai 68,19 persenn pada tahun 2017, sementara rumah tidak layak huni sebesar 8,01 persen.

Tabel 2.32. Indikator Perumahan

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki akses Air Bersih	42,16	57,08	59,75	61,83
2.	Persentase Rumah Tangga memiliki sumber Listrik	95,96	94,85	95,57	97,08
3.	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak /Jamban Sendiri	42,26	46,59	48,71	68,19
4.	Persentase Rumah tidak layak huni	11,77	9,42	7,18	8,01

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.1.5. Komunikasi dan Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Persentase penduduk yang memiliki telepon seluler mengalami peningkatan menjadi 51,54 persen, sementara penduduk yang mengakses internet baru mencapai 17,31 persen.

Tabel 2.33. Indikator teknologi informasi dan komunikasi

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki telepon	1,44	0,44	0,07	0,54
2.	Persentase Anggota Rumah Tangga memiliki telepon seluler	-	48,74	50,37	51,54
3.	Persentase Anggota Rumah Tangga mengakses internet	7,41	-	11	17,31

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.1.6. Lingkungan Hidup

Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program Adipura, sosialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*). Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos,

untuk sampah anorganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinya misal kantong plastik, dapat juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain-lain dapat juga langsung dijual ke pengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga timbunan sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang sampah tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.

Tabel 2.34. Indikator lingkungan hidup

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Penanganan sampah (%)	%	25,00	27,51	50,51	61,78
2.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	%	0,02	0,02	0,03	0,03
3.	Penegakan hukum lingkungan hidup (%)	%	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKI, 2018

Indeks Kualitas Lingkungan diperoleh melalui perhitungan akumulasi dari 30 persen Indeks Kualitas Air, 30 persen Indeks Kualitas Udara dan 40 persen Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 2.35. Perhitungan Indeks Kualitas lingkungan hidup

Penutupan Lahan (Tahun 2017)	Nilai Indeks	Bobot Indeks
Indeks Kualitas Air (IKA)	62,00	30 %
Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,79	30 %
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	33,20	40 %
Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) = 30% (IKA) + 30% (IKU) + 40% (ITL)	60,62	

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI 2018

Maka Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2017 : 30% (62,0) + 30% (95,79 + 40% (33,20) yaitu 60,62 (kurang).

Rentang nilai IKLH sbb :  
 Unggul : > 90  
 Sangat Baik :  $82 < x \leq 90$   
 Baik :  $74 < x \leq 82$   
 Cukup :  $66 \leq x \leq 74$   
 Kurang :  $58 \leq x \leq 66$   
 Sangat Kurang :  $50 \leq x \leq 58$   
 Waspada : < 50

### 2.3.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio penduduk usia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah yang berKTP persatuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 57,2 persen dari jumlah 776.263 jiwa dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 70,84 persen.

Tabel 2.36. Indikator Kependudukan

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	4,37	36,46	5,28	54,84
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	1,40	1,88	2,87	29,69
3.	Rasio pasangan berakte menikah	%	100	100	100	100
4.	Kepemilikan KTP	%	57,2	53,96	70,84	77,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan hanya dapat dilakukan apabila potensi sumber daya manusia telah berimbang antara pria dan wanita. Dalam pembentukan wanita yang dapat bersaing secara positif dengan pria tentu saja harus merubah pola pikir, dimana pada zaman dahulu pola pikir bahwa wanita hanya menjadi pendamping dan mengurus rumah tangga, tetapi juga harus berpikir maju bahwa wanita juga dapat berprestasi sama bahkan dapat melebihi prestasi pria. Peningkatan potensi sumber daya wanita tentu saja dapat dicapai melalui pendidikan yang cukup dan kesetaraan untuk mendapatkan hak yang sama dalam menuntut ilmu.

Dalam mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan politik. Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama baik bagi perempuan maupun laki laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI) angka partisipasi murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki laki.

Selain dilihat dari Indeks Paritas Gender (IPG) Angka Partisipasi Murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki, angka melek

huruf juga menjadi indikator pencapaian MDG's bagi tujuan ketiga, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun hampir mencapai sasaran MDG's. Pada tahun 2009, IPG nasional untuk melek huruf kelompok usia 15-24 tahun hampir mendekati angka 100, dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Namun, di 15 provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok usia ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki.

Tabel 2.37. Rasio APS perempuan terhadap Laki-Laki, IPG dan IDG di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 -2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio APS Perempuan terhadap Laki-Laki usia 7 - 12 tahun	1,01	1,02	1,00	0,19
2.	Rasio APS Perempuan terhadap Laki-Laki usia 13 - 15 tahun	0,97	0,98	1,09	0,65
3.	Rasio APS Perempuan terhadap Laki-Laki usia 16 - 18 tahun	1,14	0,90	0,77	0,96
4	Indeks pembangunan gender (IPG)	89,70	90,22	-	91,08
5	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	53,03	53,04	-	56,08

Sumber : Kemen PPPA dan BPS, 2018

### 2.3.1.9. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terjadi peningkatan persentase koperasi aktif dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Peningkatan persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sebesar 83,11 persen yang sebelumnya pada tahun 2014 hanya 80,12 persen selama 4 tahun terakhir peningkatan koperasi aktif rata-rata sebesar 2,99 persen. Usaha Mikro dan Kecil setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2014 sebanyak 9.770 usaha mikro dan kecil sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 10.233 usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.38. Indikator koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koperasi	Unit	342	400	413	421
2.	Jumlah anggota koperasi	Orang	70.012	72.537	76.173	78.727
3	Persentase koperasi aktif	%	80,12	80,75	80,87	83,11
4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	9.770	8.212	9.280	10.233
5.	Jumlah tenaga kerja di industri kecil	Orang	4.246	4.651	4.633	5.439

Sumber : Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

Tabel 2.39. Jumlah industri kecil menurut kelompok industri kecil (unit) Kabupaten OKI

No.	Kecamatan	Industri pangan	Industri sandang & kulit	Industri kerajinan	Industri logam & jasa industri	Industri kimia & Bhn bangunan
1	Lempuing	-	21	-	-	18
2	Lempuing Jaya	-	-	290	-	38
3	Mesuji	-	-	-	-	-
4	Sungai Menang	-	-	-	-	-
5	Mesuji Makmur	-	-	-	-	-
6	Mesuji Raya	-	-	-	-	-
7	Tulung Selapan	41	-	388	-	-
8	Cengal	16	-	-	-	-
9	Pedamaran	25	-	417	-	-
10	Pedamaran Timur	-	-	-	-	-
11	Tanjung Lubuk	46	-	-	-	-
12	Teluk Gelam	46	-	-	1	16
13	Kayuagung	18	6	77	-	32
14	Sirah Pulau Padang	25	-	-	-	-
15	Jejawi	6	9	-	-	-
16	Pampangan	27	-	185	-	-
17	Pangkalan Lampam	-	-	-	-	-
18	Air Sugihan	88	-	-	-	-
	Tahun 2017	338	36	1.357	1	104
	2016	335	36	1.218	1	104
	2015	328	35	1.213	1	104
	2014	318	35	1.050	1	104

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. OKI, 2018

### 2.3.1.10. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan karena tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Secara umum, TPAK perempuan jauh lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal ini disebabkan karena TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah dirinya maupun keluarganya. TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya pendidikan wanita, terbukanya kesempatan kerja bagi wanita, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat seperti pandangan terhadap wanita yang bekerja. Sebaliknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan cenderung

lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Kondisi ini disebabkan karena kesempatan kerja perempuan lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 – 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	- Laki-Laki	89,00	81,81	81,81	84,61
	- Perempuan	58,91	50,08	50,08	54,07
2	Tingkat Pengangguran				
	- Laki-Laki	10,85	14,78	14,78	3,74
	- Perempuan	2,53	7,71	7,71	2,97

Sumber : Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

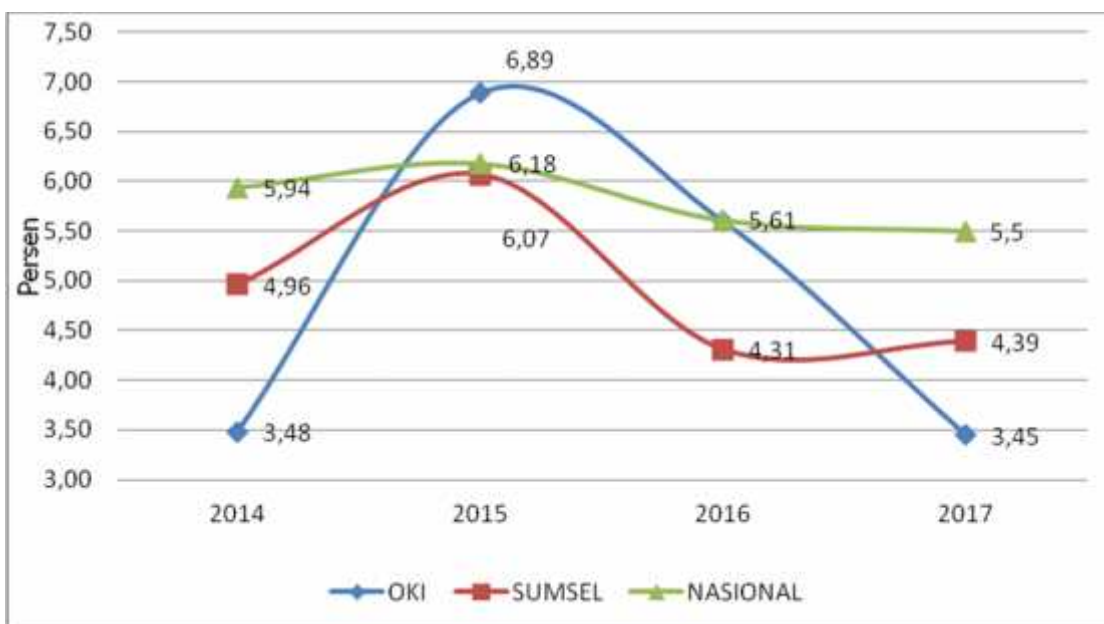
Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 sebanyak 575.868 orang. Jumlah angkatan kerja diperkirakan sebanyak 401.335 orang, terdiri dari 249.256 orang angkatan kerja laki-laki dan 152.079 orang angkatan kerja perempuan. Jumlah angkatan kerja dirinci menurut kegiatannya adalah sebanyak 387.495 orang bekerja dan 13.840 orang pengangguran (sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja). Dengan kata lain tingkat kesempatan kerja sebesar 69,01 persen dan tingkat pengangguran sebesar 3,45 persen. Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor primer sebagai ciri perekonomian daerah perdesaan merupakan pekerjaan yang dominan dilakukan oleh penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada tahun 2016 sekitar 65,08 persen penduduk bekerja di sektor primer (pertanian). Sektor sekunder (pertambangan, industri, listrik, dan bangunan) menyerap sekitar 7 persen tenaga kerja, sedangkan sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa) menyerap hampir 27,92 persen tenaga kerja.

Kinerja angka pengangguran di suatu daerah dapat menjadi tolok ukur untuk melihat sejauhmana kemajuan ekonomi di suatu daerah. Dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2017 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami tren yang berfluktuasi. Tahun 2015 adalah tahun di mana tingkat pengangguran tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama periode tersebut, yaitu sebesar 6,89 persen. Namun, di tahun 2017 tingkat pengangguran turun

cukup signifikan menjadi 3,45 persen yang merupakan tingkat pengangguran terendah selama periode tahun 2014-2017.

Kinerja tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami tren berfluktuasi selama periode tahun 2013 hingga 2017 ternyata sejalan dengan tren perkembangan tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan nasional yang juga mengalami tren berfluktuasi. Tahun 2015 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan nasional mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2014). Adanya peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup relevan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Peningkatan secara bersama-sama pada setiap tingkatan wilayah mengindikasikan bahwa setiap level pemerintahan menghadapi persoalan yang sama terhadap rendahnya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja yang ada. Hal demikian merupakan imbas dari pertumbuhan ekonomi yang melambat selama beberapa tahun terakhir. Kinerja tingkat pengangguran dapat dilihat pada Gambar 7.10.

Gambar 2.10. TPAK Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2014-2017



Sumber: Statistik Indonesia 2016-2018, 2016-2018; dan Buku Saku Data dan Indikator Sosial Sumatera Selatan 2006-2017, 2018 Keterangan: Data Tahun 2016 tidak tersedia untuk tingkat kabupaten/kota

berdasarkan Gambar 2.10, diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami penurunan dari periode waktu sebelumnya ternyata relevan dengan kinerja tingkat nasional yang juga menurun. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak relevan

jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan. Di sisi lain, tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan nasional masing-masing sebesar 4,39 persen dan 5,50 persen.

## 2.3.2. Fokus Urusan Pilihan

### 2.3.2.1. Perikanan

perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengingat luas wilayah yang 75 persen tergenangi oleh air, yang menjadi tempat berkembangnya ikan, baik untuk budidaya ikan maupun perikanan tangkap. Produksi ikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 sebesar 26.005,40 ton terdiri dari produksi perikanan perairan laut sebesar 18.423,92 ton dan perikanan tangkap 7.581,48 ton

Tabel 2.41. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Kabupaten OKI

No.	Kecamatan	Perairan Laut	Perairan Umum	Jumlah
1	Lempuing	-	16,60	16,60
2	Lempuing Jaya	-	621,44	621,44
3	Mesuji	-	20,10	20,10
4	Sungai Menang	6.041,30	271,86	6.313,16
5	Mesuji Makmur	-	-	-
6	Mesuji Raya	-	162,77	162,77
7	Tulung Selapan	3.210,84	623,51	3.834,35
8	Cengal	8.447,60	346,99	8.794,59
9	Pedamaran	-	642,69	642,69
10	Pedamaran Timur	-	52,14	52,14
11	Tanjung Lubuk	-	227,45	227,45
12	Teluk Gelam	-	19,19	19,19
13	Kayuagung	-	921,11	921,11
14	Sirah Pulau Padang	-	894,25	894,25
15	Jejawi	-	805,77	805,77
16	Pampangan	-	1.591,33	1.591,33
17	Pangkalan Lampam	-	119,28	119,28
18	Air Sugihan	724,18	245,00	969,18
Jumlah Tahun 2017		18.423,92	7.581,48	26.005,40
Tahun 2016		15.593,59	6.955,63	22.549,22
Tahun 2015		20.954,56	11.800,82	32.755,38
Tahun 2014		21.109,72	11.801,51	32.911,23

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk peningkatan pendapatan daerah. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi obyek wisata, seperti Danau teluk gelam yang pernah dijadikan lokasi pertandingan cabang olahraga sky air dan lomba dayung pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2004 di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 2.42. Obyek wisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Kecamatan	Wisata Alam
1	Kayuagung	Lebak teloko, sungai komering, dan pantai love
2	Lempuing dan Lempuing jaya	Pemandangan sawah, Perkebunan sawit dan karet
3	Pedamaran dan Pedamaran Timur	Areal Persawahan dan perkebunan, teluk / danau rasau, dan desa menang raya
4	Tanjung Lubuk dan Teluk Gelam	Danau teluk gelam dan area persawahan
5	Pampangan dan Pangkalan Lampam	Bukit batu, lebak deling, pulau hantu, pulau bayas, pulau napo
6	Tulung Selapan	Kuala lebung itam, kuala sungai sibur, kuala sungai pasir, hutan mangrove, dan pulau maspari
7	Cengal	Pantai sungai lumpur

Sumber : Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKI

### 2.3.2.3. Pertanian

Pada tahun 2017 luas lahan pertanian adalah sebesar 178.025 hektar, terdiri dari 173.538 hektar lahan pertanian sawah dan 4.487 hektar lahan pertanian bukan sawah. Dari keseluruhan luas lahan, yang paling luas adalah lahan rawa lebak sebesar 118.129 hektar. Dilihat dari sub sektor tanaman pangan, produksi padi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 mencapai 819.206, dengan luas panen sebesar 165.347 hektar, terdiri dari 811.862 ton padi sawah dan 7.344 ton padi bukan sawah. Dengan angka tersebut, maka produktivitas padi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 adalah sebesar 4,95 ton per hektar.

Empat daerah penghasil padi terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Air Sugihan dan Tanjung Lubuk. Pada tahun 2017 luas panen tanaman padi di kecamatan lempuing jaya seluas 19.375 hektar dengan produksi padi mencapai 96.798 ton, kecamatan Lempung Jaya seluas 21.298 hektar dengan produksi padi mencapai 106.403 ton, kecamatan Tanjung Lubuk seluas 25.263 hektar dengan produksi padi mencapai 126.213 ton dan

kecamatan Air Sugihan seluas 25.119 hektar dengan produksi padi mencapai 128.136 ton.

Tabel 2.43. Luas panen dan produksi padi per kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang			Jumlah		
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1. Lempuing	18.925	19.375	96.798	-	-	-	18.925	19.375	96.798
2. Lempuing Jaya	20.759	21.298	106.403	-	513	1.324	20.759	21.811	107.727
3. Mesuji	2.036	4.405	22.006	-	-	-	2.036	4.405	22.006
4. Sungai Menang	12.399	8.844	44.187	-	-	-	12.399	8.844	44.187
5. Mesuji Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Mesuji Raya	2.973	3.533	17.650	-	87	225	2.973	3.620	17.875
7. Tulung Selapan	3.291	2.478	12.382	-	-	-	3.291	2.478	12.382
8. Cengal	3.898	8.743	10.256	-	-	-	3.898	8.743	10.256
9. Pedamaran	8.413	9.215	43.682	-	-	-	8.413	9.215	43.682
10. Pedamaran Timur	964	270	1.349	-	121	312	964	391	1.661
11. Tanjung Lubuk	29.026	25.263	126.213	-	-	-	29.026	25.263	126.213
12. Teluk Gelam	4.717	4.702	23.491	-	-	-	4.717	4.702	23.491
13. Kayuagung	4.442	4.442	22.194	-	-	-	4.442	4.442	22.194
14. Sirah Pulau Padang	11.570	11.789	58.897	-	-	-	11.570	11.789	58.897
15. Jejawi	9.272	8.309	41.512	-	-	-	9.272	8.309	41.512
16. Pampangan	10.706	10.488	52.399	-	5	13	10.706	10.493	52.412
17. Pangkalan Lampam	2.843	862	4.307	-	-	-	2.843	862	4.307
18. Air Sugihan	27.304	25.648	128.136	4.487	2.119	5.470	31.791	27.767	133.606
Jumlah 2017	173.538	162.502	811.862	4.487	2.845	7.344	178.025	165.347	819.206
2016	161.021	162.611	720.504	3.577	11.247	31.874	164.598	173.858	752.378
2015	150.218	132.641	612.690	11.136	6.026	11.312	161.354	138.667	624.002
2014	120.436	119.087	544.906	6.011	12.377	23.137	126.447	131.460	568.043

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

Kontribusi sub sektor perkebunan khususnya tanaman keras mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh rakyat yang arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar. Komoditi yang dicakup meliputi antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pinang, kopi, kapuk, aren, dan kakao. Luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2017 sebesar 181.706 hektar dengan jumlah produksi 339.757 ton seperti tertera pada

Tabel 2.42. Sedangkan luas areal perkebunan besar pada tahun 2015 sebesar 111.312 hektar dengan jumlah produksi 138.667 ton (Tabel 2.39).

Tabel 2.44. Luas areal dan produksi perkebunan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				Produksi		Jumlah Petani/ (KK)
		Tanaman belum menghasilkan	Tanaman menghasilkan	Tanaman tua/Tanaman rusak	Jumlah	Ton	Rata-Rata (Kg/Ha)	
1	Karet	30.189	111.507	14.797	156.493	144.346	1,29	61.161
2	Kelapa Sawit	3.490	17.817	114	21.421	193.749	10,87	12.028
3	Kelapa	464	1.249	599	2.312	1.156	0,93	9.669
4	Lada	62	26	5	93	9	0,36	304
5	Pinang	53	206	25	284	59	0,29	688
6	Kopi	2	527	278	807	347	0,66	2.506
7	Kapuk	3	42	8	53	8	0,19	376
8	Aren	13	71	4	88	26	0,37	265
9	Kakao	31	124	1	156	58	0,47	345
Jumlah 2017		34.307	131.568	15.831	181.706	339.757	2,58	87.342
2016		41.651	121.841	17.644	181.136	299.508	2,46	87.868
2015		41.109	117.073	16.676	174.858	329.985	2,82	84.973
2014		34.033	103.795	16.009	153.837	184.369	1,78	59.823

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

Tabel 2.45. Luas areal perkebunan besar menurut komoditas tahun 2017

Komoditas		Jumlah (ha)	Produksi(Ton)
1	Kelapa Sawit	176.796,87	1.735.317,57
	- Inti	115.243,93	885.064,01
	- Plasma	61.552,94	850.253,56
2	Karet		
	- Inti	8.948,76	-
	- Plasma	-	-

Sumber : Data Sektoral Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

Populasi ternak yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini letaknya tersebar di 18 kecamatan, adapun jumlah populasi ternak yang ada dan sebarannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, disajikan pada Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel 2.46. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (Ekor) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017

No	Kecamatan	Jenis Ternak			
		Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Lempuing	5.504	69	5.773	449
2.	Lempuing Jaya	3.274	91	1.340	384
3.	Mesuji	1.402	61	1.898	33
4.	Sungai Menang	396	217	2.761	28
5.	Mesuji Makmur	962	-	944	-
6.	Mesuji Raya	3.450	62	4.159	516
7.	Tulung Selapan	1.068	172	1.539	246
8.	Cengal	1.080	288	2.953	120
9.	Pedamaran	2.216	787	1.825	40
10.	Pedamaran Timur	1.228	198	650	204
11.	Tanjung Lubuk	576	61	1.218	437
12.	Teluk Gelam	1.135	31	1.735	65
13.	Kayuagung	739	11	1.735	35
14.	Sirah Pulau Padang	94	27	1.532	-
15.	Jejawi	954	638	1.668	-
16.	Pampangan	1.444	5.418	1.898	93
17.	Pangkalan Lampam	1.689	2.949	1.898	87
18.	Air Sugihan	1.074	70	1.583	233
Jumlah 2017		28.285	11.150	37.109	2.970
2016		26.745	10.997	36.564	2.940
2015		26.246	10.337	35.349	2.269
2014		22.480	9.354	24.107	1.193

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, 2018

Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa terhadap perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 67,77 persen, di ikuti oleh sektor perkebunan sebesar 36,78 persen, tanaman pangan sebesar 18,94 persen, dan perikanan sebesar 16,81 persen. Secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.42 kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 67,92 persen sedangkan pada tahun 2017 sebesar 67,77 persen.

Tabel 2.47. Indikator sektor pertanian

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016*	2017**
1.	Produktivitas padi	ton/ha	4,3	4,5	4,3	4,9
2.	Produktivitas karet	ton/ha	1,77	1,74	1,28	-
3.	Produktivitas kelapa sawit	ton/ha	15,27	14,6	10,81	-
4.	Sumbangan sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa pertanian terhadap PDRB	%	67,92	65,25	66,96	67,77
5.	Sumbangan tanaman pangan terhadap PDRB	%	14,62	16,30	19,36	18,94
6.	Sumbangan tanaman Hortukultura terhadap PDRB	%	2,70	2,79	3,10	3,39
7.	Sumbangan tanaman perkebunan terhadap PDRB	%	42,95	37,96	35,80	36,78
8.	Sumbangan peternakan dan hasilnya terhadap PDRB	%	5,99	6,37	6,92	7,04
9.	Sumbangan tanaman kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB	%	15,71	17,57	15,36	15,42
10.	Sumbangan perikanan terhadap PDRB	%	16,37	17,17	17,68	16,81

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

#### 2.3.2.4. Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/ pendistribusian tanpa mengubah sifat barang. Sub sektor perdagangan dalam perhitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu sektor tersier memberikan kontribusi terbesar ketiga yaitu mencapai 9,88 persen selama kurun waktu 5 tahun

Tabel 2.48. Indikator Perdagangan

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7,59	8,82	9,49	9,88
2.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	29,85	24,78	23,49	21,53
3.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/	%	70,15	75,22	76,51	78,47
4	Jumlah sarana perdagangan (pasar, toko, kios, warung)	unit	3.225	3.242	3.262	3.202

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

### 2.3.2.5. Perindustrian

Gerak pertumbuhan sektor industri pengolahan berkaitan erat dengan kemajuan perekonomian suatu daerah atau negara. Hal ini dikarenakan salah satu ciri kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai dengan berkurangnya peranan sektor primer (pertanian) dan meningkatnya peranan sektor industri. Sektor industri pengolahan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu sub sektor industri pengolahan migas dan sub sektor industri pengolahan non migas. Sektor industri di Kabupaten Ogan Komering Ilir sepenuhnya berasal dari industri non migas, karena belum ditemukan industri migas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sub sektor Industri non migas tetap menjadi harapan agar menjadi sektor primadona pada masa-masa yang akan datang. Sebab, proses industrialisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Seperti halnya di negara-negara maju, biasanya sektor industri dan jasa memegang peranan dan kontribusi yang cukup dominan dalam perekonomiannya. Kriteria utama pembangunan adalah kenaikan pendapatan per kapita yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi. Dalam mengembangkan sektor industri, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap industri kecil, menengah, dan industri kerajinan rumah tangga. Sebab Industri ini menyangkut perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, disamping juga relatif stabil terhadap pengaruh faktor-faktor dari luar negeri.

Nilai tambah sub sektor industri non migas sebagian besar masih dihasilkan dari industri makanan, minuman dan tembakau, pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 88,78 persen, disusul kemudian oleh

industri barang kayu dan hasil hutan lainnya yang memiliki kontribusi 3,83 persen.

Tabel 2.49. Indikator perindustrian

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4,87	5,55	6,39	7,24
2	Kontibusi industri makanan, minuman dan tembakau terhadap PDRB	%	80,79	83,95	86,83	88,78
3	Kontibusi industri barang kayu dan hasil hutan lainnya terhadap PDRB	%	7,11	6,10	4,84	3,83
4	Pertumbuhan industry	%	6,97	7,41	10,86	12,06

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

## 2.4. Aspek Daya Saing

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Data besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Sehingga untuk mempermudah pengumpulan data pendapatan dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 880.795,- per bulan, yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 503.453,- dan non makanan sebesar Rp. 377.343,-. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pengeluaran perkapita makanan sebulan terbesar tahun 2016 digunakan untuk membeli bahan pangan padi yaitu Rp. 59.677,-. Sementara pengeluaran perkapita non makanan digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.50. Indikator Pengeluaran Per Kapita

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Pengeluaran rata-rata per kapita kelompok barang makanan	Rp	122.321	250.000	436.397	503.453
2.	Pengeluaran rata-rata per kapita kelompok barang non makanan	Rp	61.852	379.630	297.684	377.343
3.	Rata-rata konsumsi per kapita per bulan	Rp.	564.729	629.630	734.082	880.795
4.	Ketersediaan energi dan protein Per Kapita	Energi (kkal/kpt/hr)	2.006,44	2.096,96	2.131,13	2.276,33
		Protein (gram/kpt/hr)	55,29	55,59	55,75	61,42

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

Jenis dan jumlah bank dan cabang didalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 28 unit pada tahun 2014 dan terjadi peningkatan sebanyak 7 unit pada tahun 2017. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel pada tahun 2014 sebanyak 23 unit sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 30 unit.

Tabel 2.51. Indikator Pendukung daya saing

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah bank dan cabang	Unit	28	35	35	35
2	Jumlah penginapan/hotel	Unit	23	25	29	30
3.	Jumlah restoran/rumah makan	Unit	124	124	124	127

Sumber : BPS Kabupaten OKI, 2018

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1. Perhubungan

Pada tahun 2017 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 0,104 dimana setiap 104 meter terdapat 1 kendaraan yang melintas, sedangkan jumlah orang/ barang yang terangkut oleh angkutan umum pada tahun 2017 sebesar 0,006 unit per orang dimana jumlah angkutan darat sebesar 7.089 unit jumlah penumpang angkutan darat sebesar 1.064.700 orang. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada cabang-cabang Dinas LLAJR menurut jenis kendaraan (Unit) pada tahun 2017 berjumlah 5.355 unit kendaraan, dan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 berjumlah 33. Jumlah Dermaga dan tambahan perahu (Unit) di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2017 berjumlah 25 unit yang terdiri dari 6 Unit Dermaga dan 19 Unit Tambatan Perahu yang tersebar di 7 kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 2.52. Indikator Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Rasio jumlah angkutan darat (load factor)	%	50,18	35,17	47,58	60,11
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	org	937.300	694.200	889.200	1.144.000
3	Jumlah dermaga sungai, pelabuhan udara, terminal bis	Lokasi/unit	16	19	21	33

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten OKI, 2018

#### **2.4.2.2. Penataan Ruang**

Penataan ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Tujuan dari penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, memiliki infrastruktur yang memadai dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033, telah disusun rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kawasan khususnya kawasan strategis Kabupaten (KSK) yakni:

1. RDTR kawasan strategis kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Lokasi kawasan di Eks. Transmigrasi Gajah Mati Kecamatan Sungai Menang;
2. RDTR kawasan Penyangga metropolitan Palembang tahun 2015. Lokasi kawasan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Jejawi, SP. Padang, Pampangan, dan Kota Kayuagung;
3. RDTR kawasan strategis cepat tumbuh Agropolitan tahun 2015. Lokasi kawasan di Desa Surya Adi dan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuj;
4. RDTR kawasan Minapolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2016. Lokasi kawasan di Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang.
5. RDTR kawasan Penyangga kawasan Industri tahun 2016. Lokasi kawasan di Desa Bukit Batu dan Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan.
6. Penataan Ruang Agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 yang disusun melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kawasan meliputi Desa Lubuk Makmur dan Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Tugu Jaya, Tugu Agung, Mekar Jaya, Tugu Mulyo, Tulung Harapan, Sindang Sari, Bumi Agung, Cahaya Maju, Desa Tebing Suluh dan Desa Cahaya Tani Kecamatan Lempuing.

Selanjutnya secara teknis melalui APBN (Satker PBL) telah disusun Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) di beberapa kawasan strategis Kabupaten yakni :

1. RTBL kawasan Penyangga Kota Palembang Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Kawasan RTBL meliputi Desa Terusan Menang, Terate, Sirah Pulau Padang dan Desa Serdang Menang Kecamatan SP. Padang.
2. RTBL kawasan Cagar Budaya Kota Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014. Kawasan RTBL meliputi Kelurahan Mangun Jaya, Sidakersa, dan Kelurahan Jua-Jua.

Dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang, didasarkan pada kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Ogan Komering Ilir cukup signifikan hal ini di tunjukan dengan adanya permintaan *advice planning* atau rekomendasi kesesuaian dengan tata ruang oleh pemangku kepentingan. Pada tahun 2014 ketataan terhadap RTRW sebesar 100 persen, menurun pada tahun 2015 menjadi 95 persen, menurun lagi pada tahun 2017 sebesar 90 persen. Adapun pengurusan IMB dari masyarakat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen terlayani.

Tabel 2.53. Indikator Kinerja Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RTBL	Dok	2	3	2	-
2	Ketersediaan Perda RTRW	Dok	1	1	1	1
3	Persentase Layanan IMB	%	100	100	100	100
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	100	95	92	90

Sumber Data : OPD Kabupaten OKI, 2018

### 2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh fungsi penunjang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : administrasi pemerintahan, perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan.

Struktur pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai Perda Kabupaten OKI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, didukung 35 perangkat daerah yaitu 1 Setda dengan 12 bagian, 1 Setwan dengan 4 bagian, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 24 Dinas dan 7 Badan serta 18 Kecamatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2017 sebanyak 8.416 orang yang terdiri dari tenaga administrasi 3.541 orang dan tenaga pendidik/guru 4.875 orang, dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 3.053 orang (36%), D1/D3 sebanyak 2.608 orang (31%), dan S1/D4 sebanyak 2.366 orang (28%). Sementara jika dilihat dari tingkat kepangkatan golongan maka PNS memiliki kepangkatan golongan II sebanyak 1.843 orang (22%), golongan III sebanyak 4.389 orang (52%) dan golongan IV sebanyak 2.146 orang (25%)

Tata kelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tergolong baik. Hal ini diindikasikan oleh opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi belanja tidak langsung yang masih lebih besar dari alokasi belanja langsung.

Penyediaan layanan publik berkualitas yang lebih cepat, lebih mudah yang ditandai dengan penerapan SOP pelayanan serta keterbukaan informasi. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel diharapkan dapat menjadi stimulan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi.

Tabel 2.54. Indikator fungsi penunjang

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Indeks reformasi birokrasi	54,26	55,75	56,5	55,95
2	Nilai SAKIP	C (50,11)	C (41,97)	CC (47,14)	CC (51,84)
3.	Nilai LPPD	T	T	ST	ST
4.	Indeks kepuasan masyarakat	75,36	76,10	76,30	78,29
5	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : OPD Kabupaten OKI, 2018

#### 2.4.4. Fokus iklim berinvestasi

Dalam rangka peningkatan perekonomian maka iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga dan pendapatan daerah. Pemerintah daerah memberikan

kemudahan dan kenyamanan bagi pengusaha dan investor sehingga dapat terus meningkatkan iklim investasi.

Beberapa indikator yang mendukung iklim investasi diantaranya tingkat kriminalitas, Jumlah perizinan yang dikeluarkan, Penegakan Perda perizinan dan Rata-rata lama Proses Perizinan. Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya berdampak terciptanya lapangan kerja melainkan juga stabilitas harga dan peningkatan pajak sebagai pendapatan pemerintah.

Angka kriminilitas merupakan gangguan ketertiban umum, semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan rendahnya tingkat keamanan suatu daerah sehingga akan berdampak pada turunnya iklim investasi pada tahun 2017 terdapat 881 kasus. Perkembangan jumlah izin usaha mengalami penurunan akibat perlambatan kegiatan ekonomi nasional pada tahun 2017 telah dikeluarkan sebanyak 497 izin.

Tabel 2.55. Indikator investasi

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Angka kriminalitas	Kasus	1234	1274	1328	881
2	Jumlah perizinan yang dikeluarkan	Buah	516	421	687	497
3	Penegakan Perda perizinan	%	100	100	100	100
4	Rata-rata lama Proses Perizinan	Hari	7	7	3	3

Sumber : BPS Kab.OKI dan Data Sektoral Perencanaan Pembangunan Kabupaten OKI, 2018

## 2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ogan Komering Ilir

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan indonesia maka capaian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pembangunan sosial, Pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan tata kelola pelaksanaan.

Kabupaten OKI telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 yang diselaraskan dengan RPJMD tahun 2019-2024, gambaran umum capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2.56. Capaian SDG's Kabupaten OKI Tahun 2017

Tujuan	Target TPB	No.	Indikator	Capaian OKI (2017)	Target Provinsi	Target Nasional	Status Capaian
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
			Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	15,75	12,27	10,64	Belum
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	8,21	7,77	6,02	Belum
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	0,9	12,3		Tercapai
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	87,70			
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)				
			Jumlah Kematian Ibu	2	165	305	Tercapai
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	2	48	40	Tercapai
			3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	2	98	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	51	190	395	Tercapai	

Tujuan	Target TPB	No.	Indikator	Capaian OKI (2017)	Target Provinsi	Target Nasional	Status Capaian
	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	77,60	65,67		Tercapai
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern.	16,02	9,9		Belum
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	112,96	112,14	108,50	tercapai
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	89,42	89,09	90,23	Belum
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,45	8,41		Belum
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuh anak usia dini, pengasuh, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	91,02	67,77	67,51	Tercapai
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan / laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan /laki-laki di SD/MI/ sederajat	95,94	99,55	99,7	Belum
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan /laki-laki di SMP/ MTs/sederajat	121,88	105,1	104,9	Tercapai
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan /laki-laki di SMA/ SMK/MA/sederajat	118,17	113,15	105,54	Tercapai
			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.	129,23			
	4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98,09	99,85(15-24) 99,45(15-59)	99,9(15-24) 99,47(15-59)	Belum

Tujuan	Target TPB	No.	Indikator	Capaian OKI (2017)	Target Provinsi	Target Nasional	Status Capaian
Tujuan 5. Kesetaraan Gender	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,07	0,02		Belum
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	95,00			
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	77,73	53,54	72,04	Tercapai
			Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.				
	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.				
Persentase rumah tinggal yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	62,12		51,06	67,20	Belum		
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	97,08	87,61	91,16	Belum
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.				
			Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	3,47	3,63	3,7	Belum
		8.1.1.(a)	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	31,137	46.420	47.957	Belum
	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				
			Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	14,23*	4,50	2,80	Tercapai
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,45	4,39	5,50	Tercapai	
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	45,69	9,46	7,55	Belum	
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita				
			Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB (%)	5,39	19,52	18,2	Belum

	kurang berkembang.		Nilai tambah sektor industri manufaktur perkapita (Rupiah)	1.219.346			
Tujuan	Target TPB	No.	Indikator	Capaian OKI (2017)	Target Provinsi	Target Nasional	Status Capaian
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.				
			Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	12,06	7,06		Tercapai
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).				
			Jumlah limbah B3 yang terkelola (Ton)	1.156			
		Proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	0,60				
	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	17.089			
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah				
			Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah	-			
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,05	0,19	Lk 38,62 Pr 20,48	Tercapai
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100	100		Tercapai
		16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	70,00	79,65	22,14	Belum
	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.			8,89	11,08	14	Belum	
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	86,91	88,16		Belum

	bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
<b>Tujuan</b>	<b>Target TPB</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian OKI (2017)</b>	<b>Target Provinsi</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Status Capaian</b>
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB				
			Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	0,15	0,74		Belum



# *Bab III*

## *Gambaran Keuangan Daerah*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan data dan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya tiga tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa lima tahun mendatang.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis Keuangan masa lalu sangat penting untuk merancang keuangan masa depan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sementara itu, neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan diuraikan sebagai berikut :

##### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan, belanja langsung dan tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi dan tantangan ke depan. Secara umum gambaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna.

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat laju pertumbuhan pendapatan daerah dilihat dari perkembangannya dengan menggunakan data realisasi pendapatan lima tahun kebelakang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1  
Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017  
(dalam milyar)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.577,43</b>	<b>1.653,38</b>	<b>1.979,25</b>	<b>2.120,35</b>	<b>10,55</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>145,59</b>	<b>110,23</b>	<b>108,99</b>	<b>222,96</b>	<b>26,38</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	80,46	34,19	21,85	37,27	
1.1.2.	Retribusi Daerah	6,75	5,49	6,33	4,89	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,55	6,77	7,34	7,10	
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	57,82	63,78	73,47	173,70	
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.279,11</b>	<b>1.255,13</b>	<b>1.472,01</b>	<b>1.493,74</b>	<b>5,62</b>
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	259,08	158,13	126,27	144,87	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	931,16	959,00	1.050,00	1.042,87	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	88,87	138,00	295,74	306,00	
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah</b>	<b>152,73</b>	<b>288,03</b>	<b>379,61</b>	<b>403,65</b>	<b>42,23</b>
1.3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	17,41	16,15	88,29	121,56	
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan otonomi daerah	0,00	3,00	39,25	7,50	
1.3.3.	Bantuan Keuangan dari Pusat	30,99	6,14	40,87	7,20	
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	104,34	262,73	211,20	267,39	
1.3.5.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	0,00	0,00	0	0	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir , 2018

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kenaikan pada Tahun 2017 yakni sebesar 7,13 persen dari Rp 1.979.249.631.381,- pada Tahun 2016 menjadi Rp 2.120.350.526.972,- pada Tahun 2017 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.577.431.308.218,- menjadi Rp. 1.653.377.720.792 pada tahun 2015 dengan kenaikan sebesar 4,81 persen dalam perkembangannya selama 4 (empat) tahun terakhir realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, secara keseluruhan menghasilkan rata – rata pertumbuhan pendapatan sebesar 10,55 persen.

Kontribusi terbesar untuk pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dari Dana Perimbangan dengan rata – rata proporsi kontribusinya terhadap pendapatan adalah 5,62 persen, dengan kondisi dimana pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sangat bergantung kepada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK

## **b. Belanja Daerah**

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit untuk diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan. Sedangkan, belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah periode tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017  
(dalam milyar)

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.490,46</b>	<b>1.745,36</b>	<b>1.979,33</b>	<b>2.108,71</b>	<b>12,35</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>711,32</b>	<b>859,31</b>	<b>993,30</b>	<b>1.196,38</b>	<b>18,95</b>
2.1.1.	Belanja pegawai	621,03	691,88	692,86	744,89	6,35
2.1.2.	Belanja Subsidi	1,23	1,31	1,35	1,35	3,07
2.1.3.	Belanja Hibah	8,76	3,89	12,67	54,94	167,83
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	3,32	0,99	1,10	0,00	-53,12

2.1.5.	Belanja Bagi Hasil	31,18	28,88	74,94	126,76	73,75
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan	45,72	132,19	210,38	268,41	91,95
2.1.7.	Belanja tidak terduga	0,08	0,18	0,00	0,04	11,30
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>779,15</b>	<b>886,05</b>	<b>986,04</b>	<b>912,33</b>	<b>5,84</b>
2.2.1.	Belanja pegawai	25,49	28,95	28,29	34,29	10,83
2.2.2.	Belanja barang dan jasa	308,65	382,95	396,76	399,43	9,45
2.2.3.	Belanja modal	445,00	474,15	560,99	478,61	3,39

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2014 – 2017 berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi realisasi belanja ini dipengaruhi oleh fluktuasi realisasi pendapatan yang disajikan pada tabel 3.1. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada Tahun 2017 senilai Rp 2.108.707.748.851,-. Sedangkan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2014 senilai Rp 1.490.462.394.601,-. Secara keseluruhan, rata – rata pertumbuhan per tahun belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2014 – 2017 sebesar 12,35% dengan rata – rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 18,95 persen dan rata – rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 5,84 persen. Bila ditinjau dari proporsi belanja daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, persentase komponen Belanja Langsung Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sangat rendah yakni sebesar 5,84 persen, dimana pertumbuhan realisasi untuk masing-masing belanja pegawai sebesar 10,83 persen, belanja barang dan jasa sebesar 9,45 persen dan Belanja Modal yakni sebesar 3,39 persen.

### **c. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah selama periode 2014-2017 sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena faktor pembayaran hutang (*carry over*) dana bagi hasil yang tidak jelas setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan perencanaan pembiayaan untuk tahun selanjutnya menjadi bias. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah periode tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2017  
(dalam jutaan)

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13,23</b>	<b>110,56</b>	<b>9,06</b>	<b>8,26</b>	<b>211,62</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	3,91	70,04	9,04	8,17	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,05	0,02	0,02	0,10	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	9,28	40,51	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>29,06</b>	<b>9,54</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>81,10</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	6,00	4,60	1,00	5,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	23,06	4,94	0,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(15,82)</b>	<b>101,02</b>	<b>8,06</b>	<b>3,26</b>	<b>(296,62)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>71,14</b>	<b>9,04</b>	<b>7,97</b>	<b>14,75</b>	<b>(4,69)</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

### 3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2015-2017 dan rata-rata pertumbuhannya disajikan pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2017  
(dalam jutaan)

No	Uraian	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.1.	<b>ASET</b>				
1.1.1	Kas di kas Daerah	3.059,14	1.881,97	2.029,50	(10,21)
1.1.2	Kas Dibendahara Penerimaan	-	1,69	0,75	-
1.1.3	Kas Bendahara Pengeluaran	1.736,58	1.740,05	767,47	(18,56)
1.1.4	Kas diBadan Layanan Umum Daerah	2.063,02	1.215,04	4.911,36	87,70
1.1.5	Kas di bendahara FKTP	2.177,27	3.132,43	6.217,37	47,45
1.1.6	Kas di Bendahara Dana Bos APBN	42,92	786,22	845,98	579,83
1.1.7	Kas di Bendahara PSG	2,90	106,03	71,60	1.176,30
1.1.8	Kas Lainnya		-	8,39	-
1.1.9	Kas dan setara Kas				
1.1.10	Inventasi Jangka pendek	-	-	-	-
1.1.11	Piutang Pajak Daerah	15.515,84	17.589,28	19.444,48	7,97
	- Penyisihan Piutang Pajak	(6.450,54)	(8.017,77)	(10.186,85)	17,12
	- Piutang Pajak Netto	9.065,30	9.571,51	9.257,63	0,77
1.1.12	Piutang Retribusi Daerah	347,28	348,92	347,28	0,00
	- Penyisihan Piutang Retribusi	(347,28)	(347,28)	(347,28)	-
	- Piutang Retribusi Netto	-	1,64	-	-
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
1.1.14	Piutang Trasfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.532	-	-	-
1.1.15	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	128.434,78	107.392,06	67.799,81	(17,75)
	- Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(575,95)	-	-	-
	- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	127.858,83	107.392,06	67.799,81	(17,62)
1.1.16	Penyisihan Piutang	-	-	-	
1.1.17	Belanja Dibayar Dimuka	327,85	334,32	347,28	1,95
1.1.18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	376,51	370,19	386,03	0,87
	- Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(138,97)	(118,66)	(70,79)	(18,32)
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	237,54	251,53	315,23	10,41
1.1.19	Bagian Lancar tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	
1.1.20	Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi	264,71	923,15	126,02	54,13
	- Penyisihan Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi	(104,90)	(105,59)	(60,27)	(14,09)
	- Bagian Lancar Tuntunan Ganti Rugi Netto	159,81	817,57	65,75	106,54
1.1.21	Piutang Lainnya	8.086,34	2.679,23	2.561,73	(23,75)
	- Penyisihan Piutang Lainnya	(1.869,18)	(2.247,98)	(2.400,48)	9,02
	- Piutang Lainnya Netto	6.217,16	431,25	161,25	(51,89)
1.1.22	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	24.476,22	30.553,15	33.457,76	11,44
	- Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	(871,08)	(1.976,68)	(1.332,63)	31,45
	- Piutang Lain - Lain PAD yang Sah Netto	23.605,13	28.576,47	32.125,13	11,16
1.1.23	Persediaan	12.320,98	9.681,73	11.492,51	(0,91)
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>163.929,51</b>	<b>139.119,90</b>	<b>101.772,86</b>	<b>(10,37)</b>

<b>1.2</b>	<b>INVENTASI JANGKA PANJANG</b>				
1.2.1	Inventasi Non Permanen		-	-	-
	- Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-	-
	- Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-	-
	- Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-	-
	- Pinjaman Jangka Panjang		-	-	-
	- Investasi Dalam Surat Utang Negara		-	-	-
	- Investasi dalam Proyek Negara		-	-	-
	- Investasi Dana Bergulir		-	-	-
	- Inventasi Non Permanen Lainnya	4.484,17	-	-	-
	- Inventasi Non Permanen yang diragukan tertagih	(2.146,26)			

1.2.2	Inventasi Permanen	-			
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	125.785,13	125.856,18	105.744,74	(5,31)
	- Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>128.123,04</b>	<b>125.856,18</b>	<b>105.744,74</b>	<b>(5,92)</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>				
1.3.1	Tanah	179.604,17	183.354,08	320.937,59	25,71
1.3.2	Peralatan dan Mesin	411.217,06	432.116,61	439.103,95	2,23
1.3.3	Gedung dan Bangunan	958.445,44	952.234,19	992.603,16	1,20
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.516.552,99	2.698.544,87	2.920.667,23	5,15
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	36.730,20	69.838,04	81.085,88	35,41
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	295,46	3.609,60	-	340,56
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.305.963,35)	(1.582.569,99)	(1.795.610,20)	11,55
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.796.881,96</b>	<b>2.757.127,40</b>	<b>2.958.787,60</b>	<b>1,96</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>				
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>				
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	<b>1.077,46</b>	<b>911,70</b>	<b>745,94</b>	(11,19)
	- Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	- 53,87	- 4,56	- 4,06	(34,18)
	- Tagihan Penjualan Angsuran Netto	1.023,59	907,14	741,88	(9,86)
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
	- Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
	- Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	-	-
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<b>68.736,14</b>	-	-	-
	- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(12.170,32)	-	-	-
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto	56.565,82	-	-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	<b>509,40</b>	<b>509,40</b>	-	(33,33)
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	(509,40)	(509,40)	-	(33,33)
	- Aset Tak Berwujud Netto	-	-	-	-
1.5.5	Aset Lain - Lain	<b>4.139,16</b>	<b>371.814,35</b>	<b>387.379,61</b>	2962,35
	- Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	(107.103,60)	(116.994,70)	
	- Aset Lain-lain Netto	4.139,16	264.710,75	270.384,90	2099,14
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>61.728,57</b>	<b>265.617,89</b>	<b>271.126,78</b>	<b>110,79</b>
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>2.858.610,82</b>	<b>3.022.745,55</b>	<b>3.229.914,59</b>	<b>3,01</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	8,18	-
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	58,42	77,06	151,54	42,85
2.1.6	Utang Belanja				
2.1.7	Utang Beban	29.561,86	58.532,35	52.559,53	29,27
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	45.538,00	160.642,94	50.894,84	61,48
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>75.158,28</b>	<b>219.252,35</b>	<b>103.614,08</b>	<b>46,33</b>
<b>2.2.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
2.2.2	Utang Luar Negeri				
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,10</b>	<b>46,33</b>

<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang				
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan				
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek				
3.1.5	Pendapatan yang ditangguhkan				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang				
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)				
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang				
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>3.102.982,04</b>	<b>3.095.270,61</b>	<b>3.368.462,06</b>	<b>2,86</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.178.140,31</b>	<b>3.314.522,96</b>	<b>3.472.076,14</b>	<b>3,01</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

Analisis terhadap data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio quick merupakan perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban jangka pendek.

#### 2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio total utang terhadap total aset merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset. Sedangkan rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan total utang dengan total ekuitas.

Hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas periode tahun 2015-2017 tersaji pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5  
Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Uraian	2015	2016	2017
A	<b>Rasio Likuiditas</b>			
1.	Rasio Lancar (Current Ratio)	2,55	0,76	1,32
2.	Rasio Quick (Quick Ratio)	2,38	0,71	1,21
B	<b>Rasio Solvabilitas</b>			
1.	Rasio total utang terhadap total aset	0,02	0,07	0,03
2.	Rasio utang terhadap modal	0,02	0,07	0,03

Sumber : Hasil Analisis

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga berpedoman Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perpaduan dari beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam implementasinya kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari dana perimbangan pusat - daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian/otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri agar mampu mendanai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit-unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana Perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya penting yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Melakukan kajian peningkatan pendapatan melalui PBB jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung-Palembang.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2014-2017 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2017, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat

perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaiki sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah. Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

#### **b. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017 dan mempedomani dokumen perencanaan RKPD, serta dibahas secara bersama sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan, kebijakan umum belanja daerah pada periode Tahun 2014-2017 adalah:

1. Peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.
2. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan infrastruktur dasar, perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial,
4. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tukar petani, melalui fasilitasi usaha/industri olahan, baik skala rumah tangga, kecil, dan menengah.
5. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja perangkat daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*). Kebijakan belanja yang dilakukan tidak berdasarkan

pengalokasian anggaran yang didasarkan pada fungsi masing-masing urusan (*money follow function*) tetapi pengalokasian anggaran didasarkan pada program prioritas (*money follow program priority*). Tidak semua tugas dan fungsi dibiayai secara merata.

Disamping kebijakan belanja yang dituangkan dalam RPJMD, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempedomani kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, diantaranya:

1. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
2. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan kinerja kegiatan pembangunan.
3. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang meliputi penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, mencapai pendidikan dasar yang berkualitas, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, akses energi yang terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, pemukiman yang layak, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
4. Percepatan penurunan prevalensi stunting meliputi 10 desa di 5 kecamatan.

### **c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada dan kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang memiliki resiko terkecil dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Menjadikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk air minum.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran proporsi penggunaan anggaran periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, diuraikan sebagai berikut:

#### a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran periode tahun 2015-2017 pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6  
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2017  
(dalam milyar)

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>									
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>907,08</b>	<b>859,31</b>	<b>94,73</b>	<b>1.133,56</b>	<b>993,30</b>	<b>87,63</b>	<b>1.390,91</b>	<b>1.196,38</b>	<b>86,01</b>
2.1.1	Belanja pegawai	736,59	691,88	93,93	825,29	692,86	83,95	931,99	744,89	79,92
2.1.3	Belanja Subsidi	1,35	1,31	97,09	1,35	1,35	99,99	1,35	1,35	100
2.1.4	Belanja Hibah	4,26	3,89	91,3	13,54	12,67	93,58	57,57	54,94	95,43
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,11	0,99	46,92	1,54	1,10	71,43	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	28,88	28,88	100	79,28	74,94	94,52	130,95	126,76	96,8
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	133,14	132,19	99,28	211,81	210,38	99,32	268,56	268,41	99,94
2.1.8	Belanja tidak terduga	0,75	0,18	23,39	0,75	-	-	0,50	0,04	8,05
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>974,92</b>	<b>886,05</b>	<b>90,88</b>	<b>1.254,78</b>	<b>986,04</b>	<b>78,58</b>	<b>1.013,76</b>	<b>912,33</b>	<b>89,99</b>
2.2.1	Belanja pegawai	30,76	28,95	94,09	36,39	28,29	77,73	36,77	34,29	93,28
2.2.2	Belanja barang dan jasa	415,07	382,95	92,26	474,70	396,76	83,58	436,32	399,43	91,55
2.2.3	Belanja modal	529,09	474,15	89,62	743,69	560,99	75,43	540,67	478,61	88,52

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

#### b. Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan pada tabel 3.7 berikut ini.

No	Uraian	2014	2015	2016	2017

		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	610.653,93	675.819,71	676.069,56	689.786,54
2.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan	7.977,00	10.500,56	11.350,51	46.094,70
2.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	746,76	3.801,60	4.168,42	7.417,11
2.1.1.05.01	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.204,50	1.537,21	1.003,42	1.445,91
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
2.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	22.382,56	25.126,68	23.676,61	20.699,21
2.2.1.02	Belanja Uang Lembur	988,00	993,40	753,42	283,43
2.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi	854,66	686,11	776,94	763,08
2.2.1.05	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	7.919,81	9.473,90	8.892,00	9.078,50
2.2.1.06	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.999,34	397,25	1.085,36	1.450,68
2.2.1.08	Belanja sarana mobilitas	519,45	1.047,38	928,67	4.469,45
2.2.1.10	Belanja sarana perlengkapan dan peralatan kantor	1.027,52	1.735,29	2.940,11	2.634,52
2.2.1.11	Belanja makanan dan minuman	13.695,22	11.137,16	34.095,58	13.045,46
2.2.1.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.094,13	1.875,23	1.541,55	3.390,35
2.2.1.14	Belanja pakaian Khusus dan pakaian hari hari tertentu	2.264,85	2.453,30	2.594,03	1.865,44
2.2.1.15	Belanja perjalanan dinas	49.021,52	61.980,31	78.692,97	82.309,04
2.2.1.16	belanja beasiswa pendidikan PNS	180,00	240,00	#VALUE!	350,00
2.2.1.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.093,83	1.705,14	2.251,58	1.725,25
2.2.1.20	Belanja pemeliharaan	19.815,20	30.286,22	23.780,57	27.280,91
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>444.998,10</b>	<b>474.153,71</b>	<b>560.990,40</b>	<b>473.963,60</b>
	<b>Total</b>	<b>1.189.436,37</b>	<b>1.314.950,15</b>	<b>1.435.591,68</b>	<b>1.388.053,18</b>

Tabel 3.7  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 – 2017  
(dalam jutaan)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

Berdasarkan tabel 3.7 di atas diperoleh proporsi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014– 2017  
(dalam milyar)

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase 3/4 x 100%
1	2	3	4	5
1	2014	1.189	1.520	78,27
2	2015	1.315	1.755	74,93
3	2016	1.436	1.980	72,49
4	2017	1.388	2.114	65,66

Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2014-2017 pemenuhan kebutuhan aparatur alokasi belanja untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur persentasenya relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik dan diharapkan belanja untuk pelayanan publik lebih meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya, Efektivitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan kondisi defisit riil anggaran dan penutup defisit riil anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir periode tahun 2014-2017 tersaji pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9  
Penutup Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014– 2017  
(dalam jutaan)

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah				
	Dikurangi Realisasi :	1.577,43	1.653,38	1.979,25	2.120,19
2	Belanja Daerah				
	Transfer bantuan Keuangan				268.413,09
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.059,30	9.541,32	1.000,00	5.000,00
<b>A</b>	<b>Defisit Riil</b>				
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :	86.968,91	(91.984,40)	(77.428,36)	11.483,97
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	71.143,94	9.036,01	7.971,18	14.747,70
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Peminjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	46,00	20,00	20,00	96,35
6	Penerimaan Piutang Daerah	9.279,21	40.506,69	77.343,25	0,00
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	15.824,97	101.020,41	85.399,26	3.263,73
<b>A+B</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	71.143,94	9.036,01	7.970,91	14.747,70

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

Pada tabel 3.9 di atas terlihat pembiayaan Kabupaten Ogan Komering Ilir bersifat sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2015 kas daerah terdapat sisa anggaran (SILPA) sampai dengan Rp. 9.036.007.627,- begitu juga tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 7.970.905.849,-. Tahun 2017 kondisi sisa lebih pembiayaan daerah sebesar 14.747.700.886,-. Untuk menutupi pembiayaan tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
(dalam jutaan)

No	Uraian	Proporsi dari Defisit Riil					
		2015		2016		2017	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya	70.035,04	0,00	9.036,01	0,00	8.167,38	0,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20,00	0,00	20,00	0,00	96,35	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	40.506,69	0,00	-	-	-	0,00
7	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	9.036,01	0,00	7.971,18	0,00	14.772,64	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

Kemudian analisis terakhir yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) periode tahun 2014-2017 tersaji pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
(dalam jutaan)

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1	Jumlah SILPA	71.143,94	0,00	9.036,01	12,70	7.970,91	88,21	14.747,70	185,02	(79,27)
2	Pelampauan Penerimaan PAD	1.178,18	0,00	24.485,04	34,4	-	-	-	-	1978,21
3	Pelampauan penerimaan Dana perimbangan	-	-	500,00	0,7	-	-	-	-	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	4.240,29	46,93	-	-	
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	2.730,94	0,00	45.250,00	63,6	4.795,72	53,07	-	-	75,61
6	Kewajiban Kepada pihak ketiga s.d Akhir tahun belum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	terselesaikan									
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ogan Komering Ilir 2018

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mendapatkan proyeksi pendanaan lima tahun kedepan dilakukan analisis proyeksi data masa lalu yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke belakang. Dari analisis rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak konsisten atau dinamis. Hal ini disebabkan dari faktor eksternal terutama dari pendapatan dana perimbangan. Bila dilihat untuk pertumbuhan realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014-2017 hanya tumbuh sekitar 10,88% karena pergerakan yang fluktuatif.

Sebagai bahan pertimbangan proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun kedepan selain melihat rata-rata pertumbuhan juga mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan di sektor keuangan. Untuk proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2024 diasumsikan pertumbuhan setiap tahunnya sekitar 7,6%. Secara lengkap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019-2024 *(dalam jutaan)*

No	URAIAN	PROYEKSI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,403,175</b>	<b>2,828,145</b>	<b>2,985,597</b>	<b>3,093,107</b>	<b>3,277,572</b>	<b>3,459,896</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>190,197</b>	<b>211,366</b>	<b>233,803</b>	<b>243,954</b>	<b>256,383</b>	<b>269,446</b>
1.1.1	Pajak Daerah	40,643	42,674	44,808	47,048	49,401	51,871
1.1.2	Retribusi Daerah	4,178	4,386	4,605	4,836	5,077	5,331
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,254	7,616	7,997	8,397	8,817	9,258
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138,123	156,690	176,393	183,673	193,088	202,986
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,692,275</b>	<b>2,070,042</b>	<b>2,177,720</b>	<b>2,246,375</b>	<b>2,388,272</b>	<b>2,525,887</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	247,371	259,739	272,726	286,362	300,681	315,715
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,083,057	1,430,364	1,506,058	1,541,131	1,647,764	1,748,354
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	361,847	379,939	398,936	418,882	439,827	461,818
<b>1.3</b>	<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>520,703</b>	<b>546,737</b>	<b>574,074</b>	<b>602,778</b>	<b>632,917</b>	<b>664,563</b>
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	86,475	90,798	95,338	100,105	105,110	110,365
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,699	35,383	37,152	39,010	40,961	43,009
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	5,495	5,769	6,058	6,361	6,679	7,013
1.3.6	Pendapatan Lainnya	395,035	414,787	435,526	457,302	480,167	504,176
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,419,909</b>	<b>2,838,077</b>	<b>2,995,529</b>	<b>3,103,039</b>	<b>3,287,504</b>	<b>3,469,828</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,421,207</b>	<b>1,492,093</b>	<b>1,566,560</b>	<b>1,644,751</b>	<b>1,726,851</b>	<b>1,813,056</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	964,417	1,012,638	1,063,270	1,116,433	1,172,255	1,230,868
2.1.2	Belanja Subsidi	1,761	1,849	1,942	2,039	2,141	2,248
2.1.3	Belanja Hibah	13,366	14,000	14,700	15,435	16,206	17,017
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3,135	3,292	3,456	3,629	3,811	4,001
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	140,954	148,001	155,401	163,171	171,329	179,896
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294,824	309,564	325,042	341,294	358,359	376,277
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750

No	URAIAN	PROYEKSI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>998,702</b>	<b>1,345,984</b>	<b>1,428,969</b>	<b>1,458,288</b>	<b>1,560,653</b>	<b>1,656,772</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	(16,733)	(9,932)	(9,932)	(9,932)	(9,932)	(9,932)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>17,733</b>	<b>10,932</b>	<b>10,932</b>	<b>10,932</b>	<b>10,932</b>	<b>10,932</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	14,773	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
3.2.2	Penyertaan modal (inventasi) pemerintahan daerah	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
	<i>Pembiayaan Netto</i>	16,733	9,932	9,932	9,932	9,932	9,932
	SILPA Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis

Proyeksi pendapatan dan belanja ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar dari pendapatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sama seperti periode RPJMD sebelumnya. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi harus ditingkatkan penerimaannya, dikarenakan kebijakan dana transfer pemerintah pusat menyesuaikan dengan penerimaan negara.

Dalam menentukan proyeksi SiLPA pada periode tahun 2019-2024 menggunakan data SiLPA pada periode sebelumnya. Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik, sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal sebesar 0,3 % dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana disajikan pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13  
Proyeksi SILPA  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019- 2024  
(dalam jutaan)

No	URAIAN	KONDISI AWAL 2018	PROYEKSI					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	7.971	14.773	7.971	7.971	7.971	7.971	7.971

Sumber : Hasil Analisis

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2019-2024, Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengankondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dari penganggaran setiap tahunnya, Selengkapny secara indikatif tersaji pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14  
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan  
 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2019- 2024  
 (dalam jutaan)

NO	URAIAN	PROYEKSI						
		Kondisi Awal 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	2,231,343	2,403,175	2,828,145	2,985,597	3,093,107	3,277,572	3,459,896
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)							
3	Penerimaan pembiayaan (Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dan penerimaan kembali pemberian pinjaman)	10,932	17,733	10,932	10,932	10,932	10,932	10,932
	Total penerimaan	2,242,275	2,420,908	2,839,077	2,996,529	3,104,039	3,288,504	3,470,828
	Dikurangi :							
4	Belanja Tidak langsung	1,499,929	1,421,207	1,492,093	1,566,560	1,644,751	1,726,851	1,813,056
5	Pengeluaran pembiayaan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2,239,775	998,702	1,345,984	1,428,969	1,458,288	1,560,653	1,656,772

Sumber : Hasil Analisis

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan pengeluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksudkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3.15  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024  
(dalam jutaan)

NO	URAIAN	Kondisi Awal APBD	PROYEKSI					Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.239.315</b>	<b>2,420,908</b>	<b>2,839,077</b>	<b>2,996,529</b>	<b>3,104,039</b>	<b>3,288,504</b>	<b>3,470,828</b>
1	Pendapatan	2.231.344	2,403,175	2,828,145	2,985,597	3,093,107	3,277,572	3,459,896
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	10.932	17,733	10,932	10,932	10,932	10,932	10,932
<b>B</b>	<b>BELANJA + PEMBIAYAAN</b>	<b>2,330,385</b>	<b>2,420,909</b>	<b>2,839,251</b>	<b>2,996,529</b>	<b>3,104,039</b>	<b>3,288,504</b>	<b>3,470,828</b>
	<b>BELANJA</b>	<b>2,329,385</b>	<b>2,419,909</b>	<b>2,838,251</b>	<b>2,995,529</b>	<b>3,103,039</b>	<b>3,287,504</b>	<b>3,469,828</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,490,999</b>	<b>1,421,207</b>	<b>1,492,130</b>	<b>1,566,599</b>	<b>1,644,791</b>	<b>1,726,893</b>	<b>1,813,100</b>
a	Belanja Pegawai	1,002,835	964,417	1,012,638	1,063,270	1,116,434	1,172,255	1,230,868
b	Belanja Subsidi	1,761	1,761	1,849	1,941	2,038	2,140	2,247
c	Belanja Hibah	13,333	13,366	14,035	14,736	15,473	16,247	17,059
e	Belanja Bantuan Sosial	1,635	3,135	3,292	3,456	3,629	3,811	4,001
f	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	126,945	140,954	148,001	155,401	163,171	171,330	179,897
g	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	254,509	294,824	309,565	325,043	341,296	358,360	376,278
h	Belanja Tidak Terduga	750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>838,386</b>	<b>998,702</b>	<b>1,345,983</b>	<b>1,428,970</b>	<b>1,458,288</b>	<b>1,560,653</b>	<b>1,656,772</b>
	<b>PRIORITAS I (Belanja Rutin PD)</b>	<b>-</b>	<b>190,084</b>	<b>252,282</b>	<b>248,792</b>	<b>255,008</b>	<b>267,794</b>	<b>280,020</b>
	<b>PRIORITAS II (Belanja Urusan PD)</b>	<b>-</b>	<b>808,618</b>	<b>1,093,701</b>	<b>1,180,178</b>	<b>1,203,280</b>	<b>1,292,859</b>	<b>1,376,752</b>
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda ke BUMD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa Belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping pengelolaan belanja sejak proses perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek, efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow* program prioritas) dan kebutuhan.

Selanjutnya, ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah berdasarkan prioritas. Prioritas dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16. Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I dan II) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Kelompok prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum kelompok prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada pada capaian visi misi daerah.

Tabel 3.16  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024  
(dalam jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	kapasitas riil kemampuan keuangan	998,702	1,345,984	1,428,969	1,458,288	1,560,653	1,656,772
1	Prioritas I	190,085	252,282	248,792	255,008	267,794	278,820
2	Prioritas II	808,604	1,093,701	1,180,178	1,203,280	1,292,859	1,376,752

Sumber : Hasil Analisis





# *Bab IV*

## *Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH**

Analisis terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lima tahun terakhir terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disamping itu terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah mengakibatkan tidak semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga memerlukan pemilahan dan penentuan skala prioritas permasalahan atau tantangan yang mendesak untuk diatasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Namun demikian, permasalahan atau tantangan yang tidak menjadi prioritas utama bukan berarti tidak diatasi oleh pemerintah daerah akan tetapi secara operasional tetap menjadi perhatian sepanjang memiliki pengaruh terhadap kinerja yang telah dicapai di masa lalu dan berpengaruh terhadap standar pelayanan bagi masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis harus melibatkan stakeholder kabupaten, provinsi dan pusat agar terjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar pusat dan daerah.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan terutama program pengembangan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, Pembangunan Pertanian, Pengembangan ekonomi lokal dan beberapa program/kegiatan lainnya yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kabupaten, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah dilaksanakan selama 2014-2017 selain membawa kemajuan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga menyisakan berbagai permasalahan yang harus diatasi secara terencana, terukur dan tuntas. Permasalahan pembangunan daerah di Ogan Komering Ilir yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2019-2024) adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan**

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengupayakan reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Perubahan pola pikir dan kebiasaan serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

##### **4.1.1.1. Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN**

Reformasi birokrasi yang berjalan tidak seiring dengan tuntutan efisiensi pelaksanaan manajemen menjadi salah satu kendala

penerapan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan kinerja pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam bentuk kelembagaan maupun non kelembagaan masih belum optimal. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan telah dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Penyebab lambannya upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan pada masing-masing PD dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) / Inspektorat dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit.

#### 4.1.1.2. Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kinerja birokrasi berdasarkan kelembagaan belum optimal sesuai harapan dan ini tercermin dari kinerja Perangkat Daerah yang masih rendah. Hal ini disebabkan dukungan kualitas tenaga teknis masih rendah, terdapat tumpang tindih kewenangan pada beberapa PD, sistem perencanaan dan pelaporan yang belum optimal, proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

#### 4.1.1.3. Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi. Beberapa unit pelayanan publik belum menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik adalah Sumber Daya Manusia dan kapasitas aparatur yang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus ditingkatkan.

#### 4.1.1.4. Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan, ini ditunjukkan dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang sebesar 10,51 persen pada tahun 2017, sementara jika dilihat dari rasio pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah maka nilainya hanya 1,98 persen. Permasalahan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah adalah kurangnya kajian mengenai potensi dan kualitas aparatur pemungut.

#### 4.1.1.5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa sebanyak 314 dari 327 desa/kelurahan memiliki APB Desa lebih kurang satu milyar membutuhkan kemampuan teknis aparat pemerintah desa mengelola keuangan desa, sehingga alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan desa dalam bidang infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat.

### 4.1.2. Infrastruktur Dasar

Permasalahan penyediaan infrastruktur dasar antara lain :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan dan jembatan yang belum memadai mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa.
  - Karakteristik wilayah terbagi menjadi wilayah barat berupa dataran sedang dan wilayah timur berupa satuan geomorfik rawa dan sungai mencapai 75 persen. Pembangunan dan perbaikan akses transportasi darat di kawasan timur membutuhkan alokasi

dana yang besar, kondisi tanah rawa yang labil mempercepat kerusakan jalan

- Kondisi jalan menuju sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang kurang baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi jalan rusak pada tahun 2017 sepanjang 601.599 km atau sebesar 29,53 persen.
  - Kapasitas jalan yang ada tidak mampu menampung beban yang melebihi tonase (*overloading*) dalam mobilisasi barang sehingga dalam siklus tahunan jalan telah mengalami kerusakan, karena kapasitas jalan kabupaten tidak mampu dilalui oleh kendaraan bertonase besar yang mengangkut hasil perkebunan.
  - Sarana prasarana transportasi sungai di wilayah timur belum memadai seperti perahu, kapal, dermaga, tambatan perahu dan rambu
  - Integrasi antar moda transportasi darat di wilayah barat untuk mendukung aksesibilitas transportasi sungai di wilayah timur.
  - Belum berfungsinya terminal di Kota Kayuagung dalam mendorong kegiatan perekonomian, karena saat ini dikelola pemerintah pusat
2. Jangkauan aliran listrik belum mencapai seluruh desa di wilayah pesisir timur dan pasokan daya listrik yang ada masih kurang dan tidak stabil, sehingga diperlukan adanya gardu induk yang saat ini sedang dibangun di kayuagung
- Rasio desa berlistrik telah mencapai 90,63 persen yang didukung listrik PLN, genset dan pembangkit listrik tenaga surya sistem komunal
  - Rasio Rumah tangga yang telah menggunakan listrik 63,83 persen
3. Penyediaan air bersih yang masih kurang di wilayah pesisir timur
- Cakupan layanan air bersih telah mencapai 65,9 persen, sementara rumah tangga pengguna air bersih mencapai 64,26 persen. Kecamatan yang belum terlayani instalasi air minum adalah kecamatan lempuing jaya, kecamatan sungai menang, kecamatan mesuji makmur, kecamatan mesuji raya, kecamatan cengal, kecamatan pedamaran timur dan kecamatan air sugihan. Kecamatan cengal dan kecamatan air sugihan termasuk

kecamatan rawan air, karena wilayahnya dipengaruhi intrusi air asin dan hujan yang rendah

4. Masih adanya rumah tinggal belum bersanitasi di wilayah peisisir timur dan sepanjang aliran sungai
  - Proporsi rumah tangga yang memiliki jamban sendiri baru mencapai 68,17 persen, sisanya sekitar 31,83 persen rumah tangga membuang limbahnya langsung ke sungai atau rawa lebak, kondisi ini akan mencemari aliran sungai sebagai air baku untuk air bersih.
5. Masih perlunya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi teknis dan non teknis di wilayah lebak
  - Potensi sumber daya alam yang paling besar adalah pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Wilayah pertanian terbagi menjadi wilayah dataran rendah yang memerlukan irigasi teknis dan wilayah rawa / lebak irigasi non teknis

#### **4.1.3. Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan ditandai dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu 7,01 tahun pada tahun 2017. Kondisi ini relevan dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk sebagian besar adalah tamatan SD/ sederajat yaitu 40,06 persen pada tahun 2017. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan faktor angka putus sekolah yang masih tinggi, yang dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga angka partisipasi kasar SMA/ sederajat masih rendah yaitu 73,50 persen dan angka partisipasi murni SMA/ sederajat yaitu 57,95 pada tahun 2017.

Hasil sensus pengukuran SPM dikdas menunjukkan bahwa sebagian indikator dan sub indikator pencapaiannya belum optimal. Kesenjangan terkait dengan penyediaan sarana prasarana (kebutuhan ruang kelas, laboratorium IPA, meja, kursi, papan tulis, buku dan lain-lain), pemenuhan sumber daya manusia (pendidik dan pengawas sekolah yang belum berkualifikasi S1 dan atau akta IV, belum memiliki sertifikat profesi). Permasalahan pendidikan yang masih belum tertangani yaitu:

1. Kondisi ruang kelas yang terbatas dan mengalami kerusakan.
2. Kondisi sarana meja, kursi dan papan tulis yang terbatas dan mengalami kerusakan.
3. Masih terbatasnya sarana penunjang buku teks mata pelajaran dan peralatan laboratorium IPA
4. Belum terpenuhinya pemerataan dan kualifikasi akademik serta kompetensi tenaga pendidikan.

#### **4.1.4. Kesehatan**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan masih tingginya angka kematian ibu (2 jiwa), bayi (33 jiwa) dan balita (33 jiwa) pada tahun 2017, selain itu masih terdapat kasus balita gizi kurang (0,88 persen) dan balita gizi buruk (0,01 persen). Adapun permasalahan kesehatan yaitu:

1. Kinerja pelayanan kesehatan belum optimal terutama desa yang relatif jauh dan tertinggal dari pusat pelayanan kesehatan, yang menyebabkan masih terdapatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.
2. Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita yang mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah dua tahun.
3. Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat.
5. Masih terbatasnya tenaga spesialis dan teknis dalam mendukung pelayanan Rumah Sakit maupun Puskesmas.
6. Belum optimalnya peran dan fungsi, serta masih rendahnya kualitas Posyandu dengan persebaran strata yang tidak merata.
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana yang semakin memadai serta kapasitas SDM tenaga kesehatan yang berkualitas.
8. Belum optimalnya partisipasi semua lapisan masyarakat dalam menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum.
9. Kemandirian peserta KB masih rendah.

#### **4.1.5. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi sorotan baik di level nasional maupun daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih cukup tinggi, pada tahun 2017 sebesar 15,75 persen atau 127.060 jiwa diatas angka kemiskinan provinsi sebesar 13,19 persen.

Dari hasil pemetaan permasalahan dan perumusan akar masalah faktor pembentuk kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang paling mendasar adalah penyediaan infrastruktur dasar yang masih kurang dan belum merata, ketenagakerjaan dan sumber mata pencaharian masyarakat yang masih belum mantap. Penyebab dan tantangan kemiskinan setelah dilakukan identifikasi dan perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Daya beli masyarakat yang rendah dikarenakan menurunnya harga komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk terus mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
3. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program penanganan kemiskinan yang diupayakan belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat.
4. Belum adanya keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur.
5. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum fokus, masih sektoral dan belum terpadu.
6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar

#### **4.1.6. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam antara lain

1. Pengelolaan lahan pertanian belum optimal
  - Kawasan pertanian sawah tadah hujan dikecamatan lempuing dan lempuing jaya sudah dialiri pengairan irigasi teknis yang memungkinkan untuk penanaman padi 2 – 3 kali setahun
  - Kawasan pertanian lahan sawah lebak dioptimalkan dengan pembuatan pintu air dan jaringan tersier
  - Kawasan pertanian sawah pasang surut dikembangkan untuk penanaman 2 kali setahun
2. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) pengolahan hasil sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian sebagai komoditas unggulan.
  - Produksi hasil pertanian tanaman pangan masih dikirim ke daerah lain belum dilakukan pengolahan lebih lanjut
3. Pengembangan perikanan budidaya air tawar belum optimal
  - Potensi wilayah yang sebagian besar perairan sangat tepat menjadi sentra produksi perikanan air tawar
4. Belum efektifnya tata niaga setiap komoditi bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.
  - Pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan basis ekonomi lokal yang menjadi komoditi unggulan. Hasil produknya menjadikan pusat agrobisnis dan agroindustri. Pengelolaan komoditi tersebut belum dikembangkan sehingga peningkatan nilai tambah komoditi melalui proses industri, pengangkutan, pemasaran dan distribusi yang kuat belum ada.

#### **4.1.7. Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup**

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tata ruang antara lain :

1. Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
  - Perkembangan penduduk dan ekonomi berimplikasi pada ketersediaan daya dukung lingkungan untuk pemukiman dan ketahanan pangan. Prinsip keberlanjutan bermakna agar dilakukan kearifan dalam pengelolaan lingkungan sehingga tidak mengakibatkan bencana di masa datang. Perlu pengendalian alih

fungsi lahan pertanian mke permukiman dan pertanian ke perkebunan

2. Masih terdapat pembukaan lahan dengan cara membakar, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan perkebunan.
3. Penurunan fungsi hutan sudah memasuki titik yang mengkhawatirkan terlihat ketika musim hujan dan musim panas gejala banjir dan kekeringan begitu cepat terjadi.
4. Terjadinya konversi lahan tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan.
5. Penanganan mitigasi bencana
  - Karakteristik wilayah topografi mendatar, berawa dan tanah penusutan alluvial lempeng memiliki potensi bencana banjir. Adanya kawasan perkebunan dan hutan yang luas pada lahan gambut berpotensi mudahnya terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal ini juga didukung dengan kebiasaan masyarakat yang menggarap padi sonor dan pembukaan lahan perkebunan dengan membakar.

## **4.2. Isu Eksternal**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa datang. Untuk menentukan isu-isu strategis daerah dilakukan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan. Permasalahan dan peluang tersebut bisa berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti dari dunia internasional, nasional, regional dan daerah perbatasan. Isu- isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan peluang dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan dari hasil analisis diuraikan sebagai berikut :

### **1. Isu Internasional**

#### **1) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Implementasi MEA dimulai tanggal 31 Desember 2015, ASEAN telah menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini akan membuka peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi tidak saja oleh Pemerintah tetapi juga oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu meningkatkan kesiapan terutama mengedukasi masyarakat tentang peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk merebut pasar kerja lokal maupun pasar kerja regional. Isu terakhir yang mengemuka yaitu masuknya tenaga kerja Tiongkok ke pasar kerja Indonesia. Efek ini jika tidak disikapi dengan menyiapkan tenaga kerja terampil bahkan bersertifikat maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang cukup tinggi.

## 2) Sustainable Development Goals (SDGs)

Memberikan arah tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, beberapa indikator yang belum tercapai sampai dengan tahun 2017, antara lain:

- 1) Penghapusan kemiskinan (angka kemiskinan dan pemukiman kumuh)
- 2) Penghapusan kelaparan (kualitas konsumsi pangan)
- 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (penggunaan kontrasepsi jangka panjang)
- 4) Pendidikan berkualitas (APK SMP/MTs/ sederajat, rata-rata lama sekolah, APM SD/MI/ sederajat, angka melek aksara)
- 5) Kesetaraan gender (kekerasan terhadap perempuan)
- 6) Air bersih dan sanitasi
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita)
- 9) Infrastruktur tangguh, industri inklusif, dan inovatif (nilai tambah sektor industri)

- 10) Konsumsi dan produksi berkelanjutan
- 11) Perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana
- 12) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh (pelayanan publik, keterwakilan perempuan di DPRD)
- 13) Kemitraan untuk semua tujuan pembangunan (rasio penerimaan pajak daerah)

Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*”.

## **2. Isu Nasional**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2019-2024. Kebijakan moratorium PNS memberikan tantangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberdayakan tenaga sumber daya PNS yang dimiliki dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional serta distribusi PNS.
- Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum  
Pemberantasan korupsi merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat

efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

#### □ Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Desa

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sasaran pembangunan nasional khususnya pembangunan ketahanan air, infrastruktur dan konektivitas terdapat sasaran pembangunan strategis nasional yang menjadi tugas daerah seperti: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 9,136 juta hektar menjadi 10 juta hektar, rasio elektrifikasi 81,5 – 96,6, kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 ha – 0 ha, akses air minum layak dari 70% - 100%, akses sanitasi layak dari 60,9% - 100%, kabupaten/kota yang dijangkau broadband 82% - 100%, jumlah dermaga penyeberangan 210 – 275, pangsa pasar angkutan umum perkotaan 23% - 32%.

Kebijakan Pemerintah yang perlu disikapi antara lain percepatan pembangunan desa dan wilayah tertinggal, terpencil dan terluar. Paradigma baru membangun Indonesia dari pinggiran atau desa sangat rasional bila dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah penduduk miskin perdesaan. Kebijakan yang populis ini sudah mulai ditindaklanjuti sejak tahun 2015 dengan ditandai adanya dana desa dan alokasi dana desa. Dana tersebut akan terus bertambah sesuai dengan jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang keduanya masuk dalam struktur APBD. Dapat dipastikan setiap

desa akan menerima sekitar Rp. 500 – Rp. 1 milyar per tahun tergantung karakteristik desa masing-masing. Dana yang cukup besar tersebut harus tepat sasaran dan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. Isu Regional

- Penelaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Percepatan penurunan angka kemiskinan
  - b. Pengembangan sumber daya manusia
    - Pendidikan, Kesehatan
  - c. Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi
  - d. Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan
  - e. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar
  - f. Optimalisasi reformasi birokrasi
  - g. Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan
  - h. Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani
  - i. Pengembangan energi baru dan terbarukan pengembangan energi baru dan terbarukan
  - j. Pengembangan sosial budaya dan olahraga

### 4. Isu Daerah Perbatasan

- Penelaahan RPJMD Kabupaten Perbatasan
 

Agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya maka, perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur.

Tabel 4.1  
Isu Strategis RPJMD Daerah Perbatasan

No	Kabupaten OKU Timur (2016-2021)	Kabupaten Ogan Ilir (2016-2021)	Kabupaten Banyuasin (2018-2023)
1.	<p><b>Isu Strategis Daerah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah , agar sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional</li> <li>2. Peningkatan sinergi antara aparat dan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban</li> <li>3. Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah</li> </ol>	<p><b>Isu Strategis Daerah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</li> <li>2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan</li> <li>3. Penyediaan layanan dasar berkualitas</li> <li>4. Kedaulatan pangan</li> <li>5. Percepatan penanggulangan kemiskinan</li> <li>6. Pemerataan dan perluasan pendidikan</li> <li>7. Peningkatan layanan kesehatan</li> </ol>	<p><b>Isu Strategis Daerah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan, Kesehatan dan dukungan ekonomi</li> <li>2. Lingkungan</li> <li>3. Jaminan Sosial</li> <li>4. Tenaga Kerja</li> <li>5. Kemiskinan</li> <li>6. Infrastruktur</li> </ol>

5. Masih kurangnya aksesibilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat	8. Pelayanan administrasi publik	
6. Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan kuantitas pelayanan bidang kesehatan	9. Penurunan angka pengangguran	
7. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah	10. Konektivitas pembangunan antar wilayah	
8. Belum terkelolanya lingkungan hidup yang asridan lestari dalam rangka pengembangan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	11. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan	
	12. Pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana	
	13. Keamanan dan ketertiban umum	

Dari beberapa isu strategis kabupaten perbatasan dapat disimpulkan isu-isu utama pada masing-masing daerah perbatasan yang menjadi perhatian perencanaan pembangunan kedepan sebagai berikut :

1. Isu Penyediaan Infrastruktur Dasar masyarakat
2. Isu Pendidikan dan Kesehatan
3. Isu Pengembangan Ekonomi Global
4. Isu Kemiskinan
5. Isu Peningkatan Tatakelola Pemerintahan
6. Isu Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

## 5. Isu Pengembangan Kota

City branding diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian visi Kabupaten Ogan Komering Ilir. City branding merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan image sebuah kota atau daerah beserta isinya (budaya, obyek wisata, produk barang, layanan jasa, dan sebagainya) di dalam pemikiran target pasar (investor, tourist, talent, event) kota dengan menggunakan slogan, icon, eksibisi dan berbagai media lainnya, agar kota tersebut dikenal secara luas baik regional maupun nasional. “*kayuagung kota lama wisata budaya*” sebagai city branding Kota Kayuagung merupakan *trigger* untuk peningkatan perekonomian kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya Kota Kayuagung. Kota wisata budaya ini dilatarbelakangi oleh keberadaan rumah dan pemukiman tua yang masih terjaga.

Penataan Kota Kayuagung sebagai pusat pemerintahan perlu dilakukan seiring dengan dilaksanakannya pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang – Kayuagung dan Kayuagung – Palembang yang memberikan dampak terhadap pengembangan Kota Kayuagung dibidang permukiman, perdagangan dan jasa. Arus barang dan orang

dengan kendaraan roda empat dari wilayah Sumatera ke Jawa dan sebaliknya sangat padat yang berimbas pada kebutuhan akan tempat makan dan tempat istirahat. Untuk itu perlu diperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan melakukan penataan Kota Kayuagung seperti lahan pemukiman, ketersediaan air bersih, energi dan sanitasi.

### 4.3. Isu Tata Ruang dan Lingkungan

#### 1. Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada penguatan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2  
Struktur Ruang dan Fungsi yang diemban Kecamatan

No	Kecamatan	Hirarki	Fungsi Yang Diemban Pusat Kegiatan/Pelayanan															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kayuagung	PKW	X	x	X	X	x	X	x	x	X	x	x	X	x	x	x	x
2	Lempuing	PKL		x	X	X	x	X	x		X	x	x	X	x	x	x	x
3	Tulung Selapan	PKLp		x	X	X	x		x		X	x	x	X	x		x	x
4	Lempuing Jaya	PPK		x	X	X	x		x		X	x	x	X	x	x	x	
5	Mesuji	PPK		x	X	X	x		x		X	x	x	X	x		x	
6	Sungai Menang	PPK		x			x		x			x	x	X	x	x	x	
7	Mesuji Makmur	PPK		x			x		x			x	x	X	x	x	x	
8	Mesuji Raya	PPK		x	X	X	x		x		X	x	x	X	x		x	
8	Cengal	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	
10	Pedamaran	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	x
11	Pedamaran Timur	PPK		x	X	X	x		x		X	x	x	X	x	x	x	
12	Tanjung Lubuk	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	
13	Teluk Gelam	PPK		x			x		x		X	x	x	X	x	x	x	
14	SP Padang	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	
15	Jejawi	PKLp		x			x		x			x	x	X	x		x	
16	Pampangan	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	
17	Pkl Lampam	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	
18	Air Sugihan	PPK		x			x		x			x	x	X	x		x	

Keterangan :

- |                                    |                                   |                      |                |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten            | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan   | 11. Kesehatan        | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal                | 7. Jasa Koperasi UnitDesa         | 12. Listrik          |                |
| 3. Distribusi dan Koleksi          | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi      | 13. Telekomunikasi   |                |
| 4. Industri                        | 9. Pariwisata dan Jasa Penginapan | 14. Irigasi          |                |
| 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar | 10. Pendidikan                    | 15. Air Minum Bersih |                |

PKW : Pusat Kegiatan Wilayah , PKL : Pusat Kegiatan Lokal, PKLp : Pusat Kegiatan Lokal Promosi, PPK: Pusat Pelayanan Kawasan,

Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Program RPJMD
1.	Sistem Perdesaan dan Perkotaan	Sistem Perdesaan dan Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran darainase dan gorong-gorong	Sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	Sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Sesuai RTRW
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	Sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	Sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	Sesuai RTRW
2.	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	Program pembangunan terminal	Sesuai RTRW
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sesuai RTRW

## 2. Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang

meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Inidaksi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
1	Rencana Kawasan lindung	Rencana Kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan kerservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2	Kawasan rawan Bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
			Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Sesuai prioritas
			Program pencegahan banjir	Sesuai prioritas
3	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan raya	Sesuai prioritas

#### 4.4. Analisis KLHS

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Tabel 4.5  
Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup (lahan masih cukup luas, ITL 33,2)	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan pada wilayah tertentu
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Rentan	Program terkait dengan lingkungan hidup	Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa Ekosistem	Kurang	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem pada jasa penyediaan (pangan, air bersih, energi), pengaturan (kualitas lingkungan) , budaya (tempat tinggal) dan pendukung.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air, lahan dan hutan mineral)	Cukup	Program-program Pembangunan layanan kebutuhan dasar	Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien sesuai dengan jumlah penduduk, kebutuhan konsumsi dan pelestarian lingkungan hidup
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Rentan	Program-program Pembangunan infrastruktur dan pertanian	Perangkat Daerah memperhatikan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Rentan	Program-program Pembangunan pertanian dan lingkungan hidup	Perangkat Daerah memperhatikan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik di pinggiran dan wilayah pesisir
8.	Pemerataan air minum	Kurang	Pembangunan IPA dan jaringan air minum	Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan air minum di wilayah sulit air dan pesisir
9.	Pengelolaan sampah	Kurang	Pembangunan TPA dan sarana pendukung	Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan TPA disetiap kecamatan dan sarana pengangkutan dan pengolahan

Hasil Penelaahan KLHS yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana program Pembangunan Daerah yaitu :

1) Daya dukung sumber daya air

Ketersediaan sumber daya air sesuai perhitungan pada tahun 2017 sebanyak 14.694.809.967,92 m<sup>3</sup>/tahun. Dengan menggunakan kriteria WHO kebutuhan air sebesar 1.000 – 2.000 m<sup>3</sup>/orang/tahun pada tahun 2017 adalah 809.203 jiwa x 1500m<sup>3</sup>/orang/tahun yaitu sebesar 1.213.804.500 m<sup>3</sup>/tahun, jadi surplus pemenuhan kebutuhan air 13.481.003.467 m<sup>3</sup>/tahun. Proyeksi kebutuhan air di Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Proyeksi kebutuhan air di Kabupaten OKI

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk (jiwa)	Koefisien kebutuhan air 1000-2000m <sup>3</sup> /org/th)	Proyeksi kebutuhan air (m <sup>3</sup> /tahun)
2017	809.203	1.500	1.213.804.500
2023	876.482	1.750	1.533.843.500
2030	962.076	2.000	1.924.152.000

Sumber : Analisa KLHS

2) Daya dukung sumber daya lahan untuk penyediaan pangan

Potensi lahan untuk penyediaan pangan berdasarkan identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait pengediaan pangan menunjukkan potensi ketersediaan dan kemampuan paling tinggi berada di Kecamatan Mesuji Makmur. Pada tahun 2017 produksi padi sebanyak 819.206 ton, dengan luas panen 165.347 hektar atau nilai rata-rata produktivitas adalah 4,5 ton/hektar. Wilayah penghasil padi adalah Kecamatan Lempuing, Lempuing jaya, Air Sugihan dan Tanjung Lubuk. Berdasarkan data berikut menunjukkan kondisi yang berlebih (surplus) dimana jumlah produksi lebih banyak dari kebutuhan.

Tabel 4.7 Ketersediaan dan kebutuhan pangan di kabupaten OKI

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk (jiwa)	Produksi padi	Produksi beras (62,74% padi)	Kebutuhan pangan 114 kg/orang/tahun (jumlah penduduk x 0,114)
	(jiwa)	(ton/tahun)	(ton/tahun)	(ton/tahun)
2014	776.263	568.043	356.390	88.493,98
2015	787.513	624.002	391.499	89.776,48
2016	798.482	752.378	472.042	91.026,95
2017	809.203	819.206	513.970	92.249,14

Isu-isu lingkungan hidup yang perlu di perhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya air
  - Kondisi sawah terendam di sebagian wilayah mengakibatkan gagal tanam
  - Kurangnya ketersediaan air bersih pada wilayah pesisir
  - Penurunan kualitas air sungai pada saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan.
2. Konsumsi sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan pangan
  - Terhambatnya kegiatan pertanian akibat kondisi sawah terendam saat musim penghujan
  - Kesulitan membuka dan mengolah lahan karena adanya larangan membakar
  - Nilai jual hasil pertanian dan perkebunan rendah
3. Sebagian wilayah belum terhubung akses jalan darat
4. Timbulan sampah yang belum terkelola
  - Penerapan kebijakan pengelolaan sampah (retribusi sampah dan pengelolaan swasta)
  - Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah seperti : lahan, TPS, TPS 3R, TPA, angkutan sampah, pusat daur ulang dan lainnya.
5. Potensi kebakaran lahan dan hutan terkait kondisi rawan dan bergambut
6. Kegiatan penambangan pasir sungai dan galian tanah
7. Menurunnya kondisi pariwisata
  - Berdasar peta indikatif DDDT LH jasa ekosistem budaya rekreasi dan estika alam memiliki nilai indeks yang rendah. Potensi wisata budaya, alam dataran rendah dan rawa seperti : Danau teluk gelam, danau teloko, bulit batu, pantai tanjung menjangan, suaka marga satwa padang sugihan, kawasan mangrove dan pulau maspari
8. Peran serta swasta / perusahaan terhadap pembangunan daerah melalui CSR PKBL

#### **4.5. Isu-isu Strategis**

Dengan memperhatikan hasil pemilahan dan kriteria terkait isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka **isu-isu strategis**

yang paling menentukan dalam penyusunan visi dan misi lima tahun ke depan yaitu tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik
  - Peningkatan kompetensi dan kualifikasi aparatur untuk perbaikan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan pelayanan publik.
  - Belum optimalnya penggunaan IT (e-government) dalam menunjang peningkatan pelayanan publik.
  - Pengembangan wilayah  
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan upaya memperpendek rentang kendali. Luasnya wilayah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, untuk itu perlu dilakukan kajian pengembangan wilayah kabupaten, kecamatan dan desa
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
  - Peningkatan dan pengembangan transportasi darat (infrastruktur Jalan dan Jembatan) dan sungai (perahu dan dermaga) dalam mendukung pengembangan wilayah.
  - Pengembangan Infrastruktur lainnya seperti jaringan listrik, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
  - Pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
  - Distribusi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama pada daerah wilayah perairan.
4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
  - Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
  - Distribusi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan terutama pada daerah wilayah perairan.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
  - Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
  - Pengembangan sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas unggulan.

- Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal seperti Pengembangan pusat pertanian tanaman pangan dan hortikultura, karena potensi lahan yang cukup luas dijadikan sebagai salah satu daerah sentra beras dan buah.
  - Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha masyarakat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
  - Isu global yang tidak kalah pentingnya adalah program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.
  - Mitigasi bencana  
Ancaman bencana banjir dari meluapnya sungai yang ada dan ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dari pengolahan lahan pertanian sawah lebak dan pembukaan lahan perkebunan.
7. Menciptakan kondisi Ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Mencegah konflik sosial SARA, politik dan ekonomi  
Potensi konflik penguasaan lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat.

#### **4.6. Penyelarasan Isu Strategis**

Pelaksanaan otonomi daerah bukanlah membagi ruang dan pemerintahan dengan memisahkan pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintahan provinsi maupun nasional melainkan program pembangunan kabupaten/kota wajib mendukung program pembangunan provinsi maupun nasional. Bertitik tolak dari hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan nasional. Penyelarasan RPJMD kabupaten dan kota meliputi : Penyelarasan Isu Strategis, Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Penyelaraan Program Prioritas Pembangunan Daerah,

Penyelarasan Pendanaan Program Pembangunan Daerah serta Penyelarasan lokasi Pelaksanaan kegiatan Strategis Nasional.

Penyelarasan isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Isu Strategis Nasional sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/ 2016 di sajikan dalam tabel 4.8. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

**Tabel 4.8**  
**Keselarasn Isu Strategis Pembangunan Daerah**

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Prov. Sumsel 2019 – 2023	RPJMN 2015 – 2019
1.	<p><b>Tata kelola pemerintahan yang baik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja birokrasi masih perlu perbaikan sesuai dengan tuntutan pelayanan publik.</li> <li>- Belum optimalnya penggunaan IT dalam menunjang peningkatan pelayanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>- Optimalisasi reformasi birokrasi</li> </ul>	<p>Peningkatan pendidikan keagamaan; Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;</p> <p>Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya, lemahnya peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan, kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal.</p>
2	<p><b>Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih perlunya peningkatan dan pengembangan Transportasi darat (infrastruktur Jalan dan Jembatan) dan sungai (perahu dan dermaga) dalam mendukung pengembangan wilayah yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai.</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidakterediaan prasarana dan sarana infrastruktur</li> </ul>	Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar	<p>Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidakterediaan prasarana dan sarana infrastruktur</p> <p>Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas; Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik; Pembangunan infrastruktur/ prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan; Kebutuhan infratraktur perumahan dan permukiman;</p>
3	<p><b>Peningkatan kualitas layanan pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas.</li> <li>- Belum optimalnya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.</li> </ul>	<p>Pengembangan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> </ul>	<p>Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas; Peningkatan kualitas pembelajaran; Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi;</p> <p>Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas; Peningkatan kualitas pembelajaran; Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); Peningkatan ketrampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa</p>

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Prov. Sumsel 2019 – 2023	RPJMN 2015 – 2019
4	<p><b>Peningkatan kualitas layanan kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum memadai.</li> </ul>	<p>Pengembangan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesehatan</li> </ul>	<p>Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;</p> <p>Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio tenaga dokter dan tenaga medis belum sesuai standar pelayanan kesehatan terutama pada daerah dengan infrastruktur sulit.</li> </ul>		<p>Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;</p>
5	<p><b>Pengembangan ekonomi kerakyatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan</li> <li>- Peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tukar petani</li> <li>- Percepatan penurunan angka kemiskinan</li> </ul>	<p>Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan;</p> <p>Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani;</p> <p>Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak garam;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditas unggulan.</li> </ul>		<p>Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi diimpor;</p> <p>Produktivitas rendah;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan Pusat Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, karena potensi lahan yang cukup besar dan ke depan sebagai salah satu daerah sentra beras.</li> </ul>		<p>Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi</li> </ul>		<p>Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi</p>



No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab OKI 2019-2024	RPJMD Prov. Sumsel 2019 – 2023	RPJMN 2015 – 2019
6	- Tingkat kemandirian Koperasi dan UKM masih rendah.	Pengurangan pengangguran dan antisipasi bonus demografi	Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
	- Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD.		Peningkatan penerimaan negara; Peningkatan kualitas belanja negara melalui sinergisitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah
	<b>Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan</b> - Pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.	- Pengembangan energi baru dan terbarukan pengembangan energi baru dan terbarukan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI;
7	- Isu global yang tidak kalah pentingnya adalah program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.	- Pelestarian ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan	Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;
	<b>Menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat</b> - Implementasi nilai – nilai agama dalam kehidupan masih rendah dan terkesan terkontaminasi budaya negatif asing.	- Pengembangan sosial budaya dan olahraga	Peningkatan pendidikan keagamaan; Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;



# *Bab V*

## *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



Tabel 5.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Sasaran  
 Visi: “Terwujudnya Masyarakat OKI yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa</b>											
1.	Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggung jawab		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	55,95	55,95	55,98	55,98	56,00	56,00	56,00
	1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B
			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Nilai	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
			Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Tingkat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	78,29	78,57	78,86	79,14	79,43	79,71	80
	1.1.3	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	%	55	55	56	57	58	59	60
<b>Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana</b>											
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata		Indeks pelayanan infrastruktur dasar	Indeks	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75
	2.1.1	Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	70,46	70,46	71	72	73	74	75
			Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	%	64,26	65	67	69	71	73	75
<b>Misi III Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>											
3.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia		Indeks pembangunan manusia	Indeks	66,18	67,03	67,88	68,73	69,58	70,43	71,28

	3.1.1	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat	Angka Melek huruf	%	97,69	98	98	99	99	99	99
	3.1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,25	7,3	7,5	7,6	7,7	7,8	8
			Angka kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	3.1.3	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	Angka kelulusan SMP/MTs	%	99,5	100	100	100	100	100	100
	3.1.4	Meningkatnya mutu layanan kesehatan	Angka Usia harapan Hidup	Tahun	68,04	68,4	68,8	69,2	69,5	69,8	70
	3.1.5	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Rasio fasilitas kesehatan terakreditasi baik	%	85	88	91	94	97	99	100
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,31	60,54	62,77	65,01	67,24	69,47	71,70
<b>Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>											
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	%	5,03	5,11	5,19	5,27	5,34	5,42	5,5
	4.1.1	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nilai tukar petani	%	92,42	94	95	96	97	98	100
	4.1.2	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	83	84	84	85	85	86	86
	4.1.3	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
	4.1.4	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,45	3,45	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40
	4.1.5	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	10,52	10,55	10,6	10,7	10,8	10,9	11
	4.1.6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	15,6	14,66	17,72	12,78	11,83	10,89	9,95

<b>Misi V Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan</b>											
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	64	64	63	63	62	62	62
	5.1.1	Menurunnya pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup	Indeks tutupan lahan	Indeks	55,97	55,97	54	53	52	51	50
			Indeks kualitas air	Indeks	65,38	64	64	63	63	62	62
			Indeks kualitas udara	Indeks	99,06	99,06	98	97	96	95	94
	5.1.2	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan titik kebakaran (hot spot)	%	85	86	87	89	91	93	95
<b>Misi VI Menciptakan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Religius, Tertib, Aman dan Nyaman</b>											
6.	Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik		kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Angka PMKS yang mendapat layanan	%	8	10	10	10	10	10	10



# *Bab VI*

## *Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **6.1.Strategi**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi atau cara yang digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi pada hakikatnya merupakan komitmen pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Strategi memuat program-program yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan juga akan mengatur urutan satu strategi dengan strategi lainnya selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan. Dalam menentukan strategi pembangunan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib mengarahkan strategi pembangunannya pada kebutuhan dasar rakyat untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pertama pemenuhan kebutuhan dasar dan kedua

menciptakan landasan pembangunan yang kuat untuk menopang visi dan misi Kabupaten.

Terkait dengan kewajiban Kabupaten/Kota menerapkan urusan wajib layanan dasar diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib layanan dasar meliputi : 1) urusan pendidikan, 2) urusan kesehatan, 3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 4). urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 5). urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) urusan sosial.

## 2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimaksudkan untuk menciptakan layanan yang simpel, efektif dan efisien, diarahkan untuk mendukung sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Urgensi penataan struktur organisasi perangkat daerah berkaitan dengan pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Setelah dua tahun penataan organisasi berjalan, perlu dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan apakah telah efektif dan efisien atau belum. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Banyaknya jumlah perangkat daerah membebani anggaran untuk operasional perangkat daerah dan tunjangan pejabat struktural. Untuk itu perlu diciptakan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien agar alokasi anggaran lebih besar dapat diarahkan kepada belanja langsung pelayanan publik.

### 3) Sinkronisasi Antar Urusan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD sangat perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah. Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan.

Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip keterpaduan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah. Keterpaduan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut : (1) Keterpaduan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan urusan; (2) Keterpaduan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Keterpaduan dilakukan pada urusan terkait, dan diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pembangunan.

### 4) Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, namun harus dilakukan secara terpadu melalui lintas perangkat daerah. Penyusunan program sektoral dalam penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2019-2024. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat

mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka penanggulangan kemiskinan lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan :

1. Fokus mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan keluarga penduduk miskin yaitu kepemilikan identitas diri, penyediaan infrastruktur dasar, akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan dan sumber mata pencaharian.
2. Fokus pelaksanaan program pada lokasi banyak ditemukan penduduk miskin seperti di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kota Kayuagung dan Lempuing Jaya.
3. Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dengan penyusunan program lintas perangkat daerah dan fokus menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial.

#### 5) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Program prioritas lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dicapai apabila ketergantungan dengan dana transfer dari pusat semakin berkurang; hal ini dapat terjadi bila pendapatan asli daerah meningkat secara proporsional. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan, maka peningkatan pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui strategi lintas urusan/lintas perangkat daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah diantaranya dilakukan dengan :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat.

Intensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) Pendaftaran/pendataan, pemutakhiran dan konfirmasi data pajak daerah.
- 2) Pengelolaan sistem pajak daerah
- 3) Implementasi aplikasi simda pendapatan.
- 4) Intensifikasi penagihan/ pemungutan PAD.
- 5) Pelayanan dan penertiban pajak daerah.

- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah.

Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) Penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
- 2) Sosialisasi dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

- b. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
- c. Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah yang *profitable*.

#### 6) Arahan Pengembangan Wilayah

Mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah kecamatan dan desa memiliki peran yang sangat strategis sehingga diperlukan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing kecamatan dan desa berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada.

Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyusun dan melaksanakan program 20 (dua puluh) tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan.

RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan tahun 2013 sehingga ketaatan atas implementasi perda ini belum terukur. Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di wilayah kabupaten, meliputi:
  - memantapkan Kecamatan Kayuagung (Ibukota Kabupaten) sebagai PKW;
  - memantapkan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai PKL; dan
  - mempromosikan Ibukota Kecamatan Tulung Selapan dan Ibu kota Kecamatan Jejawi sebagai PKLp.
  
- b. Pengembangan system jaringan prasarana dan sarana untuk membuka akses seluruh wilayah meliputi:
  - memantapkan jaringan jalan lintas timur Sumatera sebagai jaringan jalan arteri primer, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan ruas Kayuagung - Palembang via Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi;
  - membangun jalan lingkaran timur Sumatera Selatan (Lampung-Sungai Menang- Cengal-Tulung. Selapan- Riding-Air Sugihan-Banyuasin -Tanjung Api-Api).
  - membangun, mengembangkan dan meningkatkan status jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kawasan pantai timur dan wilayah kabupaten tetangga;
  - membangun dan mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan jaringan transportasi laut; dan
  - membangun dan mengembangkan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana dan sarana lingkungan.
  
- c. Pemantapan, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, suaka alam dan Kawasan lindung lainnya meliputi:
  - memantapkan Kawasan hutan lindung pantai (hutan lindung Sungai Lumpur-Mesuji) dan kawasan hutan suaka alam (HSA) Padang Sugihan;

- memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya;
  - mencegah kerusakan fungsi ekosistem pada kawasan lindung; dan
  - meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemantapan, perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kualitas kawasan lindung.
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan budidaya meliputi:
- membangun dan mengembangkan Kawasan hutan produksi (HP) menjadi kawasan hutan tanaman industri;
  - membangun dan mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - membangun dan mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan swasta nasional;
  - membangun dan mengembangkan kawasan perikanan air tawar, air payau dan perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut;
  - membangun dan mengembangkan kawasan peternakan;
  - membangun dan mengembangkan kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan permukiman; dan
  - membangun dan mengembangkan kawasan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, ruang terbuka hijau dan kawasan perdagangan dan jasa.
- e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
- membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan penyangga Kota Palembang;
  - membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan minapolitan;
  - membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan agropolitan; dan

- membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM);
  - menetapkan Kawasan Hutan Mangrove (Bakau) Pantai Timur sebagai Kawasan lindung pantai untuk kelestarian sumber daya alam hayati;
  - menetapkan Kawasan Lebak Deling sebagai Kawasan Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan; dan
  - menetapkan Kawasan Kota Lama Kayuagung sebagai Kawasan Cagar Budaya.
- f. Mengembangkan kawasan strategis kabupaten untuk sistem mitigasi bencana di kawasan budidaya maupun kawasan lindung meliputi:
- membangun dan mengembangkan sistem informasi komunikasi dan peringatan dini;
  - membangun dan mengembangkan tanggul penahan banjir dan atau rekayasa teknik di sepanjang daerah aliran sungai yang berpotensi banjir;
  - membangun polder untuk menampung air banjir dan mengalirkan air banjir dengan cara gravitasi atau menggunakan pompa;
  - mempertahankan sistem vegetasi pada lahan-lahan yang berpotensi bencana;
  - memanfaatkan ruang terbuka hijau, sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
  - memperkuat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.
- g. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi :
- Kawasan hutan produksi terbatas Pedamaran-Kayuagung seluas 9.986 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan Kecamatan Pedamaran Timur.
  - Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP), meliputi kawasan hutan produksi Mesuji III, Way Hitam Mesuji, Mesuji IV, Simpang Heran Beyuku dan kawasan hutan produksi Terusan Sialang yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, Lempuing Jaya, Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Makmur seluas 652.423 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar.

- Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak Pedamaran Timur, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang seluas 160.716 (seratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas) hektar.
- Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak disemua kecamatan terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan dan sawah lebak.
- Kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan besar terdapat di semua kecamatan.

## **6.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Strategi Pembangunan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Ogan Komering Ilir maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa, diperlukan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Dari hasil analisis permasalahan, isu-isu strategis dan analisis faktor internal dan eksternal yang tersaji pada Bab IV secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Strategi mencapai tujuan meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggungjawab
2. Strategi mencapai tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata
3. Strategi mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Strategi mencapai tujuan mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Strategi mencapai tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
6. Strategi mencapai tujuan menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Tahun 2019-2024 untuk Mewujudkan Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa</b>		
1. Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggungjawab.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah	1) Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel 2) Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah 4) Mengoptimalkan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) 5) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah
	2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1) Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui sistem informasi terpadu( <i>e-government</i> ) 2) Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik
	3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelayanan publik	1) Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan pengembangan sistem penopang ( <i>support system</i> ) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
<b>Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana</b>		
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan merata	1. Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	1) Pemerataan pembangunan wilayah dengan optimalisasi dana desa 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem transportasi publik dan Pengembangan wilayah pesisir

		<p>4) Pemenuhan sarana prasarana perumahan dan pemukiman penduduk</p> <p>5) Percepatan pemenuhan layanan dasar listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat</p> <p>6) Peningkatan kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat</p> <p>7) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air, kualitas jaringan irigasi teknis dan non teknis (rawa lebak)</p>
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat	<p>1) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat</p> <p>2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan</p>
	2. Meningkatnya mutu pendidikan	<p>1) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan</p> <p>2) Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan</p>
	3. Meningkatnya jangkauan kesehatan kepada masyarakat	<p>1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat</p> <p>2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan</p>
	4. Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	<p>1) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>2) Meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas kesehatan</p>
	5. Meningkatnya pemberdayaan Gender dan perlindungan anak	<p>1) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>2) Meningkatkan perlindungan anak</p>
<b>Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>		
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<p>1) Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p> <p>2) Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan kemandirian ekonomi masyarakat</p>

	2. Meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan unit- unit sektor usaha kecil yang berbasis <i>home industry</i> pertanian</li> <li>2) Meningkatkan kualitas manajemen pengelola serta pemberdayaan koperasi dan UMKM</li> </ol>
	3. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat</li> </ol>
	4. Meningkatnya kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja</li> <li>2) Menciptakan iklim kreatif , inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan</li> </ol>
	5. Meningkatnya PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak daerah dan non pajak</li> <li>2) Penegakan Perda terkait Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah</li> <li>3) Optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor pariwisata dan sarana olahraga</li> <li>4) Mengoptimalkan BUMD</li> </ol>
	1. Menurunnya angka kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin seperti identitas diri, kebutuhan dasar, akses pendidikan dan kesehatan.</li> <li>2) Meningkatkan pendapatan keluarga penduduk miskin seperti akses sumber mata pencaharian</li> <li>3) Meningkatkan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan fokus menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah di verifikasi dan divalidasi</li> </ol>
<b>Misi 5: Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan</b>		
1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan sesuai dengan RTRW</li> <li>2) Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan</li> <li>3) Penerapan perencanaan dan</li> </ol>

		Kebijakan tata ruang yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan
	2. Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	1) Peningkatan kapasitas penanganan bencana
<b>Misi 6: Menciptakan kehidupan sosial budaya masyarakat yang religius, tertib, aman dan nyaman</b>		
1. Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik	1. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	1) Penguatan toleransi dan solidaritas antar umat beragama dan masyarakat
	2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	1) Perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial

### 6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan komponen atau bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama lima tahun. Arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan dalam satu tahun periode, namun dapat juga membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal yang terpenting adalah arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Agar penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pemetaan waktu pencapaian arah kebijakan dapat terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan maka ditetapkan fokus atau tema pembangunan tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya adalah sebagai berikut : dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Tabel 6.2  
Tema / Fokus Pembangunan Lima Tahunan

NO	TAHUN	TEMA / FOKUS
1	2019	Penciptaan aparatur yang profesional dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih guna memberikan pelayanan publik
2	2020	Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah
3	2021	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pinggiran
4	2022	Peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis inovasi dan teknologi dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
5	2023	Pengembangan industri dan investasi dalam percepatan hilirisasi industri berbasis pertanian
6	2024	Mewujudkan visi "OKI yang lebih maju mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa" menciptakan pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kualitas SDM yang prima,

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.3  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun  
2019-2024

Arah Kebijakan					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan pengembangan aplikasi berbasis aplikasi (e-Gov)</li> <li>2. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah.</li> <li>3. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dan minat baca (literasi).</li> <li>4. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.</li> <li>5. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan</li> <li>6. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran.</li> <li>7. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>8. Pembangunan Berwawasan Lingkungan</li> <li>9. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah serta pengembangan wilayah.</li> <li>2. Penataan ibukota kabupaten</li> <li>3. Pengembagan sarana prasarana perekonomian masyarakat</li> <li>4. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.</li> <li>5. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan</li> <li>6. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li> <li>7. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan</li> <li>8. Pemberdayaan UMKM, Koperasi, Industri dan perdagangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.</li> <li>9. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran.</li> <li>10. Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah.</li> <li>2. Penataan ibukota kabupaten</li> <li>3. Pengembagan sarana prasarana perekonomian masyarakat</li> <li>4. Mengembangkan promosi potensi daerah</li> <li>5. Pengembangan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha.</li> <li>6. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran.</li> <li>7. Peningkatan produktifitas dan sportifitas generasi muda.</li> <li>8. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</li> <li>9. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.</li> <li>10. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah.</li> <li>2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran.</li> <li>3. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.</li> <li>4. Peningkatan pemerataan pengembangan ekonomi antar wilayah.</li> <li>5. Pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi industri .</li> <li>6. Penciptaan sistem distribusi dan pemasaran komoditas unggulan.</li> <li>7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata.</li> <li>8. Mengembangkan promosi potensi daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan industri yang berbasis kearifan lokal.</li> <li>2. Revitalisasi sektor pertanian yang mendukung industri.</li> <li>3. Mengembangkan promosi potensi daerah.</li> <li>4. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan.</li> <li>5. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan angka pengangguran.</li> <li>6. Meningkatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.</li> <li>7. Mengembangkan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.</li> <li>8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan birokrasi yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.</li> <li>3. Akselerasi pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar berkualitas .</li> <li>4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah</li> <li>5. Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan .</li> </ol>

#### 6.4. Program Pembangunan Daerah

Dalam menjabarkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendefinisikan program- program prioritas berdasarkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif (*melalui*):  
Peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur;  
Optimalisasi pendapatan daerah (*intensifikasi dan ekstensifikasi*); Penyelesaian permasalahan pertanahan.
  - Penataan administrasi kependudukan (kk, akte kelahiran, ktp, akte kematian)
  - Peningkatan dan pengembangan pelayanan perijinan
  - Peningkatan dan pengembangan aparatur pemerintahan desa
  - Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
  - Peningkatan kualitas pengawasan internal
  - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
  - Pengembangan sistem informasi e-goverment
  - Penataan wilayah
  
2. Penguatan konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana yang berkualitas melalui Pembangunan infrastruktur dasar (*jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga, listrik , pasar dan komunikasi*) di perdesaan dan perkotaan
  - Pembentukan unit penanganan infrastruktur wilayah
  - Penyusunan masterplan transportasi pesisir timur (jalan Sungai menang-cengal, tulung selapan, air sugihan, KEK Tanjung api-api)

- Melanjutkan pembangunan jalan sepucuk (kayuagung-pedamaran timur-mesujiraya-sungai menang)
  - Menuntaskan pemasangan jaringan listrik perdesaan
  - Menuntaskan ketersediaan air bersih di desa
  - Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui kemudahan akses dan keterjangkauan masyarakat, penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan penguatan pendidikan usia dini dengan peningkatan kualitas PAUD/TK/TPA
- Melanjutkan program kemudahan akses pendidikan dasar (SD dan SMP)
  - Melanjutkan program bantuan peralatan sekolah (pakaian, tas dan alat tulis)
  - Melanjutkan program beasiswa beprestasi ke jenjang selanjutnya
  - Melanjutkan peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan guru daerah terpencil
4. Peningkatan pelayanan kesehatan (peningkatan kualitas layanan Poskesdes)
- Melanjutkan program kemudahan akses kesehatan yg diintegrasikan dengan sistem jaminan kesehatan nasional
  - Peningkatan layanan kualitas kesehatan mulai dari poskesdes, PKM sampai RSUD
  - Melanjutkan program rumah singgah
  - Pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Tulung Selapan dan kecamatan Mesuji.
  - Penyediaan alat kontrasepsi keluarga berencana
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui perkuatan ekonomi pertanian, industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan serta optimalisasi program padat karya

- Melanjutkan dukungan penyaluran program beras sejahtera (Rastra)
  - Melanjutkan program bantuan kematian bagi keluarga tidak mampu
  - Melanjutkan program pugar rumah.
  - Menjaga ketahanan pangan (*melalui*): Optimalisasi sektor pertanian, dalam arti luas, penanganan gagal tanam dan gagal panen, dan peningkatan manajemen KUD
  - Melanjutkan program bantuan bibit, pupuk, pakan dan sarana prasarana kepada kelompok tani, nelayan dan peternak
  - Melanjutkan program bantuan kepada koperasi UMKM dan UP3K
  - Melanjutkan program peningkatan produksi padi (pemanfaatan lahan tidak produktif dan peningkatan panen menjadi 2 sampai 3 kali)
6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*melalui*): Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan (RDTRK) serta penyusunan kawasan strategis ; Penataan kota Kayuagung, Pembangunan dan pengembangan permukiman dan perumahan termasuk kasiba dan lisiba; Pengamanan Perda RTRW Kab OKI
7. Menciptakan stabilitas dan kondusivitas daerah (*melalui*) Peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; Pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan budaya; Menumbuh kembangkan wawasan keagamaan dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan dan kebhinnekaan.
- Melanjutkan program pembinaan lembaga adat desa, kecamatan dan kabupaten
  - Melanjutkan program bantuan masjid
  - Melanjutkan program peningkatan kesejahteraan ustadz, ustadzah, imam masjid dan mudin

- Melanjutkan program pembinaan pembinaan umat beragama

Selanjutnya gambaran program pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program masing-masing misi diuraikan pada tabel 6.4 berikut :

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
*(pagu indikatif dalam jutaan)*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN <i>(dalam jutaan)</i>										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa</b>															
1 1	<b>Tujuan:</b>  Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan bertanggungjawab	Indeks Reformasi Birokrasi												56		
1 1 1	<b>Sasaran :</b> - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan daerah	1) Nilai SAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 2) Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) 3) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	CC ST WTP Level 3	CC ST WTP Level 3		B ST WTP Level 3		B ST WTP Level 3		B ST WTP Level 3		B ST WTP Level 3		B ST WTP Level 3		
	<b>1 BELANJA RUTIN SETIAP OPD</b>				181.799		249.389		245.657		251.962		265.070		277.473	
	- Program pelayanan Administrasi Perkantoran				118.980		126.566		132.283		136.590		142.991		146.424	SEMUA OPD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				39.810		67.139		55.293		53.861		56.566		61.262	SEMUA OPD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program peningkatan disiplin aparatur				4.300		14.229		13.978		14.584		15.895		16.201	SEMUA OPD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				11.826		28.129		30.090		32.003		33.666		36.680	SEMUA OPD
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				6.883		13.326		14.012		14.924		15.953		16.905	SEMUA OPD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				68.064		65.550		69.194		73.177		76.695		77.590	
	<b>2.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>															
	- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				50.598		43.795		45.984		48.284		50.699		50.699	Setwan
	1 Tercapainya Rasio jumlah perda yang disahkan		5 Buah	5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Teridentifikasinya masalah - masalah di Daerah Pemilihan (DAPIL) yang teratasi	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
		3 Meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
		- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD			466		294		309		324		340		357	Bagian Keuangan
		1 Tersedianya anggaran Setda Kab. OKI	100	-		-		-		-		-		-		
		- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			1.602		1.014		1.106		1.206		1.316		1.468	SETDA
		1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		Bagian Hukum
		2 Tersedianya dan terdokumentasinya Kegiatan Pemerintah kab.OKI	60%	60%		66%		73%		80%		88%		97%		Bagian Humas & Protokoler
		- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			4.787		6.051		6.437		6.984		7.469		7.772	Setda
		1 Meningkatnya Pelayanan Acara Resmi Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	62%	62%		68%		75%		83%		91%		100%		Bagian Humas & Protokoler
		2 Tersedianya data pembangunan daerah	20 lap	20 lap		20 lap		20 lap		20 lap		20 lap		20 lap		Bagian Adm. Pembangunan
		3 Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Keuangan
		4 Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Keuangan
		- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			200		275		295		320		360		360	Bagian Hukum
		1 Terbentuknya peraturan daerah yang baik	10 Perda	10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		
		2 Tersedianya buku peraturan perundang-undangan	500 Buku	500 Buku		500 Buku		500 Buku		550 Buku		550 Buku		550 Buku		SETDA
		- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			400		480		500		575		600		642	
		1 Meningkatnya kinerja camat	18	18		18		18		18		18		18		
		2 Terfasilitasinya Kesuksesan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden	1	1		-		-		-		-		1		
		- Program Penataan Daerah Otonomi Baru			590		1.218		1.335		1.453		1.320		1.353	Bagian Pemerintahan
		1 Terfasilitasinya pembentukan kabupaten dan kecamatan baru	-	-		-		-		-		-		2		
		2 Tersedianya data nama-nama Rupa Bumi	200	200		300		300		350		350		400		
		3 Terwujudnya kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama antar daerah	1	100%		1		1		1		1		1		
		4 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,Layanan Publik,Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1	1		1		1		1		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten				255		585		470		505		535		585	Bagian Pemerintahan
		1 Terpenuhinya Tertib Wilayah administrasi Batas Desa/Kelurahan	1	-		-		-		-		-		1		
		2 Tersedianya Data Digital Penataan Batas	1	1		1		-		-		-		-		
	- Program Pengendalian Perekonomian Daerah				650		680		710		740		790		825	Bagian Ekonomi
		1 Tingkat koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. OKI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2 Tingkat pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2 BUMD	2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		
		3 Terfasilitasinya modal usaha golongan ekonomi lemah	4 Kec	4 Kec		4 Kec		5 Kec		5 Kec		6 Kec		6 Kec		
	- Program mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat				0		200		200		200		200		200	Bagian Hukum
		1 Terciptanya perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu	10 Perkara	10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		
	- Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa				0		1.980		2.450		2.950		2.950		2.950	Bagian ULP
		1 Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	25%	25%		50%		70%		80%		90%		100%		
	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kecamatan				845		845		882		882		946		946	KECAMATAN
		1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				3.212		3.373		3.518		3.518		3.672		3.672	KECAMATAN
		1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)				4.137		0		0		0		0		0	KECAMATAN
		1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	- Program pembangunan kelurahan				323		4.760		4.998		5.237		5.499		5.762	KYG, TL.SELAPAN, TJ.LUBUK
		1 Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2 Capaian pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>2.2. PENGAWASAN</b>				3.388		4.110		4.540		4.970		5.415		5.765	
	- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				3.328		4.050		4.470		4.890		5.325		5.665	INSPEKTORAT
	1	Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	65%	75		80		85		87		90		95		
	2	Persentase hasil pemeriksaan/review tepat waktu	65%	68		75		80		85		90		95		
	3	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83%	83		80		85		87		90		95		
	4	Tingkat Kapabilitas APIP	300%	3		84		85		86		87		88		
	5	Tingkat Maturitas SPIP	300%	3		-		-		-		-		-		
	- Program Penataan dan Penyempurnaan				60		60		70		80		90		100	INSPEKTORAT
	1	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN	83%	84%		85%		85%		85%		85%		85%		
	<b>2.3 PERENCANAAN</b>				<b>3.318</b>		<b>2.987</b>		<b>3.108</b>		<b>3.475</b>		<b>3.465</b>		<b>4.402</b>	
	- Program Pengembangan data/informasi				120		130		130		140		140		150	BAPPEDA
	1	Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program pengembangan kota-kota menengah				100		0		0		0		0		0	Bappeda
	1	Jumlah dokumen koordinasi percepatan pembangunan bidang air bersih/ drainase sanitasi dan pemukiman	100%	1												
	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.821		1.136		1.141		1.321		1.151		2.061	BAPPEDA
	1	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				410		640		660		710		750		680	Bappeda
	1	Persentase program/kegiatan PD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Perencanaan Sosial Budaya				597		657		722		795		874		961	Bappeda
	1	Persentase program/kegiatan PD bidang sosial budaya yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				270		425		455		510		550		550	BAPPEDA
	1	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>2.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				650		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
	- Program Litbang dan Inovasi Daerah				0		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Rekomendasi/laporan yang di terapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Peningkatan IPTEK bagi UKM				0		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Litbang dan Inovasi Peningkatan bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan				0		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Inovasi Sosial dan Kemasyarakatan				0		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan				150		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Penguatan Kelembagaan Penelitian				260		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Tingkat Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Desiminasi Iptek hasil Litbang dan Inovasi				40		100		100		100		100		100	Balitbang
	1 Iptek dan Inovasi yang dipamerkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Program Peningkatan Hasil Pemasaran				200		300		300		300		300		300	Balitbang
	1 Studi komoditas / produk unggulan lokal berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>2.5 KEUANGAN</b>				5.459		7.850		7.865		8.115		8.165		8.370	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.459		5.480		5.645		5.845		5.795		6.150	BPKAD
	1 Predikat laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
	3 Tingkat Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
	4 Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	65,45%	66	70	75	80	85	90								
	- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah				0		2.370		2.220		2.270		2.370		2.220	BPKAD
	1 Meningkatnya Penata Usahaan Pengelolaan Aset	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
	2 Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
	3 Terpenuhinya dan Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD Kab OKI)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	
	<b>2.6 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				2.201		5.827		5.730		4.833		5.904		6.250	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0		2.040		1.970		1.983		1.930		2.135	BKDPP
	1 Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%	88%	90%	92%	95%	96%								

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Terpenuhinya CPNS golongan II dan III yang memenuhi persyaratan	100%	90%		91%		92%		94%		95%		97%		
		3 Meningkatkan pemahaman PNS tentang jabatan fungsional dan perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	100%	80%		82%		85%		88%		90%		96%		
		- Program pembinaan dan pengembangan aparatur			2.141		1.545		1.660		1.611		1.504		1.445	BKDPP
		1 Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	70%	80%		83%		85%		87%		90%		95%		
		2 Persentase pelanggaran disiplin aparatur	1,30%	1%		1,20%		1%		1%		0,5%		0,8%		
		3 Terpenuhinya formasi CPNS sesuai kebutuhan organisasi	90,00%	90%		92,00%		94%		95%		96%		98%		
		4 Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur	100,00%	100%		100,00%		100%		100%		100%		100%		
		- Program Pendidikan Kedinasan			0		2.172		2.035		1.164		2.405		2.590	BKDPP
		1 Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%		88%		90%		94%		95%		97%		
		2 Ketersediaan data PNS yang akurat	30%	85%		90%		93%		95%		96%		98%		
		3 Peningkatan kualitas SDM aparatur	90%	80%		85%		90%		92%		94%		96%		
		Program Penataan dan Penyempurnaan			60		70		65		75		65		80	BKDPP
		1 Meningkatnya tingkat ketersediaan pelaporan data LHKPN pejabat Pemkab OKI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		<b>3 URUSAN KEARSIPAN</b>			<b>176</b>		<b>1.110</b>		<b>1.221</b>		<b>1.332</b>		<b>1.443</b>		<b>1.554</b>	
		- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			176		500		550		600		650		700	D. ARSIP PUSTAKA
		1 Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	57,69%	7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		3,85%		
		2 Persentase arsip /dokumen yg tertata (arsip statis)	9,62%	9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
		3 Persentase buku arsip daerah	0%	0%		19,23%		19,23%		19,23%		19,23%		19,23%		
		4 Persentase dokumen/arsip statis & sejarah yang direstorasi	0%	0%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
		5 Persentase arsip statis yang diakuisisi	0%	0%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
		- Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			0		200		220		240		260		280	D. ARSIP PUSTAKA
		1 Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	80%	0%		80%		80%		80%		90%		90%		
		2 Persentase OPD yang memiliki sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar	57,69%	0%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan				0		410		451		492		533		574	D. ARSIP PUSTAKA	
		1 Persentase Layanan Arsip Yg Berbasis Teknologi & Informasi	1,92%	0%		5,77%		5,77%		5,77%		5,77%		5,77%			
		2 Jumlah OPD yang dibina kearsipannya	30 OPD	4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD			
		3 Jumlah arsiparis yang dinilai angka kreditnya	0 orang	0 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang			
1	1	2 Sasaran :															
		Meningkatnya - Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	78,29%	78,57%		78,86%		79,14%		79,43%		79,71%		80,00%		
		<b>1. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>2.305</b>		<b>2.421</b>		<b>2.542</b>		<b>2.669</b>		<b>2.803</b>		<b>2.943</b>	
		- Program penataan administrasi kependudukan				2.305		2.421		2.542		2.669		2.803		2.943	DISDUKCAPIL
		1 Rasio Kepemilikan KTP elektronik	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%		99,4%		99,6%		99,8%			
		2 Lama Pengurusan KTP	7 hari	7 hari		7 hari		7 hari		7 hari		7 hari		7 hari			
		3 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	81,2%	85,2%		89,5%		93,9%		98,6%		98,8%		99,0%			
		4 Persentase penduduk yang memiliki KTP	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%		99,4%		99,6%		99,8%			
		5 Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	1	86,4%		92,4%		97,9%		98,0%		98,5%		1			
		6 Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	30,91	35,53%		40,15%		44,77%		49,39%		54,01%		58,63%			
		7 Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100	100		100		100		100		100		100			
		8 Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	100	100		100		100		100		100		100			
		9 Persentase anak umur di bawah 17 tahun yang memiliki KIA	100	100		100		100		100		100		100			
		<b>2 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>4.181</b>		<b>7.975</b>		<b>8.025</b>		<b>8.575</b>		<b>8.575</b>		<b>8.650</b>	
		- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				2.538		3.250		3.300		3.300		3.300		3.300	DPMD
		1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (Kelompok)	327	314		314		314		314		314		314			
		2 Ketersediaan data desa/kelurahan	327	327		327		327		327		327		327			
		3 Persentase pelaksanaan roda pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100		100		100		100		100		100			
		4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan	100	100		100		100		100		100		100			
		5 Jumlah Posyandu yang aktif	635	635		650		670		675		680		783			
		- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi				80		400		400		400		400		400	DPMD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	314	50		50		50		50		50		64		
		2 Jumlah BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian desa	314	50		50		50		50		50		64		
		- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			1.006		2.725		2.725		3.275		3.275		3.350	DPMD
		1 Jumlah PKK yang aktif (kelompok)	346	346		346		346		346		346		346		
		2 Persentase desa inovasi	314	50		50		50		50		50		64		
		3 Jumlah desa yang sudah menyusun APBDesa	314	314		314		314		314		314		314		
		- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			557		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	DPMD
		1 Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik (%)	40	50		60		70		80		90		95		
		2 Tingkat pemenuhan administrasi bantuan keuangan kepada pemerintahan	314	314		100		314		314		314		314		
		3 Jumlah aparat desa terlatih	318	628		628		628		628		628		628		
		- Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna			0		100		100		100		100		100	DPMD
		1 Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif	100	1		3		3		3		3		3		
1	1	3 Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik														
		1) Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	55%	55%		56%		57%		58%		59%		60%		
		<b>1 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>4.178</b>		<b>8.335</b>		<b>8.475</b>		<b>8.575</b>		<b>8.575</b>		<b>8.575</b>	
		- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			1.338		3.445		3.550		3.650		3.650		3.650	DISKOMINFO
		1 Jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	23	28		35		41		46		52		55		
		2 Jumlah jaringan komunikasi	8	8		10		12		16		18		20		
		- Program kerjasama informasi dan mass media			2.700		4.690		4.725		4.725		4.725		4.725	DISKOMINFO
		1 Jumlah/kapasitas mitra komunikasi publik	70	92		92		92		92		92		92		
		2 Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	12		12		12		12		12		12		
		3 Rasio wartel dan warnet terhadap jumlah penduduk	73	73		73		73		73		73		73		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				140		200		200		200		200		200		DISKOMINFO
	1 Jumlah SDM bidang kominfo		7	10		13		16		19		22		25			
	2 Terlaksananya Pemberdayaan SDM Bidang Kominfo		0	1		2		3		4		5		6			
	<b>2 URUSAN STATISTIK</b>				<b>0</b>		<b>730</b>		<b>880</b>		<b>1.005</b>		<b>1.110</b>		<b>1.210</b>		
	- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				0		150		200		250		250		250		DISKOMINFO
	1 Jumlah dokumen data kec dalam angka		1	1		1		1		1		1		1			
	- Program penyelenggaraan statistik sektoral				0		580		680		755		860		960		DISKOMINFO
	1 Membangun e-database sebagai hasil pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data		1	1		1		1		1		1		1			
	2 Aplikasi data e-database yang akurat		1	1		1		1		1		1		1			
	<b>3 URUSAN PERSANDIAN</b>				<b>0</b>		<b>180</b>		<b>185</b>		<b>190</b>		<b>195</b>		<b>200</b>		
	- Program Penyusunan Tata Kelola Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		30		35		40		45		50		DISKOMINFO
	1 Jumlah kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian (berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas)			2		2		2		2		2		2			
	2 Jumlah Masterplan / Grand Design / Pedoman / Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian			1		1		1		1		1		1			
	- Program Operasional Layanan Persandian untuk Mendukung Pengamanan Informasi				0		50		50		50		50		50		DISKOMINFO
	1 Jumlah kegiatan pengamanan sinyal (jamming)			3		3		3		3		3		3			
	2 Jumlah kegiatan pengamanan informasi kontra penginderaan (Streilisasi)			3		3		3		3		3		3			
	- Program Pengawasan dan Evaluasi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0		100		100		100		100		100		DISKOMINFO
	1 Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian			1		1		1		1		1		1			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana</b>															
2	1 <b>Tujuan:</b>															
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang baik dan merata	1) Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	0,67											0,75		
2	1 <b>Sasaran :</b>															
	meningkatnya Infrastruktur yang baik dan merata	1) Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70,46%	70,46%		71%		72%		73%		74%		75%		
		2) Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	64,26%	65%		67%		69%		71%		73%		75%		
	<b>1 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>303.582</b>		<b>376.447</b>		<b>408.551</b>		<b>445.407</b>		<b>485.947</b>		<b>528.921</b>	
	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				33.251		36.575		40.233		44.256		48.681		53.549	DPU PR
		1 Persentase jalan yang dibangun	5,89%	1%		1,10%		1,20%		1,20%		1%		5,50%		
		2 Jumlah jembatan yang dibangun	257 Unit	30 Unit		30 Unit		40 Unit		38 Unit		25 Unit		168 Unit		
	- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				0		27.300		27.300		27.300		27.300		27.300	DPU PR
		1 Panjang drainase jalan kondisi mantap	2,6 Km	-		1 Km		1 Km		1 Km		1 Km		5 Km		
	- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				35.226		38.749		42.623		46.886		51.574		56.732	DPU PR
		1 Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	70,47%	1,15%		1,21%		1,27%		1,25%		1%		76,35%		
		2 Jumlah jembatan kondisi mantap (bisa dilewati)	25 Unit	4 Unit		5 Unit		6 Unit		5 Unit		3 Unit		23 Unit		
	- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan				0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	DPU PR
		1 Tersedianya dana siap pakai untuk rehab jalan dan jembatan	0	2 Km		2 Km		2 Km		2 Km		2 Km		10 Km		
	- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan				0		200		200		200		200		200	DPU PR
		1 Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				4.182		4.600		5.060		5.566		6.123		6.735	DPU PR
		1 Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		
	- Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan				0		500		500		500		500		500	DPU PR
		1 Ketersediaan Data Kondisi Eksisting Jalan dan Jembatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				156.426		172.069		189.275		208.203		229.023		251.926	DPU PR
		1 Jumlah jembatan yang ditingkatkan		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		10 Unit		
		2 Panjang jalan yang ditingkatkan		144 Km		261 Km		314 Km		283 Km		144 Km		1215 Km		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Perencanaan Jalan dan Jembatan				4.952		5.447		5.992		6.591		7.250		7.975	DPU PR
	1 Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan		188 Ruas Jln & Jbt	188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		
	- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				59.476		65.424		71.966		79.163		87.079		95.787	DPU PR
	1 Persentase luas irigasi dalam kondisi baik		18%	37%		57%		75%		88%		100%		100%		
	- Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong				10.069		12.183		13.402		14.742		16.216		16.216	DPU PR
	1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran		19%	35%		51%		68%		84%		100%		100%		
	- Program Rehabilitas/Pemeliharaan Talud/Bronjong				0		3.400		2.000		2.000		2.000		2.000	DPU PR
	1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran		19%	35%		51%		68%		84%		100%		100%		
	<b>2 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>64.323</b>		<b>67.575</b>		<b>69.436</b>		<b>71.638</b>		<b>73.008</b>		<b>76.072</b>	
	- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong				0		2.261		3.281		4.073		5.830		6.000	DPU PR
	1 Panjang drainase permukiman dalam kondisi baik		0,05	0		0,10		0,15		0,20		0,25		0,30		
	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				14.738		30.145		30.725		31.108		31.496		32.195	DPRKP
	1 Persentase rumah tinggal bersanitasi		53,95	56,65		59,48		62,45		65,58		68,86		72,30		
	2 Persentase penduduk berakses air minum (PDAM)		6,51	7,46		8,28		13,54		17,02		21,99		24,01		
	- Program pembangunan infrastruktur perdesaan				9.728		10.020		10.320		10.630		10.949		11.168	DPRKP
	1 Persentase jalan lingkungan yang terbangun		40,18	40,23		67,88		70,67		77,67		80,23		87,77		
	- Program penyediaan dan pengelolaan air baku				0		4.315		4.962		5.706		6.562		7.547	DPRKP
	1 Persentase penduduk yang terlayani air baku (Non PDAM)		67,96	69,45		70,21		70,98		71,75		73,32		74,11		
	- Program Pengembangan Perumahan				647		3.500		3.675		3.859		4.052		4.254	DPRKP
	1 Persentase Rumah Layak huni		64,68	68,38		73,65		73,65		75,23		76,91		78,71		
	- Program Penataan Lingkungan Kumuh				0		1.166		1.224		1.285		1.349		1.403	
	1 Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani		2,67	2,80		2,94		3,09		3,25		3,41		3,58		
	- Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				32.097		12.500		12.750		13.000		13.000		13.655	DPRKP
	1 Persentase desa berlistrik		92,71%	93,6%		94,6%		95,5%		96,5%		97,4%		98,4%		
	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				0		880		880		900		900		900	DPRKP
	1 Persentase RTH Ibukota kabupaten dalam Kondisi Baik		100	0		100		100		100		100		100		
	- Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				880		0		0		0		0		0	DPRKP
	1 Pemeliharaan Fasilitas Umum Perkotaan		100	100		0		0		0		0		0		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				0		1.900		1.500		1.500		800		800	DPRKP
		1 Unit lahan yang tersedia	3 unit	0		3 unit		2		1		1		1		
	- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman				250		250		250		250		250		250	DPRKP
		1 Unit sarana prasarana pemakaman yang dibangun	2 unit	3 unit		5 unit		7 unit		9 unit		10 unit		12 unit		
	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				0		2.700		2.900		3.100		3.300		3.500	DPRKP
		1 Jumlah TPS 3R yang di bangun	2 unit	6 unit		10 unit		14 unit		18 unit		22 unit		26 unit		
	- Program Lingkungan Sehat Perumahan				2.040		200		250		300		350		400	DPRKP
		1 Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05			0		0		0		0		0		
		2 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	0	0		100		100		100		100		100		
	- Program Pembangunan Distribusi penyediaan air baku				3.943		0		0		0		0		0	DPRKP
		1 Tingkat ketersediaan air baku	40%	45%												
	<b>3 URUSAN PERHUBUNGAN</b>				<b>1.655</b>		<b>4.673</b>		<b>3.556</b>		<b>1.859</b>		<b>2.012</b>		<b>2.129</b>	
	- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				895		200		300		350		460		500	DISHUB
		1 Jumlah Prasarana Transportasi LLAJSDP	25 lokasi	27 lok		28 lok		29 lok		30 lok		31 lok		32 lok		
	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				20		302		156		150		175		200	DISHUB
		1 Persentase Fasilitas LLAJSDP dalam keadaan baik	25,00%	29,16%		33,32%		37,48%		41,64%		45,80%		50,00%		
		2 Persentase rambu-rambu LLAJSDP dalam kondisi baik	30,00%	30,00%		34,00%		38,00%		42,00%		46,00%		50,00%		
	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				695		784		750		750		750		750	DISHUB
		1 Jumlah rute pelayaran	18 rute	18		20		21		23		24		25		
		2 Jumlah Peraturan Yang dikeluarkan	13 buah	14		15		16		17		18		20		
	- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				45		312		250		225		227		230	DISHUB
		1 Persentase Fasilitas Keselamatan LLAJSDP	41,32%	43,23%		51,17%		59,11%		67,05%		75,00%		75,00%		
	- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				0		3.075		100		100		100		100	DISHUB
		1 Persentase kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	60%	63,34%		66,68%		70,02%		73,36%		76,70%		80,00%		
		2 Jumlah Uji Keur kendaraan bermotor	3500 unit	3900		4300		4700		5100		5400		6000		
	- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				0		0		2.000		284		300		349	DISHUB
		1 Tersedianya Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	0	0		0		1		1		1		1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>3</b>	<b>MISI 3 : Meningkatkan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>															
3	1	<b>Tujuan:</b>  Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	66,18										71,28		
3	1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Jangkauan layanan	1) Angka melek huruf 2) Rata-rata lama sekolah	97,69% 7,25 tahun	98% 7,3	98% 7,5	99% 7,6	99% 7,7	99% 7,8	99% 8 tahun						
		<b>1 URUSAN PENDIDIKAN</b>			<b>144.285</b>	<b>242.910</b>	<b>260.398</b>	<b>279.531</b>	<b>300.243</b>	<b>322.681</b>						
		Program Pendidikan Anak Usia Dini			726	27.300	28.665	30.098	31.603	33.183						
		1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,01	95,20	96,40	97,60	98,80	100	100							
		2 Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	5,33	12,30	19,20	26,10	33,10	40,0	47,1							
		- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			41.623	59.000	61.740	64.827	68.068	71.472						DISDIK
		1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	110,93	110,93	111	111	111	111	111							
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,7	101,8	101,82	101,90	101,92	102	102							
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	96,10	97,10	98,10	99,00	100	100							
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	74,76	76,80	78,90	80,90	83,00	85,00	87							
		5 Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	48,84	56,10	63,30	70,50	77,80	78,00	83,80							
		6 Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	48,93	55,10	61,40	67,60	73,80	80,00	86,20							
		7 Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	50,06	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00							
		8 Rata-rata skor Indeks Integritas Ujian Nasional SMP	69,17	70,30	71,50	72,70	73,80	75,00	77,50							
		9 Angka kelulusan SD/MI	98,02	98,40	98,80	99,20	99,60	100	100							
		10 Angka Kelulusan SMP/MTs	99,88	99,90	99,90	100	100	100	100							
		11 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	71,45	74,16	76,87	79,58	82,29	85	87,71							
		12 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89,49	91,59	93,69	95,80	97,90	100	100							
		- Program Pendidikan Non Formal			260	2.940	3.087	3.241	3.403	3.574						DISDIK
		1 Angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	98,09	98,5	98,9	99,2	99,6	100	100							
		2 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	3	3	6	9	12	15	15							
		3 Jumlah lembaga PKBM terakreditasi	0	7	11	15	19	21	23							
		- Program Bantuan Operasional Sekolah			99.970	108.900	119.790	131.769	144.946	159.440						DISDIK
		1 Tingkat Penyaluran BOS ke sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	1	2	Sasaran :														
			Meningkatnya mutu pendidikan	1) Angka kelulusan SD/MI	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
				2) Angka kelulusan SMP/MTs	99,5%	100%		100%		100%		100%		100%			
			<b>1 URUSAN PENDIDIKAN</b>														
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				810		18.375		19.294		20.258		21.271	22.335	DISDIK
			1 Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	100	100		100		100		100		100		100		
			2 Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1/D4	100	100		100		100		100		100		100		
			3 Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100		100		
			4 Persentase Guru SD berkualifikasi S1/D4	97,00	97,60		98,20		98,80		99,40		100		100		
			5 Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	59,16	62,30		65,50		68,70		71,80		75,00		75,00		
			6 Persentase Guru SMP berkualifikasi S1/D4	89,09	91,30		93,50		95,60		97,80		100		100		
			- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				553		24.675		25.909		27.204		28.564	29.993	DISDIK
			1 Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh unit kerja Dinas Pendidikan	50	60		70		80		90		100		100		
			2 Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	97	98		98		99		99		100		100		
			3 Persentase Satuan Pendidikan yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar	59,16	62,30		65,50		68,70		71,80		75		75		
			- Program Pembinaan Pendidikan Olahraga dan Seni				294		1.650		1.815		1.997		2.196	2.416	DISDIK
			1 Jumlah siswa yang meraih peringkat 1 (satu) Provinsi/ Nasional	3	4		5		5		6		7		8		
			- Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan				50		70		98		137		192	269	DISDIK
			1 Persentase siswa yang dapat baca tulis Al-Qur'an	0	14,00		28,00		42,00		56,00		70,00		73,00		
			<b>2 URUSAN PERPUSTAKAAN</b>				<b>350</b>		<b>500</b>		<b>600</b>		<b>700</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				350		0		0		0		0	0	D. ARSIP PUSTAKA
			1 Persentase peningkatan bahan pustaka	10,09%	11,10%		12,21%		13,43%		14,77%		16,25%		17,88%		
			2 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	0,40%	0,42%		0,44%		0,46%		0,49%		0,51%		0,54%		
			3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,39%	1,46%		1,53%		1,61%		1,69%		1,77%		1,86%		
			4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	11.920 buku	0 buku		12.516 buku		13.142 buku		13.799 buku		14.489 buku		15.213 buku		
			5 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	4,88%	0%		5,12%		5,38%		5,65%		5,93%		6,23%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Pengembangan Perpustakaan				0		350		400		450		500		550	D. ARSIP PUSTAKA
		1 Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar	30%	33%		36%		40%		44%		48%		53%		
		2 Meningkatnya tenaga perpustakaan sesuai standar	4,88%	5,12%		5,38%		5,65%		5,93%		6,23%		6,54%		
	- Program Peningkatan minat baca				0		150		200		250		300		350	D. ARSIP PUSTAKA
		1 Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca	7673 orang	8056 orang		8458 orang		8881 orang		9325 orang		9791 orang		10280 orang		
	<b>3 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>2.688</b>		<b>2.925</b>		<b>3.050</b>		<b>3.255</b>		<b>3.495</b>		<b>3.830</b>	
	- Program peningkatan peran serta kepemudaan				816		830		850		875		900		920	DISPORA
		1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif	80%	80%		85%		85%		85%		90%		90%		
	- Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba				0		75		75		80		85		90	DISPORA
		1 Persentase Pemuda yang bebas narkoba	55%	55%		60%		60%		65%		65%		70%		
	- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan				55		70		75		100		110		120	DISPORA
		1 Jumlah Pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup	30	30		35		35		40		40		50		
	- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				1.267		1.200		1.250		1.300		1.400		1.500	DISPORA
		1 Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	25	25		30		30		35		40		45		
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				550		750		800		900		1.000		1.200	DISPORA
		1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	20%	20%		21%		22%		23%		24%		25%		
		2 Rasio Lapangan Olah Raga per 1.000	17%	18%		20%		22%		25%		27%		30%		
3	1	3 Sasaran : Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	68,04 tahun	68,4		68,8		69,2		69,5		69,8		70 tahun		
		<b>1 URUSAN KESEHATAN</b>			<b>147.210</b>		<b>195.500</b>		<b>166.974</b>		<b>171.002</b>		<b>177.606</b>		<b>181.817</b>	
		- Program Obat dan Pembekalan Kesehatan			3.908		5.000		5.500		6.000		6.500		7.000	DINKES
			1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		- Program Pelayanan Kesehatan			970		1.050		1.100		1.150		1.200		1.250	DINKES
			1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		- Program Pengawasan Obat Dan Makanan			159		200		225		250		275		300	DINKES
			1 Persentase obat dan makanan yang diawasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.005		1.100		1.200		1.300		1.400		1.500	DINKES
	1 Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Besih dan sehat	75%	77%			80%		83%		85%		88%		88%		
	2 Cakupan Desa Siaga Aktif	321	321			323		323		324		325		325		
	3 Persentase Posyandu Aktif	70%	70%			75%		75%		80%		80%		80%		
	4 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Perbaikan Gizi Masyarakat				673		750		850		950		1.150		1.250	DINKES
	1 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35%	0,35%			0,3%		0,3%		0,25%		0,2%		0,2%		
	2 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Pesentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan GIZI	98%	98%			98%		98%		99%		99%		99%		
	5 Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	0%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat				700		1.000		1.100		1.200		1.300		1.400	DINKES
	1 Cakupan Rumah tangga sehat	80%	80%			90%		100%		100%		100%		100%		
	2 Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	80%	80%			90%		100%		100%		100%		100%		
	3 Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	65%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Cakupan Tempat-tempat Umum dan Penjual Makanan (TPUM) yang dibina dan diawasi	78%	80%			83%		85%		90%		95%		95%		
	5 Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	80%	80%			90%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.270		1.500		1.750		2.000		2.250		2.500	DINKES
	1 Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (semua Kasus)	91%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	90%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Imunisasi (UCI desa)	321	321			323		323		324		325		325		
	5 Imunisasi Dasar anak Usia 0-11 Bulan	321	321			323		323		324		325		325		
	6 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	7 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		9 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			150		350		400		450		500		550		DINKES
		1 Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		6 Jumlah Kematian Ibu	11	9		7		5		3		2		2			
		- Program Hygiene sanitasi air Bersih dan air minum			350		375		400		425		450		475		DINKES
		1 Cakupan rumah tangga dengan sumber air terlindungi dan berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		- Program peningkatan dan pengawasan keselamatan kerja dan olah raga			350		375		400		425		450		475		DINKES
		1 Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			143		150		175		200		225		250		DINKES
		1 Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			0		150		200		250		350		350		DINKES
		1 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
3	1	4 <b>Sasaran :</b>  Meningkatnya mutu layanan kesehatan															
		1) Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi baik (%)	85%	88%		91%		94%		97%		99%		100%			
		<b>1 URUSAN KESEHATAN</b>															
		- Program standarisasi Pelayanan Kesehatan			467		550		600		650		700		800		DINKES
		1 Cakupan Puskesmas yang mengirimkan Laporan ke dinas Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 cakupan Program yang di kembangkan di bidang kesehatan	2	2		2		2		2		2		2			
		- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			20.820		22.000		23.000		24.000		25.000		26.000		DINKES
		1 Pembangunan baru Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan jaringannya	0	1		1		1		1		1		1			
		2 Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas.Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6	5		5		5		5		5		5			
		3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	6	6		6		6		6		6		6			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4 Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	6		6		6		6		6		6		
		5 Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		6 Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	60%	70%		80%		90%		95%		100%		100%		
		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata			20.012		60.505		28.469		29.692		33.231		29.645	DINKES, RSUD, BLUD RSUD
		1 Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	80%	80%		90%		95%		95%		95%		95%		DINKES
		2 Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama	12	12		12		12		12		12		12		
		3 Tersedianya penyimpanan obat di Rumah Sakit	1 unit	1 unit		-		-		1 Unit		-		-		RSUD
		4 Tersedianya ruang perawatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		-		-		-		-		
		5 Berfungsinya ruang operasi yang terintegrasi	3 Paket	-		3 Paket		1 Paket		-		-		-		
		6 Tersedianya fasilitas rehabilitasi medik	1 Paket	-		1 Paket		-		-		-		-		
		7 Tersedianya pelayanan laboratorium klinik	1 Unit	-		1 Unit		1 Unit		-		-		-		
		8 Pengelolaan limbah yang berfungsi baik	1 Paket	-		1 Paket		-		-		-		-		
		9 Tertatanya fungsi bangunan rumah sakit	1 Paket	-		1 Paket		-		-		-		-		
		10 Bertambahnya alat kesehatan yang dibutuhkan		5 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		
		11 Lancarnya pengantaran rujukan pasien	-	-		1 Unit		-		2 Unit		-		-		
		12 Tersedianya mebeleur gedung rawat inap dan penunjang lainnya	-	-		1 Unit		-		-		-		-		
		13 Tersedianya aparatur dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
		14 Tersedianya CSSD	-	1 Unit		-		-		-		-		-		
		15 Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi pasien hemodialisa	-	-		-		-		-		1 Unit		-		
		16 Persentase pemakaian tempat tidur pasien (BOR)	66,26%	68%		70%		72%		75%		77%		68%		BLUD RSUD
		17 Rata-rata lama perawatan pasien (ALOS)	3,8	3,7		3,6		3,5		3,4		3,3		3,3		
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata			1.152	0	1.775	0	1.885	0	1.890	0	1.905	0	6.422	RSUD , BLUD RSUD
		1 Terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit	100	100		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terpeliharanya Alat-alat kesehatan yang berfungsi sesuai dengan standar Rumah sakit Tipe C	100	100	12 bln		12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		
		Peralatan kantor penunjang pelayanan berfungsi dengan baik	100	100	12 bln		12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		
		Terpeliharanya perlengkapan mebeuleur yang baik guna menunjang pelayanan di RSUD	100	100	12 bln		12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		
		Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	61%	64%	100%		100%			100%		100%		100%		BLUD RSUD
		- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			95.082	0	98.570	0	99.070	0	99.570	0	100.070	0	101.000	DINKES, BLUD RSUD
		1 Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	100%	100%	100%		100%			100%		100%		100%		
		2 Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12	12	12		12			12		12		12		
		3 Integrasi JKN	12	12	12		12			12		12		12		
		4 Terselenggaranya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	12	12	12		12			12		12		12		
		5 Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	100%		100%			100%		100%		100%		
		6 Peningkatan jumlah jenis pelayanan kesehatan	12 plynn	12 plynn	13 plynn		14 plynn			15 plynn		15 plynn		15 plynn		
		- Program peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan			0	0	100	0	650	0	600	0	650	0	650	RSUD & BLUD RSUD
		1 Tipe kelas Rumah Sakit rujukan regional JKN wilayah Sumsel	-	B	B		B			B		B		B		
		2 Tingkatan akreditasi rumah sakit	-	Madya	Madya		Pari purna			Pari purna		Pari purna		Pari purna		
		3 Tingkat Akreditasi RS	0%	madya	madya		madya			utama		utama		utama		
		<b>2 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>371</b>		<b>1.698</b>		<b>1.771</b>		<b>1.933</b>		<b>2.066</b>		<b>2.263</b>	
		- Program Keluarga Berencana			95		294		308		324		336		357	DPPKB
		1 Prevalensi peserta KB aktif	82,04%	79,00%	79,05%		80,00%			80,05%		81,00%		81,00%		
		2 Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	8,10%	13,00%	12,70%		12,50%			12,30%		12,00%		12,00%		
		3 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100,00%		100,00%			100,00%		100,00%		100,00%		
		- Program Pengendalian Penduduk			75		147		154		162		170		178	DPPKB
		1 Penurunan Laju penduduk	0,30%	0,30%	0,30%		0,30%			0,30%		0,30%		0,30%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga			75		147		154		162		170		178	DPPKB
		1 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	25,42%	27,42%		28,42%		29,42%		30,42%		32,42%		34,42%		
		2 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	10%	13%		15%		20%		24%		25%		26%		
		3 Cakupan kesehatan reproduksi remaja	28%	32%		36%		40%		44%		48%		52%		
		- Program Penyuluhan dan Penggerakan serta penguatan keluarga kecil dan berkualitas			75		165		175		185		190		200	DPPKB
		1 Persentase keluarga mandiri	75%	75%		80%		90%		95%		100%		100%		
		- Program meningkatnya dukungan sarana penyuluh KB			51		945		980		1.100		1.200		1.350	DPPKB
		1 Terpenuhinya dukungan sarana Pelayanan KB	75%	75,00%		80%		90%		95%		100%		100%		
3	1	5 Sasaran : Meningkatkan pemberdayaan Gender dan perlindungan anak														
		1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,31%	60,54%		62,77%		65,01%		67,24%		69,47%		71,70%		
		<b>1 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>715</b>		<b>1.781</b>		<b>1.877</b>		<b>1.974</b>		<b>2.073</b>		<b>2.171</b>	
		- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			155		163		171		179		189		197	DPPPA
		1 Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	15	20		20		25		25		30		30		
		2 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100		100		100		100		100		100		
		3 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS	100	100		100		100		100		100		100		
		4 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	50	50		50		55		60		65		70		
		5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50		50		50		60		70		80		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		7 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	54	50	55	55	60	65	70	75	80	85	90	100		
		8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	50	60	70	80	90	100							
		9 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5	6	7	8	9	9							
		10 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100		
		- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			45	47	50	52	55	57						DPPPA
		1 Rasio KDRT perempuan	0,90%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%			
		2 Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	2	2	2	4	4	4	4	8						
		3 Rasio KDRT	0,90%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%			
		4 Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%			
		5 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%			
		- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			400	725	765	805	845	885						DPPPA
		1 Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00			
		- Program Peningkatan Perlindungan Anak			0	725	765	805	845	885						
		1 Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	23%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		- Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak			70	74	77	81	85	89						DPPPA
		1 Jumlah kecamatan layak anak	0	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4			
		- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak			45	47	50	52	55	57						DPPPA
		1 Jumlah Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang diperdakan	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		<b>MISI 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>														
4	1	<b>Tujuan:</b>  Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	5,03%											5,5%	
4	1	1	<b>Sasaran :</b>  Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1) Nilai Tukar Petani	92,42%	94%	95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	100%		
<b>1 URUSAN PANGAN</b>					0	1.390	1.420	1.440	1.465	1.615						
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan					0	1.390	1.420	1.440	1.465	1.615						DKPTPH
			1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	90,8	90,9	100	100	100	100	100	100	100	100		
			2	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesiediaan Energi Untuk Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)	2304	2389	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
			3	Pola Pangan Harapan (PPH) Kesiediaan Protein Untuk Konsumsi (Gram/Kapita/Hari)	61,40	61,90	62,00	62,50	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00		
			4	Cadangan Pangan Daerah												
				- Pemerintah (Beras/Ton)	50	75	100	125	150	175	200					
				- Masyarakat (Gabah/Ton)	770	780	790	800	810	820						
			5	Persentase lumbung pangan yang termanfaatkan	N/A	92%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			6	Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		
			7	Tersusunnya buku SKPG dan peta kawasan pangan	0	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		
			8	Tersedianya buku laporan NBM dan PPH		2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku		
			9	Tersedianya cadangan pangan di daerah rawan pangan	0	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg	10.000 Kg		
			10	Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber pangan gizi	0	18 Kwt	21 Kwt	24 Kwt	27 Kwt	30 Kwt	30 Kwt	30 Kwt	30 Kwt	30 Kwt		
			11	Tersedianya laporan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
			12	Tersedianya cadangan pangan di tiap lumbung pangan masyarakat	0	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg	10000 kg		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		13 Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan	0	3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		
	<b>2 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>4.065</b>		<b>6.270</b>		<b>9.900</b>		<b>11.750</b>		<b>15.275</b>		<b>18.350</b>	
	- Program Pengembangan Budidaya Perikanan				1.703		1.950		2.500		3.200		4.300		5.650	DISKAN
		1 Persentase Produksi Perikanan Budidaya	5%	5%		5%		7%		10%		15%		20%		
		2 Persentase Produksi Benih Ikan Unggul	5%	5%		10%		20%		35%		55%		80%		DISKAN
		3 Persentase Pokdakan yang Aktif	96 kelompok	50%		55%		65%		75%		85%		100%		
		4 Persentase UPR/HSRT yang Aktif	18 UPR/HSRT	10%		15%		25%		40%		60%		80%		
	- Program Pengembangan Perikanan Tangkap				1.061		1.720		2.200		2.700		3.475		5.350	DISKAN
		1 Persentase Produksi Perikanan Tangkap	26005 ton	2%		5%		8%		12%		20%		35%		DISKAN
		2 Persentase KUB Nelayan yang Aktif	38 KUB	10%		20%		35%		50%		75%		100%		
		3 Persentase Pelayanan TPI Sungai Lumpur	25 surat	50%		60%		70%		90%		120%		170%		
	- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan				1.302		1.550		2.100		1.850		2.150		1.600	DISKAN
		1 Persentase Penurunan Illegal Fishing	20 kasus	10%		20%		30%		50%		75%		100%		
		2 Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Aktif	10 kelompok	10%		30%		50%		70%		90%		100%		
		3 Pelestarian Sumberdaya Perikanan	15 lokasi	15 lokasi		16 lokasi		16 lokasi		16 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		
		4 Persentase Pengelolaan Hasil Perikanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				0		200		250		300		400		550	DISKAN
		1 Presentase Tingkat Konsumsi Ikan perkapita	33,6 Kg/Kapita	2%		5%		10%		15%		25%		50%		
	- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar				0		0		2.000		2.000		2.500		3.500	DISKAN
		1 Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau dan Air Tawar (kawasan minapolitan) yang aktif	868 ha	2%		3%		4%		5%		6%		7%		
	- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan				0		650		650		1.500		2.250		1.500	DISKAN
		1 Peningkatan Jalan Produksi Budidaya	0 unit			1 unit		1 unit		1 unit		2 unit		2 unit		
		2 Prosentase Pengembangan/ Penyediaan Pabrik Pakan/Mesin Pakan Mandiri	3 unit	2 unit		3 unit		4 unit		5 unit		5 unit				
	- Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan				0		200		200		200		200		200	DISKAN
		1 Tersedianya Data Base Perikanan	1 buku	1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		
	<b>3 URUSAN PERTANIAN</b>				<b>10.576</b>		<b>20.380</b>		<b>22.765</b>		<b>24.800</b>		<b>27.480</b>		<b>30.400</b>	
	- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				320		1.050		675		950		1.250		1.575	DKPPTH / D BUNNAK
		1 Nilai Tukar Petani	102,11	103,45		104,95		105,60		106,50		107,30		108,20		
		2 Persentase peningkatan kelas kelompok tani	10 Kelompok	10		10		10		10		10		10		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Persentase kelompok tani yang berprestasi	0%	100		100		100		100		100		100		
		4 Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan	100%	100		100		100		100		100		100		
		5 Jumlah kelompok tani/ pelaku agribisnis yang mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis	0	20 Klp		25 Klp		30 Klp		35 Klp		40 Klp		45		
		6 Jumlah petani/ pendamping yang mengikuti PEDANA/PENAS KTNA	0	60 org		0		60 Org		60 Org		0		60 Org		
		7 Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK)	N/A (BPS)													
		7 Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	10 klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
		8 Tersedianya data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 PBSN	54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		
		- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ perkebunan			265	-	845	-	890	-	935	-	980	-	1.025	DKPTPH, DBUNNAK
		1 Promosi atas hasil produksi pertanian (event)	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
		2 Jumlah pasar tani	0	2 Unit		4 Unit		6 Unit		8 Unit		10 Unit		12 Unit		
		3 Stabilitasnya harga dan pasokan pangan pokok melalui toko tani indonesia	0	1 Unit		-		-		-		-		-		
		4 Meningkatnya promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan	20 Produk, 5 UPPB	1 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		
		- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			730	0	1.600	0	1.650	0	1.800	0	1.800	0	1.800	DKPTPH, DBUNNAK
		1 Terpenuhinya Benih Padi Penangkaran unggul bermutu	2.642 ton	2650		2658		2666,00		2674,00		2682,00		2690,00		
		2 Meningkatnya pengetahuan petani tentang peningkatan produksi perkebunan	10 Klmpk	20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		
		3 Tersedianya saprodi perkebunan	15 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		
		4 Meningkatnya luas areal dan produksi tanaman perkebunan	50 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		
		5 Terhindarnya kebun masyarakat dari kebakaran	200 Ha	200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		
		- Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan Lapangan			644	-	850	-	900	-	1.000	-	1.100	-	1.300	DKPTPH, DBUNNAK
		1 Persentase penyuluh yang bersertifikat	2	-		-										
		2 Tingkat pemenuhan 1 desa 1 penyuluh	179 PPL	3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL		
		3 Terpenuhinya insentif/ alat peraga/ alat bantu penyuluh pertanian	79	79		220		223		226		229		232		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4 Peningkatan wawasan/ motivasi penyuluh pertanian setelah mengikuti pertemuan teknis kabupaten	179 PPL	179		220		223		226		229		325		
		5 Meningkatnya kapasitas penyuluh perkebunan lapangan	47 Orang	47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		
		- Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			6.562	-	11.790	-	14.080	-	15.495	-	17.180	-	19.680	DKPTPH , DBUNNAK
		1 Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK) (Lihat di SDG's)	N/A (BPS)	68.121.992		71.102.279		74.082.565		77.062.852		80.043.139				
		2 Tingkat pemenuhan data base pertanian	10	10		10		10		10		10		10		
		3 Jumlah alat pasca panen yang tersedia														
		Terpal Jemur	0	250		300		350		400		450		500		
		RMU	0	1		1		2		2		2		3		
		Combine harvester	0	5		5		5		5		5		5		
		Power Thresher	0	10		10		15		15		15		15		
		Corn seller	0	10		10		15		15		15		15		
		Alat Packing beras	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
		4 Jumlah luas tanaman padi/palawija														
		Produksi tanaman pangan (ton)														
		- Padi	0	846.068		862.989		880.249		897.854		915.811		933.768		
		- Jagung	0	47.172		48.587		50.045		51.546		53.092		54.685		
		Produktivitas Tanaman pangan (ku/ha)														
		- Produktifitas Padi (Ku/Ha)	0	51,17		52,19		53,24		54,30		55,39		56,47		
		- Produktifitas Jagung (Ku/Ha)	0,00	42,99		43,00		43,21		43,50		43,75		44,25		
		5 Jumlah luas pertanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar	0 ha	100		150		200		250		300		800		
		6 Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
		7 Persentase lumbung pangan yang termanfaatkan	N/A	80 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen		
		8 Panjang Jalan Usaha Tani	0	3.000 M		4.000 M		5.000 M		6.000 M		7.000 M		8.000 M		
		9 Tingkat pemenuhan laporan agroklimat	0	18 Lap		18 Lap		18 Lap		18 Lap		18 Lap		18 Lap		
		10 Tingkat pengawasan pupuk bersubsidi	0	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		
		11 Tercukupinya kesediaan air pada kawasan tanaman pangan	0	225 Ha		250 Ha		275 Ha		300 Ha		325 Ha		350 Ha		
		12 Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Program Pajale	0	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		
		13 Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi program kawasan hortikultura	0	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		
		14 Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan produksi Duku	0	3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		
			23.869	24.585		25.322		26.081		26.863		27.668		28.498		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Produksi Durian	5.976	6.155		6.339		6.529		6.724		6.925		7.132		
		produksi Mangga	21548 Ton	21.550		21.555		21.565		21.570		21.570		21.570		
		Produksi Pisang	12.619	12.997		13.386		13.787		14.200		14.626		15.626		
		15 Jumlah produksi tanaman sayur														
		Produksi Cabe Besar	145.234	149.591		154.078		158.700		163.461		168.364		173.414		
		Produksi Cabe Rawit	34.656	35.695		36.765		37.867		39.003		40.173		41.378		
		16 Produktivitas tanaman sayuran														
		Produksi Cabe Besar	15,8	16,1		16,4		16,7		17		17,3		17,6		
		Produksi Cabe Rawit	16,4	16,7		18		18,3		18,6		18,9		19,2		
		17 Tersedianya alat pasca panen produk perkebunan dan peternakan	26 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
		- Program pengembangan agribisnis			75		0		0		0		0		0	DKPTPH
		1 Persentase Gapoktan yang dibina	-	-		-		-		-		-		-		
		- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan			400		800		950		800		950		800	DISBUNNAK
		1 Terlaksananya kajian pengembangan perkebunan	1 Dok	1 Dok		0		1 Dok		0		1 Dok		0		
		2 Tersedianya prasarana dan sarana perkebunan tepat guna	18 Klpk	3 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		
		- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			300		400		400		400		400		400	DISBUNNAK
		1 Terciptanya kesehatan hewan di masyarakat	22.000 Ekor	22.000 Ekor		20.000 Ekor		18.000 Ekor		16.000 Ekor		14.000 Ekor		14.000 Ekor		
		- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			1.210		2.175		2.200		2.550		2.800		2.800	DISBUNNAK
		1 Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dan meningkatnya populasi ternak	12 Unit, 2.500 Dosis	3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		
		2 Meningkatnya populasi ternak	2.574 Ekor	2.600 Ekor		2.700 Ekor		2.800 Ekor		2.900 Ekor		3.000 Ekor		3.000 Ekor		
		3 Meningkatnya konsumsi gizi produk peternakan	40 Sekolah	75 Sekolah		80 Sekolah		85 Sekolah		90 Sekolah		95 Sekolah		95 Sekolah		
		- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			0		200		200		200		200		200	DISBUNNAK
		1 Peningkatan sarana prasarana pasar hewan	2 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
		- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			0		600		750		600		750		750	DISBUNNAK
		1 Tersedianya kajian pengembangan peternakan (action plane)	1 Dok	1 Dok				1 Dok				1 Dok		1 Dok		
		2 Tersedianya prasarana dan sarana peternakan tepat guna	15 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
		- Program Peningkatan Produksi Peternakan			70		70		70		70		70		70	DISBUNNAK
		1 Persentase tingkat produksi ternak	50	50		50		50		50		50		50		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	1	2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pemberdayaan koperasi	1) Persentase koperasi yang aktif	83,11%	85%		86%		87%		88%		89%		90%		
			<b>1 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>720</b>		<b>915</b>		<b>945</b>		<b>985</b>		<b>1.050</b>		<b>1.095</b>	DISKOP UKMP
			- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				0		100		100		100		100		100	
			1 Persentase Usaha Mikro dan kecil yang memiliki izin usaha	5%	6%		7%		8%		9%		10%		11%			
			- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah				120		185		195		200		220		240	DISKOP UKMP
			1 Persentase UMKM yang sehat	15%	16%		17%		18%		19%		20%		21%			
			2 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1%	1%		2%		3%		4%		5%		6%			
			- Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah				225		175		190		220		250		270	DISKOP UKMP
			1 Persentase UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	15%	16%		17%		18%		19%		20%		21%			
			2 Persentase pemenuhan sistem pendukung usaha bagi koperasi	1%	2%		3%		4%		5%		6%		7%			
			- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				375		455		460		465		480		485	DISKOP UKMP
			1 Persentase koperasi aktif	83%	83%		84%		85%		86%		87%		88%			
			2 Jumlah koperasi berprestasi	3	3		3		3		3		3		3			
			3 Jumlah desa yang mempunyai koperasi aktif	279	286		293		300		307		314		321			
4	1	3	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1) Indeks Gini	0,33	0,32		0,31		0,30		0,30		0,30		0,29		
			<b>1 URUSAN PERDAGANGAN</b>				<b>5.660</b>		<b>8.700</b>		<b>11.850</b>		<b>12.825</b>		<b>14.970</b>		<b>14.995</b>	
			- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				1.600		575		600		650		670		670	DISDAG
			1 Persentase alat UTP yang bertanda tera sah	0%	11		13		15		17		19		21			
			2 Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	85	3		4		5		6		7		8			
			- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				0		450		450		450		450		450	DISDAG
			1 Jumlah komoditi yang diekspor	1	315 Ton		333 Ton		350 Ton		370 Ton		390 Ton		390 Ton			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				4.060		7.300		10.350		11.300		13.350		13.350	DISDAG	
		1 Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	2	2		3		5		5		5		20			
		2 Persentase penyediaan sarana perdagangan	8%	15%		20%		25%		30%		35%		40%			
		3 Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	- Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				0		375		450		425		500		525	DISDAG	
		1 Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	5,36%	10%		20%		30%		40%		50%		55%			
		2 Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	10	20%		30%		40%		50%		60%		65%			
	<b>2 URUSAN PERINDUSTRIAN</b>				<b>595</b>		<b>1.080</b>		<b>1.085</b>		<b>1.115</b>		<b>1.175</b>		<b>1.175</b>		
	- Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				0		200		200		200		200		200	DISKOP UKMP	
		1 Jumlah IKM Yang menerapkan inovasi	5	6		7		8		9		10		11			
	- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				20		200		200		200		250		200		
		1 Jumlah rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah	72	75		80		85		90		95		100			
		2 Jumlah IKM yang menjalin kerjasama dengan swasta	0	1		2		3		4		5		6			
	- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				130		80		85		90		95		100		
		1 Jumlah produk IKM yang memiliki SNI	0	0		1		2		3		4		5			
	- Program Penataan Struktur Industri				200		100		100		125		130		150		
		1 Persentase penataan hubungan antara industri hulu dan hilir	25%	30%		35%		40%		45%		50%		60%			
	- Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				245		500		500		500		500		525	DISDAG	
		1 Jumlah IKM yang memiliki sarana informasi	5	7		9		11		13		15		17			
		2 Pameran hasil industri kecil dan kerajinan	3	4		4		4		4		4		4			
4	1	4 Sasaran : Meningkatnya perluasan kesempatan kerja															
		1) Tingkat pengangguran terbuka	3,45	3,45		3,44		3,43		3,42		3,41		3,40			
		<b>1 URUSAN TENAGA KERJA</b>				<b>485</b>		<b>389</b>		<b>418</b>		<b>447</b>		<b>475</b>		<b>500</b>	
		- Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja				125		249		268		287		305		320	DISNAKER-TRANS
		1 Tingkat Pengangguran terbuka	3,45%	3,25%		3,00%		2,75%		2,50%		2,25%		2,00%			
		2 Rasio penduduk yang bekerja	78,30%	86,30%		86,50%		86,80%		87,00%		87,25%		87,40%			
		3 Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20%	25%		30%		35%		40%		45%		50%			
		- Program Peningkatan kesempatan kerja				200		65		70		75		80		85	DISNAKER-TRANS

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	44,90%	45%		48%		50%		52%		54%		55%		
		- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			160		75		80		85		90		95	DISNAKER-TRANS
		1 Presentase Sengketa Pengusaha-pekerjaan yang diselesaikan	20%	22%		25%		30%		35%		40%		45%		
4	1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya PAD	1) Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	10,52%	10,55%		10,6%		10,7%		10,8%		10,9%		11%	
		<b>1 KEUANGAN, URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>			<b>1.985</b>		<b>2.919</b>		<b>3.068</b>		<b>3.312</b>		<b>3.486</b>		<b>3.635</b>	
		- Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah			1.985		2.919		3.068		3.312		3.486		3.635	BPPD
		1 Presentase Peningkatan Pencapaian PAD	10,5%	10,55%		10,60%		10,70%		10,80%		10,90%		11%		
		<b>2 URUSAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>732</b>		<b>1.150</b>		<b>1.150</b>		<b>1.175</b>		<b>1.175</b>		<b>1.175</b>	
		- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			225		700		700		700		700		700	DPMPPTSP
		1 Presentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,06%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		
		2 Jumlah Pengunjung dalam pameran investasi	100	300		300		300		300		300		300		
		3 Jumlah buku informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kab.OKI	150	50		50		50		50		50		50		
		4 Jumlah Perusahaan yang dibina	6	50		50		50		50		50		50		
		- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			162		200		200		200		200		200	
		1 Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,393 T	3.938		4.331		4.765		5.241		5.767		6.342		
		2 Ketersediaan sistem informasi penanaman modal	100	30 izin		30 izin		30 izin		30 izin		30 izin		30 izin		
		3 Tingkat kualitas pelayanan perizinan	100	100		100		100		100		100		100		
		4 Ketersediaan peta investasi	1	0		1 dok		0		0		0		1 dok		
		- Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan perizinan			345		250		250		275		275		275	DPMPPTSP
		1 Pelayanan Terpadu satu Pintu Kepada Masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2 Verifikasi, Visitasi dan Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		<b>3 URUSAN PARIWISATA</b>			<b>2.102</b>		<b>7.459</b>		<b>9.604</b>		<b>7.359</b>		<b>7.045</b>		<b>7.409</b>	
		- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			0		1.905		2.285		2.325		2.521		2.655	DISBUDPAR
		1 Jumlah kunjungan wisatawan	10.242	10.444		10.546		10.646		10.748		10.850		10950		
		2 Tingkat promosi pariwisata	29	30		40		50		60		70		70		
		- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			353		2.700		3.720		2.240		1.710		1.810	DISBUDPAR
		1 Peningkatan Jumlah objek wisata	2	2		2		2		3		3		3		
		2 Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	15,38	23,08		30,77		38,46		46,15		53,85		53,85		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Program pengembangan kemitraan			15		1.120		1.865		1.060		1.080		1.210	DISBUDPAR
		1 Tingkat pengembangan kemitraan	161	166		172		177		182		187		193		
		- Program Pengembangan daya tarik wisata			1.734		1.734		1.734		1.734		1.734		1.734	DISBUDPAR
		1 Persentase pemeliharaan objek wisata	50	50		50		50		50		50		50		
4	1	<b>Sasaran :</b> - Menurunkan angka kemiskinan	1) Angka kemiskinan	15,60%	14,66%		13,72%		12,78%		11,83%		10,89%		9,95%	
		<b>1 URUSAN SOSIAL</b>				<b>1.000</b>		<b>783</b>		<b>1.915</b>		<b>898</b>		<b>2.033</b>		<b>1.019</b>
		- Program Pengembangan data dan informasi statistik daerah				1000		150		1250		200		1300		250
		1 Tersedianya data pendukung program					3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok	
		- Program bantuan dan jaminan sosial			0		633		665		698		733		769	DINSOS
		1 Terpuhinya kebutuhan dasar dan pemberian bantuan keluarga miskin	18 Kec	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		
		2 Terpuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		3 Terlaksananya kesiap siaga bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5		<b>MISI 5 : Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan</b>														
5	1	<b>Tujuan :</b> Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan	1) Indeks kualitas lingkungan hidup	64										62		DLH
5	1	<b>Sasaran :</b> Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan	1) Indeks tutupan lahan 2) Indeks kualitas air 3) Indeks kualitas udara	55,97 65,38 99,06	55,97 64 99,06	54 64 98	53 63 97	52 63 96,00	51 62 95,00	50 62 94,00						
		<b>1 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>3.900</b>		<b>4.290</b>		<b>4.719</b>		<b>5.191</b>		<b>5.710</b>		<b>6.281</b>
		- Program Perencanaan Tata Ruang				2.650		2.915		3.207		3.527		3.880		4.268
		1 Keberadaan Peraturan Daerah RTRW	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
		- Program Pemanfaatan Ruang			100		110		121		133		146		161	DPUPR
		1 Persentase Luas Wilayah Produktif Pemanfaatan Ruang	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1.150		1.265		1.392		1.531		1.684		1.852	DPUPR
		1 Ketaatan terhadap RTRW	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2 Persentase luas wilayah perkotaan yang sesuai tata ruang	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		<b>2 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>5.239</b>		<b>12.239</b>		<b>25.609</b>		<b>6.442</b>		<b>6.297</b>		<b>6.527</b>
		- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.224		10.173		24.224		4.791		4.931		4.936
		1 Persentase penanganan sampah	6,06 %	7 %		8 %		9%		10 %		11 %		12 %		
		2 Persentase pengurangan sampah	8,5 %	10 %		12 %		15 %		17 %		19 %		21 %		
		- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			636		1.536		891		806		996		1.021	DLH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64 %	64 %		63 %		63 %		62 %		62 %		62 %		
		Indeks kualitas air	65,38 %	64		64 %		63 %		63 %		62 %		62 %		
		Indeks kualitas udara	99,09 %	99,09		98 %		97 %		96 %		95 %		94 %		
		Indeks Tutupan Lahan	55,97 %	55,97		54 %		53 %		52 %		51 %		50 %		
		2 Persentase tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		3 Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan pada UPT Laboratorium Lingkungan	93 sample	93 sample		100 sample		150 sample		180 sample		200 sample		250 sample		
		4 Persentase wilayah dalam kota kayuagung yang bersih	80	80		80		80		80		80		80		
		5 Persentase jumlah peralatan kualitas lingkungan (alat laboratorium)	95	95		95		95		95		95		95		
		6 Persentase penataan pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	7 Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	30 prshn	30 prshn		40 prshn		45 prshn		50 prshn		55 prshn		60 prshn			
	8 Persentase Pelayanan Koordinasi Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	9 Jumlah desa pembinaan kampung iklim	2 Desa	2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa			
	- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				175		375		325		675		175		375	DLH
	1 Persentase Jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah			
	2 Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup (informasi status mutu air, udara)	83 %	85 %		87 %		90 %		95 %		97 %		100 %			
	- Program Peningkatan Pengendalian Polusi				20		20		20		20		20		20	DLH
	1 Tingkat pengendalian polusi	20%	30%		30%		30%		30%		30%		30%			
	- Program Kerjasama Pembangunan				100		100		100		100		100		100	DLH
	1 Jumlah perusahaan yang mengikuti forum CSR - pkbl Kab. OKI	10 prshn	10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn			
	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				85		35		50		50		75		75	DLH
	1 Jumlah ruang terbuka hijau	2 desa	2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		2 desa			
<b>3 URUSAN TRANSMIGRASI</b>				<b>1.045</b>		<b>1.197</b>		<b>1.208</b>		<b>1.213</b>		<b>1.218</b>		<b>1.223</b>		
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				1.045		1.197		1.208		1.213		1.218		1.223	DISNAKER-TRANS	
1 Rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	2 KW	4 KW		4 KW		4 KW		4KW		4 KW		4 KW				
2 UPT yang dibina dan dikembangkan (Ekosobud,Sapras)	2 UPT	1 UPT		1 UPT		1 UPT		1 UPT		2 UPT		2 UPT				
5 1 2	<b>Sasaran :</b>															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	1) Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	85%	86		87		89		91		93		95%		
	<b>1 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				50		50		50		50		70		70	
	- Program Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan				50		50		50		50		70		70	DLH
	1 Jumlah penanganan kebakaran hutan dan lahan	2 desa	2 desa			2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		2 desa		
	<b>2 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				1.470	0	1.530	0	1.655	0	1.600	0	1.775	0	2.085	
	- Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				220		230		290		300		310		320	SATPOL PP & PK
	1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Tingkat pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran		-	-		80%		85%		90%		95%		100%		
	- Program Layanan Informasi di Daerah Rawan Bencana				0		250		320		250		250		320	BPBD
	1 Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		18 Lok	18 Lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		
	- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				0		500		310		300		570		600	BPBD
	1 Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	2 Desa			2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		
	2 Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mendapat peralatan pelindung		-	-		45 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang		45 Orang		
	- Program Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana				0		400		555		650		525		725	BPBD
	1 Tingkat Kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan status darurat bencana		80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
	2 Jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	10 Posko	10 Posko			10 Posko		10 Posko		10 Posko		10 Posko		10 Posko		
	3 Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	1 Lap	1 Lap			-		-		1 Lap		-		1 Lap		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana			250		150		180		100		120		120	BPBD
		1 Jumlah lokasi yang dilakukan survey penaksiran kerusakan dan kerugian pasca bencana	1 Lap			1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
		- Program Tanggap Darurat			520		0		0		0		0		0	BPBD
		1 Persentase penanganan bencana	50%	60%												
		- Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana			480		0		0		0		0		0	BPBD
		1 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bencana	50%	60%												
<b>6</b>		<b>MISI 6 : Menciptakan Kehidupan Sosial- Budaya Masyarakat yang Relegius, Tertib, Aman dan Nyaman</b>														
6	1	<b>Tujuan :</b>  Menciptakan suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang baik													0	
6	1	<b>Sasaran :</b>  Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai													0	
		1) Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat	0	0		0		0		0		0		0		
		<b>1 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>2.235</b>		<b>5.180</b>		<b>6.080</b>		<b>6.867</b>		<b>7.911</b>		<b>8.835</b>	
		- Program Peningkatan peran serta masyarakat			292		1.260		1.480		1.820		2.065		2.440	KESBANGPOL
		1 Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat	60%	65%		70%		75%		80%		90%		95%		
		2 Angka (Penurunan) Kasus Konflik Sosial	60%	65%		70%		75%		80%		90%		95%		
		3 Cakupan pemantauan Kewaspadaan Dini di daerah	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		
		5 Cakupan pemantauan Perkembangan Wawasan Kebangsaan di daerah	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		
		6 Cakupan pemantauan perkembangan Forum kerukunan umat beragama dan Forum Silaturahmi Umat Beragama		-		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		
		- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			333		995		1.180		1.322		1.471		1.315	KESBANGPOL, SATPOL PP & PK
		1 Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	1		1		1		1		1		1		
		2 Pemantauan Tenaga Kerja asing dan organisasi masyarakat asing	18	18		18		18		18		18		18		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)				100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		
		4 Persentase peningkatan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			450		1.380		1.550		1.710		1.880		2.050	KESBANGPOL
		1 Jumlah tokoh Agama yang memahami pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama	75 org	142 org		142 org		142 org		142 org		142 org		142 org		
		2 Jumlah peserta penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	60 org	200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		
		3 Jumlah peserta pengembangan Nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 org	-		120 org		120 org		120 org		120 org		120 org		
		4 Jumlah masyarakat yang dilatih (Bela Negara)	663 org	-		600 org		620 org		650 org		660 org		680 org		
		- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			0		150		175		190		200		220	KESBANGPOL
		1 Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang memahami wawasan kebangsaan	60 org	-		142 org		142 org		142 org		142 org		142 org		
		- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			445	-	90	-	110	-	150	-	375	-	650	KESBANGPOL, SATPOL PP & PK
		1 Cakupan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Serentak	18 kec	-		-		-		-		18 kec		-		
		2 Cakupan pemantauan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif		18 kec		-	0	-	0	-	0	-	0	18 kec	250	
		3 Cakupan pemantauan anggota Linmas Hansip/ Se-Kab. OKI	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		
		4 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan hansip	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		5 Tingkat engamanan Pilpres/Pileg/Pilkada Gubernur/Bupati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		- Program pendidikan politik masyarakat			240	-	195	-	215	-	235	-	390	-	430	KESBANGPOL, SATPOL PP & PK
		1 Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	-		2		2		2		2		2		
		2 Jumlah pengurus partai politik yang ikut forum diskusi politik	60	-		60		60		60		60		60		
		3 Jumlah aparat yang memahami aturan pelaksanaan pileg dan pilkada	120									120		120		
		5 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Pengembangan Nilai Budaya				0		100		150		200		250		300	KESBANGPOL
	1 Persentase aset Budaya benda dan non benda yang terverifikasi		10	-		10		10		10		10		10		
	- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				475		940		1.130		1.140		1.170		1.300	SATPOL PP & PK
	1 Persentase penegakkan perda dan Perkada		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Peningkatan Pengamanan, pengawalan pejabat dan pengamanan aset / kekayaan daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat				0		70		90		100		110		130	SATPOL PP & PK
	1 Persentase penurunan angka penyakit masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	<b>2 URUSAN PERTANAHAN</b>				<b>10.783</b>		<b>2.055</b>		<b>32.095</b>		<b>2.225</b>		<b>1.995</b>		<b>2.525</b>	
	- Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				10.150		400		30.405		500		250		755	D PERTANAHAN
	1 Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		0	100		100		100		100		100		100		
	- Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan				633		1.455		1.490		1.525		1.545		1.570	D PERTANAHAN
	1 Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		100	100		100		100		100		100		100		
	- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				0		200		200		200		200		200	D PERTANAHAN
	1 Tersedianya penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal		1 lap	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		
	<b>3 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				<b>3.595</b>		<b>6.280</b>		<b>6.975</b>		<b>7.875</b>		<b>8.650</b>		<b>9.875</b>	
	- Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan dan Kesenian				3.595		6.280		6.975		7.875		8.650		9.875	Bagian Kesra
	1 Jumlah pelayanan pendukung peningkatan peribadatan		3155 org	3155 org		4155		4155		4200		4200		4200		
	2 Jumlah terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji		700 org	700 org		650 org		650 org		650 org		450 org		450 org		
	3 Jumlah pembinaan dan peningkatan kerohanian masyarakat		1000 org	1000 org		1000 org		1250 org		1250 org		1500 org		1500 org		
	4 Cakupan pembinaan keagamaan		3 lokasi	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		
	5 Jumlah peserta pelayanan administrasi pernikahan		140 pasang	140 pasang		205 pasang		272 pasang		317 pasang		350 pasang		380 pasang		
	6 Jumlah peserta pelayanan pendukung pendidikan peribadatan		2000 org	2000 org		2250 org		2500 org		2750 org		3000 org		4000 org		
	<b>4 URUSAN KEBUDAYAAN</b>				<b>461</b>		<b>6.165</b>		<b>6.750</b>		<b>7.515</b>		<b>8.155</b>		<b>8.155</b>	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			78		1.050		1.010		900		940		940	DISBUDPAR
		1 Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	31 CB	0%		1%		2%		3%		4%		5%		
		2 Persentase Cakupan Kajian Seni	15 Seni	0%		1%		2%		3%		4%		5%		
		- Program Pengelolaan Keragaman Budaya			185		2.875		3.350		3.775		4.075		4.075	DISBUDPAR
		1 Budaya	4	4		5		6		7		7		7		
		- Program Pengembangan Nilai Budaya			198		940		790		890		940		940	DISBUDPAR
		1 Persentase peran serta pelaku Budaya dalam mewujudkan seni budaya OKI	25	25		25		25		25		25		25		
		- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			0		1.300		1.600		1.950		2.200		2.200	DISBUDPAR
		1 Jumlah Tampilan Tim Kesenian Kab. OKI di Luar Daerah/Luar Negeri	100	100		100		100		100		100		100		
6	1	2 Sasaran :														
		Menurunnya jumlah peyandang masalah kesejahteraan sosial	1) Angka PMKS yang mendapat layanan	8%	10		10		10		10		10		10%	
		<b>1 URUSAN SOSIAL</b>			<b>832</b>		<b>1.127</b>		<b>1.184</b>		<b>1.243</b>		<b>1.304</b>		<b>1.370</b>	
		- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.			169		177		186		195		204		215	DINSOS
		1 Persentase PMKS mandiri	NA	20,0%		20,0%		20,0%		20,0%		20,0%		20,0%		
		2 Terbinanya KK komunitas adat terpencil	1 klmpk			1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 Klmpk		
		3 Tercapainya pemberian bantuan sarana lingkungan bagi desa terpencil	5 Unit			5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		
		- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			479		750		788		827		868		912	DINSOS
		1 Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS				100%		100%		100%		100%		100%		
		2 Tersedianya pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban trafficking	10	12%		14%		15%		18%		20%		33%		
		3 Persediaan buffer stock untuk korban bencana	6.000	1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		
		- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			25		0		0		0		0		0	DINSOS
		1 Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan	50	50 org												
		2 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial	70	70 Org												

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/IMPACT/OUTCOME	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				130		200		210		221		232		243	DINSOS
		1 Terbetuknya WKSBM Kab. OKI		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		2 Persentase Organisasi sosial yang berdaya		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		3 Terlaksannya pembinaan dan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi		20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		4 Tingkat pembinaan tenaga sosial masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	- Program Pembinaan anak terlantar dan lanjut usia				29		0		0		0		0		0	DINSOS
		1 Tingkat kemandirian anak terlantar dan lanjut usia	20%	20%												



# *Bab VII*

## *Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

### **7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Kerangka Pendanaan Pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah.

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kedepan memegang prinsip “*money follow programme*” yaitu program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang akan mendapatkan anggaran. Pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, pinjaman daerah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan akan digunakan untuk mendanai pembangunan yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2024 Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan dalam tabel 7.1. berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024**  
(dalam jutaan)

NO	URAIAN	PROYEKSI					Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2,420,908</b>	<b>2,839,113</b>	<b>2,996,566</b>	<b>3,104,077</b>	<b>3,288,544</b>	<b>3,470,871</b>
1	PENDAPATAN	2,403,175	2,828,181	2,985,634	3,093,145	3,277,612	3,459,939
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	14,773	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971
<b>B</b>	<b>BELANJA + PEMBIAYAAN</b>	<b>2,420,896</b>	<b>2,839,251</b>	<b>2,996,529</b>	<b>3,104,039</b>	<b>3,288,504</b>	<b>3,470,828</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,419,909</b>	<b>2,838,251</b>	<b>2,995,529</b>	<b>3,103,039</b>	<b>3,287,504</b>	<b>3,469,828</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,421,207</b>	<b>1,492,093</b>	<b>1,566,560</b>	<b>1,644,751</b>	<b>1,726,851</b>	<b>1,813,056</b>
a	Belanja Pegawai	964,417	1,012,638	1,063,270	1,116,433	1,172,255	1,230,868
b	Belanja Subsidi	1,761	1,849	1,942	2,039	2,141	2,248
c	Belanja Hibah	13,366	14,000	14,700	15,435	16,206	17,017
d	Belanja Bantuan Sosial	3,135	3,292	3,456	3,629	3,811	4,001
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	140,954	148,001	155,401	163,171	171,329	179,896
f	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	294,824	309,564	325,042	341,294	358,359	376,277
g	Belanja Tidak Terduga	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750

NO	URAIAN	PROYEKSI					Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>998,702</b>	<b>1,345,984</b>	<b>1,428,969</b>	<b>1,458,288</b>	<b>1,560,653</b>	<b>1,656,772</b>
a	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
b	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
c	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN</b>						
C	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
a	Penyertaan modal (inventasi) pemerintahan daerah	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
b	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil analisis

## **7.2. Program Perangkat Daerah**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dengan APBD. Sebagaimana amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Statistik;
- 12) Persandian;
- 13) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 14) Penanaman modal;
- 15) Kepemudaan dan olah raga;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang berupa:

- 1) Pengawasan
- 2) Perencanaan
- 3) Keuangan
- 4) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 5) Penelitian dan Pengembangan
- 6) Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 sesuai dengan arahan visi dan misi Kepala Daerah adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Sedangkan program prioritas dalam urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas daerah adalah sebagai berikut :

#### **7.2.1. Program Setiap Perangkat Daerah**

Program setiap Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah atau disebut program rutin perangkat daerah terdiri dari :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

#### **7.2.2. Program Pembangunan Daerah Urusan Wajib Layanan Dasar**

##### 1. Urusan Pendidikan

- 1) Program pendidikan anak usia dini;
- 2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- 3) Program pendidikan non formal;
- 4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Program manajemen pelayanan pendidikan;
- 6) Program pembinaan pendidikan olahraga dan seni;

- 7) Program pembinaan kehidupan keagamaan;
- 8) Program bantuan operasional sekolah.

## 2. Urusan Kesehatan

- 1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
- 2) Program pelayanan kesehatan;
- 3) Program pengawasan obat dan makanan;
- 4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Program perbaikan gizi masyarakat;
- 6) Program pengembangan lingkungan sehat;
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 8) Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- 9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- 10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- 11) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- 12) Program hygiene sanitasi air bersih dan air minum;
- 13) Program peningkatan dan pengawasan keselamatan kerja dan olahraga;
- 14) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- 15) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- 16) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- 17) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
- 18) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

## 3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 4) Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
- 5) Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
- 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- 7) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
- 8) Program peningkatan jalan dan jembatan;
- 9) Program perencanaan jalan dan jembatan;

- 10) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- 11) Program pembangunan turap, talud, bronjong;
- 12) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- 13) Program perencanaan tata ruang;
- 14) Program pemanfaatan ruang;
- 15) Program pengendalian pemanfaatan ruang.

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- 1) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 2) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- 3) Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) Program penyediaan dan pengelolaan air baku;
- 5) Program pengembangan perumahan;
- 6) Program penataan lingkungan kumuh;
- 7) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- 8) Program pengelolaan ruang terbuka hijau;
- 9) Program pengembangan kota-kota menengah dan besar;
- 10) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- 11) Program pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;
- 12) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- 13) Program lingkungan sehat perumahan;
- 14) Program pembangunan distribusi penyediaan air baku.

#### 5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program peningkatan peran serta masyarakat;
- 2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- 3) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- 4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 5) Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- 7) Program pendidikan politik masyarakat;
- 8) Program pengembangan nilai budaya;
- 9) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat;

- 10) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
- 11) Program layanan informasi di daerah rawan bencana;
- 12) Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 13) Program penanganan, penyelamatan, dan evaluasi korban bencana;
- 14) Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 15) Program tanggap darurat;
- 16) Program pencegahan dan mitigasi bencana.

#### 6. Urusan Sosial

- 1) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 3) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- 4) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- 5) Program pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial;
- 6) Program pembinaan anak terlantar dan lanjut usia;
- 7) Program pengembangan data dan informasi statistik daerah;
- 8) Program bantuan dan jaminan sosial.

### **7.2.3. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Wajib Non Layanan Dasar**

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 2) Peningkatan kesempatan kerja;
- 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

#### 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- 4) Program peningkatan perlindungan anak;
- 5) Program peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak;
- 6) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak.

### 3. Urusan Pangan

- 1) Program peningkatan ketahanan pangan;

### 4. Urusan Pertanahan

- 1) Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- 2) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- 3) Program pengembangan sistem informasi pertanahan.

### 5. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- 2) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4) Program peningkatan pengendalian polusi;
- 5) Program kerjasama pembangunan;
- 6) Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- 7) Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

### 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Program penataan administrasi kependudukan.

### 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- 5) Program pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

## 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Program keluarga berencana;
- 2) Program pengendalian penduduk;
- 3) Program ketahanan kesejahteraan keluarga;
- 4) Program penyuluhan dan penggerakan serta penguatan keluarga kecil dan berkualitas;
- 5) Program meningkatnya dukungan sarana penyuluh KB.

## 9. Urusan Perhubungan

- 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- 3) Program peningkatan pelayanan angkutan;
- 4) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- 5) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
- 6) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

## 10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- 2) Program kerjasama informasi dan mass media.
- 3) Program fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informasi;

## 11. Urusan Statistik

- 1) Program pengembangan data/informasi/statistik
- 2) Program penyelenggaraan statistik sektoral

## 12. Urusan Persandian

- 1) Program Penyusunan tata kelola bidang keamanan informasi dan persandian
- 2) Program operasional layanan persandian untuk mendukung pengamanan informasi
- 3) Program pengawasan dan evaluasi bidang keamanan informasi dan persandian.

### 13. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah (UKM) yang kondusif;
- 2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

### 14. Urusan Penanaman Modal

- 1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 3) Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan.

### 15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- 2) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- 4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

### 16. Urusan Kebudayaan

- 1) Program pengelolaan kekayaan budaya;
- 2) Program pengelolaan keragaman budaya daerah;
- 3) Program pengembangan nilai budaya;
- 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

### 17. Urusan Perpustakaan

- 1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
- 2) Program pengembangan perpustakaan;
- 3) Program peningkatan minat baca.

### 18. Urusan Kearsipan

- 1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

- 2) Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan;
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan.

#### **7.2.4. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Urusan Pilihan**

##### 1. Urusan Perikanan dan Kelautan

- 1) Program pengembangan budidaya perikanan;
- 2) Program pengembangan perikanan tangkap;
- 3) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
- 4) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- 5) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar.
- 6) Program pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- 7) Program pengembangan statistik kelautan dan perikanan.

##### 2. Urusan Pariwisata

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata;
- 3) Program pengembangan kemitraan;
- 4) Program pengembangan daya tarik wisata.

##### 3. Urusan Pertanian

- 1) Program peningkatan kesejahteraan petani;
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- 3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan;
- 4) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan;
- 5) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- 6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 7) Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 8) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;
- 9) Program pengembangan agribisnis.

#### 4. Urusan Perdagangan

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 2) Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
- 3) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- 4) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

#### 5. Urusan Perindustrian

- 1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;
- 2) Program pengembangan industri kecil dan menengah;
- 3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- 4) Program penataan struktur industri;
- 5) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

#### 6. Urusan Transmigrasi

- 1) Program pengembangan wilayah transmigrasi.

### **7.2.5. Program Pembangunan Daerah Terkait Dengan Penunjang Pemerintahan Daerah**

#### 1. Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- 2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 3) Program pengendalian perekonomian daerah;
- 4) Program mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat;
- 5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- 6) Program optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi;
- 7) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
- 8) Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 9) Program penataan daerah otonomi baru;
- 10) Program penataan batas wilayah administrasi kabupaten;
- 11) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan OPD;
- 12) Program pelayanan peningkatan pendidikan dan kesenian;
- 13) Program peningkatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

14) Program peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa.

## 2. Penunjang Urusan Pengawasan

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

## 3. Penunjang Urusan Perencanaan

- 1) Program pengembangan data/informasi;
- 2) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;
- 3) Program perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- 5) Program perencanaan sosial budaya;
- 6) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

## 4. Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan aset daerah
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah;

## 5. Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
- 3) Program pendidikan kedinasan.
- 4) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

## 6. Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program litbang dan inovasi daerah;
- 2) Peningkatan IPTEK bagi UKM;
- 3) Program litbang dan inovasi peningkatan bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- 4) Program kajian sosial dan kemasyarakatan;

- 5) Program litbang dan inovasi bidang pendidikan;
- 6) Program penguatan kelembagaan litbang;
- 7) Program desiminasi iptek hasil litbang dan inovasi;
- 8) Program peningkatan hasil pemasaran.

Dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib dengan Layanan Dasar, Urusan Wajib Non Layanan Dasar, Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disusun Program Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah dengan pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 dapat diuraikan seperti tabel 7.2 dibawah ini :

**TABEL 7.2**  
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
*(dalam jutaan)*

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				1.421.172		1.492.093		1.566.560		1.644.751		1.726.851		1.813.056	
1	Belanja Pegawai	100%	100%	964.417	100%	1.012.638	100%	1.063.270	100%	1.116.433	100%	1.172.255	100%	1.230.868	
2	Belanja Subsidi	100%	100%	1.761	100%	1.849	100%	1.942	100%	2.039	100%	2.141	100%	2.248	
3	Belanja Hibah	100%	100%	13.333	100%	14.000	100%	14.700	100%	15.435	100%	16.206	100%	17.017	
4	Belanja Bantuan Sosial	100%	100%	3.135	100%	3.292	100%	3.456	100%	3.629	100%	3.811	100%	4.001	
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	100%	100%	140.953	100%	148.001	100%	155.401	100%	163.171	100%	171.329	100%	179.896	
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	100%	100%	294.823	100%	309.564	100%	325.042	100%	341.294	100%	358.359	100%	376.277	
7	Belanja Tidak Terduga	100%	100%	2.750	100%	2.750	100%	2.750	100%	2.750	100%	2.750	100%	2.750	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				998.702		1.345.984		1.428.969		1.458.288		1.560.653		1.656.772	SEMUA OPD
<b>1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				729.381		985.628		1.014.281		1.079.205		1.158.924		1.230.749	
1.01	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>			146.637		264.703		283.282		303.616		325.528		349.236	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.511		1.843		1.936		2.091		2.191		2.306	DISDIK
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			130		1.365		1.433		1.505		1.580		1.659	DISDIK
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			551		7.350		7.718		8.103		8.509		8.934	DISDIK
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100		10.500		11.025		11.576		12.155		12.763	DISDIK
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			60		735		772		810		850		893	DISDIK
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program Pendidikan Anak Usia Dini			726		27.300		28.665		30.098		31.603		33.183	DISDIK
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,01	95,20		96,40		97,60		98,80		100		100	
	2	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	5,33%	12,30%		19,2%		26,1%		33,1%		40%		47,1%	
1.7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar			41.623		59.000		61.740		64.827		68.068		71.472	DISDIK
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	110,93	110,93		111		111		111		111		111	
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,7	101,8		101,82		101,90		101,92		102		102	
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	96,10		97,10		98,10		99,00		100		100	
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	74,76	76,80		78,90		80,90		83,00		85,00		87	
	5	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	48,84%	56,10		63,30		70,50		77,80		78,00		83,80	
	6	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	48,93%	55,10		61,40		67,60		73,80		80,00		86,20	
	7	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	50,06	53,00		56,00		59,00		62,00		65,00		68,00	
	8	Rata-rata skor Indeks Integritas Ujian Nasional SMP	69,17	70,30		71,50		72,70		73,80		75,00		77,50	
	9	Angka kelulusan SD/MI	98,02	98,40		98,80		99,20		99,60		100		100	
	10	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,88	99,90		99,90		100		100		100		100	
	11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	71,45	74,16		76,87		79,58		82,29		85		87,71	
	12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89,49	91,59		93,69		95,80		97,90		100		100	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.8	Program Pendidikan Non Formal			260		2.940		3.087		3.241		3.403		3.574	DISDIK
	1 Angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	98,09	98,5		98,9		99,2		99,6		100		100		
	2 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	3	3		6		9		12		15		15		
	3 Jumlah lembaga PKBM terakreditasi	7	7		11		15		19		21		23		
1.9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			810		18.375		19.294		20.258		21.271		22.335	DISDIK
	1 Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1/D4	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Persentase Guru SD bersertifikat pendidik	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
	4 Persentase Guru SD berkualifikasi S1/D4	97%	97,6%		98,2%		98,8%		99,4%		100%		100%		
	5 Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik	59,16%	62,3%		65,5%		68,7%		71,8%		75%		75%		
	6 Persentase Guru SMP berkualifikasi S1/D4	89,08%	91,3%		93,5%		95,6%		97,8%		100%		100%		
1.10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			553		24.675		25.909		27.204		28.564		29.993	DISDIK
	1 Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh unit kerja Dinas Pendidikan	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
	2 Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan	97%	97,6%		98,20%		98,80%		99,4%		100%		100%		
	3 Persentase Satuan Pendidikan yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar	59,16%	62,3%		65,5%		68,7%		71,8%		75%		75%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.11	Program Pembinaan Pendidikan Olahraga dan Seni			294		1.650		1.815		1.997		2.196		2.416	DISDIK
	1 Jumlah siswa yang meraih peringkat 1 (satu) Provinsi/ Nasional	3	4		5		5		6		7		8		
1.12	Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan			50		70		98		137		192		269	DISDIK
	1 Persentase siswa yang dapat baca tulis Al-Qur'an	14%	14%		28%		42%		56%		70%		73%		
1.13	Program Bantuan Operasional Sekolah			99.970		108.900		119.790		131.769		144.946		159.440	DISDIK
	1 Tingkat penyaluran BOS ke sekolah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.02	<b>URUSAN KESEHATAN</b>			185.838		240.009		213.436		217.469		225.846		226.594	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>			130.990		139.455		143.340		147.225		151.260		155.595	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.692		1.800		1.950		2.100		2.250		2.400	DINKES
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			949		1.000		1.050		1.100		1.150		1.200	DINKES
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		125		150		175		200		225	DINKES
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			603		660		720		780		840		920	DINKES
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			225		4.000		4.500		5.000		5.500		6.000	DINKES
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan			3.908		5.000		5.500		6.000		6.500		7.000	DINKES
	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Pelayanan Kesehatan			970		1.050		1.100		1.150		1.200		1.250	DINKES
	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.8	Program Pengawasan Obat dan Makanan			159		200		225		250		275		300	DINKES
	1 Persentase obat dan makanan yang diawasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1.005		1.100		1.200		1.300		1.400		1.500	DINKES
	1 Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	75%	77%		80%		83%		85%		88%		88%		
	2 Cakupan Desa Siaga Aktif	321	321		323		323		324		325		325		
	3 Persentase Posyandu Aktif	70%	70%		75%		75%		80%		80%		80%		
	4 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			673		750		850		950		1.150		1.250	DINKES
	1 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,35%	0,35%		0,3%		0,3%		0,25%		0,2%		0,2%		
	2 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Gizi	98%	98%		98%		98%		99%		99%		99%		
	5 Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			700		1.000		1.100		1.200		1.300		1.400	DINKES
	1 Cakupan Rumah tangga sehat	80%	80%		90%		100%		100%		100%		100%		
	2 Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	80%	80%		90%		100%		100%		100%		100%		
	3 Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	65%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Cakupan Tempat-tempat Umum dan Penjual Makanan (TPUM) yang dibina dan diawasi	78%	80%		83%		85%		90%		95%		95%		
	5 Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	80%	80%		90%		100%		100%		100%		100%		
1.12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			1.270		1.500		1.750		2.000		2.250		2.500	DINKES
	1 Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (semua Kasus)	91%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Imunisasi (UCI desa)	321	321		323		323		324		325		325		
	5 Imunisasi Dasar anak Usia 0-11 Bulan	321	321		323		323		324		325		325		
	6 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemilogi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	7 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	9 Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	10 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.13	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan			467		550		600		650		700		800	DINKES
	1 Cakupan Puskesmas yang mengirimkan Laporan ke dinas Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Cakupan Program yang di kembangkan di bidang kesehatan	2	2		2		2		2		2		2		
1.14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			20.820		22.000		23.000		24.000		25.000		26.000	DINKES
	1 Pembangunan baru Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya	0	1		1		1		1		1		1		
	2 Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	6	5		5		5		5		5		5		
	3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	6	6		6		6		6		6		6		
	4 Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	6		6		6		6		6		6		
	5 Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	6 Persentase Kelengkapan Prasarana, dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	60%	70%		80%		90%		95%		100%		100%		
1.15	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata			1.488		1.750		2.000		2.250		2.500		2.750	DINKES
	1 Persentase Kelengkapan Prasarana, dan alat Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	80%	80%		90%		95%		95%		95%		95%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DINKES
1.16		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		150		350		400		450		500		550	
	1	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	6	Jumlah Kematian Ibu	11	9	7	5	3	2	2	2	2	2	2		
1.17		Program Hygiene sanitasi air Bersih dan air minum		350		375		400		425		450		475	DINKES
	1	Cakupan rumah tangga dengan sumber air terlindungi dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.18		Program peningkatan dan pengawasan keselamatan kerja dan olah raga		350		375		400		425		450		475	DINKES
	1	Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.19		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		95.070		95.570		96.070		96.570		97.070		98.000	DINKES
	1	Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Terintegrasinya JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4	Terselenggaranya Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			143		150		175		200		225		250	DINKES
	1 Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.21	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			0		150		200		250		350		350	DINKES
	1 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG</b>			8.048		49.904		18.396		17.444		20.787		16.611	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.133		2.545		2.752		2.960		3.188		3.200	RSUD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.630		1.823		2.228		1.063		763		950	RSUD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		384		384		384		384		384	RSUD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		200		200		200		200		200	RSUD
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0		82		82		82		82		82	RSUD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1.6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			5.285		44.150		11.370			11.970		15.320		10.895	RSUD
	1 Tersedianya penyimpanan obat di Rumah Sakit	1 unit	1 unit		-		-		1 Unit		-		-			
	2 Tersedianya ruang perawatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		-		-		-		-			
	3 Berfungsinya ruang operasi yang terintegrasi	3 ruang	-		3 ruang		1 ruang		-		-		-			
	4 Tersedianya fasilitas rehabilitasi medik	1 unit	-		1 unit				-		-		-			
	5 Tersedianya pelayanan laboratorium klinik	1 Unit	-		1 Unit		1 Unit		-		-		-			
	6 Tersedianya pengelolaan limbah yang berfungsi baik	-	-		1 unit		-		-		-		-			
	7 Tertatanya fungsi bangunan rumah sakit	1 Unit	-		1 Unit		-		-		-		-			
	8 Tersedianya alat kesehatan yang dibutuhkan		5 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis	
	9 Terfasilitasinya kelancaran pengantaran rujukan pasien	-	-		1 Unit		-		2 Unit		-		-			
	10 Tersedianya mebeleur gedung rawat inap dan penunjang lainnya	-	-		1 Unit		-		-		-		-			
	11 Tersedianya aparatur dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali	
	12 Tersedianya CSSD	-	1 Unit		-		-		-		-		-		-	
	13 Tingkat kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi pasien hemodialisa	-	-		-		-		-		1 Unit		-		-	
1.7	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata			0		670		780			785		800		850	RSUD
	1 Terpeliharanya gedung dan bangunan rumah sakit	100	100		100		-	100		-	100		-	100		-

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Terpeliharanya Alat-alat kesehatan yang berfungsi sesuai dgn standar Rumah sakit Tipe C	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	3	Terpeliharanya perlengkapan mebeuleur yang baik guna menunjang pelayanan di RSU	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
1.8		Program peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan		0		50		600		-		50		50	RSUD
	1	Tipe kelas Rumah Sakit rujukan regional JKN wilayah Sumsel	B	B	B		B		B		B		B		
	2	Tingkatan akreditasi rumah sakit	Madya	Madya	Madya		Utama		Utama		utama		Pari purna		
		<b>BLUD RSUD KAYUAGUNG</b>		46.800		50.650		51.700		52.800		53.799		54.388	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		29.231		29.578		30.397		30.667		31.717		31.717	BLUD RSUD
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.657		300		500		500		500		500	BLUD RSUD
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur		510		1.506		1.008		915		925		925	BLUD RSUD
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		374		375		410		410		410		410	BLUD RSUD
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		131		131		131		131		131		131	BLUD RSUD
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			13.239		14.605		15.099		15.472		15.411		16.000	BLUD RSUD
	1 Persentase pemakaian tempat tidur pasien (BOR)	66,26%	68%		70%		72%		75%		77%		68%		
	2 Rata-rata lama perawatan pasien (ALOS)	3,8	3,7		3,6		3,5		3,4		3,3		3,3		
1.7	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			1.646		1.105		1.105		1.105		1.105		1.105	BLUD RSUD
	1 Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	61%	64%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			12		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	BLUD RSUD
	1 Peningkatan jumlah jenis pelayanan kesehatan	12 pelayanan	12 plynn		13 plynn		14 plynn		15 plynn		15 plynn		15 plynn		
1.9	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan			0		50		50		600		600		600	BLUD RSUD
	1 Tingkat Akreditasi RS	0%	madya		madya		madya		utama		utama		utama		
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			309.786		382.164		414.840		452.324		493.556		538.912	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.409		1.550		1.705		1.875		2.063		2.269	DPU PR
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			438		482		530		583		641		705	DPU PR
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			188		207		227		250		275		303	DPU PR
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			230		253		278		306		337		370	DPU PR
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			39		43		47		52		57		63	DPU PR
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			33.251		36.575		40.233		44.256		48.681		53.549	DPU PR
	1	Persentase jalan yang dibangun	5,89%	1%		1,10%		1,20%		1,20%		1%		5,50%	
	2	Jumlah jembatan yang dibangun	257 Unit	30 Unit		30 Unit		40 Unit		38 Unit		25 Unit		168 Unit	
1.7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			0		27.300		27.300		27.300		27.300		27.300	DPU PR
	1	Panjang drainase jalan kondisi mantap	2,6 Km	-		1 Km		1 Km		1 Km		1 Km		5 Km	
1.8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			35.226		38.749		42.623		46.886		51.574		56.732	DPU PR
	1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	70,46%	70,46%		71%		72%		73%		74%		75%	
	2	Jumlah jembatan kondisi mantap (bisa dilewati)	25 Unit	4 Unit		5 Unit		6 Unit		5 Unit		3 Unit		23 Unit	
1.9	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan			0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	DPU PR
	1	Tersedianya dana siap pakai untuk rehab jalan dan jembatan	0	2 Km		2 Km		2 Km		2 Km		2 Km		2 Km	
1.10	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			0		200		200		200		200		200	DPU PR
	1	Tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			4.182		4.600		5.060		5.566		6.123		6.735	DPU PR
	1 Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		
1.12	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan			0		500		500		500		500		500	DPU PR
	1 Ketersediaan Data Kondisi Eksisting Jalan dan Jembatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.13	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			156.426		172.069		189.275		208.203		229.023		251.926	DPU PR
	1 Jumlah jembatan yang ditingkatkan		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		10 Unit		
	2 Panjang jalan yang ditingkatkan		144 Km		261 Km		314 Km		283 Km		144 Km		1215 Km		
1.14	Program Perencanaan Jalan dan Jembatan			4.952		5.447		5.992		6.591		7.250		7.975	DPU PR
	1 Rencana pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	188 Ruas Jln & Jbt	188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		188 Ruas Jln & Jbt		
1.15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			59.476		65.424		71.966		79.163		87.079		95.787	DPU PR
	1 Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	18%	37%		57%		75%		88%		100%		100%		
1.16	Program Pembangunan Turap, Talud, Bronjong			10.069		11.076		12.183		13.402		14.742		16.216	DPU PR
	1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%		51%		68%		84%		100%		100%		
1.17	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Talud/Bronjong			0		3.400		2.000		2.000		2.000		2.000	DPU PR
	1 Persentase penataan tepian pinggir sungai, anak sungai dan saluran	19%	35%		51%		68%		84%		100%		100%		
1.18	Program Perencanaan Tata Ruang			2.650		2.915		3.207		3.527		3.880		4.268	DPUPR
	1 Keberadaan Peraturan Daerah RTRW	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1.19	Program Pemanfaatan Ruang			100		110		121		133		146		161	DPUPR	
	1	Persentase Luas Wilayah Produktif	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1.150		1.265		1.392		1.531		1.684		1.852	DPUPR	
	1	Ketaatan terhadap RTRW	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2	Persentase luas wilayah perkotaan yang sesuai tata ruang	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.04	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				73.785		79.582		82.755		86.050		89.488		93.041	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.108		1.141		1.175		1.211		1.247		1.284	DPRKP
	1	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan sarana dan prasarana				8.074		8.316		8.566		8.823		9.087		9.360	DPRKP
	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				155		160		164		169		174		180	DPRKP
	1	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50		52		53		55		56		58	DPRKP
	1	Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				75		77		80		82		84		87	DPRKP
	1	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong			0		2.261		3.281		4.073		5.830		6.000	DPRKP
	1 Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05	0		0,10		0,15		0,20		0,25		0,30		
1.7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			14.738		30.145		30.725		31.108		31.496		32.195	DPRKP
	1 Persentase rumah tinggal bersanitasi	53,95	56,65		59,48		62,45		65,58		68,86		72,30		
	2 Persentase penduduk berakses air minum (PDAM)	6,51	7,46		8,28		13,54		17,02		21,99		24,01		
1.8	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			9.728		10.020		10.320		10.630		10.949		11.168	DPRKP
	1 Persentase jalan lingkungan yang terbangun	40,18	40,23		67,88		70,67		77,67		80,23		87,77		
1.9	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			0		4.315		4.962		5.706		6.562		7.547	DPRKP
	1 Persentase penduduk yang terlayani air baku (Non PDAM)	67,96	69,45		70,21		70,98		71,75		73,32		74,11		
1.10	Program Pengembangan Perumahan			647		3.500		3.675		3.859		4.052		4.254	DPRKP
	1 Persentase Rumah Layak huni	64,68	68,38		73,65		73,65		75,23		76,91		78,71		
1.11	Program Penataan Lingkungan Kumuh			0		1.166		1.224		1.285		1.349		1.403	DPRKP
	1 Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	2,67	2,80		2,94		3,09		3,25		3,41		3,58		
1.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			32.097		12.500		12.750		13.000		13.000		13.655	DPRKP
	1 Persentase Desa Berlistrik	92,71%	93,6%		94,6%		95,5%		96,5%		97,4%		98,4%		
1.13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			0		880		880		900		900		900	DPRKP
	1 Persentase RTH Ibukota kabupaten dalam Kondisi Baik	100	0		100		100		100		100		100		
1.14	Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			880		0		0		0		0		0	DPRKP
	1 Pemeliharaan Fasilitas Umum Perkotaan	100	100		0		0		0		0		0		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.15	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			0		1.900		1.500		1.500		800		800	
	1 Unit lahan yang tersedia	3 unit	0		3 unit		2		1		1		1		DPRKP
1.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman			250		250		250		250		250		250	
	1 Unit sarana prasarana pemakaman yang dibangun	2 unit	3 unit		5 unit		7 unit		9 unit		10 unit		12 unit		DPRKP
1.17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			0		2.700		2.900		3.100		3.300		3.500	
	1 Jumlah TPS 3R yang di bangun	2 unit	6 unit		10 unit		14 unit		18 unit		22 unit		26 unit		DPRKP
1.18	Program Lingkungan Sehat Perumahan			2.040		200		250		300		350		400	
	1 Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	0,05			0		0		0		0		0		
	2 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan Sehat perumahan	0	0		100		100		100		100		100		DPRKP
1.19	Program Pembangunan distribusi Penyediaan air baku			3.943		0		0		0		0		0	
	1 Tingkat ketersediaan air baku	40%	45%												
1.05	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			10.503		16.148		15.702		16.379		19.882		19.224	
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			2.300		5.368		6.404		6.935		8.078		8.760	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			674		1.000		1.100		1.200		1.400		1.500	KESBANGPOL
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180		198		544		218		227		235	KESBANGPOL
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			36		-		40		-		45		-	KESBANGPOL
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		-		100%		-		100%		-		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		60		0		80		0		90	KESBANGPOL
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	-		100%		-		100%		-		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			60		60		60		60		60		60	KESBANGPOL
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program Peningkatan peran serta masyarakat			292		1.260		1.480		1.820		2.065		2.440	KESBANGPOL
	1	Tingkat penyelesaian konflik sosial masyarakat(%)	60	65		70		75		80		90		95	
	2	Angka (Penurunan) kasus konflik sosial (%)	60	65		70		75		80		90		95	
	3	Cakupan pemantauan Kewaspadaan Dini di daerah	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec	
	4	Cakupan pemantauan Perkembangan Wawasan Kebangsaan di daerah	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec	
	5	Cakupan pemantauan perkembangan Forum kerukunan umat beragama dan Forum Silaturahmi Umat Beragama		-		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec	
1.7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			333		965		1.090		1.222		1.361		1.185	KESBANGPOL
	1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	1		1		1		1		1		1	
	2	Pemantauan Tenaga Kerja asing dan organisasi masyarakat asing	18	18		18		18		18		18		18	
	3	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran dan Prekursor Narkotika (P4GN)				100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			450		1.380		1.550		1.710		1.880		2.050	KESBANGPOL
	1	Jumlah tokoh Agama yang memahami pentingnya toleransi dan kerukunan umat beragama	75 org	142 org		142 org		142 org		142 org		142 org		142 org	
	2	Jumlah peserta penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	60 org	200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		200 org	
	3	Jumlah peserta pengembangan Nilai-nilai luhur budaya bangsa	60 org	-		120 org		120 org		120 org		120 org		120 org	
	4	Jumlah masyarakat yang dilatih (Bela Negara)	663 org	-		600 org		620 org		650 org		660 org		680 org	
1.9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0		150		175		190		200		220	KESBANGPOL
	1	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang memahami wawasan kebangsaan	60 org	-		142 org		142 org		142 org		142 org		142 org	
1.10	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			165		0		0		0		200		250	KESBANGPOL
	1	Cakupan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah Serentak	18 kec	-		-		-		-		-		-	
	2	Cakupan pemantauan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif		18 kec		-		-		-		-		18 kec	
1.11	Program pendidikan politik masyarakat			110		195		215		235		390		430	KESBANGPOL
	1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kali)	1	-		2		2		2		2		2	
	2	Jumlah pengurus partai politik yang ikut forum diskusi politik	60 org	-		60 org		60 org		60 org		60 org		60 org	
	3	Jumlah aparat yang memahami aturan pelaksanaan pileg dan pilkada	120 org			-		-		-		120 org		120 org	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.12	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		100		150		200		250		300	KESBANGPOL
	1 Persentase aset budaya benda dan non benda yang terverifikasi	20	25		25		25		25		25		25		
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>			4.903		7.315		5.660		5.625		7.795		6.255	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.328		3.340		3.355		3.360		3.370		3.380	SATPOL PP & PK
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			285		2.000		325		340		2.000		375	SATPOL PP & PK
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		400		50		50		450		50	SATPOL PP & PK
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	-	-		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			145		150		150		0		0		50	SATPOL PP & PK
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			40		65		70		85		100		120	SATPOL PP & PK
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			475		940		1.130		1.140		1.170		1.300	SATPOL PP & PK
	1 Persentase penegakkan perda dan Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Peningkatan Pengamanan, pengawasan pejabat dan pengamanan aset / kekayaan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			280		90		110		150		175		400	SATPOL PP & PK
	1 Cakupan pemantauan anggota Linmas Hansip/ Se-Kab. OKI	18 kec	18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		18 kec		
	2 Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan hansip	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Tingkat pengamanan Pilpres/Pileg/Pilkada Gubernur/Bupati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.8	Program pendidikan politik masyarakat			130		0		0		0		0		0	SATPOL PP & PK
	1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat			0		70		90		100		110		130	SATPOL PP & PK
	1 Persentase penurunan angka penyakit masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.10	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		30		90		100		110		130	SATPOL PP & PK
	1 Persentase peningkatan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.11	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			220		230		290		300		310		320	SATPOL PP & PK
	1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Tingkat Waktu Tanggap ( <i>response time rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	3 Tingkat pencegahan, pengendalian, pemadaman penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran	-	-		80%		85%		90%		95%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			3.300		3.465		3.638		3.819		4.009		4.209	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.268		1.225		1.266		1.489		1.454		1.314	BPBD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			598		763		830		850		850		850	BPBD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			109		77		77		80		100		80	BPBD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			75		100		100		100		140		100	BPBD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Layanan Informasi di Daerah Rawan			0		250		320		250		250		420	BPBD
	1 Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	18 Lok	18 lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		18 Lok		
1.6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0		500		310		300		570		600	BPBD
	1 Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		
	2 Jumlah aparatur dan warga negara yang mendapat peralatan pelindung	-	-		45 Orang		45		45		45		45		
1.7	Program Penanganan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana			0		400		555		650		525		725	BPBD
	1 Tingkat kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan status darurat bencana	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
	2 Jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana	10 Posko	10 Posko		10 Posko		10 Posko		10 Posko		10 Posko		10 Posko		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	3	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	1 Lap	1 Lap	-		-		1 Lap		-		1 Lap		
1.8		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana		250		150		180		100		120		120	BPBD
	1	Jumlah lokasi yang dilakukan survey penaksiran kerusakan dan kerugian pasca bencana	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
1.9		Program Tanggap Darurat		520		0		0		0		0		0	BPBD
	1	Persentase penanganan bencana	50%	60%											
1.10		Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana		480		0		0		0		0		0	BPBD
	1	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bencana	50%	60%											
<b>1.06</b>		<b>URUSAN SOSIAL</b>		2.832		3.023		4.266		3.367		4.624		3.742	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		715		751		788		828		869		913	DINSOS
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		183		192		201		211		222		233	DINSOS
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur		53		55		58		61		64		67	DINSOS
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		45		47		50		52		55	DINSOS
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50		70		74		77		81		85	DINSOS
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%		10 dok		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			169		177		186		195		204		215	DINSOS
	1 Persentase PMKS mandiri	NA	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	2 Terbinanya KK komunitas adat terpencil	1 klmpk			1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 klmpk		1 Klmpk		
	3 Tercapainya pemberian bantuan sarana lingkungan bagi desa terpencil	5 Unit			5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		
1.7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			479		750		788		827		868		912	DINSOS
	1 Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Tersedianya pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban trafficking	10	12%		14%		15%		18%		20%		33%		
	3 Tingkat ketersediaan buffer stock untuk korban bencana	6000 paket	1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		1000 Paket		
	9 Jumlah lansia yang mendapat bantuan	1.500	75%		80%		85%		90%		95%		100%		
1.8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			25		0		0		0		0		0	DINSOS
	1 Jumlah penyandang disabilitas yang diberdayakan	50 org	50 org												
	2 Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial	70 Org	70 Org												
1.9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			130		200		210		221		232		243	DINSOS
	1 Cakupan terbentuknya WKSBM Kab. OKI	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
	2 Persentase Organisasi sosial yang berdaya	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	3	Terlaksananya pembinaan dan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi	20%	20%	20%		20%		20%		20%		20%		
	4	Tingkat pembinaan tenaga sosial masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.11		Program Pembinaan anak terlantar dan lanjut usia				29		0		0		0		0	DINSOS
	1	Tingkat kemandirian anak terlantar dan lanjut usia	20%	20%											
1.12		Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah				1.000		150		1.250		200		1.300	250
	1	Tersedianya data pendukung program				3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok	
1.13		Program Bantuan dan Jaminan Sosial				0		633		665		698		733	769
	1	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pemberian bantuan keluarga miskin	18 Kec	18 Kec	18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec		18 Kec
	2	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
	3	Tingkat kesiapan siaga bencana	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
<b>2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>						59.585		90.468		134.553		88.253		90.918	94.825
<b>2.01</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>					1.758		1.650		1.753		1.852		1.931	1.956
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					651		671		700		725		730	730
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					433		400		425		450		480	480
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			75		70		80		90		95		95	DISNAKER-TRANS
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			34		40		45		50		55		55	DISNAKER-TRANS
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			80		80		85		90		96		96	DISNAKER-TRANS
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			125		249		268		287		305		320	DISNAKER-TRANS
	1 Tingkat Pengangguran terbuka	3,45%	3,25%		3,00%		2,75%		2,50%		2,25%		2,00%		
	2 Rasio penduduk yang bekerja	78,30%	86,30%		86,50%		86,80%		87,00%		87,25%		87,40%		
	3 Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20%	25%		30%		35%		40%		45%		50%		
1.7	Program Peningkat Kesempatan Kerja			200		65		70		75		80		85	DISNAKER-TRANS
	1 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	44,90%	45%		48%		50%		52%		54%		55%		
1.8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan			160		75		80		85		90		95	DISNAKER-TRANS
	1 Persentase sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	20%	22%		25%		30%		35%		40%		45%		
<b>2.02</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			1.748		5.377		5.627		5.900		6.180		6.562	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			667		1.312		1.412		1.550		1.600		1.750	DPPPA
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			289		1.974		1.987		2.005		2.122		2.235	DPPPA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			28		50		65		65		70		80	DPPPA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		100		115		125		130		135	DPPPA
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50		160		171		180		185		190	DPPPA
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			155		163		171		179		189		197	DPPPA
	1 Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	15	20		20		25		25		30		30		
	2 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100		100		100		100		100		100		
	3 Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS	100	100		100		100		100		100		100		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	50	50	50	55	60	65	70							
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50	50	50	60	70	80							
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	54	100	100	100	100	100	100							
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	54	50	55	55	60	65	70							
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	50	60	70	80	90	100							
9	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5	6	7	8	9	9							
10	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	95	95	95	95	100	100	100							
1.7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		45	47	50	52	55	57							DPPPA
1	Rasio KDRT perempuan	0,90%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%							
2	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	2	2	2	4	4	4	8							
3	Rasio KDRT	0,90%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%							
4	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%							

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	5	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	0,05%	0,05%	0,05%		0,04%		0,04%		0,03%		0,03%		
1.8		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		400		725		765		805		845		885	DPPPA
	1	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	17,00	17,00	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		
1.9		Program Peningkatan Perlindungan Anak		0		725		765		805		845		885	DPPPA
	1	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	23%	50%	50%		50%		100%		100%		100%		
1.10		Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		70		74		77		81		85		89	DPPPA
	1	Jumlah kecamatan layak anak	0	3	3		3		4		4		4		
1.11		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak		45		47		50		52		55		57	DPPPA
	1	Jumlah Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang diperdakan	0	1	0		1		0		1		1		
<b>2.03</b>		<b>URUSAN PANGAN</b>		0		1.390		1.420		1.440		1.465		1.615	
1.1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		0		1390		1420		1440		1465		1615	DKPTPH
	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan		90,8		90,9		100		100		100		100	
	2	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Energi Untuk Konsumsi (Kkal/Kapita/Hari)		2304		2389		2400		2400		2400		2400	
	3	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Protein Untuk Konsumsi (Gram/Kapita/Hari)		61,40		61,90		62,00		62,50		63,00		63,00	
	4	Cadangan Pangan Daerah													
		- Pemerintah (Beras/Ton)	50	75	100		125		150		175		200		
		- Masyarakat (Gabah/Ton)	770	780	790		800		810		820				

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
5	Persentase lumbung pangan yang dimanfaatkan	N/A	92%		95%		97%		100%		100%		100%		
6	Tersedianya cadangan pangan di daerah rawan pangan	0	10.000 Kg		10.000 Kg		10.000 Kg		10.000 Kg		10.000 Kg		10.000 Kg		
7	Tersedianya laporan harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	0	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
8	Tersedianya cadangan pangan di tiap lumbung pangan masyarakat	0	10000 kg		10000 kg		10000 kg		10000 kg		10000 kg		10000 kg		
9	Terbinanya desa dan kawasan mandiri pangan	0	3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		3 klmpk		
<b>2.04</b>	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>			12.255		3.805		34.085		4.480		3.535		4.675	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			987		800		900		950		1.000		1.500	DINAS PERTANAHAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			349		750		850		1.000		200		250	DINAS PERTANAHAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			55		50		70		85		95		100	DINAS PERTANAHAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		50		70		100		125		150	DINAS PERTANAHAN
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			81		100		100		120		120		150	DINAS PERTANAHAN
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			10.150		400		30.405		500		250		755	DINAS PERTANAHAN
	1 Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.7	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan			633		1.455		1.490		1.525		1.545		1.570	DINAS PERTANAHAN
	1 Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			0		200		200		200		200		200	DINAS PERTANAHAN
	1 Tersedianya penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap		
<b>2.05</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			6.226		13.275		26.901		8.120		7.706		7.948	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			690		764		819		764		1.020		1.049	DLH
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			131		85		285		685		126		140	DLH
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			17		44		44		85		95		64	DLH
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			99		95		95		95		99		99	DLH
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			4.224		10.173		24.224		4.791		4.931		4.936	DLH
	1	Persentase penanganan sampah	6,06 %	7 %	8 %	9%	10 %	11 %	12 %						
	2	Persentase pengurangan sampah	8,5 %	10 %	12 %	15 %	17 %	19 %	21 %						
1.6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			636		1.536		891		806		996		1.021	DLH
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64	64	63	63	62	62	62	62	62	62	62	62	
		Indeks kualitas air	65,38	64	64	63	63	62	62	62	62	62	62	62	
		Indeks kualitas udara	99,09	99,09	98	97	96	95	95	95	95	94	94	94	
		Indeks Tutupan Lahan	55,97	55,97	54	53	52	51	51	51	51	50	50	50	
	2	Persentase tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	3	Jumlah Pengujian Kualitas Lingkungan pada UPT Laboratorium Lingkungan	93 sample	93 sample	100 sample	150 sample	180 sample	200 sample	250 sample						
	4	Persentase wilayah dalam kota kayuagung yang bersih	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	5	Persentase jumlah peralatan kualitas lingkungan (alat laboratorium)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
	6	Persentase penataan pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	30 prusahaan	30 prusahaan	40 prusahaan	45 prusahaan	50 prusahaan	55 prusahaan	60 prusahaan						
	8	Persentase Pelayanan Koordinasi Penyusunan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-ULP dan SPPL)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9	Jumlah desa pembinaan kampung iklim	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			175		375		325		675		175		375	DLH
	1 Persentase Jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		3 sekolah		
	2 Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup (informasi status mutu air, udara)	83 %	85 %		87 %		90 %		95 %		97 %		100 %		
1.8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			20		20		20		20		20		20	DLH
	1 Tingkat pengendalian polusi	20%	30%		30%		30%		30%		30%		30%		
1.9	Program Kerjasama Pembangunan			100		100		100		100		100		100	DLH
	1 Jumlah perusahaan yang mengikuti forum CSR -pkbl Kab. OKI	10 prshn	10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn		10 prshn		
1.10	Program Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan			50		50		50		50		70		70	DLH
	1 Jumlah penanganan kebakaran hutan dan lahan	2 desa	2		2		2		2		2		2		
1.11	Program Ruang Terbuka Hijau			85		35		50		50		75		75	DLH
	1 Jumlah ruang terbuka hijau	2 desa	2		2		2		2		2		2		
<b>2.06</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			5.773		6.084		6.388		6.706		7.040		7.392	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.574		1.653		1.736		1.822		1.913		2.008	DISDUKCAPIL
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.774		1.863		1.956		2.054		2.156		2.264	DISDUKCAPIL
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			55		63		66		69		72		76	P
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		21		22		23		24		25	DISDUKCAPIL
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			65		63		66		69		72		76	DISDUKCAPIL
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program penataan administrasi kependudukan			2.305		2.421		2.542		2.669		2.803		2.943	DISDUKCAPIL
	1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%		99,4%		99,6%		99,8%	
	2	Lama Pengurusan KTP	7 hari	7 hari		7 hari		7 hari		7 hari		7 hari		7 hari	
	3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	81,2%	85,2%		89,5%		93,9%		98,6%		98,8%		99,0%	
	4	Persentase penduduk yang memiliki KTP	85,74%	92,59%		99,08%		99,2%		99,4%		99,6%		99,8%	
	5	Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	86,4%	86,4%		92,4%		97,9%		98,0%		98,5%		100	
	6	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	30,91	35,53%		40,15%		44,77%		49,39%		54,01%		58,63%	
	7	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	8	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	9	Persentase anak umur di bawah 17 tahun yang memiliki KIA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2.07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.666		11.410		10.450		11.000		11.255		10.830	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.107		1.750		1.750		1.750		1.750		1.500	DPMD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			249		1.500		500		500		750		500	DPMD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			59		80		70		70		70		70	DPMD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			10		20		20		20		25		25	DPMD
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61		85		85		85		85		85	DPMD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			2.538		3.250		3.300		3.300		3.300		3.300	DPMD
	1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat/LPM (Kelompok)	327	314		314		314		314		314		314		
	2 Ketersediaan data desa/kelurahan	327	327		327		327		327		327		327		
	3 Persentase pelaksanaan roda pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	5	Jumlah Posyandu yang aktif	635	635	650	670	675	680	783						
1.7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi			80	400	400	400	400	400	400	400	400	400	DPMD	
	1	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (desa)	314	50	50	50	50	50	50	50	50	50	64		
	2	Jumlah BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian desa	314	50	50	50	50	50	50	50	50	50	64		
1.8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			1.006	2.725	2.725	3.275	3.275	3.350	DPMD					
	1	Jumlah PKK yang aktif (kelompok)	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346		
	2	Persentase desa inovasi	314	50	50	50	50	50	50	50	50	50	64		
	3	Jumlah desa yang sudah menyusun APBDesa	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314		
	4	Terlaksananya kajian pemekaran desa	23	23	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
1.9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	DPMD	
	1	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik (%)	40	50	60	70	80	90	95						
	2	Tingkat pemenuhan administrasi bantuan keuangan kepada pemerintahan	314	314	100	314	314	314	314	314	314	314	314		
	3	Jumlah aparat desa terlatih	318	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628		
1.10	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna			0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DPMD	
	1	Persentase posyantekdes yang terbentuk dan aktif	100	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2.08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.870		9.912		10.397		10.997		11.583		12.254	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			434		559		587		616		647		679	DPPKB
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.188		1.247		1.309		1.375		1.444		1.516	DPPKB
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		170		180		190		200		210	DPPKB
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			5.787		6.143		6.450		6.773		7.111		7.466	DPPKB
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90		95		100		110		115		120	DPPKB
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Keluarga Berencana			95		294		308		324		336		357	DPPKB
	1 Prevalensi peserta KB aktif	82,04%	79,00%		79,05%		80,00%		80,05%		81,00%		81,00%		
	2 Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need)	8,10%	13,00%		12,70%		12,50%		12,30%		12,00%		12,00%		
	3 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Pengendalian Penduduk			75		147		154		162		170		178	DPPKB
	1 Penurunan Laju penduduk	0,30%	0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.8	Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga			75		147		154		162		170		178	DPPKB
	1 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	25,42%	27,42%		28,42%		29,42%		30,42%		32,42%		34,42%		
	2 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	10%	13%		15%		20%		24%		25%		26%		
	3 Cakupan kesehatan reproduksi remaja	28%	32%		36%		40%		44%		48%		52%		
1.9	Program Penyuluhan dan Penggerakan serta penguatan keluarga kecil dan berkualitas			75		165		175		185		190		200	DPPKB
	1 Persentase keluarga mandiri	75%	75%		80%		90%		95%		100%		100%		
1.10	Program Meningkatnya dukungan sarana penyuluh KB			51		945		980		1.100		1.200		1.350	DPPKB
	1 Terpenuhinya dukungan sarana Pelayanan KB	75%	75,00%		80%		90%		95%		100%		100%		
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			2.920		6.419		5.066		3.379		3.547		3.724	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			951		955		956		956		960		960	DISHUB
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			169		189		189		189		200		250	DISHUB
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		337		100		100		100		100	DISHUB
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		40		40		50		50		60	DISHUB
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			145		225		225		225		225		225	DISHUB
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			895		200		300		350		460		500	DISHUB
	1 Jumlah Prasarana Transportasi LLAJSDP	25 lokasi	27 lok		28 lok		29 lok		30 lok		31 lok		32 lok		
1.7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			20		302		156		150		175		200	DISHUB
	1 Persentase Fasilitas LLAJSDP dalam kondisi baik	25,00%	29,16%		33,32%		37,48%		41,64%		45,80%		50,00%		
	2 Persentase Rambu-Rambu LLAJSDP dalam kondisi baik	30,00%	30,00%		34,00%		38,00%		42,00%		46,00%		50,00%		
1.8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			695		784		750		750		750		750	DISHUB
	1 Jumlah rute pelayaran LLAJSDP	18 rute	18		20		21		23		24		25		
	2 Jumlah peraturan yang dikeluarkan	13 buah	14		15		16		17		18		20		
1.9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			45		312		250		225		227		230	DISHUB
	1 Persentase Fasilitas Keselamatan LLAJSDP	41,32%	43,23%		51,17%		59,11%		67,05%		75,00%		75,00%		
1.10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			0		3.075		100		100		100		100	DISHUB
	1 Persentase kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	60%	63,34%		66,68%		70,02%		73,36%		76,70%		80,00%		
	2 Jumlah Uji Keur kendaraan bermotor	3500 unit	3900		4300		4700		5100		5400		6000		
1.11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			0		0		2.000		284		300		349	DISHUB
	1 Tersedianya Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	0	0		0		1		1		1		1		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2.10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.148		9.486		9.705		9.900		9.970		9.990	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			588		731		750		780		800		820	DISKOMINFO
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180		160		180		200		220		220	DISKOMINFO
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			67		80		80		85		85		85	DISKOMINFO
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			15		50		80		110		130		130	DISKOMINFO
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			120		130		140		150		160		160	DISKOMINFO
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			1.338		3.445		3.550		3.650		3.650		3.650	DISKOMINFO
	1 Jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	23	28		35		41		46		52		55		
	2 Jumlah jaringan komunikasi	8	8		10		12		16		18		20		
1.7	Program kerjasama informasi dan mass media			2.700		4.690		4.725		4.725		4.725		4.725	DISKOMINFO
	1 Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	0	35		40	1.500	45	1.500	50	1.500	55	1.500	60	1.500	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB		
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP			
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
	1	Jumlah/kapasitas mitra komunikasi publik	70	92	92		92		92		92		92				
	2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	10	12	12		12		12		12		12				
	3	Rasio wartel dan warnet terhadap jumlah penduduk	73	73	73		73		73		73		73	0			
1.8		Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				140			200			200		200	DISKOMINFO		
	1	Jumlah SDM bidang kominfo	7	10	13		16		19		22		25				
	2	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Bidang Kominfo	0	1	2		3		4		5		6				
<b>2.11</b>		<b>URUSAN STATISTIK</b>				0			730			880		1.005	1.110	1.210	
1.1		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				0			150			200		250	250	DISKOMINFO	
	1	Jumlah dokumen data kec dalam angka	1	1	1		1		1		1		1				
1.2		Program penyelenggaraan statistik sektoral				0			580			680		755	860	960	DISKOMINFO
	1	Membangun e-database sebagai hasil pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data	1	1	1		1		1		1		1				
	2	Aplikasi data e-database yang akurat	1	1	1		1		1		1		1				
<b>2.12</b>		<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				0			180			185		190	195	200	
1.1		Program Penyusunan Tata Kelola Bidang Keamanan Informasi dan Persandian				0			30			35		40	45	50	DISKOMINFO
	1	Jumlah kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian (berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas)				2			2			2		2			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Jumlah Masterplan / Grand Design / Pedoman / Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / Standard Operational Procedure (SOP) dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian	-		-		1		1		1		1		
1.2		Program Operasional Layanan Persandian untuk Mendukung Pengamanan Informasi		0		50		50		50		50		50	DISKOMINFO
	1	Jumlah kegiatan pengamanan sinyal (jamming)	3		3		3		3		3		3		
	2	Jumlah kegiatan pengamanan informasi kontra penginderaan (Streilisasi)	3		3		3		3		3		3		
1.3		Program Pengawasan dan Evaluasi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian		0		100		100		100		100		100	DISKOMINFO
	1	Jumlah Laporan Kinerja Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian	1		1		1		1		1		1		
<b>2.13</b>		<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		1.451		2.275		2.095		2.175		2.380		2.590	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		550		600		650		700		750		800	DISKOPERIN
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85		600		300		250		300		350	DISKOPERIN
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur		46		75		100		125		150		200	DISKOPERIN
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		30		40		50		60		70	DISKOPERIN
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50		55		60		65		70		75	DISKOPERIN
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil			0		100		100		100		100		100	DISKOPERIN
	1	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang memiliki izin usaha	5%	6%		7%		8%		9%		10%		11%	
1.7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah			120		185		195		200		220		240	DISKOPERIN
	1	Persentase UMKM yang sehat	15%	16%		17%		18%		19%		20%		21%	
	2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	1%	1%		2%		3%		4%		5%		6%	
1.8	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah			225		175		190		220		250		270	DISKOPERIN
	1	Persentase UMKM yang mengakses sistem pendukung usaha	15%	16%		17%		18%		19%		20%		21%	
	2	Persentase pemenuhan sistem pendukung usaha bagi koperasi	1%	2%		3%		4%		5%		6%		7%	
1.9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			375		455		460		465		480		485	DISKOPERIN
	1	Persentase koperasi aktif	83%	83%		84%		85%		86%		87%		88%	
	2	Jumlah koperasi berprestasi	3	3		3		3		3		3		3	
	3	Jumlah desa yang mempunyai koperasi aktif	279	286		293		300		307		314		321	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2.14	URUSAN PENANAMAN MODAL			2.560		3.278		3.203		3.228		3.228		3.228	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.181		1.023		1.023		1.023		1.023		1.023	DPMPTSP
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			432		650		575		575		575		575	DPMPTSP
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			49		260		260		260		260		260	DPMPTSP
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			104		100		100		100		100		100	DPMPTSP
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			63		95		95		95		95		95	DPMPTSP
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi			225		700		700		700		700		700	DPMPTSP
	1	Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,06%	10%		10%		10%		10%		10%		10%	
	2	Jumlah Pengunjung dalam pameran investasi	100	300		300		300		300		300		300	
	3	Jumlah buku informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kab.OKI	150	50		50		50		50		50		50	
	4	Jumlah Perusahaan yang dibina	6	50		50		50		50		50		50	
1.7	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi			162		200		200		200		200		200	DPMPTSP
	1	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	0,393 T	3.938		4.331		4.765		5.241		5.767		6.342	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
	2	Ketersediaan sistem informasi penanaman modal	100	30 izin	30 izin		30 izin		30 izin		30 izin		30 izin			
	3	Tingkat kualitas pelayanan perizinan	100	100	100		100		100		100		100			
	4	Ketersediaan peta investasi	1	0	1 dok		0		0		0		1 dok			
1.8		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan perizinan				345		250		250		275		275	DPMPTSP	
	1	Pelayanan Terpadu satu Pintu Kepada Masyarakat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
	2	Verifikasi, Visitasi dan Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Teknis	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
2.15		<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				3.410		3.727		3.927		4.220		4.550	4.987	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				616		667		733		806		886	974	DISPORA
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				65		70		70		75		75	80	DISPORA
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur				23		25		30		35		40	45	DISPORA
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		20		22		25		28	30	DISPORA
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				18		20		22		24		26	28	DISPORA
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%		100%		90%		100%		100%			

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			816		830		850		875		900		920	DISPORA
	1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif	80%	80%		85%		85%		85%		90%		90%		
1.7	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			0		75		75		80		85		90	DISPORA
	1 Persentase pemuda yang bebas narkoba	55%	55%		60%	75	60%	75	65%	80	65%	85	70%	90	
1.8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			55		70		75		100		110		120	DISPORA
	1 Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup	30	30		35		35		40		40		50		
1.9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			1.267		1.200		1.250		1.300		1.400		1.500	DISPORA
	1 Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	25	25		30		30		35		40		45		
1.10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			550		750		800		900		1.000		1.200	DISPORA
	1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	20%	20%		21%		22%		23%		24%		25%		
	2 Rasio lapangan olahraga per 1.000	17%	18%		20%		22%		25%		27%		30%		
<b>2.16</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>			1.261		8.215		8.890		9.755		11.010		11.105	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			531		800		850		900		950		1.000	DISBUDPAR
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			92		1.000		1.000		1.000		1.500		1.500	DISBUDPAR
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			121		100		120		140		160		180	DISBUDPAR
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		50		70		100		125		150	DISBUDPAR
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			57		100		100		100		120		120	DISBUDPAR
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		90%		100%		100%		
1.6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			78		1.050		1.010		900		940		940	DISBUDPAR
	1 Persentase Benda/ Cagar Budaya yang dilestarikan	31 CB	0%		1%		2%		3%		4%		5%		
	2 Persentase cakupan kajian seni	15 Seni	0%		1%		2%		3%		4%		5%		
1.7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah penyerenggaraan festival seni dan Budaya			185		2.875		3.350		3.775		4.075		4.075	DISBUDPAR
	1	4	4		5		6		7		7		7		
1.8	Program Pengembangan Nilai Budaya			198		940		790		890		940		940	DISBUDPAR
	1 Persentase peran serta pelaku Budaya dalam mewujudkan seni budaya OKI	25	25		25		25		25		25		25		
1.9	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			0		1.300		1.600		1.950		2.200		2.200	DISBUDPAR
	1 Jumlah Tampilan Tim Kesenian Kab. OKI di Luar Daerah/Luar Negeri	100	100		100		100		100		100		100		
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>			1.365		2.145		2.360		2.575		2.790		3.005	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			646		700		750		800		850		900	D ARSIP PUSTAKA
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			235		750		800		850		900		950	D ARSIP PUSTAKA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			34		40		45		50		55		60	D ARSIP PUSTAKA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		50		55		60		65		70	D ARSIP PUSTAKA
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100		105		110		115		120		125	D ARSIP PUSTAKA
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		90%		100%		100%		
1.6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			350		0		0		0		0		0	D ARSIP PUSTAKA
	1 Persentase peningkatan bahan pustaka	10,09%	11,10%		12,21%		13,43%		14,77%		16,25%		17,88%		
	2 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	0,40%	0,42%		0,44%		0,46%		0,49%		0,51%		0,54%		
	3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,39%	1,46%		1,53%		1,61%		1,69%		1,77%		1,86%		
	4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	11.920 buku	0 buku		12.516 buku		13.142 buku		13.799 buku		14.489 buku		15.213 buku		
	5 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	4,88%	0%		5,12%		5,38%		5,65%		5,93%		6,23%		
1.7	Program Pengembangan Perpustakaan			0		350		400		450		500		550	D ARSIP PUSTAKA
	1 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar	30%	33%		36%		40%		44%		48%		53%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
	2	Meningkatnya tenaga perpustakaan sesuai standar	4,88%	5,12%		5,38%		5,65%		5,93%		6,23%		6,54%		
1.8	Program Peningkatan Minat Baca				0		150		200		250		300		350	D ARSIP PUSTAKA
	1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca	7673 orang	8056 orang		8458 orang		8881 orang		9325 orang		9791 orang		10280 orang		
<b>2.18</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				176		1.110		1.221		1.332		1.443		1.554	
1.1	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				176		500		550		600		650		700	D ARSIP PUSTAKA
	1	Persentase OPD yg menerapkan arsip secara baku	57,69%	7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		3,85%		
	2	Persentase arsip /dokumen yg tertata (arsip statis)	9,62%	9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
	3	Persentase buku arsip daerah	0%	0%		19,23%		19,23%		19,23%		19,23%		19,23%		
	4	Persentase dokumen/arsip statis & sejarah yang direstorasi	0%	0%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
	5	Persentase arsip statis yang diakuisisi	0%	0%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		9,62%		
1.2	Program pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan				0		200		220		240		260		280	D ARSIP PUSTAKA
	1	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	80%	0%		80%		80%		80%		90%		90%		
	2	Persentase OPD yang memiliki sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar	57,69%	0%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		7,69%		
1.3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan				0		410		451		492		533		574	D ARSIP PUSTAKA
	1	Persentase Layanan Arsip Yg Berbasis Teknologi & Informasi	1,92%	0%		5,77%		5,77%		5,77%		5,77%		5,77%		
	2	Jumlah OPD yang dibina kearsipannya	30 OPD	4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD		4 OPD		
	3	Jumlah arsiparis yang dinilai angka kreditnya	0 orang	0 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
<b>3. URUSAN PILIHAN</b>				32.510		56.252		66.662		68.772		77.968		82.497	
<b>3.01</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			5.520		8.095		11.450		13.310		16.935		20.075	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.188		1.100		1.200		1.200		1.300		1.300	DISKAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			155		600		200		200		200		200	DISKAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			62		50		50		60		60		75	DISKAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		25		50		50		50		100	DISKAN
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50		50		50		50		50		50	DISKAN
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1.703		1.950		2.500		3.200		4.300		5.650	DISKAN
	1 Persentase Produksi Perikanan Budidaya	5%	5%		5%		7%		10%		15%		20%		
	2 Persentase Produksi Benih Ikan Unggul	5%	5%		10%		20%		35%		55%		80%		
	3 Persentase Pokdakan yang Aktif	96 kelompok	50%		55%		65%		75%		85%		100%		
	4 Persentase UPR/HSRT yang Aktif	18 UPR/HSRT	10%		15%		25%		40%		60%		80%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1.061		1.720		2.200		2.700		3.475		5.350	DISKAN
	1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	26005 ton	2%		5%		8%		12%		20%		35%	
	2	Persentase KUB Nelayan yang Aktif	38 KUB	10%		20%		35%		50%		75%		100%	
	3	Persentase Pelayanan TPI Sungai Lumpur	25 surat	50%		60%		70%		90%		120%		170%	
1.8	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan			1.302		1.550		2.100		1.850		2.150		1.600	DISKAN
	1	Persentase penurunan ilegal fishing	20 kasus	10%		20%		30%		50%		75%		100%	
	2	Persentase kelompok masyarakat pengawas yang aktif	10 kelompok	10%		30%		50%		70%		90%		100%	
	3	Pelestarian Sumberdaya Perikanan	15 lokasi	15 lokasi		16 lokasi		16 lokasi		16 lokasi		17 lokasi		17 lokasi	
	4	Persentase Pengelolaan Hasil Perikanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.9	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			0		200		250		300		400		550	DISKAN
	1	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan perkapita	33,6 Kg/Kapita	2%		5%		10%		15%		25%		50%	
1.10	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			0		0		2.000		2.000		2.500		3.500	DISKAN
	1	Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau dan Air Tawar (kawasan minapolitan) yang aktif	868 ha	2%		3%		4%		5%		6%		7%	
1.11	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan			0		650		650		1.500		2.250		1.500	DISKAN
	1	Peningkatan Jalan Produksi Budidaya	0 unit			1 unit		1 unit		1 unit		2 unit		2 unit	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Persentase Pengembangan/ Penyediaan Pabrik Pakan/Mesin Pakan Mandiri	3 unit	2 unit	3 unit		4 unit		5 unit		5 unit				
1,12		Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan		0	200		200		200		200		200		DISKAN
	1	Tersedianya Data Base Perikanan	1 buku	1 buku	1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		
<b>3.02</b>		<b>URUSAN PARIWISATA</b>		2.102	7.459		9.604		7.359		7.045		7.409		
1.1		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		0	1.905		2.285		2.325		2.521		2.655		DISBUDPAR
	1	Jumlah kunjungan wisatawan	10.242	10.444	10.546		10.646		10.748		10.850		10950		
	2	Tingkat promosi pariwisata	29	30	40		50		60		70		70		
1.2		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		353	2.700		3.720		2.240		1.710		1.810		DISBUDPAR
	1	Peningkatan Jumlah objek wisata	2	2	2		2		3		3		3		
	2	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	15,38	23,08	30,77		38,46		46,15		53,85		53,85		
1.3		Program pengembangan kemitraan		15	1.120		1.865		1.060		1.080		1.210		DISBUDPAR
	1	Tingkat pengembangan kemitraan	161	166	172		177		182		187		193		
1.4		Program Pengembangan daya tarik wisata		1.734	1.734		1.734		1.734		1.734		1.734		DISBUDPAR
	1	Persentase pemeliharaan objek wisata	50	50	50		50		50		50		50		
<b>3.03</b>		<b>URUSAN PERTANIAN</b>		15.519	27.220		29.405		30.890		33.795		35.540		
		<b>DINAS KETAHANAN PANGAN , TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA</b>		11.044	17.985		20.095		21.130		23.385		25.280		
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.053	2.150		2.200		2.250		2.275		2.300		DKKTPH
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1402	2200		2200		1400		1400		200		DKKTPH
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			83		300		300		300		350		350	DKPTPH
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		150		200		200		250		250	DKPTPH
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			60		100		100		100		100		100	DKPTPH
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		90%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			200		600		225		500		800		1.125	DKPTPH
	1 Nilai Tukar Petani	92,42	94		95		96		97		98		100		
	2 Persentase peningkatan kelas kelompok tani	10 Kelompok	10		10		10		10		10		10		
	3 Persentase kelompok tani yang berprestasi	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	4 Jumlah kelompok tani/ pelaku agribisnis yang mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis	0	20 Klp		25 Klp		30 Klp		35 Klp		40 Klp		45 Klp		
	5 Jumlah petani/ pendamping yang mengikuti PEDANA/PENAS KTNA	0	60 org		0		60 Org		60 Org		0		60 Org		
1.7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			115		345		390		435		480		525	DKPTPH
	1 Promosi atas hasil produksi pertanian (event)	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
	2 Jumlah pasar tani	0	2 Unit		4 Unit		6 Unit		8 Unit		10 Unit		12 Unit		
	3 Stabilitasnya harga dan pasokan pangan pokok melalui toko tani indonesia	0	1 Unit	-	-		-		-		-		-		
1.8	Program Peningkatan Produksi			100		100		100		100		100		100	DKPTPH
	1 Terpenuhinya Benih Padi Penangkaran unggul bermutu	2.642 ton	2650		2658		2666		2674		2682		2690		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.9	Program Pemberdayaan Penyuluh			394		550		600		650		750		950	DKPTPH
	1	Persentase penyuluh yang bersertifikat	2	-		-									
	2	Tingkat pemenuhan 1 desa 1 penyuluh	179 PPL	3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL		3 PPL	
	3	Terpenuhinya insentif/ alat peraga/ alat bantu penyuluh pertanian	79	79		220		223		226		229		232	
	4	Peningkatan wawasan/ motivasi penyuluh pertanian setelah mengikuti pertemuan teknis kabupaten	179 PPL	179		220		223		226		229		325	
1.10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian			6.562		11.490		13.780		15.195		16.880		19.380	DKPTPH
	1	Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (Rp/TK) (Lihat di SDG's)	N/A (BPS)	68.121.992		71.102.279		74.082.565		77.062.852		80.043.139			
	2	Tingkat pemenuhan data base pertanian	10	10		10		10		10		10		10	
	3	Jumlah alat pasca panen yang tersedia													
		Terpal Jemur	0	250		300		350		400		450		500	
		RMU	0	1		1		2		2		2		3	
		Combine harvester	0	5		5		5		5		5		5	
		Power Thresher	0	10		10		15		15		15		15	
		Corn seller	0	10		10		15		15		15		15	
		Alat Packing beras	0	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
	4	Jumlah luas tanaman padi/palawija													
		Produksi tanaman pangan (ton)													
		- Padi	0	846.068		862.989		880.249		897.854		915.811		933.768	
		- Jagung	0	47.172		48.587		50.045		51.546		53.092		54.685	
		Produktivitas Tanaman pangan (ku/ha)													
		- Produktifitas Padi (Ku/Ha)	0	51,17		52,19		53,24		54,30		55,39		56,47	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	- Produktifitas Jagung (Ku/Ha)	0,00	42,99	43,00	43,21	43,50	43,75	44,25							
5	Jumlah luas pertanaman Ubi Kayu dan Ubi Jalar	0 ha	100	150	200	250	300	800							
6	Tersedianya lumbung pangan	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit							
7	Persentase lumbung pangan yang dimanfaatkan	N/A	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen							
8	Panjang Jalan Usaha Tani	0	3.000 M	4.000 M	5.000 M	6.000 M	7.000 M	8.000 M							
9	Tingkat pemenuhan laporan agroklimat	0	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap							
10	Tingkat pengawasan pupuk bersubsidi	0	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec							
11	Tercukupinya kesediaan air pada kawasan tanaman pangan	0	225 Ha	250 Ha	275 Ha	300 Ha	325 Ha	350 Ha							
12	Jumlah produksi tanaman buah buahan														
	produksi Duku	23.869	24.585	25.322	26.081	26.863	27.668	28.498							
	Produksi Durian	5.976	6.155	6.339	6.529	6.724	6.925	7.132							
	produksi Mangga	21548 Ton	21.550	21.555	21.565	21.570	21.570	21.570							
	Produksi Pisang	12.619	12.997	13.386	13.787	14.200	14.626	15.626							
13	Jumlah produksi tanaman sayur														
	Produksi Cabe Besar	145.234	149.591	154.078	158.700	163.461	168.364	173.414							
	Produksi Cabe Rawit	34.656	35.695	36.765	37.867	39.003	40.173	41.378							
14	Produktivitas tanaman sayuran														
	Produksi Cabe Besar	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6							
	Produksi Cabe Rawit	16,4	16,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2							
1.11	Program pengembangan agribisnis														DKPTPH
1	Persentase Gapoktan yang dibina	100%	100%												
	<b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>														
			4.475	9.235	9.310	9.760	10.410	10.260							
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														DISBUNNAK
			917	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200							
1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			190		650		300		300		350		350	DISBUNNAK
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			123		150		200		200		250		250	DISBUNNAK
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			40		40		40		40		40		40	DISBUNNAK
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			75		100		100		100		100		100	DISBUNNAK
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		90%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			120		450		450		450		450		450	DISBUNNAK
	1 Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	10 klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
	2 Tersedianya data perusahaan dan pelaku agribisnis lainnya	54 PBSN	54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		54 PBSN		
1.7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi perkebunan			150		500		500		500		500		500	DISBUNNAK
	1 Meningkatnya promosi dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan	20 Produk, 5 UPPB	1 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		2 Produk, 2 UPPB		
1.8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan			400		800		950		800		950		800	DISBUNNAK
	1 Terlaksananya kajian pengembangan perkebunan	1 Dok	1 Dok		0		1 Dok		0		1 Dok		0		
	2 Tersedianya prasarana dan sarana perkebunan tepat guna	18 Klpk	3 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		5 Klpk		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.9	Program Peningkatan Produksi			630		1.500		1.550		1.700		1.700		1.700	DISBUNNAK
	1 Meningkatkan pengetahuan petani tentang peningkatan produksi perkebunan	10 Klmpk	20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		20 klmpk		
	2 Tersedianya saprodi perkebunan	15 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		
	3 Meningkatkan luas areal dan produksi tanaman perkebunan	50 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		7 Klmpk		
	4 Terhindarnya kebun masyarakat dari kebakaran	200 Ha	200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		200 Ha		
1.10	Program Pemberdayaan Penyuluh			250		300		300		350		350		350	DISBUNNAK
	1 Meningkatkan kapasitas penyuluh perkebunan lapangan	47 Orang	47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		47 Orang		
1.11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			300		400		400		400		400		400	DISBUNNAK
	1 Terciptanya kesehatan hewan di masyarakat	22.000 Ekor	22.000 Ekor		20.000 Ekor		18.000 Ekor		16.000 Ekor		14.000 Ekor		14.000 Ekor		
1.12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			1.210		2.175		2.200		2.550		2.800		2.800	DISBUNNAK
	1 Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak dan meningkatnya populasi ternak	12 Unit, 2.500 Dosis	3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		3 Unit, 2.500 Dosis		
	2 Meningkatnya populasi ternak	2.574 Ekor	2.600 Ekor		2.700 Ekor		2.800 Ekor		2.900 Ekor		3.000 Ekor		3.000 Ekor		
	3 Meningkatnya konsumsi gizi produk peternakan	40 Sekolah	75 Sekolah		80 Sekolah		85 Sekolah		90 Sekolah		95 Sekolah		95 Sekolah		
1.13	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			0		200		200		200		200		200	DISBUNNAK
	1 Peningkatan sarana prasarana pasar hewan	2 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
1.14	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			0		600		750		600		750		750	DISBUNNAK
	1 Tersedianya kajian pengembangan peternakan (action plane)	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB	
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
	2	Tersedianya prasarana dan sarana peternakan tepat guna	15 Klmpk	4 Klmpk		5 Klmpk	600	5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
1.15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			0		300		300		300		300		300	DISBUNNAK
	1	Tersedianya alat pasca panen produk perkebunan dan peternakan	26 Klmpk	3 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		5 Klmpk		
1.16		Program Peningkatan Produksi Peternakan			70		70		70		70		70		70	DISBUNNAK
	1	Persentase tingkat produksi ternak	50	50		50		50		50		50		50		
<b>3.04</b>		<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>			7.729		11.201		13.910		14.885		17.800		17.075	
1.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.539		1.326		1.400		1.400		1.400		1.400	DISDAG
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			394		980		380		380		1.130		380	DISDAG
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3		Program peningkatan disiplin aparatur			66		60		130		130		130		130	DISDAG
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		65		70		70		85		85	DISDAG
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			70		70		80		80		85		85	DISDAG
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		90%		100%		100%		
1.6		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			1.600		575		600		650		670		670	DISDAG
	1	Persentase alat UTTP yang bertanda terasah	0%	11%		13%		15%		17%		19%		21%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	2	Persentase monitoring dan pengawasan barang dan jasa	85%	3%	4%	5%	6%	7%	8%						
1.7		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		0	450	450	450	450					450	DISDAG	
	1	Jumlah komoditi yang diekspor	Na	315 Ton	333 Ton	350 Ton	370 Ton	390 Ton	390 Ton						
1.8		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		4.060	7.300	10.350	11.300	13.350	13.350				13.350	DISDAG	
	1	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	2	2	3	5	5	5	20						
	2	Persentase penyediaan sarana perdagangan	8%	15%	20%	25%	30%	35%	40%						
	3	Persentase penyediaan informasi dan promosi perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
1.9		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		0	375	450	425	500	525					DISDAG	
	1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	5,36%	10%	20%	30%	40%	50%	55%						
	2	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	10%	20%	30%	40%	50%	60%	65%						
<b>3.05</b>		<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>		595	1.080	1.085	1.115	1.175	1.175						
1.1		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		0	200	200	200	200	200				200	DISKOPERIN	
	1	Jumlah IKM Yang menerapkan inovasi	5	6	7	8	9	10	11						
1.2		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		20	200	200	200	250	200				200	DISKOPERIN	
	1	Jumlah rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah	72	75	80	85	90	95	100						
	2	Jumlah IKM yang menjalin kerjasama dengan swasta	0	1	2	3	4	5	6						

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			130		80		85		90		95		100	DISKOPERIN
	1 Jumlah produk IKM yang memiliki SNI	5	6		7		8		9		10		11		
1.4	Program Penataan Struktur Industri			200		100		100		125		130		150	DISKOPERIN
	1 Persentase penataan hubungan antara industri hulu dan hilir	25%	30%		35%		40%		45%		50%		60%		
1.5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial			245		500		500		500		500		525	DISKOPERIN
	1 Jumlah IKM yang memiliki sarana informasi	0	0		1		2		3		4		5		
	2 Pameran hasil industri kecil dan kerajinan	3	4		4		4		4		4		4		
<b>3.06</b>	<b>URUSAN TRANSMIGRASI</b>			1.045		1.197		1.208		1.213		1.218		1.223	
1.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			1.045		1.197		1.208		1.213		1.218		1.223	DISNAKER-TRANS
	1 Rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	2 KW	4 KW		4 KW		4 KW		4KW		4 KW		4 KW		
	2 UPT yang dibina dan dikembangkan (Ekosobud,Sapras)	2 UPT	1 UPT		1 UPT		1 UPT		1 UPT		2 UPT		2 UPT		
<b>4.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>			177.214		213.636		213.473		222.058		232.843		248.702	
<b>4.01</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>														
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			65.128		67.531		64.607		67.837		71.232		77.232	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			11.671		12.319		12.935		13.581		14.261		14.261	SETWAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.821		10.402	0	4.622	0	4.853	0	5.096	0	11.096	SETWAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparaturn	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			226		237		249		261		275		275	SETWAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			509		524		550		578		607		607	SETWAN
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			303		254		267		280		294		294	SETWAN
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			50.598		43.795		45.984		48.284		50.699		50.699	SETWAN
	1 Tercapainya Rasio jumlah perda yang disahkan	5 Buah	5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		5 Buah		
	2 Teridentifikasinya masalah - masalah di Daerah Pemilihan (DAPIL) yang teratasi	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
	3 Meningkatnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			54.924		70.250		74.400		79.634		84.154		89.166	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			28.810		30.251		31.763		33.351		35.019		36.770	SETDA
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9.038		9.690		10.164		10.663		11.186		11.735	SETDA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			614		645		677		711		746		784	SETDA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		20%		18%		21%		26%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			1.917		6.558		7.288		7.879		8.530		9.147	
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			2.000		4.050		3.721		3.898		4.143		4.344	SETDA
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD			466		294		309		324		340		357	Bagian Keuangan
	1	Tersedianya Anggaran Setda Kab. OKI	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
1.7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			1.602		1.014		1.106		1.206		1.316		1.468	SETDA
	1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	Bagian Hukum
	2	Tersedianya dan Terdokumentasinya Kegiatan Pemerintah kab.OKI	60%	60%		66%		73%		80%		88%		97%	Bagian Humas & Protokoler
1.8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			4.787		6.051		6.437		6.984		7.469		7.772	SETDA
	1	Meningkatnya Pelayanan Acara Resmi Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	62%	62%		68%		75%		83%		91%		100%	Bagian Humas & Protokoler
	2	Tersedianya data pembangunan daerah	20 lap	20 lap		20 lap		20 lap		20 lap		20 lap		20 lap	Bagian Adm. Pembangunan
	3	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bagian Keuangan
	4	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bagian Keuangan

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			200		275		295		320		360		360	SETDA
	1 Terbentuknya peraturan daerah yang baik	10 Perda	10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		10 Perda		Bagian Hukum
	2 Tersedianya buku peraturan perundang-undangan	500 Buku	500 Buku		500 Buku		500 Buku		550 Buku		550 Buku		550 Buku		Bagian Hukum
1.10	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			400		480		500		575		600		642	SETDA
	1 Meningkatnya kinerja camat	18	18		18		18		18		18		18		Bagian Pemerintahan
	2 Terasilinasinya Kesuksesan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden	1	1		-		-		-		-		1		Bagian Pemerintahan
1.11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			590		1.218		1.335		1.453		1.320		1.353	Bagian Pemerintahan
	1 Terasilinasinya pembentukan kabupaten dan kecamatan baru	-	-		-		-		-		-		2		
	2 Tersedianya data nama-nama Rupa Bumi	200	200		300		300		350		350		400		
	3 Terwujudnya kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama antar daerah	1	1		1		1		1		1		1		
	4 Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Layanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1	1		1		1		1		1		1		
1.12	Program Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten			255		585		470		505		535		585	Bagian Pemerintahan
	1 Terpenuhinya Tertib Wilayah administrasi Batas Desa/Kelurahan	-	-		-		-		-		-		1		
	2 Tersedianya Data Digital Penataan Batas	1	1		1		-		-		-		-		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.13	Program Pengendalian perekonomian daerah			650		680		710		740		790		825	Bagian Ekonomi
	1 Tingkat koordinasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. OKI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Tingkat pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2 BUMD	2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		2 BUMD		
	3 Terfasilitasinya modal usaha golongan ekonomi lemah	4 Kec	4 Kec		4 Kec		5 Kec		5 Kec		6 Kec		6 Kec		
1.14	Program Pelayanan Peningkatan Pendidikan dan Kesenian			3.595		6.280		6.975		7.875		8.650		9.875	Bagian Kesra
	1 Jumlah pelayanan pendukung peningkatan peribadatan	3155 org	3155 org		4155		4155		4200		4200		4200		
	2 Jumlah terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	700 org	700 org		650 org		650 org		650 org		450 org		450 org		
	3 Jumlah pembinaan dan peningkatan kerohanian masyarakat	1000 org	1000 org		1000 org		1250 org		1250 org		1500 org		1500 org		
	4 Cakupan pembinaan keagamaan	3 lokasi	3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		3 lokasi		
	5 Jumlah peserta pelayanan administrasi pernikahan	140 pasang	140 pasang		205 pasang		272 pasang		317 pasang		350 pasang		380 pasang		
	6 Jumlah peserta pelayanan pendukung pendidikan peribadatan	2000 org	2000 org		2250 org		2500 org		2750 org		3000 org		4000 org		
1.15	Program mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat			0		200		200		200		200		200	Bagian Hukum
	1 Terciptanya perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu	10 Perkara	10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		10 Perkara		Bagian Hukum
1.16	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa			0		1.980		2.450		2.950		2.950		2.950	Bagian ULP
	1 Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	25%	25%		50%		70%		80%		90%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	PEMERINTAHAN KECAMATAN			24.802		25.658		26.764		27.065		28.218		28.823	
	KECAMATAN KAYUAGUNG			6.090		9.706		10.192		10.394		10.914		11.136	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.090		5.090		5.345		5.345		5.612		5.612	KAYUAGUNG
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			418		418		439		439		461		461	KAYUAGUNG
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			69		69		72		72		76		76	KAYUAGUNG
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			30		30		32		32		33		33	KAYUAGUNG
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			250		250		262		262		275		275	KAYUAGUNG
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			234		0		0		0		0		0	KAYUAGUNG
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
1.7	Program pembangunan kelurahan			0		3.850		4.043		4.245		4.457		4.680	KAYUAGUNG
	1 Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	<b>KECAMATAN SP PADANG</b>			1.093		768		807		807		847		847	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			308		308		323		323		340		340	SP PADANG
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			180		180		189		189		198		198	SP PADANG
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			20		20		21		21		22		22	SP PADANG
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	SP PADANG
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			210		210		221		221		232		232	SP PADANG
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			325		0		0		0		0		0	SP PADANG
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN JEJAWI</b>			1.093		817		858		858		901		1.100	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			374		374		393		393		413		413	JEJAWI
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			135		135		142		142		149		348	JEJAWI
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			15		15		16		16		17		17	JEJAWI
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	JEJAWI
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			243		243		255		255		268		268	JEJAWI
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			276		0		0		0		0		0	JEJAWI
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN PAMPANGAN</b>			1.010		751		764		764		802		802	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			404		404		424		424		445		445	PAMPANGAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			105		105		110		110		116		116	PAMPANGAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			24		24		0		0		0		0	PAMPANGAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%								
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			12		12		13		13		13		13	PAMPANGAN
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			40		40		42		42		44		44	PAMPANGAN
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			167		167		175		175		184		184	PAMPANGAN
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			259		0		0		0		0		0	PAMPANGAN
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN TULUNG SELAPAN</b>			1.656		1.548		1.626		1.644		1.726		1.746	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			333		333		350		350		367		367	TL. SELAPAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			476		476		500		500		525		525	TL. SELAPAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			45		45		47		47		50		50	TL. SELAPAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			16		16		17		17		18		18	TL. SELAPAN
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			45		45		47		47		50		50	TL. SELAPAN
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			133		133		139		139		146		146	TL. SELAPAN
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			345		0		0		0		0		0	TL. SELAPAN
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
1.8	Program pembangunan kelurahan			263		500		525		543		571		591	TL. SELAPAN
	1 Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	<b>KECAMATAN PEDAMARAN</b>			1.020		867		910		910		956		956	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			417		417		438		438		460		460	PEDAMARAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			199		199		209		209		219		219	PEDAMARAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	PEDAMARAN
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			201		201		211		211		221		221	PEDAMARAN
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			153		0		0		0		0		0	PEDAMARAN
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN TANJUNG LUBUK</b>			1.621		1.727		1.813		1.831		1.923		1.943	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			518		518		543		543		571		571	TJ. LUBUK
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			566		566		594		594		624		624	TJ. LUBUK
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			29		29		30		30		32		32	TJ. LUBUK
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	TJ. LUBUK
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			154		154		162		162		170		170	TJ. LUBUK
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			244		0		0		0		0		0	TJ. LUBUK
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
1.7	Program pembangunan kelurahan			60		410		431		449		471		492	TJ. LUBUK
	1 Capaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Capaian Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	<b>KECAMATAN LEMPUING</b>			1.020		858		901		901		946		946	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			402		402		423		423		444		444	LEMPUING
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			182		182		191		191		201		201	LEMPUING
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			12		12		13		13		13		13	LEMPUING
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			8		8		8		8		9		9	LEMPUING
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			40		40		42		42		44		44	LEMPUING
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			213		213		224		224		235		235	LEMPUING
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			162		0		0		0		0		0	LEMPUING
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN MESUJI</b>			1.020		1.284		1.284		1.287		1.317		1.317	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			410		547		547		547		547		547	MESUJI
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			207		285		285		285		285		285	MESUJI
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			10		32		32		32		32		32	MESUJI
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		20		20		20		23		23	MESUJI
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0		12		12		15		15		15	MESUJI
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		50		50		75		75	MESUJI
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			177		338		338		338		340		340	MESUJI
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.8	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			166		0		0		0		0		0	MESUJI
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN SUNGAI MENANG</b>			1.020		740		777		777		816		816	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			337		337		354		354		371		371	SUNGAI MENANG
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			170		170		179		179		187		187	SUNGAI MENANG
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			20		20		21		21		22		22	SUNGAI MENANG
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	SUNGAI MENANG
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			163		163		171		171		180		180	SUNGAI MENANG
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			280		0		0		0		0		0	SUNGAI MENANG
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN AIR SUGIHAN</b>			1.204		969		1.017		1.017		1.068		1.068	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			426		426		447		447		469		469	AIR SUGIHAN
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			295		295		310		310		325		325	AIR SUGIHAN
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			32		32		34		34		36		36	AIR SUGIHAN
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	AIR SUGIHAN
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			166		166		174		174		183		183	AIR SUGIHAN
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			235		0		0		0		0		0	AIR SUGIHAN
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN CENGAL</b>			1.020		738		775		775		814		814	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			359		359		377		377		396		396	CENGAL
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			230		230		242		242		254		254	CENGAL
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			7		7		7		7		7		7	CENGAL
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			40		40		42		42		44		44	CENGAL
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			103		103		108		108		113		113	CENGAL
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			282		0		0		0		0		0	CENGAL
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN TELUK GELAM</b>			1.020		975		904		963		856		998	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			420		420		420		427		427		442	TELUK GELAM
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			239		333		274		314		219		334	TELUK GELAM
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			0		30		18		30		18		30	TELUK GELAM
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		50		50		50		50	TELUK GELAM
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			142		142		142		142		142		142	TELUK GELAM
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			169		0		0		0		0		0	TELUK GELAM
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM</b>			1.020		812		886		886		919		919	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			325		325		384		384		391		391	PKL.LAMPAM
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			272		272		276		276		291		291	PKL.LAMPAM
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			18		18		19		19		20		20	PKL.LAMPAM
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	PKL.LAMPAM
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			147		147		155		155		162		162	PKL.LAMPAM
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			208		0		0		0		0		0	PKL.LAMPAM
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR</b>			836		682		716		716		752		752	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			305		305		320		320		336		336	PETIR
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			162		162		170		170		179		179	PETIR
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			50		50		53		53		55		55	PETIR
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	PETIR
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			116		116		121		121		128		128	PETIR
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			154		0		0		0		0		0	PETIR
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN LEMPUING JAYA</b>			1.020		767		805		805		845		845	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			317		317		333		333		350		350	LEMPUING JAYA
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			146		146		154		154		161		161	LEMPUING JAYA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			29		29		30		30		32		32	LEMPUING JAYA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	LEMPUING JAYA
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			224		224		235		235		247		247	LEMPUING JAYA
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			253		0		0		0		0		0	LEMPUING JAYA
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN MESUJI RAYA</b>			1.020		850		893		893		937		937	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			410		410		431		431		452		452	MESUJI RAYA
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			174		174		183		183		192		192	MESUJI RAYA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			46		46		48		48		51		51	MESUJI RAYA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	MESUJI RAYA
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			170		170		179		179		187		187	MESUJI RAYA
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			170		0		0		0		0		0	MESUJI RAYA
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
	<b>KECAMATAN MESUJI MAKMUR</b>			1.020		798		838		838		880		880	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			307		307		323		323		339		339	MESUJI MAKMUR
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			194		194		204		204		214		214	MESUJI MAKMUR
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			12		12		12		12		13		13	MESUJI MAKMUR
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan			50		50		53		53		55		55	MESUJI MAKMUR
	1 Ketepatan terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			234		234		246		246		258		258	MESUJI MAKMUR
	1 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)			222		0		0		0		0		0	MESUJI MAKMUR
	1 Dana Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke titik bagi	100%	100%												
<b>4.02</b>	<b>PENGAWASAN</b>			5.164		7.669		8.111		8.657		9.263		9.734	
2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			758		999		1.071		1.087		1.148		1.159	INSPEKTORAT
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			150		1.870		1.440		1.410		1.380		1.350	INSPEKTORAT
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.3	Program peningkatan disiplin aparatur			110		100		120		140		160		180	INSPEKTORAT
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%				100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			340		370		430		490		550		610	INSPEKTORAT
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			418		220		510		560		610		670	INSPEKTORAT
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah			3.328		4.050		4.470		4.890		5.325		5.665	INSPEKTORAT
	1	Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	65%	75%		80%		85%		87%		90%		95%	
	2	Persentase hasil pemeriksaan/review tepat waktu	65%	68%		75%		80%		85%		90%		95%	
	3	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83%	83%		80%		85%		87%		90%		95%	
	4	Tingkat Kapabilitas APIP	84	84		84		85		86		87		88	
	5	Tingkat Maturitas SPIP	3	3		3		3		3		3		3	
2.7	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			60		60		70		80		90		100	INSPEKTORAT
	1	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN	83%	84%		85%		85%		85%		85%		85%	
<b>4.03</b>	<b>PERENCANAAN</b>			5.053		4.809		5.670		5.483		5.573		6.482	
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.043		1.095		1.150		1.207		1.268		1.331	BAPPEDA
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			521		547		1.224		603		633		531	BAPPEDA
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.3	Program peningkatan disiplin aparatur			51		54		56		59		62		65	BAPPEDA
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			10		11		11		12		12		13	BAPPEDA
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			110		116		121		127		134		140	BAPPEDA
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.6	Program Pengembangan data/informasi			120		130		130		140		140		150	BAPPEDA
	1 Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.7	Program pengembangan kota-kota menengah dan besar			100		0		0		0		0		0	BAPPEDA
	1 Jumlah dokumen koordinasi percepatan pembangunan bidang air bersih/drainase sanitasi dan pemukiman	1 lap	1 lap												
3.8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.821		1.136		1.141		1.321		1.151		2.061	BAPPEDA
	1 Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
3.9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			410		640		660		710		750		680	BAPPEDA
	1 Persentase program/kegiatan PD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.10	Program Perencanaan Sosial Budaya			597		657		722		795		874		961	BAPPEDA
	1 Persentase program/kegiatan PD bidang sosial budaya yang sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			270		425		455		510		550		550	BAPPEDA
	1 Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>4.04</b>	<b>KEUANGAN</b>			15.576		25.852		22.286		23.313		23.014		24.575	
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			10.952		15.920		15.725		16.105		15.240		16.157	
1.1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			3.169		3.799		3.828		3.846		3.941		4.131	BPKAD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.1	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			717		1.966		1.689		1.820		868		1.134	BPKAD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			98		145		173		155		192		198	BPKAD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			75		480		480		480		380		580	BPKAD
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			1.434		880		890		890		895		945	BPKAD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan Aset Daerah			0		800		800		800		800		800	BPKAD
	1 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD OKI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	2 Persentase Pelaporan Aset yang akurat	80%	80%		82%		85%		87%		90%		95%		
1.7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.459		5.480		5.645		5.845		5.795		6.150	BPKAD
	1 Predikat laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
	3 Tingkat Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		
	4 Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	65,45%	66		70		75		80		85		90		
1.8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah			0		2.370		2.220		2.270		2.370		2.220	BPKAD
	1 Meningkatnya Penata Usahaan Pengelolaan Aset	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		
	2 Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		
	3 Terpenuhinya dan Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD Kab OKI)	1 lap	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	<b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH</b>			4.624		9.932		6.561		7.208		7.774		8.418	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.544		1.621		1.771		1.921		2.071		2.221	BPPD
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			240		4.240		390		490		560		660	BPPD
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			115		220		270		350		435		520	BPPD
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			365		435		495		525		585		645	BPPD
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			375		497		567		610		637		737	BPPD
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah			1.985		2.919		3.068		3.312		3.486		3.635	BPPD
	1 Persentase Peningkatan Pencapaian PAD	10,5%	10,55%		10,60%		10,70%		10,80%		10,90%		11%		
<b>4.05</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			4.968		8.272		8.325		6.758		7.784		9.380	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			976		900		1.100		990		1.100		980	BKDPP
	1 Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			869		1.300		1.200		450		400		1.000	BKDPP
	1 Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			50		25		25		25		25		50	BKDPP
	1 Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			752		110		150		350		250		980	BKDPP
	1 Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			120		110		120		110		105		120	BKDPP
	1 Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		2.040		1.970		1.983		1.930		2.135	BKDPP
	1 Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%		88%		90%		92%		95%		96%		
	2 Terpenuhiya CPNS golongan II dan III yang memenuhi persyaratan	100%	90%		91%		92%		94%		95%		97%		
	3 Meningkatkan pemahaman PNS tentang jabatan fungsional dan perhitungan angka kredit bagi tenaga fungsional	100%	80%		82%		85%		88%		90%		96%		
1.7	Program pembinaan dan pengembangan aparatur			2.141		1.545		1.660		1.611		1.504		1.445	BKDPP
	1 Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	70%	80%		83%		85%		87%		90%		95%		
	2 Persentase pelanggaran disiplin aparatur	1,3%	1,3%		1,2%		1,1%		1%		0,9%		0,8%		
	3 Terpenuhiya formasi CPNS sesuai kebutuhan organisasi	90%	90%		92%		94%		95%		96%		98%		
	4 Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.8	Program Pendidikan Kedinasan			0		2.172		2.035		1.164		2.405		2.590	BKDPP
	1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	80%	85%	88%		90%		94%		95%		97%		
	2	Ketersediaan data PNS yang akurat	30%	85%	90%		93%		95%		96%		98%		
	3	Peningkatan kualitas SDM aparatur	90%	80%	85%		90%		92%		94%		96%		
1.9	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			60		70		65		75		65		80	BKDPP
	1	Meningkatnya tingkat ketersediaan pelaporan data LHKPN pejabat Pemkab OKI	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
<b>4.06</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			1.600		3.595		3.310		3.310		3.605		3.310	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			608		650		650		650		650		650	BALITBANG
	1	Persentase Cakupan layanan administrasi perkantoran	51,54	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			168		495		200		200		495		200	BALITBANG
	1	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	53,88	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			48		50		50		50		50		50	BALITBANG
	1	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			126		140		150		150		150		150	BALITBANG
	1	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	21,09	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1.5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0		60		60		60		60		60	BALITBANG
	1	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	0%	100%		100%		100%		100%		100%		

URUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA & KERANGKA PENDANAAN										AKHIR PERIODE RPJMD 2024		PD PENANGUNG JAWAB
			2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	RP	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1.6	Program Litbang dan Inovasi Daerah			0		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Rekomendasi/laporan yang di terapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.7	Program Peningkatan IPTEK bagi UKM			0		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.8	Program Litbang dan Inovasi Peningkatan bidang Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan			0		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.9	Program Kajian Sosial dan Kemasyarakatan			0		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.10	Program Litbang dan Inovasi Bidang Pendidikan			150		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Rekomendasi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.11	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian			260		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Tingkat Laporan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.12	Program Desiminasi Iptek hasil Litbang dan Inovasi			40		100		100		100		100		100	BALITBANG
	1 Iptek dan Inovasi yang dipamerkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.13	Program Peningkatan Hasil Pemasaran			200		300		300		300		300		300	BALITBANG
	1 Studi komoditas / produk unggulan lokal berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		



# *Bab VIII*

## *Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatannya. Tingkat keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur secara spesifik tingkat capaian kinerja program dan kegiatan baik kuantitatif dan/atau kualitatif. Dengan demikian indikator kinerja menjadi dasar penilaian kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator tersebut menjadi parameter prioritas pembangunan dan juga sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja setiap urusan diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **8.1 Indikator Kinerja Utama**

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assessment) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan dan pengukuran

dilakukan tidak oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk lima tahun kedepan sebagaimana ditampilkan pada tabel 8.1.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ilir**

No	Indikator	Target					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa</b>							
1.	Indeks reformasi birokrasi						56,00
	- Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B
	- Nilai LPPD (Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	- Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	- Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	70	71	72	73	74	75
	- Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi	55 %	56	57	58	59	60 %
<b>Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana</b>							
2.	Indeks pelayanan infrastruktur dasar						0,75
	- Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70,46 %	71	72	73	74	75 %
	- Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	65 %	67	69	71	73	75 %
<b>Misi III Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>							
3.	Indeks Pembangunan Manusia						71.28
	- Rata-rata lama sekolah	7,3 Thn	7,5	7,6	7,7	7,8	8 Thn
	- Angka Usia Harapan Hidup	68,4 Thn	68,8	69,2	69,5	69,8	70 Thn
	- Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi baik (%)	88 %	91	94	97	99	100 %

<b>Misi IV Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi</b>							
4.	Pertumbuhan ekonomi						5,5
	- Nilai Tukar Petani	94 %	95	96	97	98	100 %
	- Persentase Koperasi yang aktif	83%	84	84	85	85	86
	- Indeks Gini	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40
	- Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	10,5%	10,6	10,7	10,8	10,9	11%
	- Angka kemiskinan	14,66%	13,72	12,78	11,83	10,89	9,95%
<b>Misi V Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan</b>							
5.	Indeks kualitas lingkungan hidup						62
	- Indeks Tutupan lahan	55,97	54	53	52	51	50
	- Indeks Kualitas Air	64	64	63	63	62	62
	- Indeks Kualitas Udara	99,06	98	97	96	95	94
<b>Misi VI Menciptakan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Religius, Tertib, Aman dan Nyaman</b>							
6.	Kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi						0
	- Jumlah kasus konflik antar umat beragama	0	0	0	0	0	0
	- Angka PMKS yang mendapat layanan	10 %	10	10	10	10	10 %

## **8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah sering pula disebut Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada lampiran A. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.2. sebagai berikut :



**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
<b>1</b>	<b><i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i></b>										
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,03	5,11	5,19	5,27	5,34	5,42	5,5		
1.2	Laju inflasi Kabupaten	%	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54		
1.3	Persentase Angka Kemiskinan	%	15,6	14,66	13,72	12,78	11,83	10,89	9,95		
1.4	Indeks Gini	indeks	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30		
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	66,18	67,03	67,88	68,73	69,58	70,43	71,28		
<b>2</b>	<b><i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i></b>										
2.1	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,01	7,3	7,5	7,7	8	8,21	8,4	DISDIK	
2.2	Angka Putus Sekolah SD	%	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	0,04	DISDIK	
2.3	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,50	0,42	0,34	,0,26	0,18	0,10	0,02	DISDIK	
2.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,02	98,4	98,8	99,2	99,6	100	100	DISDIK	
2.5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,88	99,9	99,9	100	100	100	100	DISDIK	
2.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	71,45	74,16	76,87	79,58	82,29	85	87,71	DISDIK	
2.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89,49	91,59	93,69	95,8	97,9	100	100	DISDIK	
2.8	Angka usia harapan hidup	tahun	68,04	68,4	68,8	69,2	69,5	69,8	70	DINKES	
2.9	Persentase balita gizi buruk	%	0,35	0,35	0,3	0,3	0,25	0,2	0,2	DINKES	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>1</b>	<b><i>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</i></b>										
<b>1,1</b>	<b><i>Pendidikan</i></b>									DISDIK	
1.1.1	APK PAUD	%	94,01	95,20	96,40	97,60	98,80	100	100		
1.1.2	APK SD	%	110,93	110,93	111	111	111	111	111		
1.1.3	APK SMP	%	95,18	96,10	97,10	98,10	99,00	100	100		
1.1.4	APM SD	%	101,71	101,80	101,82	101,90	101,92	102	102,02		
1.1.5	APM SMP	%	74,76	76,80	78,90	80,90	83,00	85,00	87,00		
1.1.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	%	5,33	12,30	19,20	26,10	33,10	40,00	43,00		
1.1.7	Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi	%	48,84	56,10	63,30	70,50	77,80	78,00	83,80		
1.1.8	Persentase guru bersertifikasi	%	48,93	55,10	61,40	67,60	73,80	80,00	86,20		
1.1.9	Jumlah lembaga PKBM yang Terakreditasi	Lembaga	0	3	6	9	12	15	15		
1.1.10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	Lembaga	3	7	11	15	19	21	23		
1.1.11	Persentase satuan pendidikan yang sudah mencapai standar pelayanan minimal pendidikan dasar	%	59,16	62,3	65,5	68,7	71,8	75	78		
1.1.12	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	32,29	35,8	39,4	42,9	46,5	50	53		
1.1.13	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	42,44	45	47,5	50	52,5	55	57,5		
1.1.14	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	31,79	37,4	43,1	48,7	54,4	60	63,4		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1,2</b>	<b>Kesehatan</b>									DINKES	
1.2.1	Cakupan rumah tangga sehat (persen)	%	80	80	90	100	100	100	100		
1.2.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	90	100	100	100	100	100	100		
1.2.3	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin untuk Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.4	Persentase Ketersediaan Obat Generik dan Obat Esensial di Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.5	Persentase Pelayanan Kesehatan daerah rentan masalah kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.6	Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin	%	85	100	100	100	100	100	100		
1.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.8	Persentasase obat yang diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.9	Cakupan Rumah Tangga dengan Prilaku Hidup Bersih dan sehat	%	75	77	80	83	85	88	88		
1.2.10	Cakupan Desa Siaga Aktif	Desa	321	321	323	323	324	325	325		
1.2.11	Persentase Posyandu Aktif	%	70	70	75	75	80	80	80		
1.2.12	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.13	Persentase anak 6-24 bulan keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan pendamping ASI	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.14	Pesentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan GIZI	%	98	98	98	98	99	99	99		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.15	Persentase Stunting pada anak balita yang ditangani	%	0	100	100	100	100	100	100		
1.2.16	Cakupan Rumah tangga dengan sumber air terlindungi	%	80	80	90	100	100	100	100		
1.2.17	Cakupan Rumah memiliki jamban sehat	%	65	100	100	100	100	100	100		
1.2.18	Cakupan tempat umum dan Penjual Makanan yang sehat	%	78	80	83	85	90	95	95		
1.2.19	Cakupan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan	%	80	80	90	100	100	100	100		
1.2.20	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis sesuai dengan pelayanan kesehatan TB	%	81	100	100	100	100	100	100		
1.2.21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus DBD	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.22	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai standar pelayanan kesehatan HIV	%	90	100	100	100	100	100	100		
1.2.23	Cakupan desa/kelurahan UCI	Desa	321	321	323	323	324	325	325		
1.2.24	Cakupan Imunisasi Dasar anak Usia 12 -23 Bulan	%	95	95	95	95,5	96	96,5	97		
1.2.25	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.26	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.27	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM) sesuai standar pelayanan kesehatan penderita DM	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.28	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar pelayanan kesehatan penderita (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100		
1.2.29	Persentase sarana Kesehatan yang dapat dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.30	Persentase Kelengkapan Prasarana, dan alat Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar	%	60	70	80	90	95	100	100		
1.2.31	Persentase Kelengkapan Prasarana, dan alat Kesehatan di Rumah Sakit Pratama sesuai standar	%	80	80	90	95	95	95	95		
1.2.32	Persentase Peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.33	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.34	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai dengan standar pelayanan persalinan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru baru lahir (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai dengan standar pelayanan kesehatan balita (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.38	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada usia produktif (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.39	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	11	9	7	5	3	2	2		
1.2.40	Persentase Hygiene air bersih dan air minum yang memiliki sertifikat hygiene	80	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.41	Persentase Upaya Keselamatan kerja dan olah raga	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.42	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (SPM)	%	90	100	100	100	100	100	100		
1.2.43	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan nasional Melalui PBI	%	75	80	85	90	95	100	100		
1.2.44	Cakupan stunting pada anak dibawah usia 5 Tahun	%	20	<20	<19,5	<18	<17	<16,5	<16		
1.2.45	Cakupan stunting pada anak dibawah usia 2 Tahun	%	13	<13	<12,5	<12	<11,5	<11	<10,5		
1.2.46	Cakupan desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/kel	274	283	291	299	307	315	327		
1.2.47	Cakupan desa/kelurahan yang Open Defecation free (ODF)/ Stop BAB Sembarangan	Desa/kel	60	82	104	128	148	168	188		
1.2.48	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	bayi	2	2	2	1	1	1	1		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.49	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	balita	2	2	2	1	1	1	1		
1.2.50	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Neonatal	2	2	2	1	1	1	1		
1.2.51	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.52	Rasio dokter persatuan penduduk	%	8,24	8,7	9,3	10,04	10,8	11,6	12,4	RSUD/DINKES	
1.2.53	Tipe kelas Rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel	Tipe	B	B	B	B	B	B	B	RSUD	
1.2.54	Tingkatan akreditasi rumah sakit	Tingkat	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama	Paripurna	RSUD	
<b>1,3</b>	<b><i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i></b>										
1.3.1	Rasio panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	70,47	70,47	71,62	72,83	74,1	75,35	76,35	DINAS PUPR	
1.3.2	Rasio jembatan kondisi mantap	%	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PUPR	
1.3.3	Rasio drainase jalan kondisi Mantap	%	45,14	45,15	45,16	45,17	45,18	45,19	45,2	DINAS PRKP	
1.3.4	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	10	15	15	15	15	15	15	DINAS PUPR	
1.3.5	Rasio jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	%	15	20	20	20	20	20	20	DINAS PUPR	
1.3.6	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	18	37	57	75	88	100	100	DINAS PUPR	
1.3.7	Prosentase penduduk berakses air Minum	%	77,73	79,73	80,73	81,73	82,73	83,73	84,73	DINAS PRKP	
1.3.8	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	5	10	10	10	10	10	10	DINAS PUPR	
1.3.9	Persentase infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	40,18	40,23	40,34	40,52	40,78	41,13	41,58	DINAS PRKP	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.10	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah	%	0,17	0,31	0,42	0,73	1,28	2,24	3,2	DINAS PUPR	
1.3.11	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PUPR	
<b>1,4</b>	<b><i>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</i></b>										
1.4.1	Rasio Rumah Layak huni	%	56,66	58,66	60,66	62,66	64,66	66,66	68,66	DINAS PRKP	
1.4.2	Persentase kawasan kumuh yang Tertangani	%	2,67	2,80	2,94	3,09	3,25	3,41	3,58	DINAS PRKP	
1.4.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK	
1.4.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK	
<b>1.5</b>	<b><i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></b>										
1.5.1	Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	POLPP & PK	
1.5.2	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	%	60	65	70	75	80	85	90	KESBANGPOL	
1.5.3	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ilir	63,87	63,87	100	-	-	-	100	100	KESBANGPOL	
1.5.4	Persentase penurunan titik kebakaran (Hot Spot) hutan dan lahan	%	85	86	87	89	91	93	95	BPBD	
1.5.5	Persentase kejadian bencana yang Ditanggulangi	%	50	60	60	60	60	60	60	BPBD	
<b>1.6</b>	<b><i>Sosial</i></b>									DINSOS	
1.6.1	Persentase panti sosial yang dibina	%	80	100	100	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.6.2	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	%	10	10	10	10	10	10	10		
1.6.3	Cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100		
1.6.4	Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	%	22,2	100	100	100	100	100	100		
1.6.5	Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.6.6	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100		
<b>2</b>	<b><i>Fokus Pelayanan Wajib Tidak Dasar</i></b>										
<b>2.1</b>	<b><i>Tenaga Kerja</i></b>									DISNAKER-TRANS	
2.1.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	86,30	86,30	86,50	86,80	87,00	87,25	87,40		
2.1.2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan ( per 1000 orang)	%	44,90	45	48	50	52	54	55		
2.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,45	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25	2,00		
2.1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,40	65	70	75%	80	85	90		
2.1.5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	20	22%	25%	30	35%	40	45%		
<b>2.2</b>	<b><i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i></b>									DINAS PP & PA	
2.2.1	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	PD	15	20	20	25	25	30	30		
2.2.2	Rasio KDRT perempuan	%	0,90	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,48	91,89	92,29	92,69	93,09	93,50	93,90		
2.2.4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	58,31	60,54	62,77	65,01	67,24	69,47	71,70		
2.2.5	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	%	23	50	50	50	100	100	100		
2.2.6	Jumlah kecamatan layak anak	Kec	0	3	3	3	4	4	4		
2.2.7	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05		
2.2.8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	95	95	95	100	100	100	100		
2.2.9	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03		
2.2.10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	26,71	30	30	35	40	45	50		
2.2.11	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	13,33	15	20	20	25	25	30		
2.2.12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100		
2.2.13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2.14	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	50	50	50	55	60	65	80		
2.2.15	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50	50	55	55	60	70	90		
2.2.16	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54	90	90	90	95	95	95		
2.2.17	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	54	55	55	55	60	60	65		
2.2.18	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50	60	70	80	90	90		
<b>2.3</b>	<b><i>Ketahanan Pangan</i></b>									DKTPH	
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	PPH	87,9	90,8	90,9	100	100	100	100		
2.3.2	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan (Angka Skor)	Angka Skor	82,9	90,8	93,9	96,9	98,6	100	100		
2.3.3	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	176,91	177,2	178,1	179,6	181,3	183,6	185,1		
2.3.4	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	Rp/orang	1939,3	2032,4	2049,2	2052,7	2075,6	2080,9	2100,4		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.4</b>	<b>Pertanahan</b>									DINAS PERTANAHAN	
2.4.1	Jumlah Bidang Tanah Aset yang Disertifikatkan	Persil	0	70	72	74	76	78	83		
2.4.2	Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100		
2.4.3	Jumlah Permasalahan Penguasaan Tanah yang Diidentifikasi	Kasus	70	70	75	76	77	78	84		
<b>2.5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>									DINAS LH	
2.5.1	Persentase penanganan sampah	%	6,06	7	8	9	10	11	12		
2.5.2	Persentase pengurangan sampah Kab.OKI	%	8,5	10	12	15	17	19	21		
2.5.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64	64	63	63	62	62	62		
	Indeks kualitas air	Indeks	65,38	64	64	63	63	62	62		
	Indeks kualitas udara	Indeks	99,06	99,06	98	97	96	95	94		
	Indeks tutupan lahan	Indeks	55,97	55,97	54	53	52	51	50		
2.5.4	Jumlah Bank Sampah yang terkelola	%	72	73	74	75	76	77	78		
2.5.5	Penegakkan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100		
2.5.6	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100		
2.5.7	Persentase jumlah sekolah adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah		
<b>2.6</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>									DISDUKCAPIL	
2.6.1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	%	85,74	92,59	99,08	99,2	99,4	99,6	99,8		
2.6.2	Lama Pengurusan KTP	Hari	7	7	7	7	7	7	7		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.3	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	%	81,2	85,2	89,5	93,9	98,6	98,8	99	
2.6.4	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	30,91	35,53	40,15	44,77	49,39	54,01	58,63	
2.6.5	Kepemilikan KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6.6	<i>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatn Sipil</i>	%	50	55	60	65	70	75	80	
<b>2.7</b>	<b><i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i></b>									DINAS PMD
2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat /LPM (Kelompok)	Kelompok	314	314	314	314	314	314	314	
2.7.2	Jumlah BUMDes yang mempunyai 1 unit usaha yang telah berjalan dengan baik (Desa)	Desa	314	50	50	50	50	50	64	
2.7.3	Jumlah PKK yang aktif (Kelompok)	kelompok	346	346	346	346	346	346	346	
2.7.4	Persentase desa inovasi	Desa	314	50	50	50	50	50	50	
2.7.5	Persentase aparat pemerintah desa yang berkinerja baik	%	40	50	60	70	80	90	95	
<b>2.8</b>	<b><i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i></b>									DINAS PPKB
2.8.1	Prevalensi peserta KB aktif	%	82,04	79,00	79,05	80,00	80,05	81,00	81,00	
2.8.2	Rasio petugas KB /desa	org/desa	40	40	40	40	40	40	40	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9</b>	<b>Perhubungan</b>									DINAS PERHUBUNGAN
2.9.1	Jumlah Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	lokasi	25	27	28	29	30	31	32	
2.9.2	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas per tahun	%	3	3	4	4	5	5	5	
2.9.3	Persentase Kepemilikan Keur (Pengujian Kendaraan Bermotor)	%	60	63,34	66,68	70,02	73,36	76,70	80,00	
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>									DISKOMINFO
2.10.1	jumlah media komunikasi publik milik Pemda (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	media	23	28	35	41	46	52	55	
2.10.2	Jumlah kerjasama dengan media massa (elektronik, online, luar ruangan)	kerjasama	0	35	40	45	50	55	60	
2.10.3	Cakupan layanan telekomunikasi	%	60	65	70	75	80	85	90	
<b>2.11</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>									DISKOPERIN
2.11.1	Persentase Usaha Mikro kecil dan menengah yang sehat	%	15	16	17	18	19	20	21	
2.11.2	Angka pertumbuhan wirausaha baru (org)	Org	1000	100	100	100	100	120	1520	
2.11.3	Rasio jumlah koperasi aktif	%	83	83	84	85	86	87	88	
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>									DINAS PM, PTSP
2.12.1	Nilai realisasi investasi PMDN	Triliun	0,393	3,938	4,331	4,765	5,241	5,767	6,342	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.2	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan	%	82,15	75	77	79	81	83	85	
2.12.3	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1500	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
2.12.4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	%	50	60	60	60	70	70	70	
<b>2.13</b>	<b><i>Kepemudaan dan Olahraga</i></b>									DISPORA
2.13.1	Persentase Pemuda yang bebas Narkoba	%	55	55	60	65	65	65	70	
2.13.2	Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi	%	25	25	30	30	35	40	45	
2.13.3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	%	20	20	21	22	23	24	25	
2.13.4	Rasio Lapangan Olahraga Per 1000 Penduduk	%	17	18	20	22.5	25	27.5	30	
<b>2.14</b>	<b><i>Kebudayaan</i></b>									DISBUDPAR
2.14.1	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	31 CB	0	1	2	3	4	5	
2.14.2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	4	4	5	6	7	7	7	
<b>2.15</b>	<b><i>Perpustakaan</i></b>									DINAS KP
2.15.1	Rasio jumlah pengunjung Perpustakaan	%	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	
2.15.2	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4,88	0	5,12	5,38	5,65	5,93	6,23	
2.15.3	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buku	11.920	0	12.516	13.142	13.799	14.489	15.213	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.16</b>	<b><i>Kearsipan</i></b>									DINAS KP	
2.16.1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	%	57,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	3,85		
2.16.2	Persentase arsip statis dan in aktif yang terdata dan tertata dengan baik	%	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62		
2.16.3	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	%	1,92	0	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77		
<b>2.17</b>	<b><i>Statistik</i></b>									DISKOMINFO	
2.17.1	Jumlah buku statistik daerah	Buku	100	100	100	100	100	100	100		
<b>2.18</b>	<b><i>Persandian</i></b>									DISKOMINFO	
2.18.1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	%	1	1	1	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b><i>Fokus Layanan Urusan Pilihan</i></b>										
<b>3.1</b>	<b><i>Perikanan</i></b>									DINAS PERIKANAN	
3.1.1	Persentase penurunan Illegal Fishing	%	20 kasus	10	20	30	50	75%	100		
3.1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	67.249	70.611,45	71.317,56	82.015,19	94.317,46	117.896,82	165.055,54		
3.1.3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	26.005	26.525,1	27.851,35	30.079,45	33.688,98	40.426,77	54.576,13		
3.1.4	Nilai tukar nelayan / NTN	%	102,00	102,30	102,50	102,80	103,00	103,30	104,00		
3.1.5	Cakupan bina kelompok nelayan	%	40	40	40	40	40	40	40		
<b>3,2</b>	<b><i>Pariwisata</i></b>									DISBUDPAR	
3.2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	10.242	10.444	10.546	10.646	10.748	10850	10.950		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.2	Peningkatan Jumlah objek wisata	unit	2	2	2	2	3	3	3		
<b>3.3</b>	<b>Pertanian</b>									DKPTPH	
3.3.1	Produksi tanaman pangan										
	- Padi	Ton	810.570	846.068	862.989	880.249	897.854	915.811	933.768		
	- Jagung	Ton	47.087	47.172	48.587	50.045	51.546	53.092	54.685		
3.3.2	Produktivitas Tanaman pangan										
	- Produktifitas Padi	Ton	50.00	51.17	52.19	53.24	54.30	55.39	56.47		
	- Produktifitas Jagung	Ton	41.99	42.99	43.00	43.21	43.50	43.75	44.25		
3.3.3	Produktivitas Tanaman Perkebunan										
	- Produktivitas Karet	Ton/Ha	1,29	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55		
	- Produktivitas Sawit	Ton/Ha	10,97	10,95	11,50	12	12,50	13	13,50		
3.3.4	Produksi tanaman buah- buahan										
	- Produksi Duku (ton)	Ton	23.869	24.585	25.322	26.081	26.863	27.668	28.498		
	- Produksi Durian (ton)	Ton	5.976	6.155	6.339	6.529	6.724	6.925	7.132		
	- Produksi Mangga (ton)	Ton	21.548	21.550	21.555	21.565	21.570	21.570	21.57		
3.3.5	Produksi tanaman sayuran										
	- Produksi Cabe Besar (ton)	Ton	145.234	149.591	154.078	158.700	163.461	168.364	173.414		
	- Produksi Cabe Rawit (ton)	Ton	34.656	35.695	36.765	37.867	39.003	40.173	41.378		
3.3.6	Produktivitas tanaman sayuran										
	- Produksi Cabe Besar (ton)	Ton	15,8	16,1	16,4	16,7	17	17,3	17,6		
	- Produksi Cabe Rawit (ton)	Ton	16,4	16,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2		
3.3.7	Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	%	10	10	20	30	40	50	60		
3.3.8	Jumlah populasi Ternak	Ekor								DISBUNNAK	
	- Sapi	Ekor	28.285	29.699	31.18	32.742	34.379	36.097	37.901		
	- Kerbau	Ekor	11.150	11.707	12.29	12.906	13.551	14.228	14.939		
3.3.9	Produksi Telur	Ton	748,9	763,87	779,14	794,72	810,61	826,62	843,35	DISBUNNAK	
3.3.10	Produksi daging	Ton	482.044	491.684	501.517	511.547	521.777	532.212	542.856	DISBUNNAK	

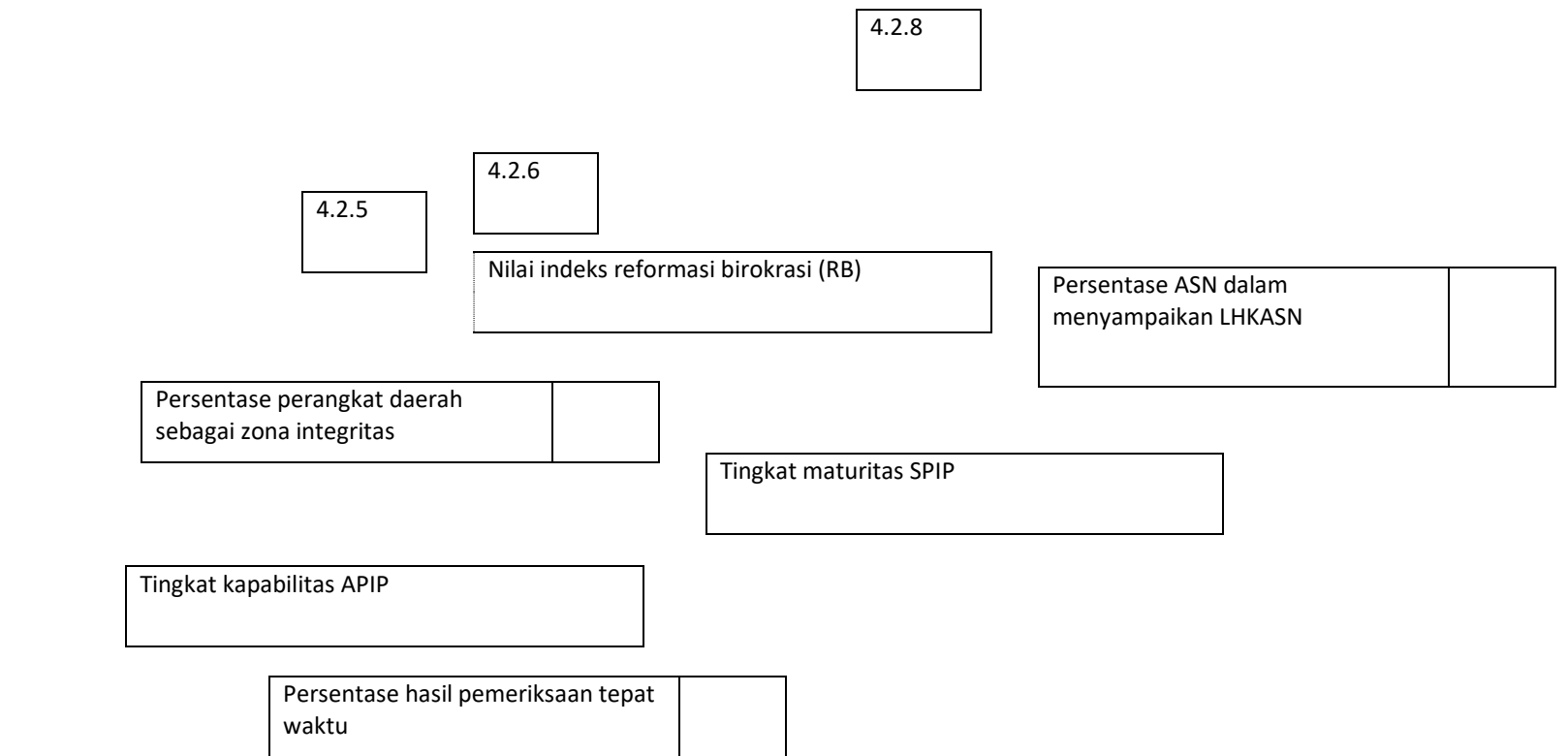
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>3,4</b>	<b>Perdagangan</b>									DINAS PERDAGANGAN	
3.4.1	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	9	11	13	15	17	19	21		
3.4.2	Jumlah komoditi yang diekspor	Komoditi	1	315	333	350	370	390	390		
3.4.3	Jumlah revitalisasi sarana distribusi dan logistik (Pasar dan Gudang)	pasar dan gudang	2	2	3	5	5	5	20		
3.4.4	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	5,36	10	20	30	40	50	55%		
<b>3,5</b>	<b>Perindustrian</b>									DISKOPERIN	
3.5.1	Persentase Pertumbuhan industri secara keseluruhan (%)	%	2,8	3	3,25	3,50	3,70	3,80	4,00		
3.5.2	Jumlah pertumbuhan sentra IKM (sentra)	sentra	168	175	185	195	205	215	220		
3.5.3	Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan	Produk	1	2	3	4	5	6	7		
<b>3.6</b>	<b>Transmigrasi</b>									DISNAKER TRANS	
3.6.1	Jumlah rencana Penyiapan Kawasan Transmigrasi	KW	2	4	4	4	4	4	4		
3.6.2	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang terwujud	KW	3 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW		
3.6.3	Jumlah UPT yang dibina dan dikembangkan	UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT	2 UPT	2 UPT		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4</b>	<b>Fokus Layanan Penunjang</b>									
<b>4.1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>									
4.1.1	Persentase kunjungan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA
4.1.2	Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum bagi ASN	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/ BAG. HUKUM
4.1.3	Persentase Belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. ULP
4.1.4	Jumlah OPD yang menetapkan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. ORGANISASI
4.1.5	Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan kesra	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDA/BAG. KESRA
4.1.6	Jumlah Raperda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD	Perda	5	5	5	5	5	5	5	SETWAN
<b>4.2</b>	<b>Pengawasan</b>									INSPEKTORAT
4.2.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	%	83	83	85	85	85	85	85	
4.2.2	Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang di tindaklanjuti	%	65	75	80	85	87	90	95	
4.2.3	Nilai indeks reformasi birokrasi (RB)	Nilai	55,95	55,95	55,98	55,98	56	56,00	56,00	
4.2.4	Persentase perangkat daerah sebagai zona integritas	%	2	2	3	3	3	3	4	
4.2.5	Persentase hasil pemeriksaan tepat waktu	%	65	68	75	80	85	90	95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.2.6	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN	%	83	84	85	85	85	85	85		
4.2.7	Tingkat kapabilitas APIP		84	84	84	85	87	90	95		
4.2.8	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3		
4.2.9	Jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai LKJIP minimal B/reviu LKJIP	%	0	30	36	42	48	54	60		
<b>4.3</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>									BAPPEDA	
4.3.1	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100		
4.3.2	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	%	100	100	100	100	100	100	100		
<b>4.4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									BALITBANG	
4.4.1	Persentase Pendayagunaan hasil Kelitbangan	%	80	80	80	90	100	100	100		
<b>4,5</b>	<b>Keuangan</b>										
4.5.1	Predikat laporan keuangan daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	
4.5.2	Persentase laporan OPD benar dan tepat waktu	%	65,45	66	70	75	80	85	90	BPKAD	
4.5.3	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	%	12	12	12	12	12	12	12	BPPD	
<b>4,6</b>	<b>Kepegawaian</b>									BKPP	
4.6.1	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	%	80	85	88	90	92	95	96		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.6.2	Prosentase penempatan jabatan struktural sesuai dengan kompetensi	%	70	80	83	85	87	90	95		
4.6.3	Persentase pelanggaran disiplin Aparatur	%	1,3	1	1,20	1	1	0,5	0,8		
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
<b>1</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>										
<b>1.1</b>	<b>Perhubungan</b>									DISHUB	
1.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	M/kend	170	176	182	187	192	197	200		
1.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/bulan	358.104	376.008	394.812	414.552	435.276	457.044	479.892		
1.1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang/bulan	91.440	96.012	100.813	105.853	111.146	116.703	122.538		
<b>1.2</b>	<b>Penataan Ruang</b>									DINAS PUPR	
1.2.1	Keberadaan Perda RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100		
1.2.2	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	dokumen	1	1	1	1	1	1	1		
<b>1,3</b>	<b>Perekonomian</b>									DISBUDPAR	
1.3.1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	rumah makan	154	160	180	200	215	225	250		
1.3.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	hotel	24	30	35	35	40	45	45		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>									
2.1	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>									
2.1.1	Lama waktu proses perijinan	hari	4	3	3	3	3	3	3	DINAS PM, PTSP
2.1.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	-	-	-	-	-	-	



4.2.3	Nilai indeks reformasi birokrasi (RB)
4.2.4	Persentase perangkat daerah sebagai zona integritas
4.2.5	Persentase hasil pemeriksaan tepat waktu
4.2.6	Persentase ASN dalam menyampaikan LHKASN
4.2.7	Tingkat maturitas SPIP

4.2.8	Tingkat kapabilitas APIP

4.2.7





# *Bab IX*

## *Penutup*

Rencana  
Pembangunan  
Jangka  
Menengah  
Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir yang erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan ddalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode satu tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dokumen ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan

#### **9.1. Pedoman Transisi**

Masa jabatan Bupati Ogan Komering Ilir periode 2019-2024 berakhir pada bulan Januari 2024, namun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir dimulai pada tahun 2019 sehingga tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kepemimpinan tersebut berakhir pada tahun 2024. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD tahun 2024 agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Berikut adalah

rancangan program transisi untuk dapat digunakan dalam penyusunan RKPD tahun 2024 :

No	Bidang Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1.	Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
			2) Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
			3) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			4) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5) Indeks kepuasan masyarakat
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	6) Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi
2.	Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata	7) Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
			8) Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih
3.	Pendidikan	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat	9) Angka melek huruf
			10) Rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya mutu pendidikan	11) Angka kelulusan SD/MI
			12) Angka kelulusan SMP/MTs
4.	Kesehatan	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat	Angka Usia harapan Hidup
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan	13) Rasio fasilitas kesehatan terakreditasi baik
		Meningkatnya pemberdayaan Gender dan perlindungan anak	14) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
5.	Ekonomi	Meningkatnya daya saing pertanian, perkebunan dan perikanan	15) Nilai tukar petani
		Berdayanya koperasi	16) Persentase koperasi yang aktif
		Meratanya ekonomi masyarakat	17) Indeks gini
		Meningkatnya kesempatan kerja	18) Tingkat pengangguran terbuka
		Meningkatnya PAD	19) Persentase PAD terhadap

			pendapatan daerah
		Menurunnya angka kemiskinan	20) Angka kemiskinan
6.	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	21) Indeks tutupan lahan
			22) Indeks kualitas air
			23) Indeks kualitas udara
		Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	24) Persentase penurunan titik kebakaran (hot spot)
7.	Sosial budaya	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	25) Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat
		Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	26) Angka PMKS yang mendapat layanan

## 9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) dan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2025. RPJMD menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024 serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2019 hingga 2024;
3. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra, karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta fokus pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah;
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
6. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan diperkirakan dapat mempengaruhi pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

**ISKANDAR**